KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM

LAPORAN KINERJA

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehinggga Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2024 tersusun dengan baik dan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mampu mengoptimalkan kinerja terbaiknya ditengah berbagai tantangan yang terjadi selama tahun 2024. Hal ini ditandai dengan pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebesar 109,98 persen. Capaian NKO Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM selama periode 2020-2024 menunjukkan nilai diatas 100 persen atau terkategori **sangat baik**. Hal ini menunjukkan perbaikan kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang secara konsisten dan optimal. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebesar 109,41 atau terkategori **sangat baik**. Capaian NPS tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 sebesar 106,21. Berdasarkan capaian rata-rata selama periode 2020-2024, nilai NPS Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM secara konsisten berada di atas 100 persen atau terkategori **sangat baik**.

Sepanjang tahun 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berhasil meningkatkan capaian realisasi investasi sebesar Rp1.714,2 triliun. Capaian tersebut berhasil melampaui target Presiden sebesar Rp1.650,0 triliun dan target Rencana Strategis sebesar Rp1.239,3 triliun. Realisasi investasi ini berdampak pada kenaikan serapan tenaga kerja Indonesia menjadi 2.456.130 atau meningkat sebesar 34,7 persen dibanding tahun 2023. Peningkatan capaian realisasi investasi tersebut diikuti oleh peningkatan realisasi investasi di pulau Jawa Rp818,8 triliun atau meningkat sebesar 19,0 persen, serta peningkatan realisasi investasi di luar Pulau Jawa mencapai Rp895,4 triliun atau meningkat sebesar 22,5 persen. Peningkatan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp900,2 triliun pada tahun 2024 atau meningkat sebesar 21,0 persen, dan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp814,0 triliun atau meningkat sebesar 20,6 persen dibanding tahun 2023. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus menunjukkan capaian kinerja yang positif dalam upaya perwujudan kemudahan berusaha. Mengacu pada *World Competitiveness Yearbook* 2024 yang diterbitkan oleh *Institute for Management Development* (IMD), Indonesia naik ke peringkat 27 pada tahun 2024.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga menujukkan kinerja yang positif terhadap pencapaian program prioritas nasional tahun 2024. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menjadi kontributor terhadap pencapaian program prioritas pertama “Memperkuat Kebijakan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan”. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki 24 kegiatan dan 63 rincian output dalam menunjang pencapaian program prioritas nasional tersebut. Dari total 24 kegiatan selama tahun 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki realisasi yang telah mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menjadikan rata-rata persentase capaian kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebesar 100 persen bahkan lebih. Hal ini menunjukkan konsistensi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional.

Keluarga Besar Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Bapak Bahlil Lahadalia yang telah memberikan dedikasi, sumbangsih, dan pengabdiannya bagi kemajuan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dari tahun 2021 sampai Agustus 2024. Keluarga Besar Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja sama, baik seluruh Kementerian/ Lembaga/Daerah maupun seluruh masyarakat. Keluarga Besar Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berharap dapat memperkuat kerja sama yang telah terbangun dan melanjutkan berbagai kerja kolaborasi serta memberikan pelayanan terbaik ke depannya.

Laporan Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2024 ini merupakan laporan kinerja akhir periode Rencana Strategis 2020-2024. Hal ini menjadikan capaian kinerja tahun 2024 merupakan *milestone* dan transisi menuju periode Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029. Laporan kinerja ini menjadi pijakan untuk terus melakukan inovasi dan transformasi kinerja yang lebih produktif, efisien, serta efektif kedepannya. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan terus berupaya mewujudkan cita-cita sebagai lembaga yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional serta **Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.**

Jakarta, Februari 2025
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Rosan Perkasa Roeslani

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara. Penyusunan Laporan kinerja (LKj) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah pertanggungjawaban kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM selama tahun 2024 sesuai Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan. Laporan ini mencakup capaian dan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan selama tahun 2024, serta menunjukkan peningkatan kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada tahun tersebut dibandingkan tahun sebelumnya.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki tiga sasaran strategis dengan tujuh indikator kinerja pada perjanjian kinerja 2024. ***Pertama,*** meningkatnya realisasi penanaman modal memiliki empat indikator kinerja yaitu: 1) Nilai realisasi penanaman modal; 2) Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder; 3) Sebaran penanaman modal berkualitas di luar Pulau Jawa; dan 4) Kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM. ***Kedua,*** meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal memiliki satu indikator kinerja yaitu 5) Peringkat kemudahan berusaha. ***Ketiga,*** terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani memiliki dua indikator kinerja yaitu 6) Nilai reformasi birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM; dan 7) Opini atas Laporan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Capaian kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2024 secara keseluruhan menunjukkan kinerja **sangat baik**. Hal ini ditandai dengan pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 109,98 persen. Capaian NKO selama periode 2020-2024 menunjukkan nilai diatas 100 persen atau terkategori **sangat baik**. Hal ini menunjukkan kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang secara konsisten dan optimal. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebesar 109,41 atau terkategori **sangat baik**. Capaian NPS tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 sebesar 106,21. Berdasarkan capaian rata-rata selama periode 2020-2024, nilai NPS Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM secara konsisten berada di atas 100 persen atau terkategori **sangat baik**. Hal ini menunjukkan kinerja positif serta komitmen Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam melaksanakan berbagai kinerja untuk mencapai target setiap sasaran yang telah ditetapkan.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berhasil mencapai sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kemajuan signifikan dalam bidang penanaman modal, kepercayaan pelaku usaha, dan reformasi birokrasi.

1. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal *(Stakeholder Perspective)*
   1) Nilai Realisasi Penanaman Modal
      Target penanaman modal sebesar Rp1.239,3 triliun berhasil terlampaui dengan capaian Rp1.714,2 triliun, mencapai 138,32 persen dari target yang ditetapkan. Pencapaian ini menunjukkan hasil yang **sangat baik**, mencerminkan keberhasilan dalam menarik investasi secara signifikan.
   2) Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder
      Target penanaman modal sektor sekunder sebesar Rp646,1 triliun, realisasi yang tercatat mencapai Rp721,3 triliun, dengan pencapaian 111,64 persen. Ini menunjukkan hasil yang **sangat baik**, dengan sektor sekunder menunjukkan kemajuan yang menggembirakan.

3) Sebaran Penanaman Modal Berkualitas di Luar Jawa
Target untuk sebaran penanaman modal berkualitas di luar Jawa adalah 51,7 persen, dan realisasinya tercatat sebesar 52,2 persen. Ini mencapai 100,97 persen dari target, yang menunjukkan distribusi investasi yang merata dan semakin berkembang di luar Pulau Jawa, yang dapat digolongkan **sangat baik**.
4) Kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk UMKM
Target kontribusi PMDN termasuk UMKM sebesar 53,1 persen tidak sepenuhnya tercapai, dengan capaian 47,5 persen. Meskipun tidak mencapai target, pencapaian ini memperoleh 89,45 persen dan dinilai **baik**, yang menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan di masa mendatang.

2. Meningkatnya Kepercayaan Pelaku Usaha/Penanam Modal *(Customer Perspective)*
1) Peringkat Kemudahan Berusaha *(Ease of Doing Business)*
Target peringkat *Ease of Doing Business* adalah 40, sementara Indonesia berhasil mencatatkan peringkat 27. Ini melampaui target dengan pencapaian 120 persen, yang menunjukkan perbaikan signifikan dalam iklim usaha, yang dapat dikategorikan sebagai **sangat baik**.

3. Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Efektif, dan Melayani *(Learning & Growth Perspective)*
1) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
Pada penilaian reformasi birokrasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berhasil memperoleh predikat BB (71,91), meskipun target yang ditetapkan adalah A (80%-90%). Meskipun tidak tercapai secara penuh, pencapaian ini mencapai 90 persen dan digolongkan sebagai **baik**.
2) Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
Laporan keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK, yang merupakan pencapaian 100 persen dan dikategorikan sebagai **sangat baik** karena menunjukkan transparansi dan akuntabilitas keuangan yang tinggi.

Realisasi kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2020-2024 menunjukkan keberhasilan mencapai sejumlah sasaran strategis dengan kategori kinerja **sangat baik.** Meskipun terdapat beberapa indikator yang belum sepenuhnya mencapai target, namun tetap berada dalam kategori yang baik. Indikator tersebut adalah (1) Kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk UMKM. Target akhir Renstra sebesar 53,1 persen dengan realisasi sebesar 47,5 persen; dan (2) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yaitu BB (71,91), sedangkan target yang ditetapkan adalah A (80%-90%). Meskipun tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus mengupayakan berbagai upaya akseleratif dan inovatif dalam mencapai target yang diharapkan. Oleh karenanya, pencapaian kinerja pada dua indikator kinerja utama di atas masih berada di rentang 76-99 persen atau terkategori **"baik".**

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki capaian kinerja yang positif terhadap berbagai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 115,02 persen atau terkategori **sangat baik** terhadap pencapaian target indikator RPJMN 2020-2024 yang diampu. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga memiliki capaian kinerja sebesar 118,22 persen atau terkategori **sangat baik** terhadap pencapaian target RKP tahun 2024. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga menunjukkan kinerja yang positif terhadap pencapaian program prioritas nasional tahun 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 104,78 persen atau terkategori **sangat baik** dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang menunjang program prioritas nasional "Memperkuat Kebijakan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan".

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2024 telah direalisasikan anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp1.148.963.439.591 atau mencapai 93,47 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp1.229.295.942.000. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mampu mencapai Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebesar 109,41 persen dan melakukan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 15,94 persen. Selama periode tahun 2020-2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berhasil mempertahankan tingkat efisiensi di atas 8 persen. Adanya efisiensi yang tinggi secara konsisten, bersamaan dengan perbaikan nilai SAKIP, serta capaian kinerja yang sebagian besar telah tercapai, menunjukkan bahwa penerapan SAKIP di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memberikan dampak positif. Efisiensi yang tinggi ini menggambarkan kemampuan kementerian dalam mengelola sumber daya secara optimal, meskipun dalam kondisi anggaran yang terbatas. Penerapan SAKIP yang efektif juga berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas, sehingga setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Semoga hal ini menciptakan kepercayaan publik yang lebih besar terhadap kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan program-program yang dilaksanakan.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah melakukan beberapa inisiatif dalam rangka perbaikan dan peningkatan akuntabiitas kinerja pada tahun 2024, diantaranya: (i) Peningkatan kualitas perencanaan strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM; (ii) Pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan Sistem Aplikasi Manajemen Akuntabilitas Kinerja Lembaga (SIMANTAB); (iii) Penguatan dan optimalisasi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); (iv) Transformasi sistem perizinan berusaha; (i) Penyediaan *website* terintegrasi; (v) Pengembangan sistem layanan kepegawaian terintegrasi dengan layanan perkantoran (E-Office); (vi) Pengembangan *User Interface* di *Website* PIR untuk Peta Peluang Investasi; (i) Transformasi layanan data dan informasi; (vii) Inovasi penguatan kerjasama penanaman modal; dan (viii) Optimalisasi pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi I-2
1.3. Peran Strategis Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM I-9
1.4. Tantangan dan Permasalahan I-9
1.5. Sistematika Laporan Kinerja I-11

BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1. Perencanaan Kinerja II-1
2.1.1. Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2020-2024 ..... II-2
2.1.2. Sasaran Strategis II-5
2.1.3. Sasaran Program II-8
2.2. Alokasi Anggaran II-10
2.2.1. Anggaran Tahun 2024 ..... II-10
2.2.2. Perkembangan Anggaran Tahun 2020-2024 ..... II-11
2.3. Perjanjian Kinerja II-12

BAB III AKUNTABILITAS KERJA
3.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024 ..... III-1
3.2. Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2024 ..... III-2
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja III-5
3.4. Keterkaitan Kinerja Unit Kerja dalam Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian III-102
3.5. Capaian Nilai SAKIP terhadap Pencapaian IKU III-104
3.6. Capaian Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Terhadap Indikator RPJMN 2020-2024 ..... III-105
3.7. Capaian Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Terhadap Target Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 ..... III-106
3.8. Peran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam mendukung Pencapaian Program Prioritas Nasional Tahun 2024 ..... III-106
3.9. Capaian Kinerja Anggaran III-109
3.10. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya III-111

BAB IV INISIATIF PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA
4.1. Tindak Lanjut Atas Evaluasi AKIP Tahun 2023 ..... IV-1
4.2. Rencana Tindak Lanjut Atas Evaluasi AKIP Tahun 2024 ..... IV-19

BAB V PENUTUP
5.1. Kesimpulan V-1
5.2. Rencana Tindak Lanjut V-3

LAMPIRAN
1. Pernyataan telah di Reviu
2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024
3. Matriks Capaian Output Prioritas Nasional Tahun 2024
4. Penghargaan Tahun 2024

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Keterkaitan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2020-2024 ..... II-6
Tabel 2.2. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target Indikator Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2020-2024 ..... II-7
Tabel 2.3. Sasaran Program, Indikator Kinerja, dan Target Indikator Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM Tahun 2020-2024 ..... II-9
Tabel 2.4. Program yang Dilaksanakan Unit di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM II-10
Tabel 2.5. Alokasi Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2024 II-10
Tabel 2.6. Alokasi Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2024 Berdasarkan Program dan Satuan Kerja II-11
Tabel 2.7. Alokasi Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Belanja II-11
Tabel 2.8. Alokasi Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2024 Berdasarkan Program dan Satuan Kerja II-12
Tabel 2.9. Perjanjian Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2024 ..... II-13
Tabel 2.10. Perspektif dan Bobot *Balance Scorecard* II-14
Tabel 2.11. Kategorisasi Kinerja II-14
Tabel 3.1. Capaian Sasaran Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2024 ..... III-1
Tabel 3.2. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2024 ..... III-3
Tabel 3.3. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Berdasarkan Perspektif Tahun 2020-2024 ..... III-5
Tabel 3.4. Capaian Indikator Kinerja Utama 1 (IKU-1) Nilai Realisasi Penanaman Modal III-7
Tabel 3.5. Nilai Realisasi Penanaman Modal Asing dan Jumlah Proyek di Masing-Masing Provinsi Tahun 2024 ..... III-10
Tabel 3.6. Nilai Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Jumlah Proyek di Masing-Masing Provinsi Tahun 2024 ..... III-13
Tabel 3.7. Capaian Indikator Kinerja Utama 2 (IKU-2) Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder III-24
Tabel 3.8. Capaian Indikator Kinerja Utama 3 (IKU-3) Sebaran Penanaman Modal Berkualitas (di luar Jawa) III-29
Tabel 3.9. Capaian Indikator Kinerja Utama 4 (IKU-4) Kontribusi Investasi PMDN termasuk UMKM III-34
Tabel 3.10. Capaian Indikator Kinerja Utama 5 (IKU-5) Peringkat Kemudahan Berusaha *(Ease of Doing Business)* III-40
Tabel 3.11. Capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal III-45
Tabel 3.12. Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hilirisasi Investasi Strategis yang akan Diimplementasikan ke dalam Rencana Aksi..... III-50
Tabel 3.13. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Hari Dalam Memulai Usaha/*Starting a Business* III-53
Tabel 3.14. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Prosedur Dalam Memulai Usaha III-57
Tabel 3.15. Capaian Indikator Kinerja Persentase Realisasi Kesepakatan Perusahaan PMA/PMDN yang Bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sesuai dengan Peraturan..... III-59
Tabel 3.16. Capaian Indikator Kinerja Nilai Rencana Penanaman Modal Hasil Berbagai Kegiatan Promosi Penanaman Modal III-65
Tabel 3.17. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Minat Penanaman Modal Melalui Berbagai Kegiatan Promosi Penanaman Modal III-70

Tabel 3.18. Ringkasan Jumlah Minat Penanaman Modal Berdasarkan Unit Kerja III-71
Tabel 3.19. Capaian Indikator Kinerja Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri yang Telah Diimplementasikan (Kesepakatan) III-75
Tabel 3.20. Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal (Indeks) III-85
Tabel 3.21. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal Tahun 2024 ..... III-86
Tabel 3.22. Capaian Indikator Kinerja Persentase Fasilitasi Perusahaan yang Dapat Diselesaikan Permasalahannya (Persentase) III-88
Tabel 3.23. Capaian Indikator Kinerja Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks) III-92
Tabel 3.24. Indikator Kinerja Utama Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM III-100
Tabel 3.25. Capaian Indikator Kinerja Utama Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM III-101
Tabel 3.26. Perbandingan Nilai SAKIP dan Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Selama Tahun 2020-2024 ..... III-106
Tabel 3.27. Target Indikator RPJMN yang diampu oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2020-2024 ..... III-106
Tabel 3.28. Pencapaian Target Indikator RPJMN yang diampu oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2024 ..... III-107
Tabel 3.29. Sasaran Ekonomi Makro pada RKP Tahun 2024 ..... III-107
Tabel 3.30. Program/Kegiatan/Proyek Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Target, Realisasi, dan Persentase Capaian terhadap Program Prioritas Nasional Tahun 2024 ..... III-108
Tabel 3.31. Realisasi Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Program III-111
Tabel 3.32. Realisasi Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Jenis Belanja III-112
Tabel 3.33. Realisasi Belanja Setiap Sasaran di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun Anggaran 2024 ..... III-112
Tabel 3.34. Efisiensi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM III-113
Tabel 4.1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2018-2024 ..... IV-1
Tabel 4.2. Kegiatan Pemeliharaan Sistem Kepegawaian yang Terintegrasi dengan Aplikasi Perkantoran (E-Office) IV-11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM I-8
Gambar 2.1. Peta Strategi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2020-2024 ..... II-4
Gambar 2.2. Alokasi Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2020-2024 ..... II-12
Gambar 3.1. Pertumbuhan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2020-2024 ..... III-4
Gambar 3.2. Nilai Realisasi Investasi Januari-Desember 2024 ..... III-8
Gambar 3.3. Lima Besar Lokasi Nilai Realisasi Investasi Tahun 2024 ..... III-8
Gambar 3.4. Lima Besar Subsektor Nilai Realisasi Investasi Tahun 2024 ..... III-9
Gambar 3.5. Lima Besar Negara Penanam Modal Asing Tahun 2024 ..... III-9
Gambar 3.6. Lima Besar Lokasi Realisasi PMA Tahun 2024 ..... III-10
Gambar 3.7. Tren Lokasi PMA Tahun 2020-2024 ..... III-11
Gambar 3.8. Lima Besar Subsektor Nilai Realisasi PMA Tahun 2024 ..... III-11
Gambar 3.9. Tren Sektor PMA Tahun 2020-2024 ..... III-12
Gambar 3.10. Lima Besar Lokasi Nilai Realisasi PMDN Tahun 2024 ..... III-12
Gambar 3.11. Tren Lokasi PMDN Periode Tahun 2020-2024 ..... III-14
Gambar 3.12. Lima Besar Subsektor Nilai Realisasi PMDN Tahun 2024 ..... III-14
Gambar 3.13. Tren Sektor PMDN 2020-2024 ..... III-15
Gambar 3.14. Lima Besar Nilai Realisasi Investasi di Bidang Hilirisasi III-15
Gambar 3.15. Lima Besar Lokasi Nilai Realisasi Investasi di Bidang Hilirisasi Tahun 2024 ..... III-16
Gambar 3.16. Lima Besar Negara Penanam Modal di Bidang Hilirisasi Tahun 2024 .... III-16
Gambar 3.17. Peta Direktorat Wilayah I III-17
Gambar 3.18. Peta Direktorat Wilayah II III-17
Gambar 3.19. Peta Direktorat Wilayah III III-18
Gambar 3.20. Peta Direktorat Wilayah IV III-18
Gambar 3.21. Peta Direktorat Wilayah V III-19
Gambar 3.22. Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia tahun 2020–2024 III-19
Gambar 3.23. *Regional Investment Forum* pada bulan Juli 2024 di Batam III-20
Gambar 3.24. Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2024 ..... III-20
Gambar 3.25. *Indonesia Investment Forum* III-21
Gambar 3.26. Perkembangan Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Primer, Sekunder dan Tersier Tahun 2020-2024 ..... III-24
Gambar 3.27. Perkembangan Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier Tahun 2020-2024 ..... III-25
Gambar 3.28. Pembangunan Industri Petrokimia di Cilegon III-26
Gambar 3.29. Penawaran Potensi Terkait Industri Ban Pesawat Terbang dari Karet Alam di Laman Resmi PIR Kementerian Investasi Dan Hilirisasi/BKPM III-26
Gambar 3.30. Persebaran Nilai Realisasi Investasi Luar Jawa dan Jawa III-30
Gambar 3.31. Sebaran Peluang Investasi di luar Pulau Jawa dalam laman resmi PIR Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM III-31
Gambar 3.32. Hilirisasi Kopi Papua 2024 ..... III-31
Gambar 3.33. *Regional Investment Forum* (RIF) pada bulan Agustus 2024 di Makassar III-32
Gambar 3.34. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Dukung Pemberdayaan UMKM Perempuan III-36
Gambar 3.35. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM Dukung EXPO UMKM di Sulawesi Tengah III-37
Gambar 3.36. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Fasilitasi Legalitas Sektor UMKM Melalui Festival Literasi Cakap Ekonomi 2024 ..... III-38
Gambar 3.37. *World Competitiveness Yearbook* III-40
Gambar 3.38. Peringkat Indonesia dalam *World Competitiveness Yearbook* (WCY) Tahun 2020-2024 ..... III-41
Gambar 3.39. Rapat Konsolidasi Kebijakan Investasi Pusat dan Daerah III-42

Gambar 3.40. Website *Online Single Submission* (OSS) III-42
Gambar 3.41. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksaaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah III-43
Gambar 3.42. *Talk show dalam acara Sindo Goes To Campus* (SGTC) III-44
Gambar 3.43. Tampilan pada Platfrom Potensi Investasi Regional BKPM III-46
Gambar 3.44. *Grand Design* RUPM 2025-2045 ..... III-46
Gambar 3.45. Sektor Prioritas Investasi III-47
Gambar 3.46. Upaya Pengembangan Investasi Berbasis Kawasan III-47
Gambar 3.47. 10 Program *Quick Wins* Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM III-48
Gambar 3.48. *Output*/Keluaran Kegiatan *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) III-49
Gambar 3.49. Paparan Peta Jalan Investasi Hilirisasi Strategis III-51
Gambar 3.50. Kegiatan Expose Kajian Hilirisasi Investasi Strategis 2024 ..... III-52
Gambar 3.51. *Workshop* dan *Coaching clinic* Kemudahan Perizinan Berusaha III-55
Gambar 3.52. Kemitraan UMKM Memperkuat Hilirisasi dan Investasi III-55
Gambar 3.53. Forum Kemitraan Investasi 2024 dengan Tema Mendorong Kemitraan Strategis untuk Investasi Berkelanjutan III-61
Gambar 3.54. Penyerahan Penghargaan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM kepada PT. Tjiwi Kimia III-62
Gambar 3.55. Kegiatan Solo *Great Sale* (SGS) ke-10 Kerjasama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM dengan Pemerintah Kota Surakarta III-63
Gambar 3.56. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Sosialiasikan Kebijakan Investasi Indonesia di CAEXPO 2024 ..... III-67
Gambar 3.57. Kegiatan *Indonesia Investment Forum*, London 2024 ..... III-68
Gambar 3.58. Tren Realisasi Jumlah Minat Penanaman Modal melalui berbagai Kegiatan Promosi Penanaman Modal Tahun 2020-2024 ..... III-71
Gambar 3.59. Kegiatan Pemasaran Investasi melalui kegiatan Indonesia *Investment Forum* 2024 ..... III-72
Gambar 3.60. Kunjungan Kerja Menteri Investasi dan Hilirisasi/ BKPM ke Tiongkok, 2024 ..... III-72
Gambar 3.61. Pelaksanaan *Indonesia-Australia Business Summit* 2024 ..... III-73
Gambar 3.62. Target dan Realisasi Kesepakatan/ Perjanjian Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri Yang Telah Diimplementasikan selama Periode 2020-2024 III-75
Gambar 3.63. Rencana Menteri Investasi Membuka EU Desk III-76
Gambar 3.64. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Memberikan Pidato Penguatan Hubungan antara Indonesia dan Afrika III-77
Gambar 3.65. Rencana Menteri Investasi Membuka EU Desk III-78
Gambar 3.66. MoU Kerja Sama antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM dan PT Grab Teknologi Indonesia, PT GoTo Gojek Tokopedia III-79
Gambar 3.67. Forum Kemitraan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM dengan Usaha Besar dan UMKM III-78
Gambar 3.68. Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan Bank Indonesia III-80
Gambar 3.69. IPEF Negosiasi III-81
Gambar 3.70. *Trade and Investment Working Group* (TIWG) III-82
Gambar 3.71. Pertemuan WTO *Joint Initiative on Investment Facilitation for Development* (JI IFD) III-82
Gambar 3.72. Wilayah, Target, dan Realisasi Masing-Masing Direktorat Tahun 2024 . III-89
Gambar 3.73. Indeks SPBE Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM III-93
Gambar 3.74. Arsitektur Proses Bisnis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM III-94
Gambar 3.75. Arsitektur Proses Bisnis Target Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM III-95
Gambar 3.76. Arsitektur Aplikasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM III-96
Gambar 3.77. Arsitektur Aplikasi Target Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM ... III-97
Gambar 3.78. Pemetaan Rekomendasi terhadap Iniasiatif Program Teknologi Informasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM III-97
Gambar 3.79. Pertemuan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi III-100

Gambar 3.80. Penerimaan Penilaian Opini Laporan Keuangan III-102
Gambar 3.81. Keterkaitan Unit Kerja dalam Pencapaian Sasaran Strategis III-104
Gambar 3.82. Perbandingan Nilai SAKIP dan Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2023 dan tahun 2024 ..... III-105
Gambar 3.83. Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2020-2024 ..... III-111
Gambar 3.84. Perkembangan Efisiensi Sumber Daya Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2020-2024 ..... III-114
Gambar 4.1. Kerangka Logis Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran, dan Unit Kerja Pengampu Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029 ..... IV-2
Gambar 4.2. Rapat Pembahasan Penyusunan Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029 dengan Kementerian PPN/Bappenas IV-3
Gambar 4.3. Tampilan Submenu Capaian Kinerja/Capaian Indikator Kinerja pada SIMANTAB IV-4
Gambar 4.4. Tampilan Input Capaian Indikator Kinerja pada Submenu Capaian Kinerja/Capaian Indikator Kinerja pada SIMANTAB IV-4
Gambar 4.5. Submenu *Reward and Punishment* pada SIMANTAB IV-5
Gambar 4.6. Arsitektur Layanan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM IV-6
Gambar 4.7. Tampilan fitur Disabilitas IV-9
Gambar 4.8. Struktur menu *website* IIPC Sydney IV-9
Gambar 4.9. Struktur menu *website* IIPC New York IV-10
Gambar 4.10. Proses Bisnis WBS IV-10
Gambar 4.11. Potensi Investasi Regional (PIR) IV-12
Gambar 4.12. Pengembangan *Business Intelligence* IV-14
Gambar 4.13. *Report Apache Superset* IV-14
Gambar 4.14. *Dashboard* Realisasi Hilirisasi IV-15
Gambar 4.15. Pemanfaatan *Dashboard* dalam kegiatan *Press Release* IV-15
Gambar 4.16. *Dashboard* Statistik Perizinan Berusaha OSS RBA IV-16
Gambar 4.17. *Dashboard* Statistik Perizinan Berusaha OSS RBA Prov/Kab/Kota & KEK/KPBPB IV-16
Gambar 4.18. *Dashboard* Statistik Perizinan Berusaha OSS RBA Kementerian/Lembaga IV-17
Gambar 4.19. Portal Satu Data IV-17
Gambar 4.20. Konten Portal Satu Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM IV-18

KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tahun 2024 adalah periode akhir dari dokumen RPJMN 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2020-2024. Tahun 2024 juga merupakan periode transisi dari RPJPN 2005-2025, RPJMN 2020-2024, dan Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2020-2024 menuju RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, serta Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029. Dengan demikian, capaian kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada tahun 2024 merupakan realisasi akhir dari dokumen Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2020-2024 dan menjadi *milestone* penting untuk perencanaan selanjutnya.

Tahun 2024 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam meningkatkan realisasi investasi. Berbagai tantangan tersebut diantaranya (i) kondisi ekonomi global yang masih *volatile* seperti perang dagang, konflik Rusia dan Ukraina, pemananasan global, serta fluktuasi harga komoditas dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS menyebabkan kekhawatiran bagi investor dan berdampak pada *appetite* investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia, (ii) ketersediaan dan kualitas infrastruktur di daerah yang belum merata, dan (iii) permasalahan pengadaan tanah di daerah. Selain itu, pada tahun 2024, Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan Kepala Daerah periode 2025-2029. Konstelasi politik tersebut menjadi tantangan dalam rangka peningkatan nilai realisasi investasi di Indonesia. Investor cenderung *wait and see* dan menunda investasinya karena menunggu hasil pemilu pada kuartal pertama 2024.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi selama tahun 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mampu mengoptimalkan kinerja terbaiknya dalam meningkatkan investasi di Indonesia. Selama tahun 2024, nilai realisasi investasi mencapai Rp1.714,2 trilliun. Angka ini telah melampui target Presiden dan target dokumen Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2020-2024. Nilai realisasi investasi pada tahun 2024 terdiri dari 52,5 persen Penanaman Modal Asing (PMA) atau sebesar Rp900,2 trilliun dan 47,5 persen Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau sebesar Rp814,0 trilliun. Nilai realisasi investasi 2024 telah mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 2.456.130 jiwa atau naik sebesar 34,7 persen dibandingkan kinerja tahun 2023. Sektor hilirisasi berkontribusi sebesar Rp407,8 Trilliun atau sebesar 23,8 persen dari total nilai realisasi investasi. Kontribusi tersebut naik menjadi 8,63 persen dibanding capaian tahun 2023. Selain itu, nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder juga mengalami peningkatan menjadi Rp721,3 trilliun atau sebesar 42,1 persen dari total nilai investasi.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM secara konsisten terus melakukan inovasi serta penerapan strategi *out of the box* yang mampu menjadi *game changer* dalam rangka peningkatan nilai realisasi investasi di Indonesia. Beberapa upaya tersebut diantaranya: (i) pemecahan berbagai ruang lingkup Klasifikasi Baku Lapangan Usaha di Indonesia (KBLI) pada sektor Energi Baru, Terbarukan dan Konervasi Energi (EBTKE), Ketenagalistrikan, Minyak Bumi dan Gas Alam (Migas), serta Mineral dan Batubara (Minerba); (ii) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sepanjang tahun 2024 telah menerbitkan 4 (empat) surat persetujuan pemanfaatan insentif impor dan/atau penyerahan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda empat kepada industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dalam rangka penanaman modal. Hal ini dilakukan sebagai wujud dukungan bagi percepatan pelaksanaan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan pembentukan ekosistem kendaraan listrik serta meningkatkan daya saing investasi dalam menarik minat investasi industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda empat; (iii) dalam rangka mendukung percepatan pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara yang merupakan skala prioritas tinggi serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara; (iv) melakukan

transformasi sistem layanan elektronik dan sistem perizinan berusaha; dan (v) mengoptimalkan kualitas tata kelola Aplikasi Manajemen Akuntabilitas Kinerja Lembaga (SIMANTAB).

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menjalankan berbagai peran strategis tersebut dengan mengedepankan prinsip-prinsip *good governance* meliputi transparan, akuntabel, responsibel, independen, dan *fairness.* Prinsip akuntabilitas menekankan pada komitmen dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara dalam melaksanakan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan rangkaian sistematis dan terintegrasi dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki tiga sasaran strategis dengan tujuh indikator kinerja pada perjanjian kinerja 2024. **Pertama,** meningkatnya realisasi penanaman modal memiliki empat indikator kinerja yaitu: 1) Nilai realisasi penanaman modal; 2) Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder; 3) Sebaran penanaman modal berkualitas di luar Pulau Jawa; dan 4) Kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM. **Kedua,** meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal memiliki satu indikator kinerja yaitu 5) Peringkat kemudahan berusaha. **Ketiga,** terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani memiliki dua indikator kinerja yaitu 6) Nilai reformasi birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM; dan 7) Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2024 ini merupakan pondasi serta pijakan upaya untuk terus melakukan inovasi dan transformasi kinerja yang produktif, efisien, serta efektif kedepannya. Laporan kinerja ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban serta penyampaian informasi kepada publik terkait realisasi anggaran serta berbagai capaian kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sepanjang tahun 2024. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga terus berupaya mewujudkan cita-cita sebagai lembaga yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional serta perwujudan Indonesia Emas 2045.

1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mengalami perubahan nomenklatur dari sebelumnya Kementerian Investasi/BKPM menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada tanggal 5 November 2024. Perubahan nomenklatur ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Sebagai tindaklanjut Peraturan Presiden tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menetapkan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan di bidang hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam

melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang investasi dan hilirisasi;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang investasi dan hilirisasi;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian;
4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian;
5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Menteri Investasi dan Hilirisasi dibantu oleh:

1. Sekretariat kementerian;
2. Staf ahli bidang peningkatan daya saing penanaman modal;
3. Staf ahli bidang ekonomi makro;
4. Staf ahli bidang hubungan kelembagaan;
5. Staf ahli bidang pengembangan sektor investasi prioritas; dan
6. Staf ahli bidang pemerataan dan kemitraan penanaman modal.

Berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, BKPM memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, BKPM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional;
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal;
3. Pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal;
4. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
5. Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
6. Pembuatan peta penanaman modal Indonesia;
7. Koordinasi pelaksanaan promosi serta kerja sama penanaman modal;
8. Pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
9. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal, pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan, dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
10. Koordinasi dan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Koordinasi penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
12. Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal;
13. Koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hilirisasi investasi strategis;
14. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BKPM;
15. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKPM;
16. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKPM; dan
17. Pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Koordinasi Penanaman Modal terdiri dari:
1. Kepala
2. Wakil Kepala
3. Sekretariat Utama;
4. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal;
5. Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis;
6. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
7. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal;
8. Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal;
9. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
10. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
11. Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal.

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Menteri/Kepala mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi.

Wakil Menteri/Wakil Kepala mempunyai tugas, antara lain:
1. Membantu Menteri/Kepala dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian/Badan; dan
2. Membantu Menteri/Kepala dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I di lingkungan Kementerian/Badan.

Sekretariat Kementerian/Sekretaris Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian/Badan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Kementerian/Sekretaris Utama menyelenggarkan fungsi:
1. Koordinasi kegiatan di lingkungan Kementerian/Badan;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian/Badan;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian/Badan;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan, serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. Koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
7. Pengelolaan data dan informasi; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
1. Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal;

3. Pengkajian dan pengusulan perencanaan dan inovasi penanaman modal nasional menurut sektor usaha;
4. Pembuatan peta penanaman modal indonesia;
5. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembuatan peta penanaman modal Indonesia;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembuatan peta penanaman modal indonesia;
7. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan penanaman modal; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hilirisasi investasi strategis. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hilirisasi investasi strategis;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hilirisasi investasi strategis;
3. Pengembangan potensi dan peluang bidang hilirisasi investasi strategis;
4. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hilirisasi investasi strategis; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri/kepala.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
3. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
4. Pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat serta menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
5. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
7. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan
8. Pelaporan di bidang pengembangan iklim penanaman modal; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi penanaman modal;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi penanaman modal;
3. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan promosi penanaman modal;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang promosi penanaman modal;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi penanaman modal;

6. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi penanaman modal; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama penanaman modal;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama penanaman modal;
3. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kerja sama penanaman modal;
4. Koordinasi penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama penanaman modal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal;
3. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu;
4. Koordinasi pelaksanaan penempatan perwakilan/pejabat dari sektor terkait dalam pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu;
5. Koordinasi pemberian pelayanan perizinan, pelayanan berbantuan, dan pelayanan fasilitas penanaman modal;
6. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelayanan penanaman modal;
7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan penanaman modal;
8. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan penanaman modal; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi perumusan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
3. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal, pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
4. Fasilitasi persebaran penanaman modal di seluruh Indonesia dan penyelesaian permasalahan dan kendala pelaku usaha;
5. Koordinasi pelaksanaan pengawasan perizinan berbasis risiko dan pengawasan administratif dan/atau fisik realisasi penanaman modal;
6. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;

7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
8. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi penanaman modal;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi penanaman modal;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang data dan sistem informasi penanaman modal;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang data dan sistem informasi penanaman modal;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang teknologi informasi penanaman modal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Dalam melaksanakan tugasnya, Menteri/Kepala juga dibantu oleh Staf Ahli yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama, yang terdiri dari:

1. Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri/Kepala terkait dengan peningkatan daya saing penanaman modal;
2. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri/Kepala terkait dengan ekonomi makro;
3. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri/Kepala terkait dengan hubungan kelembagaan dan transformasi digital;
4. Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri/Kepala terkait dengan pengembangan sektor investasi prioritas; dan
5. Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kemitraan Penanaman Modal mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri/Kepala terkait dengan pemerataan dan kemitraan penanaman modal.

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian/Badan. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian/Badan;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri/Kepala;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, dan teknis bagi aparatur di bidang penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program pendidikan dan pelatihan;

2. Penyusunan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
3. Penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan;
4. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional penanaman modal dan non penanaman modal, dan teknis bagi aparatur;
5. Penyusunan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; dan
6. Pelaksanaan administrasi pusat.

Pusat Pembinaan Penata Kelola Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pembinaan Penata Kelola Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis pembinaan jabatan fungsional penata kelola penanaman modal;
2. Penyiapan perencanaan, pembentukan, pemberian rekomendasi formasi, serta pertimbangan pengangkatan dalam jabatan fungsional penata kelola penanaman modal;
3. Pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kredit, serta pemantauan dan evaluasi kinerja pejabat fungsional penata kelola penanaman modal;
4. Penyiapan koordinasi dan penyusunan standar kompetensi jabatan fungsional penata kelola penanaman modal;
5. Pelaksanaan penilaian kompetensi teknis;
6. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional penata kelola penanaman modal;
7. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan layanan informasi jabatan fungsional penata kelola penanaman modal;
8. Pelaksanaan pembinaan profesi dan fasilitasi pembentukan organisasi profesi;
9. Pelaksanaan evaluasi pengembangan jabatan fungsional penata kelola penanaman modal; dan
10. Pelaksanaan administrasi pusat.

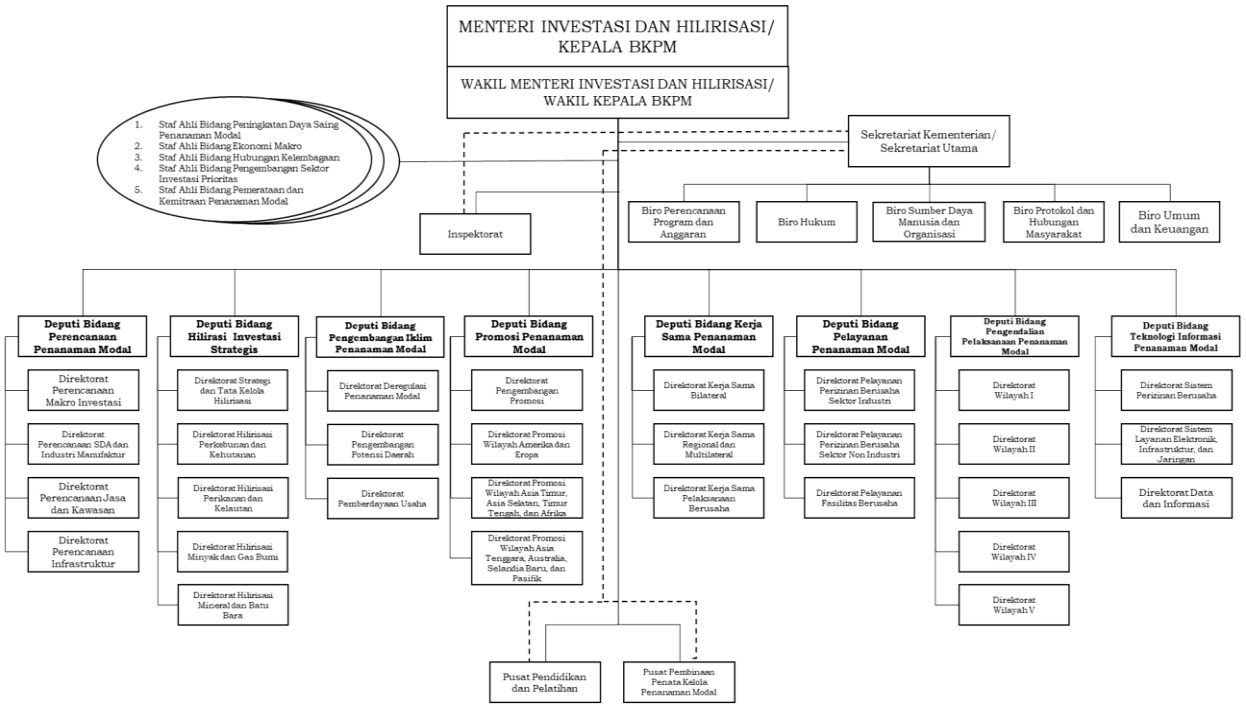

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
Sumber: Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

1.3. Peran Strategis Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki peran strategis sebagaimana diamanahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi; Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Ketugasan strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Investasi memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan diharapkan menjadi mesin pertumbuhan (*engine of growth*) yang efektif, mengingat dampaknya yang luas terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk mengoptimalkan peran ini, diperlukan investasi yang berkualitas, berkelanjutan, dan bernilai tambah. Kualitas investasi dapat diukur melalui realisasi investasi yang tinggi, inklusif, dan mempertimbangkan aspek pemerataan. Investasi yang berkualitas juga memerlukan dukungan tata kelola yang baik untuk menciptakan pola investasi yang efektif. Pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh investasi akan tercermin dalam nilai *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR), yaitu perubahan PDB atau pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari peningkatan input atau investasi. Semakin kecil nilai ICOR, semakin tinggi tingkat efisiensi ekonomi, karena menunjukkan bahwa semakin sedikit input atau investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang targetkan. Selain itu, penyerapan tenaga kerja yang signifikan akibat investasi ini akan membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan memperkecil ketimpangan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, pemerataan investasi antarwilayah harus diprioritaskan dalam upaya akselerasi pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Investasi tidak hanya berfungsi sebagai mesin pertumbuhan, tetapi juga memiliki peran besar dalam penyerapan tenaga kerja, pengurangan kemiskinan, penyempitan ketimpangan distribusi pendapatan, serta pemberdayaan UMKM secara merata di seluruh wilayah.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM perlu upaya akseleratif dalam melaksanakan amanah yang diemban dan pemenuhan kebutuhan investasi yang lebih tinggi di tahun mendatang. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan berkomitmen tinggi dalam mewujudkan hal tersebut. Arah kebijakan akan didorong pada investasi sektor prioritas yang diharapkan mampu mempercepat akselerasi pencapaian target. Akselerasi pencapaian target perlu didukung dengan iklim investasi yang berkualitas sehingga mampu mendorong investor asing dan domestik tertarik berinvestasi di Indonesia. Arah kebijakan juga didukung dengan birokrasi yang berkualitas, efektif, dan profesional, sehingga mampu menghasilkan layanan investasi yang prima dan menjadikan Indonesia memiliki daya tarik yang kuat sebagai negara tujuan utama investasi. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebagai lembaga yang bertugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, akan berkomitmen dan berupaya secara akseleratif untuk mewujudkan penanaman modal yang lebih tinggi dan berkualitas. Kinerja penanaman modal yang optimal diharapkan menjadi *engine of growth* pertumbuhan ekonomi untuk memperkuat transformasi ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

1.4. Tantangan dan Permasalahan

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menghadapi beberapa tantangan pada tahun 2024 antara lain:

1. Kondisi ekonomi global yang masih *volatile* seperti perang dagang, konflik Rusia dan Ukraina, pemananasan global, serta fluktuasi harga komoditas dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS menyebabkan kekhawatiran bagi investor dan berdampak pada *appetite* investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia;

2. Indonesia memasuki periode pemilihan Presiden pada tahun 2024 sehingga investor cenderung *wait and see* dan menunda investasinya karena menunggu hasil pemilu pada kuartal pertama 2024;
3. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur di daerah yang belum merata;
4. Permasalahan pengadaan tanah di daerah.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga telah mengidentifikasi beberapa permasalahan utama, khususnya dalam upaya meningkatkan realisasi investasi antara lain:

1. Nilai Realisasi Penanaman Modal
   a. Masih perlunya sinkronisasi kebijakan, regulasi dan insentif untuk menarik minat investasi dari sektor-sektor yang saat ini tengah menjadi tren global, seperti energi baru terbarukan, teknologi bebas emisi dan efisiensi energi;
   b. Kesenjangan infrastruktur antarwilayah dan konektifitas ekonomi antarpulau menjadi hambatan bagi calon investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia;
   c. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya di bidang penanaman modal masih perlu ditingkatkan;
   d. Terjadinya kesenjangan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan beberapa negara dikawasan ASEAN. Hal ini dapat mempengaruhi daya saing dan efisiensi investasi di Indonesia;
2. Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder
   a. Masih perlunya melengkapi informasi, optimalisasi promosi dan fasilitasi terhadap sektor-sektor usaha prioritas berdasarkan wilayah/daerah yang siap ditawarkan kepada investor (*Investment Project Ready to Offer*) maupun potensi investasi regional;
   b. Kontinuitas ketersediaan bahan baku yang belum stabil dan ketergantungan pada impor yang berpengaruh terhadap fluktuasi nilai produksi dan distribusi;
   c. Dominasi dan kuatnya produk impor serta belum adanya kemampuan industri dalam negeri untuk memproduksi produk substitusi impor yang lebih murah dan berkualitas;
   d. Akses permodalan, perizinan, teknologi, atau pasar sulit dijangkau sektor Industri Kecil Menengah (IKM), sehingga masih bergantung pada fasilitas dari pemerintah dan swasta;
   e. Belum meratanya logistik sektor industri sehingga beberapa industri tidak memiliki sistem logistik yang terintegrasi, efisien, dan andal;
   f. Ketersediaan data sektor yang terbatas, beberapa industri belum memiliki data yang *up to date*, akurat dan lengkap.
3. Sebaran Penanaman Modal Berkualitas di Luar Jawa
   a. Keterbatasan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah kepulauan. Beberapa daerah masih belum memiliki akses dan kondisi jalan yang memadai, pelabuhan dan bandara untuk mobilitas masyarakat dan barang, serta beberapa daerah belum memiliki jaringan listrik dan air bersih.
   b. Tingginya biaya logistik di daerah luar jawa berdampak pada kurangnya daya saing produk daerah dan tingginya biaya tenaga kerja di luar Jawa;
   c. Kurangnya ketersediaan sumber daya manusia di luar Jawa yang mumpuni dan belum sesuai dengan kebutuhan industri modern.
   d. Kurangnya kepercayaan investor untuk berinvestasi di daerah luar Jawa karena dinamika politik lokal dan sulitnya memperoleh status lahan *clear and clean*. Investor memiliki banyak pertimbangan dalam berinvestasi di daerah dengan risiko keamanan yang tinggi serta ketidakstabilan politik.
4. Kontribusi Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) termasuk UMKM
   a. Keterbatasan pelaku UMKM terhadap akses pembiayaan dan modal sehingga menghambat pengembangan usaha;
   b. Peluang pekerjaan yang ditawarkan perusahaan PMA/PMDN belum termanfaatkan secara maksimal dikarenakan kemampuan atau kompetensi UMKM belum optimal sehingga kemitraan yang dilakukan belum efektif dan berkelanjutan;

c. Monitoring dan evaluasi kegiatan kemitraan usaha (*matchmaking*) di bidang penanaman modal belum dilaksanakan secara maksimal.

5. Peringkat Kemudahan Berusaha (*ease of doing bussiness*)
   a. Implementasi survei *business ready* (b-*ready*) penilaian iklim investasi dan kemudahan berusaha merupakan pendekatan baru yang dikembangkan Bank Dunia sebagai pengganti dari *survei ease of doing business*, dengan 10 topik indikator: *business entry, business location, utility services, labor, financial services, international trade, taxation, dispute resolution, market competition* dan *business insolvency*.
   b. Sistem OSS masih belum stabil sehingga menyebabkan terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha, seperti *bug*, konektivitas, dan integrasi antar kementerian/lembaga yang belum optimal. Selain itu, terbatasnya jumlah SDM yang kompeten di daerah dalam pelayanan perizinan dan fasilitasi penanaman modal. Kualitas Hilirisasi Investasi Strategis
6. Masih kurangnya komitmen dari berbagai pihak untuk upaya peningkatan kualitas hilirisasi investasi strategis guna untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek hilirisasi yang prospektif sehingga membuka peluang masuknya investasi dan meningkatkan realisasi investasi yang berdampak pada pembangunan ekonomi suatu daerah.
7. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
   Adanya penajaman *roadmap* reformasi birokrasi nasional melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Adanya peraturan tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM harus menyesuaikan roadmap reformasi birokrasi kementerian dengan menyusun rencana aksi reformasi birokrasi umum dan rencana aksi reformasi birokrasi tematik. Jumlah dan kompetensi SDM perlu ditingkatkan, termasuk kompetensi promotor investasi pada sektor-sektor prioritas untuk pelaksanaan kegiatan promosi yang lebih optimal.
8. Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
   Keterbatasan SDM di bidang pengelolaan anggaran, sehingga terdapat rangkap jabatan antara tugas dan fungsi pada unit kerja dengan pengelola anggaran.

1.5. Sistematika Laporan Kinerja

Laporan kinerja Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2024 tersusun sistematika sebagai berikut:

1) Ringkasan Eksekutif
Bagian ini memuat gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM selama tahun 2024.

2) Bab I Pendahuluan
Bab ini memberikan gambaran terkait penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran mandat dan peran strategis Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

3) Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja
Bab ini akan memberikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis, prioritas pembangunan nasional dan penyusunan rencana kerja serta anggaran.

4) Bab III Akuntabilitas Kinerja
Bab ini memuat:
a. Capaian kinerja sasaran strategis Kementerian Investasi/BKPM. Subbab ini akan menguraikan capaian kinerja sasaran strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi;

b. Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Subbab ini menguraikan rincian penilaian kinerja organisasi yang dicapai menggunakan empat perspektif *Balanced Scorecard* (BSC);
c. Evaluasi dan analisis capaian kinerja. Subbab ini akan menyampaikan rincian capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dan sasaran program yang dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, serta gambaran perkembangan dan kendala yang dihadapi;
d. Keterkaitan kinerja unit kerja dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian. Subbab ini akan menyampaikan keterkaitan kinerja dan peran unit kerja dalam pencapaian sasaran strategis kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM;
e. Capaian kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terhadap target nasional. Subbab ini memaparkan capaian indikator target yang terkait dengan peran strategis kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan prioritas nasional;
f. Capaian kinerja anggaran. Subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
g. Efisiensi Penggunaan sumber daya. Subbab ini akan menguraikan pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam mencapai target yang telah ditetapkan

5) **Bab IV Inisiatif Peningkatan Akuntabilitas Kinerja**
Bab ini akan menguraikan berbagai inisiatif dalam mengoptimalkan peningkatan akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil tindak lanjut atas evaluasi AKIP tahun 2023. Pada Bab ini juga akan menguraikan rencana tindak lanjut atas evaluasi AKIP Tahun 2024
6) **Bab V Penutup**
Bab ini menyajikan ringkasan pencapaian kinerja selama tahun 2024 dan rencana tindaklanjut sebagai bagian rekomendasi perbaikan kinerja di tahun mendatang.

KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Tahun 2024 merupakan periode akhir dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2020-2024, sehingga capaian kinerja pada tahun ini merupakan gambaran kondisi akhir dari periode Renstra tahun 2020-2024. Sasaran strategis yang termuat pada Renstra mencerminkan arah kebijakan yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode lima tahun tersebut. Dengan demikian, perencanaan kinerja tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran capaian, tetapi juga sebagai panduan dalam mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tiga sasaran strategis ini meliputi:

1. **Meningkatnya realisasi penanaman modal**, yang bertujuan untuk memperkuat kontribusi investasi dalam pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan jumlah dan nilai investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
2. **Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal**, yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan investasi serta kepastian regulasi guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.
3. **Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani**, yang mengarah pada reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan agar lebih transparan, profesional, serta berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Sasaran strategis tersebut merupakan capaian akhir yang ingin direalisasikan dalam periode tahun 2024. Capaian ini menjadi dasar pijakan bagi keberlanjutan kebijakan investasi di Indonesia dan menjadi titik awal dalam masa transisi perencanaan untuk periode 2025-2029. Seluruh program dan kebijakan yang telah dijalankan dalam periode 2020-2024 akan menjadi pondasi bagi perumusan strategi investasi yang lebih adaptif, selaras dengan visi pembangunan nasional jangka panjang nasional tahun 2025-2045 dan jangka menengah nasional tahun 2025-2029. Sebagai bagian dari masa transisi periode perencanaan, capaian kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada tahun 2024 merupakan *milestone* dan pondasi penting untuk mencapai nilai realisasi investasi yang tinggi, berkualitas, dan berkelanjutan pada periode 2025-2029. Artinya kondisi capaian pada tahun 2024 merupakan gambaran awal yang akan menjadi dasar dalam penentuan berbagai arah kebijakan dan strategi pada periode Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2025-2029. Hal ini penting dalam upaya peningkatan capaian kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah pada periode perencanaan ke depan. Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029. Dokumen tersebut merupakan tahap pertama dari upaya mencapai visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045 yaitu **“Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”.**

2.1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis oleh Kementerian Investasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam rangka menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja, serta target kinerja yang terukur sesuai dengan tugas, fungsi, visi, dan misi organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, perencanaan kinerja mencakup serangkaian tahapan yang meliputi penetapan dan pengukuran kinerja, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, serta pelaporan kinerja instansi pemerintah. Proses ini dilaksanakan guna memastikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Selain itu, perencanaan kinerja bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dan kebijakan yang dijalankan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM selaras dengan prioritas nasional, serta kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional.

2.1.1. Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2020-2024

Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM periode 2020-2024 ditetapkan melalui Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2020. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyusunan rencana kerja kementerian guna memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan berjalan secara efektif, terarah, dan selaras dengan visi pembangunan nasional. Rencana strategis ini menjadi kerangka strategis dalam menentukan prioritas program, kegiatan, serta sasaran kinerja yang ingin dicapai selama periode lima tahun. Dalam dokumen ini, visi dan misi kelembagaan dirumuskan secara jelas dan kemudian dielaborasi menjadi tujuan serta sasaran yang lebih spesifik. Untuk memastikan pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi alat ukur dalam menilai kinerja serta mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan. Seluruh kebijakan dan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM harus selaras dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2020-2024, sebagaimana diatur dalam Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019. Sebagai instrumen perencanaan jangka menengah, Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM 2020-2024 menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2024. Dokumen perjanjian kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja, dan rencana anggaran. Dokumen tersebut merupakan rujukan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2024 guna menilai efektivitas implementasi kebijakan serta pencapaian kinerja investasi nasional. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman kerja internal, tetapi juga sebagai alat evaluasi yang memastikan transparansi, akuntabilitas, serta kesinambungan kebijakan investasi untuk periode perencanaan selanjutnya.

Penyusunan dokumen Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2024 ini berpedoman pada sasaran strategis dan capaian indikator kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2024. Indikator kinerja ini berperan penting sebagai instrumen pengukuran kinerja, pengendalian, dan evaluasi dalam implementasi program serta kegiatan yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaan Rencana Stratgis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2020-2024, Kementerian Investasi dan Hiliirisasi/BKPM berpedoman langsung pada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2020-2024. Arah pembangunan ini menjadi acuan dalam menyelaraskan prioritas nasional. Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hiliirisasi/BKPM dirancang untuk menopang prioritas nasional, khususnya dalam membangun iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan sebagai *engine of economic growth*. Visi Rencana Strategis 2020-2024 menggariskan tujuan utama yang hendak dicapai selama kurun waktu lima tahun. Visi rencana strategis merupakan gambaran kondisi umum yang akan dicapai oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2024. Kementerian Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berkomitmen untuk memajukan investasi yang inklusif dan berkelanjutan, yang dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini visi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Investasi dan Hiliirisasi/BKPM tahun 2020-2024:

BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"

Dalam rangka mewujudkan visi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM secara aktif mendukung dan melaksanakan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor dua dan nomor delapan dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;

4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada
8. Seluruh Warga; Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dari 9 (Sembilan) misi tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM memprioritaskan pelaksanaan dua misi utama yang secara langsung mendukung tugas dan fungsi kelembagaannya, yaitu:

1. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
   Berdasarkan RPJMN 2020–2024, investasi ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional untuk memperkuat struktur ekonomi dan meningkatkan daya saing global. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berperan penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui reformasi regulasi investasi, peningkatan daya tarik investasi, dan promosi investasi ke pasar global, kementerian berupaya membangun ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.
2. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
   Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 3 ayat (2), penyelenggaraan penanaman modal harus sejalan dengan misi pembangunan yang merata dan berkeadilan. Untuk mendukung pemerataan pembangunan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mendorong distribusi investasi ke daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, menciptakan lapangan kerja di daerah tertinggal, serta mendorong pembangunan yang lebih inklusif.

Kedua misi tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2020-2024. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berkomitmen untuk terus meningkatkan nilai realisasi investasi, karena nilai tersebut memberikan *multiplier effect* terhadap penyerapan tenaga kerja yang dalam jangka panjang berdampak pada penurunan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan. Visi dan misi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan strategis dan sasaran strategis, yang mencerminkan upaya sistematis kementerian dalam mencapai hasil yang diinginkan. Tujuan strategis disusun untuk menjawab tantangan, potensi, dan permasalahan yang akan dihadapi ke depan serta upaya perwujudan visi serta misi Presiden dan Wakil Presiden. Berikut tujuan strategis yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2020-2024:

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; dan
2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

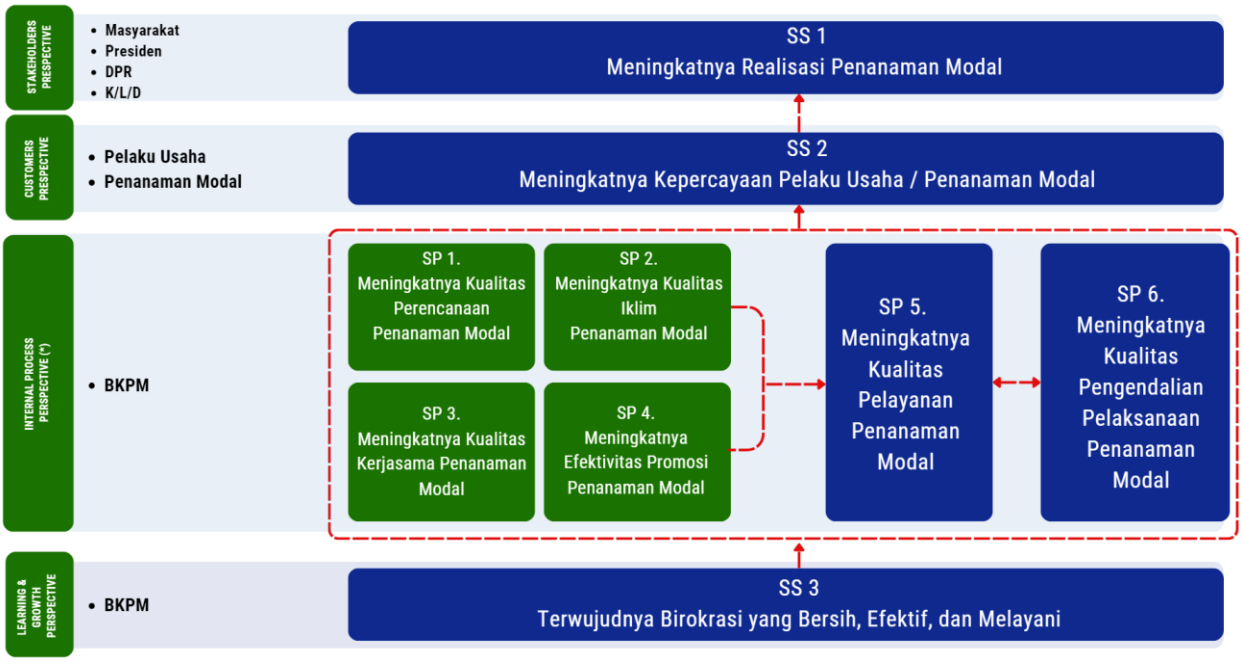

Gambar 2.1
Peta Strategi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2020-2024

Peta strategi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menggambarkan langkah strategis yang diambil untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden 2020–2024. Peta Strategi dilakukan melalui empat perspektif penilaian dengan pendekatan *Balanced Scorecard (BSC)* yaitu dari *stakeholder, customer, internal process*, dan *learning and growth.*

Pada perspektif ***stakeholders***, terdapat sasaran strategis utama, yaitu meningkatnya realisasi penanaman modal. Sasaran ini bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata terhadap prioritas nasional, termasuk melalui peningkatan volume dan kualitas realisasi investasi serta membangun kepercayaan melalui pelayanan publik dan kebijakan yang mendukung dunia usaha.

Pada perspektif ***customers***, terdapat sasaran strategis utama, yaitu meningkatnya kepercayaan pelaku usaha atau penanam modal. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berfokus pada pelaku usaha dan penanam modal sebagai pihak utama yang dilayani. Upaya strategis diarahkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan pelayanan yang prima, serta mengurangi hambatan investasi, sehingga meningkatkan daya saing investasi nasional di pasar internasional.

Perspektif ***internal process*** menjabarkan enam sasaran prioritas yang menjadi pilar utama pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Sasaran tersebut meliputi peningkatan kualitas perencanaan penanaman modal, kualitas iklim investasi, efektivitas promosi, kualitas kerja sama, kualitas pelayanan, serta pengendalian pelaksanaan investasi. Langkah-langkah ini dilakukan melalui pendekatan berbasis data, penyederhanaan regulasi, penguatan kolaborasi, optimalisasi teknologi digital, dan monitoring yang efektif, guna memastikan pelaksanaan investasi berjalan lancar dan berkelanjutan.

Perspektif ***learning and growth*** menekankan pentingnya reformasi birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani. Sasaran ini mencakup penguatan sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur digital, serta pembentukan budaya kerja yang mendukung efektivitas pelaksanaan tugas kelembagaan. Dengan peta strategi ini, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memastikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berdaya saing, sesuai dengan visi Presiden dan Wakil Presiden.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM periode 2020-2024. Pada tahun ini, seluruh capaian yang telah

direncanakan dalam Renstra 2020-2024 menjadi hasil akhir yang akan dievaluasi sekaligus menjadi dasar rujukan dalam proses penyusunan Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029. Dalam upaya sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan, capaian atau kondisi tahun 2024 menjadi perhatian utama agar arah kebijakan investasi ke depan dapat berkesinambungan dan berkelanjutan. Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM 2020-2024 akan menjadi pijakan awal dalam mengidentifikasi program-program yang perlu dilanjutkan, ditingkatkan, atau disesuaikan dengan tantangan dan prioritas nasional yang baru. Dengan demikian, periode 2024 menjadi masa transisi yang strategis bagi Kementerian Investasi dan Hiliirisasi/BKPM untuk memastikan keberlanjutan kebijakan, menciptakan sinergi lintas program, serta mempersiapkan langkah-langkah implementatif yang relevan dalam mendukung perumusan Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029.

2.1.2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang dirumuskan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah selaras dengan sasaran dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2020–2024, yaitu "Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian." Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan, sasaran strategis yang dirumuskan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mengacu pada prioritas pembangunan nasional, visi-misi Presiden dan Wakil Presiden, serta tujuan strategis kementerian.

Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menetapkan tiga sasaran strategis utama untuk periode 2020–2024, yaitu:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal, yang mencerminkan upaya mendorong investasi secara signifikan guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi.
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal, yang berfokus pada menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum, serta menyelenggarakan pelayanan investasi yang transparan dan profesional.
3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani, yang menekankan pentingnya reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan publik, khususnya pelaku usaha dan investor.

Sasaran strategis ini selanjutnya diselaraskan dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana terurai dalam tabel keterkaitan antara visi-misi nasional dengan tujuan dan sasaran strategis Kementerian Investasi dan Hiliirisasi/BKPM 2020–2024. Penyelarasan ini bertujuan untuk memastikan sinergi antara pelaksanaan tugas kementerian dengan prioritas pembangunan nasional guna mencapai hasil yang optimal. Berikut ini merupakan tabel keterkaitan antara visi misi Presiden dan Wakil Presiden dengan tujuan dan sasaran strategis Kementerian Investasi/BKPM tahun 2020-2024.

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2020-2024

Dukungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM terhadapVisi Presiden dan Wakil Presiden	Dukungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM terhadap Pelaksanaan Misi Presidendan Wakil Presiden	Tujuan	Sasaran Strategis
BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:"Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskanGotong Royong."	Struktur Ekonomi yangProduktif, Mandiri, danBerdaya Saing	Terwujudnya peningkatan daya saingpenanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal	1. Meningkatnya realisasi penanaman modal 2. Meningkatnya kepercayaanpelaku usaha / penanam modal
	Pengelolaan Pemerintahanyang Bersih, Efektif, dan Terpercaya	Terwujudnya tata Kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani

Indikator kinerja sasaran strategis berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis setiap tahun. Indikator ini berperan penting dalam memastikan kontribusi Kementerian Investasi dan Hiliirisasi/BKPM terhadap pencapaian target nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020–2024. Dengan demikian, setiap indikator kinerja dirancang untuk mencerminkan sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan mendukung sasaran pembangunan nasional.

Dalam implementasinya, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM diklasifikasikan ke dalam tiga perspektif utama dalam kerangka kerja *Balanced Scorecard* (BSC), yaitu:

1. *Stakeholder Perspective*, terdiri dari satu Sasaran Strategis yaitu (SS-1) Meningkatnya realisasi penanaman modal, dengan indikator kinerja utama:
   a. Nilai Realisasi Penanaman Modal;
   b. Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder;
   c. Sebaran Penanaman Modal Berkualitas (di luar Jawa); dan
   d. Kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN termasuk UMKM.
2. *Customer Perspective,* terdiri dari satu Sasaran Strategis yaitu (SS-2) Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal, dengan indikator kinerja utama yaitu Peringkat Kemudahan Berusaha (EoDB).
3. *Learning and Growth*, terdiri dari satu Sasaran Strategis yaitu (SS-3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani, dengan indikator kinerja utama:
   a. Nilai Reformasi Birokrasi BKPM; dan
   b. Opini Atas Laporan Keuangan BKPM.

Sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target indikator kinerja utama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2020–2024 telah dirumuskan sebagai acuan untuk mengukur kinerja kementerian dalam mendukung prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020–2024. Sasaran Strategis mencerminkan kondisi yang diharapkan tercapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan, sementara Indikator Kinerja Utama (IKU) berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan dalam mencapai sasaran tersebut.

Setiap Indikator Kinerja Utama dilengkapi dengan target yang ditetapkan untuk setiap tahun selama periode 2020–2024. Target ini disusun berdasarkan analisis capaian sebelumnya, potensi sumber daya yang tersedia, dan tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Investasi dan Hiliirisasi/BKPM. Dengan adanya target yang terukur, kementerian dapat memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan secara efektif, terarah, dan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Berikut Tabel yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan target IKU Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM:

Tabel 2.2
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target Indikator Kinerja
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2020-2024

No	Sasaran Stategis dan Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
SS-1 Meningkatnya realisasi penanaman modal							
1	Nilai realisasi penanaman modal	Rp Triliun	817,2	858,5	968,4	1.099,8	1.239,3
2	Nilai realisasi penanamanmodal sektor sekunder	Rp Triliun	227,2	268,7	352,5	483,9	646,1
3	Sebaran penanaman modalberkualitas (di luar Jawa)	%	48,3	49,0	49,7	50,6	51,7
4	Kontribusi investasi dalamnegeri/PMDN termasuk UMKM	%	48,8	49,7	50,3	51,9	53,1
SS-2 Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal							
5	Peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*)	Peringkat EoDB	60	56	51	45	40
SS-3 Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani							
6	Nilai Reformasi Birokrasi BKPM	Predikat/ Nilai	BB (>70%-80%)	BB (>70%-80%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)
7	Opini atas laporan keuangan BKPM	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mengalami masa transisi pada tahun 2024, transisi tersebut antara lain: **Pertama**, perubahan nomenklatur menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi; dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. **Kedua**, Perubahan dalam struktur organisasi tata kerja berdasarkan dengan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pada tahun 2024, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045. Dokumen ini menjadi pedoman dalam perumusan RPJMN 2025-2029. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga Tahun 2025-2029. Kementerian Investasi dan Hilirisasi telah menyusun Rancangan Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025-2029, yang akan menjadi acuan kebijakan, dan program Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Dengan demikian, tahun 2024 menjadi masa transisi yang strategis bagi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk memastikan keberlanjutan kebijakan, menciptakan sinergi lintas program, serta mempersiapkan langkah-langkah implementatif yang relevan dalam mendukung Rencana Strategis 2025-2029.

2.1.3. Sasaran Program

Sasaran program dalam Laporan Kinerja (LKj) merupakan hasil yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program yang dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Sasaran program ini memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan kelembagaan serta berperan dalam memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan di sektor investasi dan hilirisasi. Perumusan sasaran program didasarkan pada prinsip keterukuran dan relevansi dengan tugas serta fungsi masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Sasaran tersebut disusun untuk menjamin keselarasan antara rencana strategis dan pelaksanaan operasional, sehingga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan investasi, kemudahan berusaha, serta daya saing perekonomian nasional.

Unit organisasi Eselon I merumuskan Sasaran Program sebagai hasil akhir yang hendak dicapai melalui pelaksanaan programnya. Sasaran ini berkontribusi secara langsung pada pencapaian Sasaran Strategis kementerian. Sasaran Program telah mencerminkan *outcome* dari program yang dilaksanakan oleh unit organisasi Eselon I sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mewajibkan adanya hubungan kausalitas yang jelas antara Sasaran Program dengan Sasaran Strategis kementerian. Dengan demikian, setiap program yang dijalankan oleh unit organisasi dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan strategis kementerian.

Berdasarkan Peta Strategi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM tahun 2020–2024, Sasaran Program dikelompokkan ke dalam ***internal process perspective*** sesuai dengan kerangka ***Balanced Scorecard***. Perspektif ini menekankan pada proses internal organisasi yang harus dikelola dengan efektif dan efisien untuk mencapai sasaran strategis. Sasaran program pada perspektif ini mencerminkan kegiatan operasional dan langkah-langkah yang dilakukan oleh unit-unit organisasi Eselon I dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya guna mendukung misi kementerian. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menempatkan sasaran program dalam perspektif *Internal Process* untuk menunjukkan peran strategis program-program unit Eselon I dalam mendukung pencapaian tujuan kementerian. Setiap program dirancang untuk menghasilkan *outcome* yang memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja di lingkungan kementerian. Sasaran program berfungsi sebagai fondasi penting yang memastikan pelaksanaan program dapat berjalan efektif dan selaras dengan visi, misi, serta prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan. Sasaran program dan indikator kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebagai berikut:

Program Penanaman Modal

1. **(SP-1) Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal**, dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal.
2. **(SP-2) Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal**, dengan indikator kinerja:
   a. Jumlah Hari dan Prosedur Dalam Memulai Usaha (*starting a business*); dan
   b. Perusahaan Besar yang Bermitra dengan UMKM.
3. **(SP-3) Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal**, dengan indikator kinerja:
   a. Nilai Komitmen Penanaman Modal; dan
   b. Jumlah Minat Penanaman Modal.
4. **(SP-4) Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman moda**l, dengan indikator kinerja yaitu Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri yang Telah diimplementasikan.
5. **(SP-5) Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal**, dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal.
6. **(SP-6) Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal**, dengan indikator kinerja yaitu Fasilitasi Permasalahan yang Dihadapi Perusahaan (*debottlenecking).*

Program Dukungan Manajemen

1. **(SP-7) Terwujudnya ASN Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang kompeten, professional, dan berintegritas.** Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dilakukan sebagai indikator kinerja berdasarkan dua regulasi utama. **Pertama,** Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. **Kedua,** Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.
2. **(SP-8) Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif, dan efisien.** BKPM menggunakan dua indikator kinerja utama dalam pengukuran kinerjanya. **Pertama,** implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menilai akuntabilitas kinerja lembaga. **Kedua,** penilaian tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mengukur kematangan sistem pengendalian internal.
3. **(SP-9) Terkelolanya anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang akuntabel.** BKPM menetapkan nilai kinerja anggaran sebagai indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan anggaran lembaga.

Tabel 2.3
Sasaran Program, Indikator Kinerja, dan Target Indikator Kinerja
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM Tahun 2020-2024

No	Sasaran Program dan Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
PROGRAM PENANAMAN MODAL							
SP-1 Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal							
1	Indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal	(Indeks)	3,50 dari skala 5	3,65 dari skala 5	3,75 dari skala 5	3,90 dari skala 5	4,00 dari skala 5
SP-2 Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal							
2	Jumlah hari dan prosedur dalam memulai usaha (*starting a business*)	Hari	8	6	6	4	3
		Prosedur	10	8	7	5	3
3	Perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM	Jumlah Perusahaan	120	145	167	183	205
SP-3 Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal							
4	Nilai komitmen penanaman modal	Rp Triliun	1.362,00	1.430,80	1.614,00	1.833,00	2.065,50
5	Jumlah Minat Penanaman Modal	Minat	6.900	7.400	7.900	8.450	9.100
SP-4 Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal							
6	Kesepakatan / perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan	Kesepakatan/ perjanjian/ perundingan	50	53	58	64	69
SP-5 Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal							
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal	(Indeks)	3,3 dari skala 4	3,35 dari skala 4	3,4 dari skala 4	3,45 dari skala 4	3,5 dari skala 4
SP-6 Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal							
8	Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan (*debottlenecking*)	Perusahaan	116	126	132	138	143
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
SP-7 Terwujudnya ASN Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang kompeten, profesional dan berintegritas							
9	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks	70,0%	72,5%	72,5%	75,0%	77,5%
SP-8 Terwujudnya birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang efektif, efisien dan berorientasi pelayanan prima							
10	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	BB (>70%-80%)	BB (>70%-80%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)
11	Penilaian Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BKPM	Level	3	3	3	3	3

No	Sasaran Program dan Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
SP-9 Terkelolanya anggaran BKPM yang akuntabe							
12	Nilai kinerja anggaran BKPM	Predikat/Nilai	Baik (>80%-90%)	Baik (>80%-90%)	Baik (>80%-90%)	Baik (>80%-90%)	Baik (>80%-90%)

Target kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, saat ini masih menggunakan target yang termuat dalam Renstra 2020-2024. Dengan demikian, akuntabilitas kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban periode akhir Renstra 2020-2024, meskipun terjadi perubahan nomenklatur, struktur organisasi dan tata kerja, transisi menuju dokumen Rencana Strategis periode 2025-2029. Artinya Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menyelenggarakan dua program utama yang diimplementasikan melalui tujuh unit organisasi Eselon I. Program-program tersebut disusun secara terarah dan terintegrasi guna mendukung pencapaian tujuan strategis kementerian. Adapun kedua program tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Program yang Dilaksanakan Unit di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

No	Program	Unit Eselon I
1	Program Penanaman Modal (Teknis)	Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal
		Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis
		Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal
		Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal
		Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
		Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal
		Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal
2	Program Dukungan Manajemen	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama
		Pusat Pendidikan dan Pelatihan
		Pusat Pembinaan Penata Kelola Penanaman Modal

2.2. Alokasi Anggaran

2.2.1. Anggaran Tahun 2024

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berkomitmen untuk memastikan akuntabilitas dalam penggunaan setiap anggaran. Komitmen ini mencakup pengelolaan anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel. Sebagai lembaga pemerintah, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus berupaya meningkatkan tata kelola keuangan negara, tidak hanya untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, tetapi juga untuk mewujudkan pengelolaan negara yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Pada tahun anggaran 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki anggaran sebesar Rp1.229.295.942.000. Berikut ini adalah rincian alokasi anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk tahun 2024.

Tabel 2.5
Alokasi Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2024

Program	Anggaran (Rp)
Dukungan Manajemen	507.666.215.314
Penanaman Modal	721.629.726.686
Total Pagu	**1.229.295.942.000**

Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan yang terintegrasi dalam dua program utama, yaitu sebagai berikut.

Tabel 2.6
Alokasi Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2024
Berdasarkan Program dan Satuan Kerja

No	Program/Satuan Kerja	Anggaran (Rp)
Program Dukungan Manajemen		**507.666.215.314**
1	Sekretariat Utama	507.666.215.314
Program Penanaman Modal		**721.629.726.686**
1	Sekretariat Utama	80.868.574.000
2	Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal	47.292.967.000
3	Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal	182.909.143.000
4	Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	26.799.449.000
5	Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal	39.513.694.686
6	Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	111.294.422.000
7	Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal	25.805.472.000
8	Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis	32.500.000.000
9	Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal	160.646.005.000
10	Dekonsentrasi	14.000.000.000
Total		**1.229.295.942.000**

Rincian alokasi anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2024 disusun berdasarkan jenis belanja dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 2.7
Alokasi Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)
1	Belanja Pegawai	163.719.525.000
2	Belanja Barang	928.210.233.000
3	Belanja Modal	137.366.184.000
Total		1.229.295.942.000

2.2.2. Perkembangan Anggaran Tahun 2020-2024

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berkomitmen untuk menjamin akuntabilitas dalam penggunaan setiap anggaran. Komitmen ini mencakup pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel, hal ini juga dalam rangka untuk mewujudkan pengelolaan negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Alokasi anggaran menjadi sumber daya penting karena berfungsi untuk mengatur pembagian dana untuk berbagai program dan kegiatan. Alokasi anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2020-2024 merupakan anggaran untuk merealisasikan berbagai program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2020-2024 dan Rencana Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada setiap tahunnya.

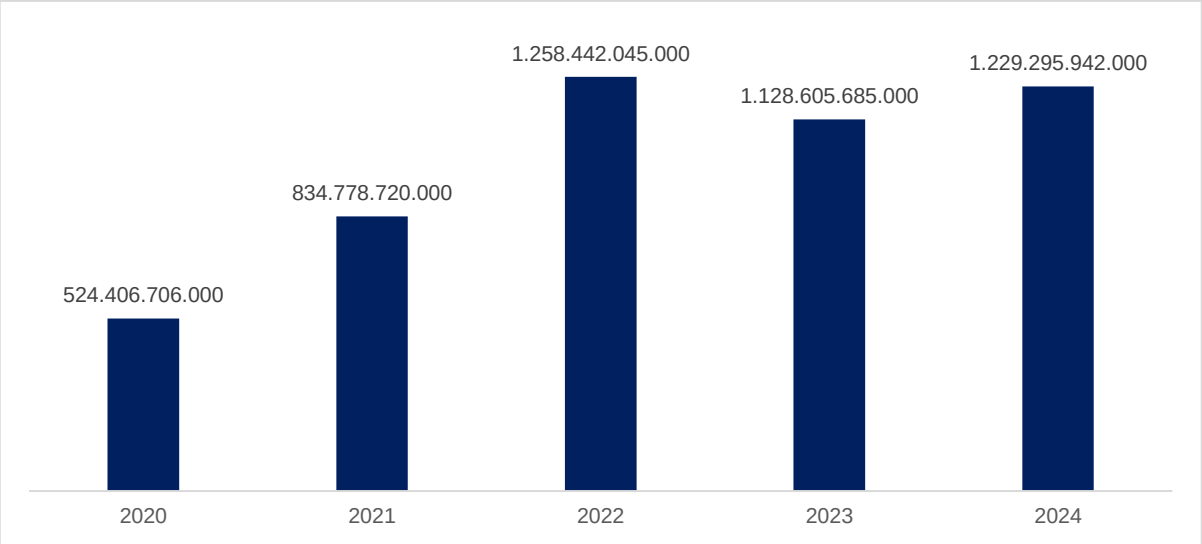

Gambar 2.2
Alokasi Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2020-2024

Alokasi anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mengalami peningkatan dari tahun 2020-2022, namun mengalami penurunan menjadi Rp1.258.442.045.000 di tahun 2023. Pada tahun 2024, alokasi anggaran mengalami sedikit peningkatan menjadi 1.229.295.942.000. Tren peningkatan ini sejalan dengan kinerja positif yang dicapai oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Pagu anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sepanjang tahun 2020-2024 dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan yang terbagi dalam 2 (dua) program utama yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Penanaman Modal. Program Dukungan Manajemen diampu oleh Sekretariat Utama, dan Program Penanaman Modal diampu Sekretariat Utama dan 8 (delapan) Kedeputian, yaitu 1) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 2) Deputi Bidang Prromosi Penanaman Modal; 3) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal; 4) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal; 5) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; 6) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal; 7) Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis; 8) Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal. Selain dialokasikan untuk Seketariat Utama dan 8 (delapan) Kedeputian tersebut, Program Penanaman Modal juga dialokasikan untuk Dekonsentrasi. Dana dekonsentrasi digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat di daerah.

Tabel 2.8
Alokasi Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2024
Berdasarkan Program dan Satuan Kerja

NO	PROGRAM/ SATKER	ALOKASI TA 2020	ALOKASI TA 2021	ALOKASI TA 2022	ALOKASI TA 2023	ALOKASI TA 2024
Program Dukungan Manajemen		**278,623,787,000**	**278,133,376,000**	**316,255,038,000**	**396,144,568,000**	**507,666,215,314**
1	Sekretariat Utama	278,623,787,000	278,133,376,000	316,255,038,000	396,144,568,000	507,666,215,314
Program Penanaman Modal		**245,782,919,000**	**556,645,344,000**	**942,187,007,000**	**732,461,117,000**	**721,629,726,686**
1	Sekretariat Utama	0	0	19,282,729,000	33,125,298,000	80,868,574,000
2	Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal	8,178,781,000	35,088,099,000	21,896,265,000	38,171,580,000	47,292,967,000
3	Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal	77,564,759,000	155,492,201,000	259,515,302,000	286,849,448,000	182,909,143,000
4	Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	9,420,632,000	158,239,486,000	87,304,446,000	42,643,593,000	26,799,449,000

NO	PROGRAM/ SATKER	ALOKASI TA 2020	ALOKASI TA 2021	ALOKASI TA 2022	ALOKASI TA 2023	ALOKASI TA 2024
5	Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal	2,791,224,000	23,658,057,000	26,815,064,000	44,649,040,000	39,513,694,686
6	Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	38,290,294,000	69,416,733,000	269,700,179,000	92,989,481,000	111,294,422,000
7	Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal	97,302,198,000	105,750,768,000	98,235,004,000	58,213,774,000	25,805,472,000
8	Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis	0	0	82,510,860,000	32,231,135,000	32,500,000,000
9	Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal	0	0	66,927,158,000	94,195,709,000	160,646,005,000
10	Dekonsentrasi	12,235,031,000	9,000,000,000	10,000,000,000	9,392,059,000	14,000,000,000
TOTAL		**524,406,706,000**	**834,778,720,000**	**1,258,442,045,00**	**1,258,442,045,00**	**1,229,295,942,00**

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Tabel 2.9
Perjanjian Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2024

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target
STAKEHOLDER PERSPECTIVE				
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal	1	Nilai realisasi penanaman modal (Rp Triliun)	1.239,3
		2	Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder (Rp Triliun)	646,1
		3	Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa) (%)	51,7
		4	Kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM (%)	53,1
CUSTUMER PERSPECTIVE				
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanaman modal	5	Peringkat kemudahan berusaha (*Ease of doing Business*) (Peringkat)	40
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE				
3	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani	6	Nilai reformasi birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM (predikat/nilai)	80
		7	Opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM (opini BPK)	4

Perjanjian Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2024 merupakan pelaksanaan target kinerja tahun terakhir dari Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2020-2024. yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator lainnya yang terkait dengan tugas fungsi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Dalam pengukuran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Sekretaris Utama Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kinerja di Kementerian Investasi/BKPM. Metode BSC tersebut menerjemahkan tugas, fungsi,

tujuan dan strategi ke dalam suatu peta strategi. Peta strategi tersebut menjabarkan strategi secara visual, melalui sejumlah sasaran strategis/sasaran program yang terangkai dalam hubungan sebab akibat dan dikelompokkan ke dalam 4 (empat) perspektif yaitu *stakeholder perspective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective*.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melaksanakan evaluasi secara berkala atas perencanaan kinerja yang ditetapkan. Salah satu *output*-nya adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diiperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi, akan diperoleh indeks capaian IKU. Perhitungan NKO mengacu pada Perjanjian Kinerja dengan formula sebagai berikut:

$$\mathbf{NKO} = \sum (\%\boldsymbol{Capaian\ Kinerja\ x\ Bobot\ Perspektif})$$

Penghitungan indeks capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

1. Apabila realisasi IKU melebihi target, dimana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120.
2. Apabila realisasi IKU sama dengan target atau tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi

Keempat perspektif dalam penilaian menggunakan metode *Balaced Scorecard* memiliki bobot yang ditentukan sebagai berikut:

Tabel 2.10
Perspektif dan Bobot *Balance Scorecard*

No	Perspektif	Bobot		
		4 Perspektif	3 Perspektif	3 Perspektif
1	*Stakeholders*	30%	40%	-
2	*Custumers*	30%	-	40%
3	*Internal Process*	20%	30%	30%
4	*Learning and Growth*	20%	30%	30%

Tingkat capaian kinerja masing-masing sasaran strategis dikelompokan ke dalam lima kategori sebagai berikut:

Tabel 2.11
Kategorisasi Kinerja

No	Nilai	Kode	Kategori
1	100-ke atas	Hijau	Sangat Baik
2	76-99	Hijau Muda	Baik
3	61-75	Kuning	Cukup
4	51-60	Oranye	Kurang
5	50- ke bawah	Merah	Buruk

KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM

BAB 3

AKUNTABILITAS KERJA

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah melakukan berbagai upaya akseleratif dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024. Hal terpenting dalam penyusunan laporan kinerja ini adalah pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan pengungkapan secara memadai terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja menjadi salah satu dasar utama dalam penerapan manajemen kinerja untuk menjamin adanya akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dan kinerja yang diharapkan. Tata kelola akuntabilitas termasuk pengukuran kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2024 telah dilaksanakan secara triwulan dan tahunan melalui pemanfaatan Aplikasi Manajemen Akuntabilitas Kinerja Lembaga (SIMANTAB). Hal ini diharapkan terwujudnya pelaporan kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang lebih akuntabel dan transparan.

3.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2024. Penetapan IKU ini dilakukan melalui perjanjian kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2024. Perjanjian kinerja menjadi acuan dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target yang telah ditentukan. Selain itu, perjanjian kinerja ini juga menjadi dasar untuk mengukur pencapaian strategis dengan membandingkan antara target yang telah direncanakan dengan hasil nyata dari masing-masing IKU pada setiap sasaran strategis yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2020-2024. Berikut ini adalah rincian mengenai target dan pencapaian sasaran strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk tahun 2024.

Tabel 3.1.
Capaian Sasaran Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun 2024			Kategori
		Target	Realisasi	%	
STAKEHOLDER PERSPECTIVE					
Meningkatnya realisasi penanaman modal	1. Nilai realisasi penanaman modal (Rp Triliun)	1.239,3	1.714,2	138,32	Sangat Baik
	2. Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder (Rp Triliun)	646,1	721,3	111,64	Sangat Baik
	3. Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa) (%)	51,70	52,20	100,97	Sangat Baik
	4. Kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM (%)	53,10	47,50	89,45	Baik
CUSTOMER PERSPECTIVE					
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/ penanam modal	5. Peringkat kemudahan berusaha *(Ease of Doing Business)* (peringkat)	40	27	120	Sangat Baik
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE					
Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani	6. Nilai reformasi birokrasi Kementerian Investasi/ BKPM (predikat/nilai)	A (>80-90)	BB (71,91)	90	Baik
	7. Opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM (opini BPK/nilai)	4	4	100	Sangat Baik

Pada tahun 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berhasil mencapai sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kemajuan signifikan dalam bidang penanaman modal, kepercayaan pelaku usaha, dan reformasi birokrasi. Secara keseluruhan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menunjukkan kinerja yang sangat baik pada sebagian besar sasaran strategis. Meskipun terdapat beberapa indikator yang belum sepenuhnya mencapai target, namun tetap berada dalam kategori yang baik, secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal *(Stakeholder Perspective)*
   1) Nilai Realisasi Penanaman Modal
      Target penanaman modal sebesar Rp1.239,3 triliun berhasil terlampaui dengan capaian Rp1.714,2 triliun, mencapai 138,32 persen dari target yang ditetapkan. Pencapaian ini menunjukkan hasil yang **sangat baik**, mencerminkan keberhasilan dalam menarik investasi secara signifikan.
   2) Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder
      Target penanaman modal sektor sekunder sebesar Rp646,1 triliun, realisasi yang tercatat mencapai Rp721,3 triliun, dengan pencapaian 111,64 persen. Ini menunjukkan hasil yang **sangat baik**, dengan sektor sekunder menunjukkan kemajuan yang menggembirakan.
   3) Sebaran Penanaman Modal Berkualitas di Luar Jawa
      Target untuk sebaran penanaman modal berkualitas di luar Jawa adalah 51,7 persen, dan realisasinya tercatat sebesar 52,2 persen. Ini mencapai 100,97 persen dari target, yang menunjukkan distribusi investasi yang merata dan semakin berkembang di luar pulau Jawa, yang dapat digolongkan sebagai **sangat baik**.
   4) Kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Termasuk UMKM
      Target kontribusi PMDN termasuk UMKM sebesar 53,1 persen tidak sepenuhnya tercapai, dengan capaian 47,5 persen. Meskipun tidak mencapai target, pencapaian ini memperoleh 89,45 persen dan dinilai **baik**, menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan di masa mendatang.
2. Meningkatnya Kepercayaan Pelaku Usaha/Penanam Modal *(Customer Perspective)*
   1) Peringkat Kemudahan Berusaha *(Ease of Doing Business)*
      Target peringkat *Ease of Doing Business* adalah 40, sementara Indonesia berhasil mencatatkan peringkat 27. Ini melampaui target dengan pencapaian 120 persen, yang menunjukkan perbaikan signifikan dalam iklim usaha, yang dapat dikategorikan sebagai **sangat baik**.
3. Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Efektif, dan Melayani *(Learning & Growth Perspective)*
   1) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
      Pada penilaian reformasi birokrasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berhasil memperoleh predikat BB (71,91), meskipun target yang ditetapkan adalah A (80%-90%). Meskipun tidak tercapai secara penuh, pencapaian ini mencapai 90 persen dan digolongkan sebagai **baik**.
   2) Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
      Laporan keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK, yang merupakan pencapaian 100 persen dan dikategorikan sebagai **sangat baik** karena menunjukkan transparansi dan akuntabilitas keuangan yang tinggi.

Realisasi kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2020-2024 menunjukkan keberhasilan mencapai sejumlah sasaran strategis dengan kategori kinerja sangat baik. Meskipun terdapat beberapa indikator yang belum sepenuhnya mencapai target, namun tetap berada dalam kategori yang baik. Indikator tersebut adalah (1) Kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk UMKM. Target akhir Renstra sebesar 53,1 persen dengan realisasi sebesar 47,5 persen; dan (2) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yaitu BB (71,91), sedangkan target yang ditetapkan adalah A (80%-90%). Meskipun tidak tercapai secara penuh, pencapaian kinerja ini berada pada rentang 76-99 persen dan digolongkan “baik”.

3.2. Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2024

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menerapkan metode *Balanced Scorecard* (BSC) untuk menilai kinerja organisasinya. Dengan pendekatan BSC, perhitungan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana)

dan realisasi dari Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap perspektif. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan, diperoleh data capaian NKO Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk tahun 2024 sebesar 109,98. Nilai ini mencerminkan pencapaian kinerja di masing-masing perspektif, yang dapat dilihat lebih rinci pada tabel berikut.

Tabel 3.2.
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Rata-Rata Sasaran (%)	Rata-Rata Perspektif (%)	Skor (%)
STAKEHOLDER PERSPECTIVE (30%)									
1. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	1. Nilai Realisasi Penanaman Modal	(Rp Triliun)	1.239,30	1.714,20	138,32	Sangat Baik	110,10	110,10	33,03
	2. Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder	(Rp Triliun)	646,1	721,3	111,64	Sangat Baik			
	3. Sebaran Penanaman Modal Berkualitas (di luar Jawa)	(%)	51,7	52,2	100,97	Sangat Baik			
	4. Kontribusi Investasi PMDN termasuk UMKM	(%)	53,1	47,5	89,45	Baik			
CUSTOMER PERSPECTIVE (30%)									
2. Meningkatnya Kepercayaan Pelaku Usaha/Penanam Modal	5. Peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*)	(peringkat)	40	27	120	Sangat Baik	120	120	36
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (20%)									
3. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penanaman Modal	6. Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal	(indeks)	4,3	4,43	110,75	Sangat Baik	110,75	109,81	21,96
4. Meningkatnya Kualitas Hilirisasi Investasi Strategis	7. Persentase rekomendasi Hilirisasi Investasi Strategis yang akan Diimplementasikan ke dalam Rencana Aksi	(persentase)	100	100	100	Sangat Baik	100		
5. Meningkatnya Kualitas Iklim Penanaman Modal	8. Jumlah Hari dalam memulai Usaha	(hari)	2,5	2,5	100	Sangat Baik	98,87		
	9. Jumlah Prosedur dalam memulai Usaha	(jumlah prosedur)	2	2	100	Sangat Baik			
	10. Persentase realisasi kesepakatan perusahaan PMA/PMDN yang bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan peraturan perundangan	(%)	32,5	31,4	96,62	Baik			
6. Meningkatnya Efektivitas Promosi Penanaman Modal	11. Nilai Rencana Penanaman Modal Hasil Berbagai Kegiatan Promosi Penanaman Modal	(Rp Triliun)	2.065,50	2.334,45	113,02	Sangat Baik	116,51		
	12. Jumlah Minat Penanaman Modal melalui berbagai Kegiatan Promosi Penanaman Modal	(jumlah minat)	9.100	12.744	120	Sangat Baik			
7. Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Penanaman Modal	13. Kesepakatan/Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri yang telah Diimplementasikan	(kesepakatan / perjanjian / perundingan)	69	69	100	Sangat Baik	100		
8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	14. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal	(Indeks)	3,50 dari skala 4	3,5	100	Sangat Baik	100		
9. Meningkatnya Kualitas Pengendalian	15. Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat	(%)	79	106,15	134,37	Sangat Baik	134,37		

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Rata-Rata Sasaran (%)	Rata-Rata Perspektif (%)	Skor (%)
Pelaksanaan Penanaman Modal	diselesaikan permasalahannya								
10. Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi Penanaman Modal	16. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	(Indeks Skala 5)	3	3,54	118	Sangat Baik	118		
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE (20%)									
11. Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Melayani	17. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM	(predikat/ nilai)	A (>80%-90%)	BB (71,91)	90	Baik	94,99	94,99	18,99
	18. Opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM	(opini BPK)	4	4	100	Sangat Baik			
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)									**109,98**
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)							**109,41**		

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM selama tahun 2020-2024 selalu berada di atas 100%. Ini menunjukkan pencapaian kinerja organisasi berada pada kategori **sangat baik.** Selain itu, NKO mengalami tren peningkatan yang signifikan selama periode tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, NKO berada pada level 106,5 dan meningkat menjadi 107,21 pada tahun 2021. Puncaknya pada tahun 2024, yaitu mencapai 109,98 atau tumbuh 1,25 persen dibandingkan tahun 2023.

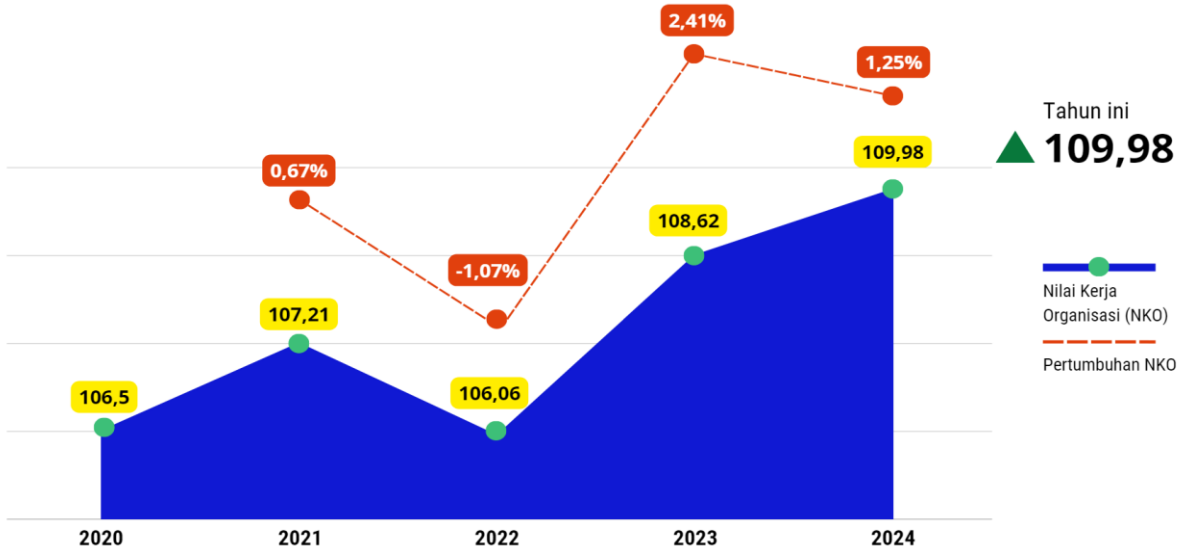

Gambar 3.1.
Pertumbuhan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2020-2024

Berdasarkan nilai kinerja organisasi (NKO) tahun 2024 pada masing-masing perspektif, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki nilai perspektif *stakeholder* sebesar 33,03, nilai perpektif *customer* sebesar 36, nilai perspektif *internal process* sebesar 21,96, dan nilai perpektif *learning and growth* sebesar 18,99. Secara keseluruhan, tidak ada perspektif yang mengalami penurunan nilai di tahun 2024. Bahkan, terjadi peningkatan nilai pada perspektif *stakeholders* dan *internal process.*

Tabel 3.3.
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
Berdasarkan Perspektif Tahun 2020-2024

No	Perspektif	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	*Stakeholder*	42,83	43,09	43,44	32,51	33,03
2	*Customer**	N/A	N/A	N/A	36	36
3	*Internal Process*	33,54	34,66	32,96	21,12	21,96
4	*Learning and Growth*	30,13	30,17	29,66	18,99	18,99

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM secara rutin melakukan pengukuran kinerja untuk memastikan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dievaluasi pada setiap triwulan, semester, dan tahunan. Biro Perencanaan Program dan Anggaran memegang peran penting dalam proses ini, dengan tugas utama mengumpulkan data kinerja melalui berbagai tahapan, mulai dari monitoring dan evaluasi hingga pengukuran dan pelaporan secara berkala. Tujuan utama dari analisis capaian kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai realisasi IKU, mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah pemulihan yang diperlukan guna meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM. Berdasarkan peta strategi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2020-2024, analisis capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) yang melibatkan empat sudut pandang, di mana setiap sudut pandang diukur dengan bobot tertentu untuk memberikan penilaian yang komprehensif dan objektif, meliputi:

1. *Stakeholder Perspective* dengan bobot 30%, mencakup sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi untuk memenuhi harapan atau kebutuhan, baik dari sektor swasta maupun pemerintah, yang memiliki kepentingan terhadap *output* atau *outcome* yang dihasilkan oleh organisasi. Perspektif ini ditetapkan melalui sasaran strategis "Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal" untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Sasaran tersebut diukur dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:
   a. Nilai realisasi penanaman modal;
   b. Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder;
   c. Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa); dan
   d. Kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM.
2. *Customers Perspective* dengan bobot 30%, mencakup sasaran yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan customers dan/atau harapan organisasi terhadap customers. Pengguna layanan ini merupakan pihak yang terkait dengan pelayanan suatu organisasi. Perspektif ini ditetapkan melalui sasaran strategis "Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal" dan diukur dengan 1 (satu) IKU yaitu Peringkat kemudahan berusaha *(Ease of Doing Business)* yang mengacu pada *World Competitiveness Yearbook* 2024 yang diterbitkan *Institute for Management Development* (IMD).
3. *Internal Process Perspective* dengan bobot 20%, mencakup sasaran yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (*value chain*). Perspektif ini ditetapkan melalui 8 (delapan) sasaran program sebagai berikut:
   a. Sasaran "Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal" diukur melalui 1 (satu) IKU yaitu indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal;
   b. Sasaran "Meningkatnya kualitas hilirisasi investasi strategis" diukur melalui 1 (satu) IKU yaitu persentase rekomendasi hilirisasi investasi strategis yang akan ditindaklanjuti;

c. Sasaran "Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal" yang diukur melalui 3 (tiga) IKU yaitu jumlah hari dan prosedur dalam memulai usaha/*starting a business*; Jumlah prosedur dalam memulai usaha/*starting a business*; dan Persentase realisasi kesepakatan perusahaan PMA/PMDN yang bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan peraturan perundangan;
d. Sasaran "Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal" yang diukur melalui 2 (dua) IKU, yaitu nilai rencana penanaman modal hasil berbagai kegiatan promosi penanaman modal dan Jumlah minat penanaman modal melalui berbagai kegiatan promosi penanaman modal;
e. Sasaran "Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal" yang diukur melalui 1 (satu) IKU, yaitu kesepakatan/perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan;
f. Sasaran "Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal" yang diukur melalui 1 (satu) IKU, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal;
g. Sasaran "Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal" yang diukur melalui 1 (satu) IKU, yaitu persentase fasilitasi perusahaan yang dapat diselesaikan permasalahannya; dan
h. Sasaran "Meningkatnya kualitas teknologi informasi penanaman modal" diukur melalui 1 (satu) IKU, yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

4. *Learning and Growth Perspective* dengan bobot 20%, mencakup sasaran yang berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan *customers* dan *stakeholder.* Perspektif ini ditetapkan melalui sasaran stategis "Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani" dan diukur melalui 2 (dua) IKU, yaitu:
   a. Nilai reformasi birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (predikat/nilai); dan
   b. Opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (opini BPK/nilai)

Sasaran Strategis (SS-1) "Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal"

Sasaran strategis pertama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM adalah "Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal". Indikator kinerja sasaran strategis ini terdiri dari empat indikator yaitu 1) Nilai Realisasi Penanaman Modal; 2) Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder; 3) Sebaran Penanaman Modal Berkualitas (di luar Jawa); dan 4) Kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN Termasuk UMKM. Nilai realisasi penanaman modal adalah nilai yang diperoleh dari segala bentuk pelaksanaan kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing, di luar investasi migas, perbankan, lembaga keuangan nonbank, asuransi, sewa guna usaha, industri rumah tangga, usaha mikro dan usaha kecil. Nilai realisasi penanaman modal sekunder adalah nilai yang diperoleh dari segala bentuk kegiatan menanam modal di sektor sekunder, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing di luar migas, perbankan, lembaga keuangan nonbank, asuransi, sewa guna usaha, industri rumah tangga, usaha mikro dan usaha kecil.

Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa) diperoleh dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yaitu laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa) perlu diperbaiki, mengingat realisasi penanaman modal masih terfokus di Jawa. Percepatan pembangunan infrastruktur, penyiapan tenaga kerja terampil, kepastian lahan dan harmonisasi peraturan menjadi kunci penyebaran penanaman modal ke luar Jawa. Aspek-aspek tersebut menjadi kunci sukses dari upaya percepatan

pembangunan Kawasan industri dan Kawasan Pariwisata sebagai pusat pertumbuhan baru di luar Jawa, dan salah satu upaya untuk meningkatkan penanaman modal di pusat-pusat pertumbuhan adalah melalui kemudahan izin dan fasiltasi penanaman modal. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk UMKM adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

IKU-1: Nilai Realisasi Penanaman Modal

Nilai realisasi penanaman modal merujuk pada nilai yang tercapai dari seluruh kegiatan penanaman modal, baik yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, di luar investasi sektor migas, perbankan, lembaga keuangan non-bank, asuransi, sewa guna usaha, industri rumah tangga, serta usaha mikro dan usaha kecil. Tahun 2024 adalah periode akhir dari Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Oleh karenanya, capaian pada tahun 2024 merupakan capaian akhir dari periode perencanaan strategis periode 2020-2024.

Tabel 3.4.
Capaian Indikator Kinerja Utama 1 (IKU-1) Nilai Realisasi Penanaman Modal

Sasaran Strategis 1 (SS-1) Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal														
Indikator Kinerja Utama 1 (IKU-1) Nilai Realisasi Penanaman Modal (Rp Triliun)														
2020		2021		2022		2023		2024		Capaian Kinerja 2024 (%)	Pertumbuhan Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Rata-rata Realisasi Kinerja Tahun 2020 -2024	Rata-rata Pertumbuhan Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2024 (%)	Kategori Capaian Kinerja Tahun 2024
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R					
817,2	826,3	858,5	901,0	968,4	1.207,2	1.099,8	1.418,9	1.239,3	1.714,2	138,32	20,81	1.213,52	20,34	▲Sangat Baik

Dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berhasil mencatatkan pencapaian signifikan dalam realisasi penanaman modal. Pada tahun 2020, dengan target penanaman modal sebesar Rp817,2 triliun, realisasi yang tercapai adalah Rp826,3 triliun, melebihi target sebesar 100,9 persen. Puncaknya di tahun 2024, mampu mencapai 138,32 persen dari target yang ditetapkan. Pencapaian ini tidak hanya menggambarkan keberhasilan dalam menarik investasi, tetapi juga memperlihatkan pertumbuhan kinerja yang signifikan, dengan pertumbuhan capaian kinerja tahunan sebesar 20,81 persen. Rata-rata realisasi kinerja selama lima tahun (2020-2024) adalah 1.213,52 triliun, dengan rata-rata pertumbuhan capaian kinerja tahunan sebesar 20,34 persen. Ini menunjukkan keberhasilan yang berkelanjutan dalam hal meningkatkan realisasi investasi. Kategori pencapaian kinerja ini masuk dalam kategori Sangat Baik.

Berdasarkan data realisasi investasi nasional sepanjang Bulan Januari sampai Bulan Desember tahun 2024, bahwa nilai realisasi investasi sebesar Rp1.714,2 Triliun. Artinya, capaian tersebut telah melampui target Presiden dan target dokumen Rencana Strategis. Nilai realisasi investasi pada tahun 2024 terdiri dari 52,5 persen Penanaman Modal Asing (PMA) atau sebesar Rp900,2 Triliun dan 47,5 persen Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau sebesar Rp814,0 Triliun. Nilai realisasi investasi tersebut telah mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 2.456.130 jiwa atau naik sebesar 34,7 persen dibandingkan serapan tahun 2023.

Gambar 3.2.
Nilai Realisasi Investasi Januari-Desember 2024

Nilai realisasi investasi baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri sebagian besar terjadi di lima besar lokasi sebagai berikut: 1) Provinsi Jawa Barat dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp 251,1 Triliun/14,7 persen; 2) Daerah Khusus Jakarta dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp 241,9 Triliun/14,1 persen; 3) Provinsi Jawa Timur dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp147,3 Triliun/8,6 persen; 4) Provinsi Sulawesi Tengah dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp139,9 Triliun/8,2 persen; dan 5) Provinsi Banten dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp 105,6 Triliun/6,2 persen.

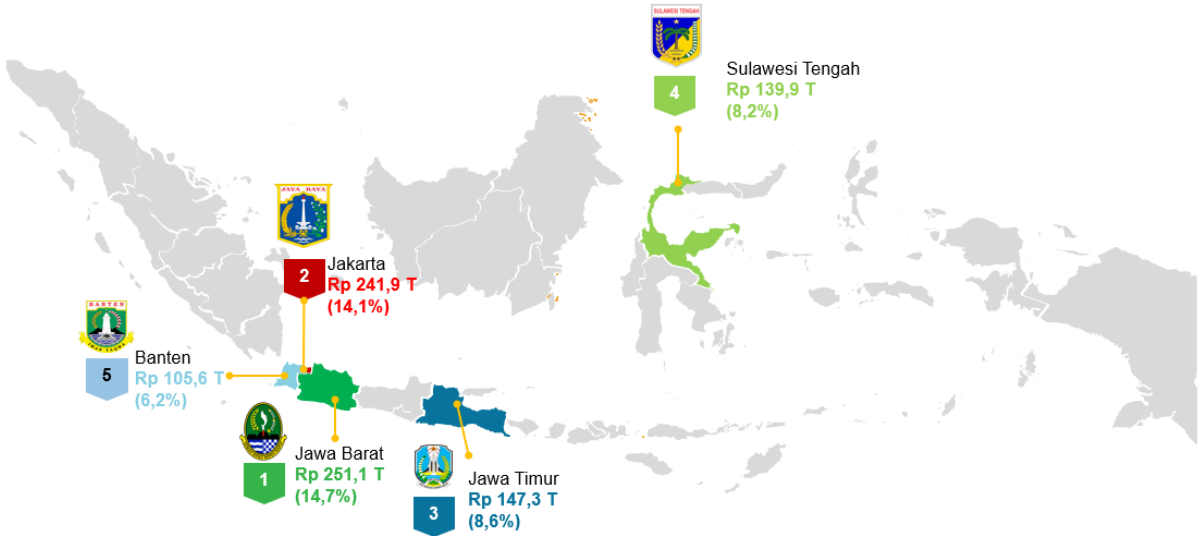

Gambar 3.3.
Lima Besar Lokasi Nilai Realisasi Investasi Tahun 2024

Berdasarkan sektor penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri terdapat lima besar subsektor sebagai berikut: 1) Subsektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp238,4 Triliun/13,9 persen; 2) Subsektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp189,9 Triliun/11,1 persen; 3) Subsektor pertambangan dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp184,7 Triliun/10,8 persen; 4) Subsektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp122,9 Triliun/7,2 persen; dan 5) Subsektor jasa lainnya dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp120,8 Triliun/7,0 persen.

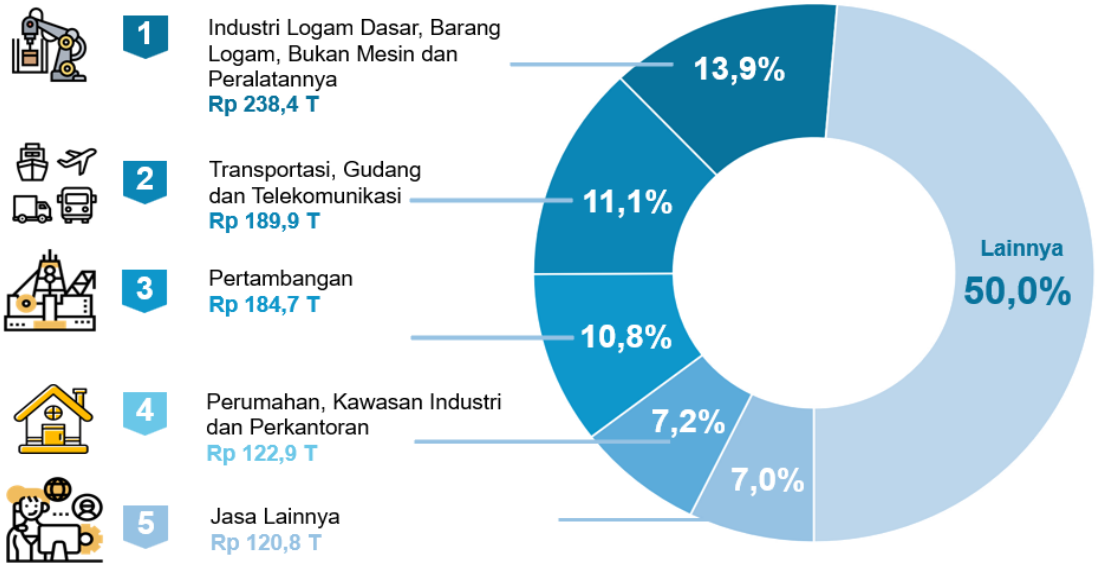

Gambar 3.4.
Lima Besar Subsektor Nilai Realisasi Investasi Tahun 2024

Dari total nilai realisasi penanaman modal asing di Indonesia sebesar Rp900,2 Triliun. Penanaman Modal Asing (PMA) tersebut didominasi oleh lima negara sebagai berikut: 1) Singapura dengan nilai realisasi investasi sebesar US$ 20,1 Miliar; 2) Hongkong dengan nilai realisasi investasi sebesar US$8,2 Miliar; 3) Republik Rakyat Tiongkok dengan nilai realisasi investasi sebesar US$8,1 Miliar; 4) Malaysia dengan nilai realisasi investasi sebesar US$4,2 Miliar; dan 5) Amerika Serikat dengan nilai realisasi investasi sebesar US$3,7 Miliar.

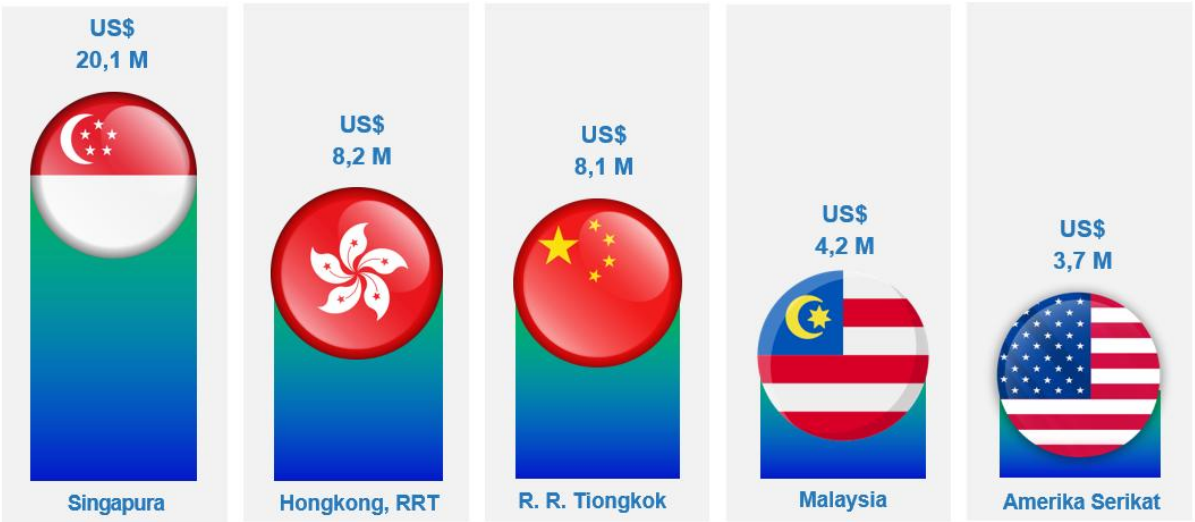

Gambar 3.5.
Lima Besar Negara Penanam Modal Asing Tahun 2024

Berdasarkan wilayah realisasinya, berikut ini merupakan lima besar lokasi realisasi penanaman modal asing: 1) Provinsi Jawa Barat dengan nilai realisasi investasi sebesar US$10,0 Miliar/16,6 persen; 2) Provinsi Sulawesi Tengah dengan nilai realisasi investasi sebesar US$ 9,0 Miliar/15,0 persen; 3) Daerah Khusus Jakarta dengan nilai realisasi investasi sebesar US$ 7,6 Miliar/12,6 persen; 4) Provinsi Maluku Utara dengan nilai realisasi investasi sebesar US$ 4,4 Miliar/7,3 persen; dan 5) Provinsi Banten dengan nilai realisasi investasi sebesar US$ 3,9 Miliar/6,4 persen.

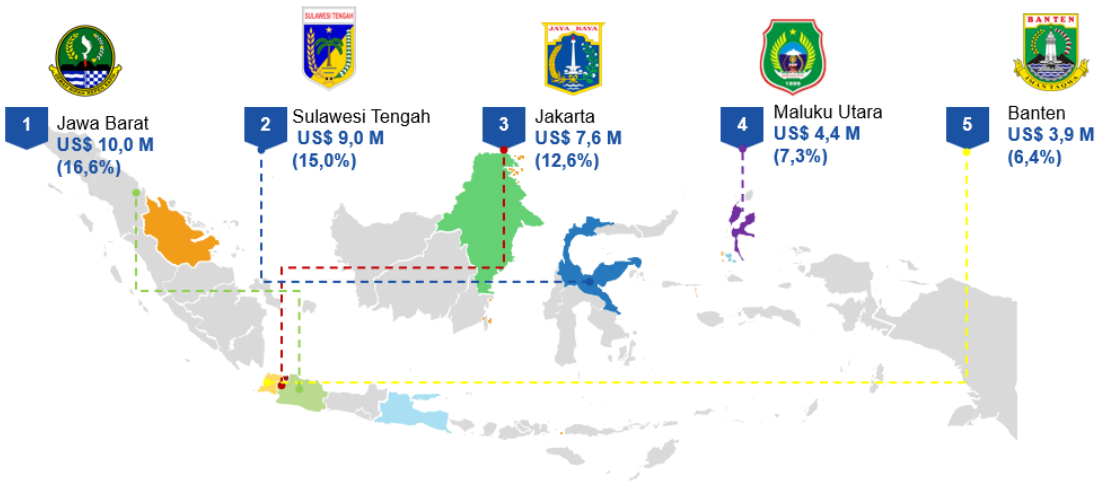

Gambar 3.6.
Lima Besar Lokasi Realisasi PMA Tahun 2024

Berikut ini merupakan tabel rinci nilai realisasi penanaman modal asing dan jumlah proyek di masing-masing provinsi pada tahun 2024. Dari 38 provinsi, total nilai investasi sebesar US$60.014 dengan total jumlah proyek sebanyak 166.650.

Tabel 3.5.
Nilai Realisasi Penanaman Modal Asing dan Jumlah Proyek di Masing-Masing Provinsi Tahun 2024

No	Provinsi	Investasi (US$. Juta)	Proyek
1	Jawa Barat	9.972,3	22.450
2	Sulawesi Tengah	9.019,3	879
3	Jakarta	7.563,4	48.470
4	Maluku Utara	4.392,4	423
5	Banten	3.868,2	11.236
6	Jawa Timur	3.661,1	8.544
7	Kepulauan Riau	2.483,0	4.007
8	Jawa Tengah	2.358,0	6.689
9	Sumatera Selatan	2.283,3	899
10	Riau	1.813,3	1.209
11	Sumatera Utara	1.721,7	2.363
12	Bali	1.613,7	42.926
13	Papua Tengah	1.496,8	92
14	Kalimantan Timur	1.417,1	1.727
15	Kalimantan Utara	1.347,7	234
16	Papua Barat	777,3	155
17	Nusa Tenggara Barat	651,0	3.991
18	Kalimantan Barat	616,0	959
19	Kalimantan Selatan	551,4	638
20	Kalimantan Tengah	419,1	824
21	Sulawesi Selatan	374,9	1.089
22	Sulawesi Tenggara	369,1	430
23	Lampung	162,9	754
24	Maluku	120,7	107
25	Sumatera Barat	115,9	832
26	Sulawesi Utara	112,4	562
27	Nusa Tenggara Timur	106,1	1.102
28	Jambi	105,6	442
29	Kepulauan Bangka Belitung	102,3	415
30	Papua Selatan	90,3	124
31	Bengkulu	86,7	156
32	Papua Barat Daya	82,9	114

No	Provinsi	Investasi (US$. Juta)	Proyek
33	Aceh	76,7	430
34	Daerah Istimewa Yogyakarta	35,4	1.004
35	Gorontalo	34,9	108
36	Papua	8,7	174
37	Sulawesi Barat	2,2	92
	TOTAL	**60.014,0**	**166.650**

Jawa Barat menjadi lokasi dengan nilai realisasi PMA tertinggi pada periode 2020-2021, kemudian pada periode 2022 Sulawesi Tengah menggantikan Jawa Barat menjadi lokasi dengan nilai realisasi PMA tertinggi. Pada periode tahun 2023-2024 Jawa Barat kembali menjadi lokasi dengan nilai realisasi PMA tertinggi. Berikut ini merupakan *tren* lima wilayah tertinggi nilai realisasi PMA dari Tahun 2020-2024:

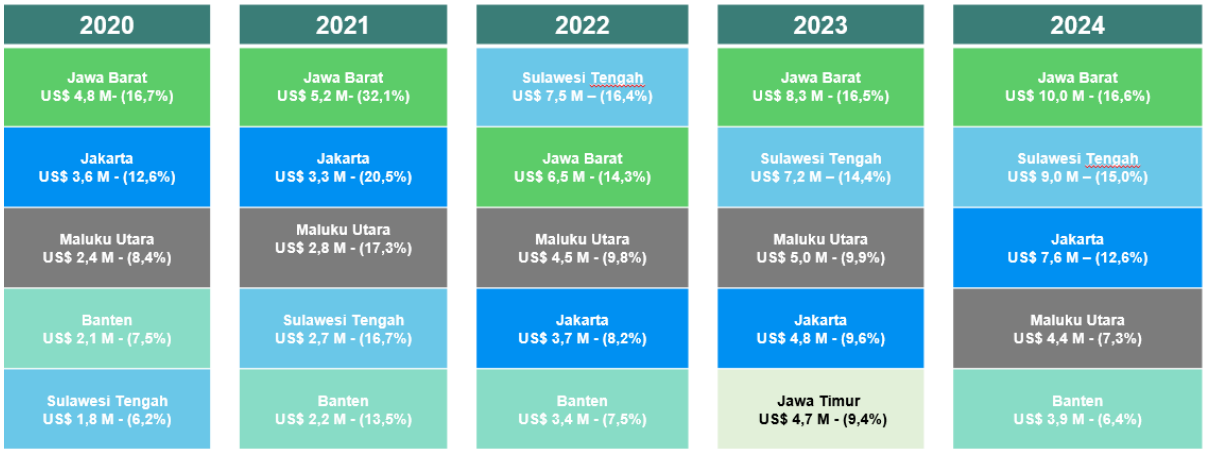

Gambar 3.7.
Tren Lokasi PMA Tahun 2020-2024

Merujuk subsektor realisasi penanaman modal asing di Indonesia, berikut ini merupakan lima besar subsektor penanaman modal asing: 1) Subsektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya dengan nilai realisasi investasi sebesar US$13,6 Miliar/22,6 persen; 2) Subsektor pertambangan dengan nilai realisasi investasi sebesar US$5,2 Miliar/ 8,6 persen; 3) Subsektor industri kertas dan percetakan dengan nilai realisasi investasi sebesar US$4,8 Miliar/8,0 persen; 4) Subsektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi dengan nilai realisasi investasi sebesar US$4,7 Miliar/7,8 persen; dan 5) Subsektor industri kimia dan farmasi dengan nilai realisasi investasi sebesar US$4,1 Miliar/ 6,9 persen.

Gambar 3.8.
Lima Besar Subsektor Nilai Realisasi PMA Tahun 2024

Sektor nilai realisasi PMA pada periode 2020-2024 tidak mengalami perubahan. Sektor Industri Pengolahan menjadi sektor yang secara konsisten memiliki nilai realisasi penanaman modal tertinggi dari tahun 2020-2024, Infrastruktur dan jasa merupakan sektor kedua tertinggi selama periode 2020-2024, sektor pertambangan merupakan sektor ketiga tertinggi selama periode 2020-2024. Berikut ini merupakan *tren* lima sektor tertinggi nilai realisasi PMA dari Tahun 2020-2024:

2020	2021	2022	2023	2024
Industri Pengolahan (*Manufacturing*) US$ 13,2 M - (46,1%)	Industri Pengolahan (*Manufacturing*) US$ 15,8 M - (50,8%)	Industri Pengolahan (*Manufacturing*) US$ 24,7 M - (54,1%)	Industri Pengolahan (*Manufacturing*) US$ 28,7 M - (57,1%)	Industri Pengolahan (*Manufacturing*) US$35,1 M - (58,5%)
Infrastruktur dan Jasa US$ 12,2 M - (42,5%)	Infrastruktur dan Jasa US$ 10,5 M - (33,7%)	Infrastruktur dan Jasa US$ 13,9 M - (30,4%)	Infrastruktur dan Jasa US$ 14,8 M - (29,4%)	Infrastruktur dan Jasa US$ 17,6 M - (29,3%)
Pertambangan US$ 2,0 M - (7,0%)	Pertambangan US$ 3,8 M - (12,3%)	Pertambangan US$ 5,1 M - (11,3%)	Pertambangan US$ 4,7 M - (9,4%)	Pertambangan US$ 5,2 M - (8,7%)
Tanaman Pangan, Perkebunan Dan Peternakan US$ 1,2 M - (4,1%)	Tanaman Pangan, Perkebunan Dan Peternakan US$ 1,0 M - (3,1%)	Tanaman Pangan, Perkebunan Dan Peternakan US$ 1,8 M - (3,9%)	Tanaman Pangan, Perkebunan Dan Peternakan US$ 1,9 M - (3,9%)	Tanaman Pangan, Perkebunan Dan Peternakan US$ 1,8 M - (3,0%)
Perikanan US$ 0,05 M - (0,2%)	Kehutanan US$ 0,04 M - (0,1%)	Kehutanan US$ 0,1 M – (0,2 %)	Kehutanan US$ 0,10 M - (0,2%)	Perikanan US$ 0,2 M - (0,4%)
Kehutanan US$ 0,04 M - (0,1%)	Perikanan US$ 0,02 M - (0,1%)	Perikanan US$ 0,03 M - (0,1%)	Perikanan US$ 0,03 M - (0,1%)	Kehutanan US$ 0,1 M - (0,1%)

Gambar 3.9.
Tren Sektor PMA Tahun 2020-2024

Dari total nilai realisasi penanaman modal dalam negeri sebesar Rp 814,0 Triliun, lima besar wilayah realisasi penanaman modal negeri adalah: 1) Daerah Khusus Jakarta dengan nilai investasi sebesar Rp128,4 Triliun/15,8 persen; 2) Provinsi Jawa Barat dengan nilai investasi sebesar Rp 101,5 Triliun/12,5 persen; 3) Provinsi Jawa Timur dengan nilai investasi sebesar Rp92,4 Triliun/11,4 persen; 4) Provinsi Riau dengan nilai investasi sebesar Rp61,1 Triliun/7,5 persen; dan 5) Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai investasi sebesar Rp55,1 Triliun/6,8 persen.

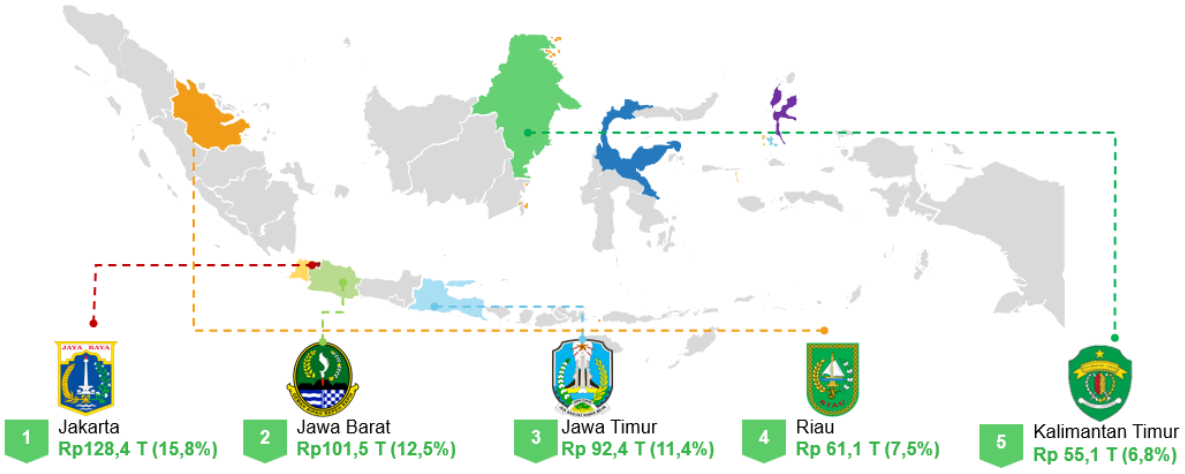

Gambar 3.10.
Lima Besar Lokasi Nilai Realisasi PMDN Tahun 2024

Berikut ini merupakan tabel rinci nilai realisasi penanaman modal dalam negeri dan jumlah proyek di masing-masing provinsi pada tahun 2024. Dari 38 provinsi, total nilai investasi sebesar Rp814.017,7 Miliar dengan total jumlah proyek sebanyak 578.610.

Tabel 3.6.
Nilai Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Jumlah Proyek
di Masing-Masing Provinsi Tahun 2024

No	Provinsi	Investasi (Rp. Miliar)	Proyek
1	Jakarta	128.402,1	173.185
2	Jawa Barat	101.552,1	80.559
3	Jawa Timur	92.410,1	58.758
4	Riau	61.097,6	10.082
5	Kalimantan Timur	55.078,9	15.390
6	Banten	47.605,8	36.320
7	Nusa Tenggara Barat	43.385,0	5.565
8	Sumatera Selatan	36.671,4	11.521
9	Jawa Tengah	33.298,7	33.960
10	Sumatera Utara	22.445,7	16.459
11	Kalimantan Selatan	16.579,3	7.123
12	Kepulauan Bangka Belitung	15.724,8	3.633
13	Kalimantan Barat	15.416,1	8.433
14	Kalimantan Tengah	15.229,3	5.157
15	Bali	12.312,3	12.836
16	Kalimantan Utara	11.924,5	1.794
17	Kepulauan Riau	10.017,4	10.329
18	Jambi	9.986,2	5.871
19	Maluku Utara	9.134,8	2.610
20	Sulawesi Selatan	8.412,0	14.279
21	Aceh	8.317,0	9.456
22	Bengkulu	7.982,5	2.500
23	Sumatera Barat	7.956,3	4.701
24	Lampung	7.218,0	8.256
25	Sulawesi Utara	5.783,9	5.884
26	Sulawesi Tenggara	5.517,3	4.247
27	Sulawesi Tengah	4.593,0	5.081
28	Gorontalo	4.003,9	1.858
29	Daerah Istimewa Yogyakarta	3.630,2	6.455
30	Sulawesi Barat	2.893,0	1.795
31	Nusa Tenggara Timur	2.625,5	4.645
32	Papua Barat Daya	1.765,4	1.679
33	Maluku	1.569,5	2.725
34	Papua Barat	1.377,9	1.361
35	Papua	974,8	1.978
36	Papua Selatan	699,7	712
37	Papua Tengah	343,5	1.275
38	Papua Pegunungan	82,0	138
	TOTAL	**814.017,7**	**578.610**

Lokasi nilai realisasi PMDN pada periode 2020-2024 mengalami perubahan yang dinamis. Jawa Timur menjadi lokasi dengan nilai realisasi PMDN tertinggi pada tahun 2020, kemudian Jawa Barat menjadi lokasi dengan nilai realisasi PMDN tertinggi pada tahun 2021. Pada periode 2022-2024, Daerah Khusus Jakarta secara konsisten menjadi lokasi dengan nilai realisasi PMDN tertinggi. Berikut ini merupakan tren lima wilayah tertinggi nilai realisasi PMDN dari Tahun 2020-2024:

Gambar 3.11.
Tren Lokasi PMDN Periode Tahun 2020-2024

Berdasarkan lima besar subsektor realisasi penanaman modal dalam negeri adalah sebagai berikut: 1) Subsektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp20,1 Triliun/14,8 persen; 2) Subsektor pertambangan dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp106,9 Triliun/13,1 persen; 3) Subsektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp76,5 Triliun/9,4 persen; 4) Subsektor jasa lainnya dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp66,3 Triliun/8,1 persen; dan 5) Subsektor industri makanan dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp65,9 Triliun/ 8,1 persen.

Gambar 3.12.
Lima Besar Subsektor Nilai Realisasi PMDN Tahun 2024

Sektor nilai realisasi PMDN pada periode 2020-2024 tidak mengalami perubahan. Sektor Infrastruktur dan jasa menjadi sektor yang secara konsisten memiliki nilai realisasi penanaman modal tertinggi dari tahun 2020-2024, Industri Pengolahan merupakan sektor kedua tertinggi selama periode 2020-2024, Tanaman Pangan, Perkebunan, Dan Peternakan merupakan sektor ketiga tertinggi selama periode 2020-2021, kemudian disusul Sektor Pertambangan sebagai sektor ketiga tertinggi selama periode 2022-2024. Sektor Kehutanan konsisten menjadi sektor terendah kedua selama periode 2020-2024, dan sektor perikanan merupakan sektor dengan urutan nilai realisasi paling rendah selama periode 2020-2024. Berikut ini merupakan tren lima sektor tertinggi nilai realisasi PMA dari Tahun 2020-2024:

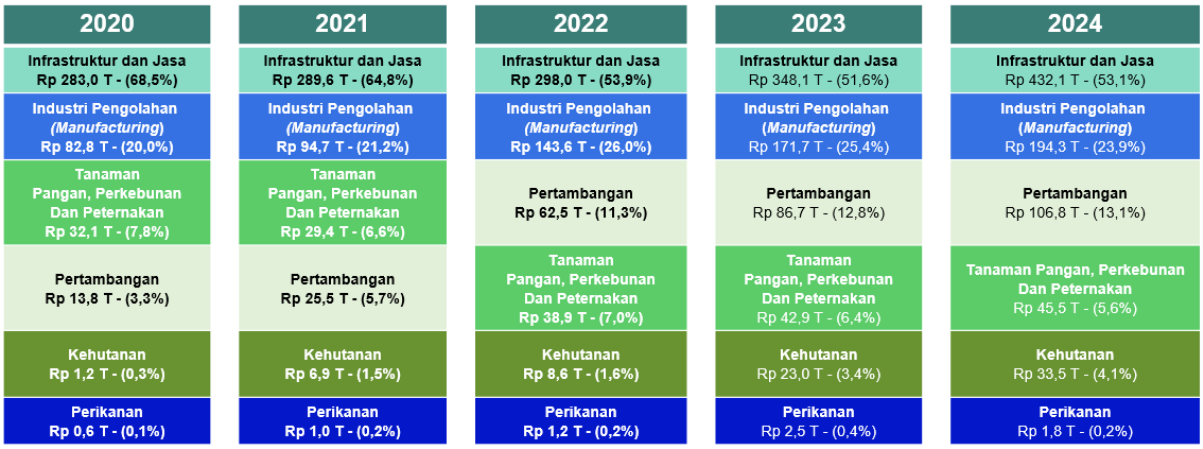

Gambar 3.13.
Tren Sektor PMDN 2020-2024

Total nilai realisasi investasi nasional sebesar Rp1.714,2 Triliun pada tahun 2024, sektor hilirisasi berkontribusi sebesar Rp407,8 Triliun atau sebesar 23,8 persen dari total nilai realisasi investasi. Kontribusi tersebut naik menjadi 8,63 persen dibanding capaian tahun 2023. Lima besar nilai realisasi investasi bidang hilirisasi adalah: 1) Mineral dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp245,2 Triliun; 2) Pertanian dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp 67,1 Triliun; 3) Kehutanan dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp 64,0 Triliun; 4) Minyak dan Gas dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp23,1 Triliun; dan 5) Ekosistem kendaraan listrik dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp8,4 Triliun.

Gambar 3.14.
Lima Besar Nilai Realisasi Investasi di Bidang Hilirisasi

Lima besar lokasi atau wilayah realisasi bidang hilirisasi adalah: 1) Provinsi Sulawesi Tengah dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp90,2 Triliun dan 90,9 persen pada nikel; 2) Provinsi Maluku Utara dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp57,6 Triliun dan 99,5 persen pada nikel; 3) Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp 35,4 Triliun dan 100 persen pada tembaga; 4) Provinsi Riau dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp29,9 Triliun dan 78,7 persen pada CPO; serta 5) Provinsi Jawa Barat dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp 28,7 Triliun dan 67,9 persen pada *pulp & paper.*

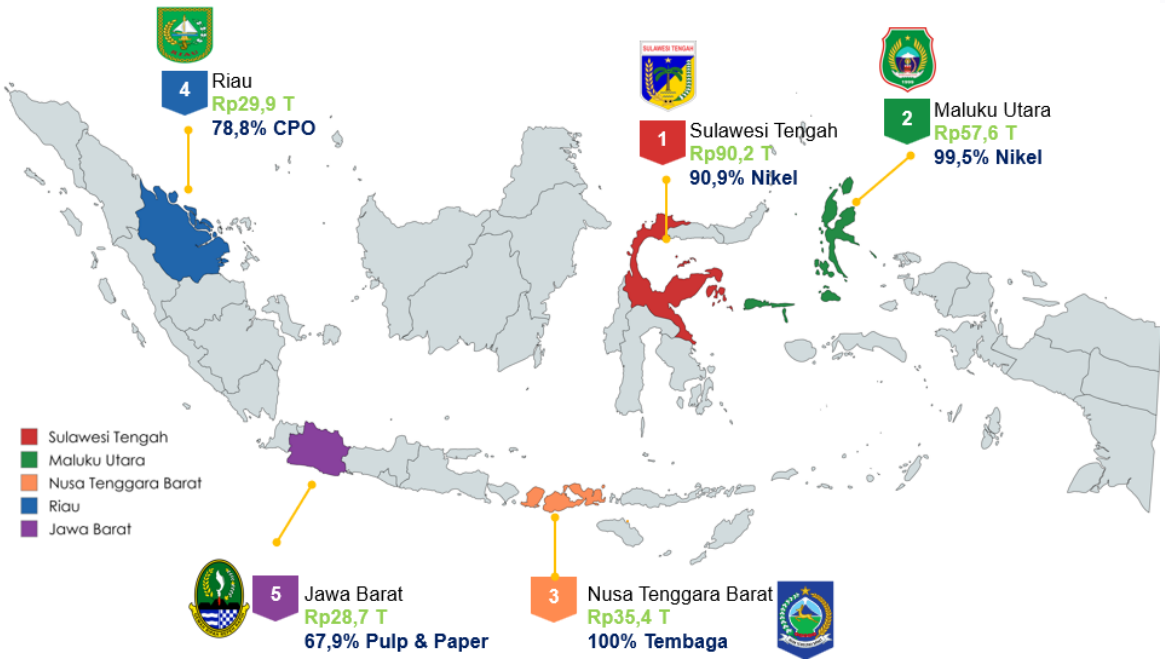

Gambar 3.15.
Lima Besar Lokasi Nilai Realisasi Investasi di Bidang Hilirisasi Tahun 2024

Lima besar negara asal investasi di bidang hilirisasi adalah: 1) Singapura dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp105,2 Triliun dan 41,7 persen pada nikel; 2) Indonesia dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp103,8 Triliun dan 36,3 persen pada CPO serta 35,1 persen pada tembaga; 3) Honkong dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp58,8 Triliun dan 93,7 persen pada nikel; 4) Republik Rakyat Tiongkok dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp55,2 Triliun dan 83,4 persen pada nikel; serta 5) Malaysia dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp39,9 Triliun dan 54,5 persen pada *pulp & paper.* Sepanjang periode Bulan Januari sampai Bulan Desember tahun 2024, nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder juga mengalami peningkatan menjadi Rp721,3 Triliun atau sebesar 42,1 persen dibanding nilai total investasi sebesar Rp1.714,2 Triliun.

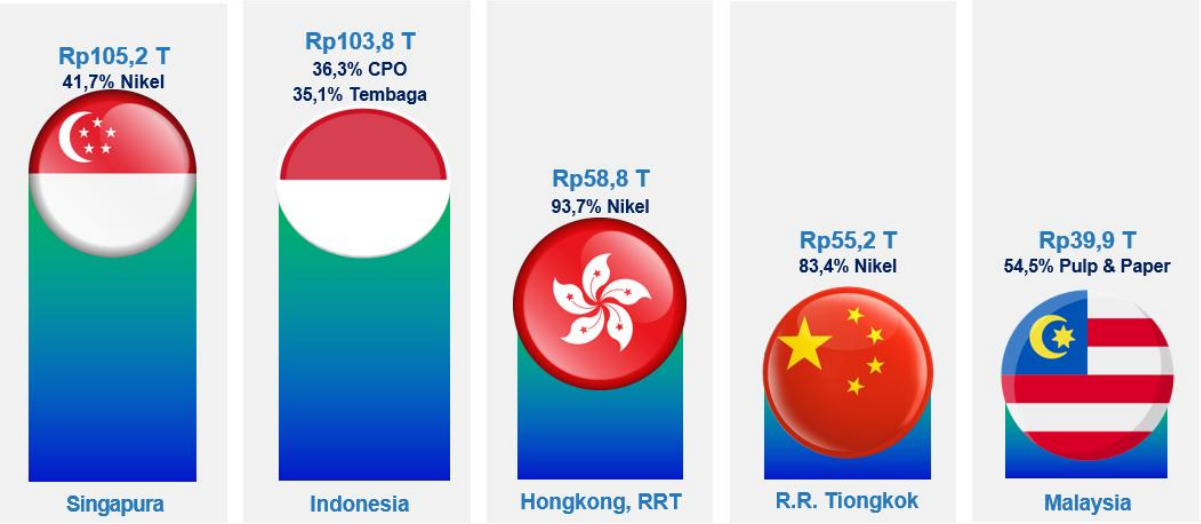

Gambar 3.16.
Lima Besar Negara Penanam Modal di Bidang Hilirisasi Tahun 2024

Berdasarkan nilai realisasi penanaman modal per wilayah direktorat. Direktorat wilayah I meliputi wilayah Provinsi Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, dan Lampung. Pada tahun 2024, direktorat wilayah I menargetkan nilai investasi sebesar Rp297 Miliar. Capaian nilai realisasi investasi pada di direktorat wilayah I sebesar Rp283,57 Miliar. Berikut ini merupakan target dan realisasi nilai investasi secara detail di masing-masing wilayah direktorat wilayah I.

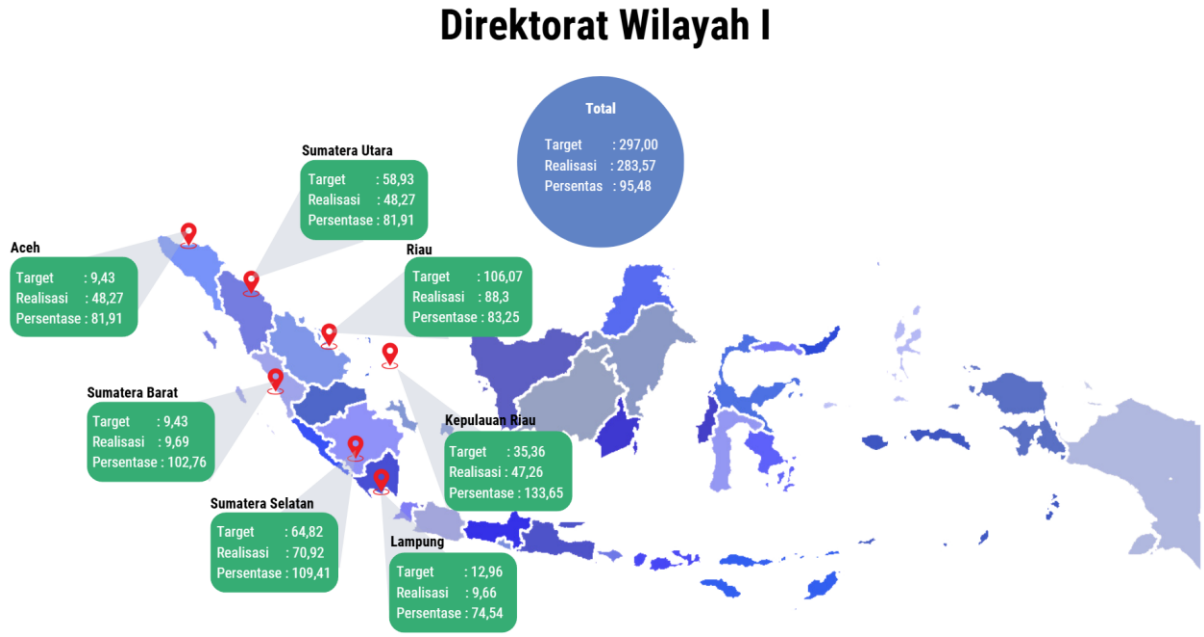

Gambar 3.17.
Peta Direktorat Wilayah I

Direktorat wilayah II meliputi Daerah Khusus Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimatan Tengah, Kalimatan Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jambi. Pada tahun 2024, direktorat wilayah II menargetkan nilai investasi sebesar Rp354,75 Miliar. Capaian nilai realisasi investasi pada di direktorat wilayah II sebesar Rp404,95 Miliar. Berikut ini merupakan target dan realisasi nilai investasi secara detail di masing-masing wilayah direktorat wilayah II.

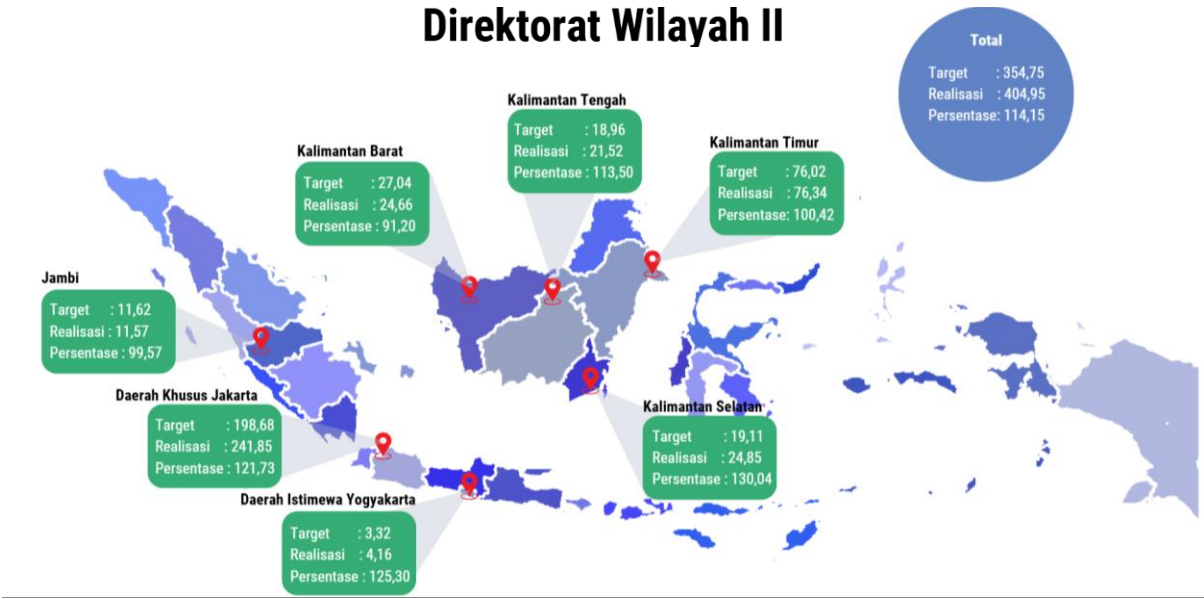

Gambar 3.18.
Peta Direktorat Wilayah II

Direktorat wilayah III meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara. Pada tahun 2024, direktorat wilayah III menargetkan nilai investasi sebesar Rp 478,50 Miliar. Capaian nilai realisasi investasi pada di direktorat wilayah III sebesar Rp 597,88 Miliar. Berikut ini merupakan target dan realisasi nilai investasi secara detail di masing-masing wilayah direktorat wilayah III.

Gambar 3.19.
Peta Direktorat Wilayah III

Direktorat wilayah IV meliputi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Pada tahun 2024, direktorat wilayah IV menargetkan nilai investasi sebesar Rp321,75 Miliar. Capaian nilai realisasi investasi pada di direktorat wilayah IV sebesar Rp345,66 Miliar. Berikut ini merupakan target dan realisasi nilai investasi secara detail di masing-masing wilayah direktorat wilayah IV.

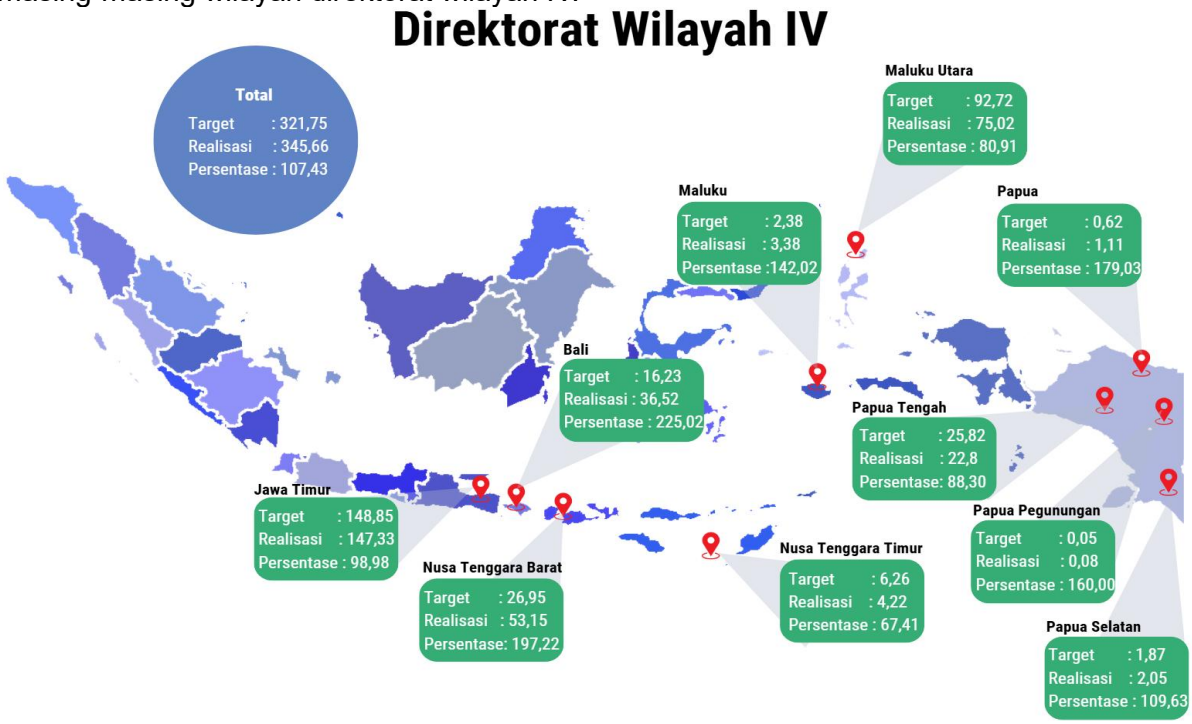

Gambar 3.20.
Peta Direktorat Wilayah IV

Direktorat wilayah V meliputi Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, Gorontalo, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Pada tahun 2024, direktorat wilayah V menargetkan nilai investasi sebesar Rp 198,00 Miliar. Capaian nilai realisasi investasi pada di direktorat wilayah IV sebesar Rp 82,19 Miliar. Berikut ini merupakan target dan realisasi nilai investasi secara detail di masing-masing wilayah direktorat wilayah V.

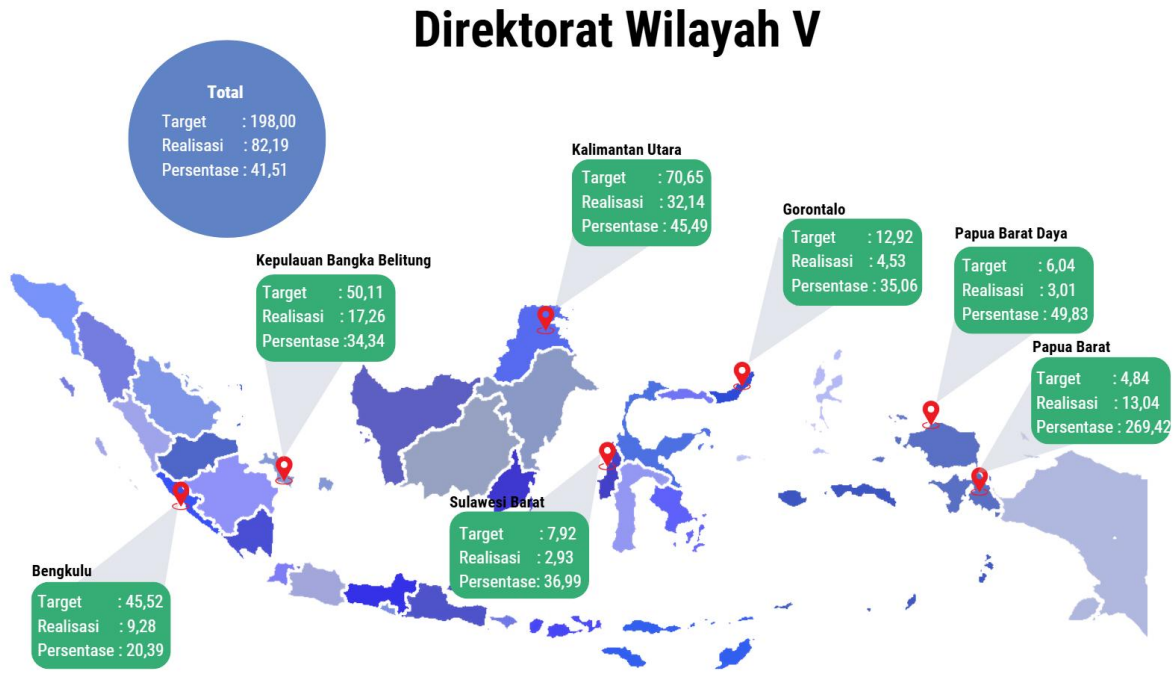

Gambar 3.21.
Peta Direktorat Wilayah V

Perkembangan penyerapan tenaga kerja Indonesia meningkat secara signifikan pada periode 2020-2024. Pada tahun 2020 penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 1.156.361, kemudian meningkat menjadi 1.207.893 pada tahun 2021. Peningkatan penyerapan tenaga kerja terus terjadi pada tahun 2022 sebanyak 1.305.001 dan tahun 2023 sebanyak 1.823.543. Pada tahun 2024 Peningkatan penyerapan tenaga kerja Indonesia mencapai nilai tertinggi sebanyak 2.456.130. Berikut merupakan perkembangan penyerapan tenaga kerja Indonesia pada periode tahun 2020-2024:

Gambar 3.22.
Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia tahun 2020–2024

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus berupaya dalam meningkatkan nilai realisasi penanaman modal. Pada tahun 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mengadakan *Regional Investment Forum* (RIF) sebanyak 3 (tiga) kali. Pada RIF pertama yang diadakan di Batam pada bulan Juli 2024, tema yang diangkat adalah "Pengembangan Industri Elektronik dalam Rangka Mendukung Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai". Forum ini menjadi wadah untuk memperkuat kerja sama antar *stakeholder* serta optimalisasi berbagai inovasi dalam upaya peningkatan nilai realisasi investasi di masing-masing wilayah di Indonesia.

Gambar 3.23.
Regional Investment Forum pada bulan Juli 2024 di Batam

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga menyelenggarakan rapat koordinasi nasional investasi tahun 2024 dengan tema "Akselerasi Hilirisasi Investasi Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045". Kegiatan ini merupakan upaya untuk memperkuat sinergi antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota. Rapat koordinasi nasional ini juga bertujuan untuk memberikan kesamaan komitmen, visi, arah kebijakan, dan strategi peningkatan nilai realisasi investasi ke depannya.

Gambar 3.24.
Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2024

Keberhasilan dalam mencapai target realisasi penanaman modal yang telah ditetapkan dalam Renstra, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah melakukan pemantauan terhadap berbagai proyek investasi PMDN/PMA di seluruh Indonesia. Hal ini diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko, yang menyebutkan bahwa kegiatan pemantauan dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi data realisasi penanaman modal yang tercantum dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh perusahaan kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM. Pada Triwulan II Tahun 2023, pelaporan LKPM secara resmi dapat dilakukan melalui sistem oss.go.id dengan menggunakan *Single Sign On* (SSO). Pelaporan LKPM dilakukan secara berkala setiap triwulan, yakni Triwulan I (Januari-Maret), Triwulan II (April-Juni), Triwulan III (Juli-September), dan Triwulan IV (Oktober-Desember), baik untuk perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi (pembangunan) maupun yang telah memulai kegiatan produksi/operasi.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga terus berupaya meningkatkan nilai realisasi penanaman modal melalui pelaksanaan kegiatan promosi *Indonesia Investment Forum* (IIF) di London, Inggris. Forum ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan *country branding*/citra bangsa Indonesia sebagai negara destinasi investasi dengan memperkenalkan berbagai potensi investasi yang ada di Indonesia. Forum ini juga sebagai platform dalam membangun jaringan internasional dalam menarik investasi khususnya dari wilayah Inggris dan negara Eropa lainnya masuk ke Indonesia.

Gambar 3.25.
Indonesia Investment Forum

Pada tahun 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menghadapi berbagai hambatan dalam mencapai target kinerja nilai realisasi penanaman modal, baik untuk Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) antara lain:

1) Ketegangan geopolitik, perang dagang, dan ketidakstabilan harga komoditas di pasar global dapat menurunkan tingkat kepercayaan investor. Hal ini berdampak pada menurunnya minat investor asing dan domestik untuk menanamkan modal di Indonesia, yang menghambat pencapaian target penanaman modal.
2) Perubahan dalam kondisi ekonomi global, seperti fluktuasi ekonomi dunia, dapat menyebabkan ketidakpastian dalam keputusan investasi. Kondisi ini membuat investor menjadi lebih berhati-hati dan cenderung menunda atau membatalkan rencana investasi mereka di Indonesia.
3) Meskipun Indonesia telah memperkenalkan sistem perizinan berbasis risiko melalui *Online Single Submission* (OSS) untuk mempermudah proses perizinan, terdapat kendala dalam implementasinya di tingkat daerah. Kurangnya pemahaman atau dukungan dari pemerintah daerah dalam menjalankan sistem ini seringkali menjadi penghambat dalam mempercepat proses perizinan dan realisasi investasi.
4) Indonesia masih sangat bergantung pada sektor pertambangan dan energi sebagai sumber utama penanaman modal. Ketergantungan ini menjadi tantangan karena fluktuasi harga komoditas global dan perubahan kebijakan lingkungan dapat berdampak langsung pada sektor-sektor ini, mengakibatkan penurunan investasi di bidang tersebut.
5) Penurunan harga komoditas global dapat menyebabkan turunnya daya tarik sektor pertambangan dan energi sebagai pilihan investasi. Ketika harga komoditas seperti batu bara, minyak, atau gas turun, investor menjadi lebih berhati-hati dan cenderung mengurangi atau menghentikan rencana investasi mereka, yang berdampak pada perekonomian Indonesia.
6) Sektor-sektor lain, seperti manufaktur dan teknologi, memang mulai berkembang di Indonesia. Namun, proses hilirisasi dan diversifikasi industri yang lebih kompleks memerlukan waktu yang lebih lama dan upaya yang lebih besar. Selain itu, sektor-sektor ini membutuhkan inovasi dan pengembangan yang berkelanjutan untuk dapat bersaing di pasar internasional, sehingga proses tersebut lebih lambat dibandingkan sektor-sektor yang lebih tradisional seperti pertambangan dan energi.

Untuk mengatasi hambatan atau kendala dalam mencapai target kinerja nilai realisasi penanaman modal pada tahun 2024, baik untuk Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah melakukan berbagai upaya strategis yang mencakup aspek birokrasi, infrastruktur, sumber daya manusia, serta kebijakan terkait investasi, di antaranya:

1) Untuk mengatasi ketidakpastian global, pemerintah Indonesia berfokus pada diversifikasi sektor investasi dengan memperkenalkan insentif yang lebih menarik. Hal ini bertujuan untuk menarik minat investor dengan menawarkan peluang di sektor-sektor yang lebih tahan terhadap fluktuasi ekonomi global, seperti sektor manufaktur berbasis teknologi, energi terbarukan, dan industri yang mendukung keberlanjutan.
2) Pemerintah melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus melakukan promosi investasi baik di dalam negeri maupun luar negeri. Upaya ini dilakukan kegiatan dengan mengundang investor untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek strategis serta sektor-sektor proritas yang ada di Indonesia, khususnya yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Proyek tersebut difokuskan pada sektor-sektor yang lebih *resilient* terhadap ketidakstabilan ekonomi global.
3) Untuk meminimalkan dampak ketidakpastian global, pemerintah Indonesia berusaha menjaga stabilitas ekonomi domestik. Upaya tersebut termasuk menjaga inflasi tetap terkendali serta memastikan pasokan energi yang stabil, agar para investor merasa lebih aman dan yakin untuk menanamkan modal mereka di Indonesia.
4) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga bekerja untuk mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu, seperti pertambangan dan energi. Salah satu langkah strategisnya adalah mendorong hilirisasi industri dan mempercepat diversifikasi sektor-sektor yang lebih tahan terhadap fluktuasi global. Ini termasuk pengembangan sektor industri kreatif, teknologi digital, dan ekonomi hijau.

5) Sebagai bagian dari strategi diversifikasi, pemerintah Indonesia memperkenalkan kebijakan yang mendukung pengembangan sektor-sektor baru dengan memberikan insentif fiskal yang menarik, seperti pembebasan atau pengurangan pajak. Kebijakan ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi domestik dan asing yang akan memberikan nilai tambah lebih besar bagi perekonomian Indonesia, khususnya di sektor yang lebih berkelanjutan.

Adapun rencana tindak lanjut ke depan dalam mencapai target nilai realisasi penanaman modal baik PMA maupun PMDN, berfokus pada penguatan dan pengembangan berbagai aspek yang telah diterapkan serta penyesuaian terhadap dinamika yang terjadi, melalui:

1) Percepatan penyempurnaan dan ekspansi sistem OSS. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses perizinan menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah yang masih menghadapi tantangan dalam hal implementasi. Pemerintah juga berencana untuk meningkatkan pelatihan dan dukungan kepada pemerintah daerah agar mereka dapat lebih memahami dan memanfaatkan sistem OSS untuk meminimalkan kendala birokrasi.
2) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan meningkatkan upaya promosi dan diplomasi investasi, di antaranya melalui penyelenggaraan forum bisnis internasional, pemasaran terfokusi dan pertemuan tertutup (*one-on-one meeting*) yang bertujuan untuk mendorong *country branding* dan memperkenalkan peluang-peluang investasi di sektor-sektor strategis. Sektor-sektor yang menjadi fokus utama antara lain hilirisasi, energi terbarukan, industri semikonduktor, ekonomi digital dan data center, kesehatan, pendidikan dan vokasi, manufaktur berorientasi ekspor, IKN dan ketahanan pangan. Langkah ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investor asing ke Indonesia.
3) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM akan memperkuat kemitraan dengan berbagai negara, dengan memfokuskan upaya pada negara-negara yang memiliki potensi besar untuk berinvestasi di Indonesia. Fokus ini mencakup negara-negara dari kawasan Asia, Timur Tengah, dan Eropa, untuk memperluas jaringan investor dan meningkatkan peluang investasi di Indonesia.
4) Kampanye untuk menarik Penanaman Modal Asing (PMA) akan dilakukan secara lebih terarah dengan memfokuskan pada sektor-sektor yang tahan terhadap gejolak ekonomi global. Fokus utama adalah sektor-sektor yang dapat memberikan nilai tambah signifikan bagi perekonomian domestik, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kontribusi investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

IKU-2: Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder

Nilai realisasi penanaman modal sekunder adalah nilai yang diperoleh dari seluruh kegiatan penanaman modal di sektor sekunder, baik yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, dengan pengecualian sektor migas, perbankan, lembaga keuangan non-bank, asuransi, sewa guna usaha, industri rumah tangga, serta usaha mikro dan usaha kecil. Penanaman modal sektor sekunder meliputi:

1. Industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya
2. Industri makanan
3. Industri kimia dan farmasi
4. Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain
5. Industri kertas dan percetakan
6. Industri mesin, elektronik, instrumen kedokteran, peralatan listrik, presisi, optik dan jam
7. Industri tekstil
8. Industri karet dan plastik
9. Industri mineral non logam
10. Industri barang dari kulit dan alas kaki
11. Industri kayu
12. Industri lainnya

Tabel 3.7.
Capaian Indikator Kinerja Utama 2 (IKU-2) Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder

Sasaran Strategis 1 (SS-1) Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal														
Indikator Kinerja Utama 2 (IKU-2) Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder (Rp Triliun)														
2020		2021		2022		2023		2024		Capaian Kinerja 2024 (%)	Pertumbuhan Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Rata-rata Realisasi Kinerja Tahun 2020 - 2024	Rata-rata Pertumbuhan Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2024 (%)	Kategori Capaian Kinerja Tahun 2024
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R					
227,2	272,9	268,7	325,4	352,5	497,7	483,9	596,3	646,1	721,3	111,64	20,96	482,72	28,24	▲Sangat Baik

Dalam rangka mendukung sasaran strategis untuk meningkatkan realisasi penanaman modal, salah satu fokus utama adalah sektor sekunder. Selama lima tahun terakhir, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah berhasil mencapai hasil yang mengesankan dalam hal realisasi penanaman modal sektor sekunder. Pada tahun 2020, target penanaman modal sektor sekunder ditetapkan sebesar Rp227,2 triliun, dan realisasi yang tercapai adalah Rp272,9 triliun, dengan pencapaian 120,2 persen dari target. Pencapaian ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada sektor sekunder, yang sangat mendukung perekonomian Indonesia.

Pada tahun 2021, target untuk sektor sekunder meningkat menjadi Rp268,7 triliun, dengan realisasi yang mencapai Rp325,4 triliun, mencatatkan pencapaian 121,1 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sektor sekunder terus berkembang dan menarik investasi yang lebih besar. Kemudian, pada tahun 2022, target untuk sektor ini ditetapkan sebesar Rp352,5 triliun, dan realisasi mencapai Rp497,7 triliun, dengan persentase pencapaian 141,2 persen, yang lebih dari sekadar memenuhi target yang ditetapkan. Di tahun 2023, dengan target Rp483,9 triliun, sektor sekunder berhasil meraih realisasi sebesar Rp596,3 triliun, mencapai 123,3 persen dari target.

Pada tahun 2024, target penanaman modal sektor sekunder ditetapkan sebesar Rp646,1 triliun, dan realisasi yang tercapai adalah Rp721,3 triliun, yang menunjukkan pencapaian sebesar 111,64 persen dari target. Dengan ini, sektor sekunder terus mencatatkan pertumbuhan yang signifikan, dengan pertumbuhan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 20,96 persen. Rata-rata realisasi kinerja penanaman modal sektor sekunder dalam periode 2020-2024 tercatat sebesar 482,72 triliun, sementara rata-rata pertumbuhannya mencapai 28,24 persen. Kategori pencapaian kinerja pada sektor sekunder ini dapat dikategorikan sebagai Sangat Baik, yang menunjukkan hasil luar biasa dalam mengembangkan penanaman modal sektor sekunder Indonesia.

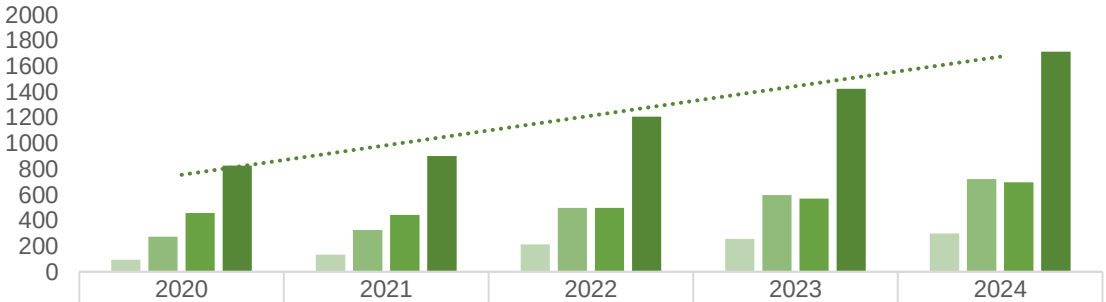

	2020	2021	2022	2023	2024
Primer	94,8	133,3	212,6	256,8	297,4
Sekunder	272,9	325,4	497,7	596,3	721,3
Tersier	458,6	442,3	496,9	570,0	695,6
Total	826,30	901,00	1.207,20	1.423,10	1.714,30

Gambar 3.26.
Perkembangan Realisasi Investasi
Berdasarkan Sektor Primer, Sekunder dan Tersier Tahun 2020-2024

Realisasi investasi Indonesia selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan di setiap sektor perekonomian. Investasi dibagi menjadi tiga sektor utama, yaitu sektor primer, sekunder, dan tersier, yang masing-masing menunjukkan kontribusi penting terhadap total investasi nasional. Investasi sektor primer mengalami peningkatan stabil dari Rp94,8 triliun pada 2020 menjadi Rp297,4 triliun pada 2024. Kenaikan terbesar terjadi pada 2022 dan 2023, mencerminkan penguatan di sektor ini. Sektor sekunder menunjukkan pertumbuhan pesat, dari Rp272,9 triliun pada 2020 menjadi Rp721,3 triliun pada 2024. Sektor ini menjadi pendorong utama pertumbuhan investasi, dengan kenaikan signifikan setiap tahun. Sementara itu pada sektor tersier, meskipun sempat menurun pada 2021 menjadi Rp442,3 triliun, namun demikian terus tumbuh dengan stabil hingga mencapai Rp695,6 triliun pada 2024. Secara keseluruhan, investasi di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup merata di ketiga sektor. Sektor sekunder dan tersier menjadi pendorong utama dalam meningkatkan total investasi, sementara sektor primer juga menunjukkan kontribusi yang terus berkembang.

Pada tahun 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah melaksanakan berbagai upaya strategis untuk mencapai target kinerja Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder. Salah satu langkah utama adalah fokus pada sektor hilirisasi, yang pada Triwulan III 2024 menyumbang Rp91,51 triliun atau 21,2 persen dari total realisasi investasi triwulan tersebut. Kontribusi ini tidak hanya memenuhi 26,15 persen dari target investasi tahun 2024, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi 650.172 tenaga kerja Indonesia. Selain itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berupaya meningkatkan realisasi investasi sektor sekunder dengan menyederhanakan prosedur perizinan dan mempercepat proses perizinan untuk menarik lebih banyak investor ke sektor manufaktur dan industri pengolahan. Implementasi sistem perizinan berbasis risiko dan digitalisasi proses perizinan menjadi bagian dari upaya ini.

Perkembangan Realisasi Investasi Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier mengalami fluktuasi pada periode tahun 2020-2024. Sektor tersier merupakan sektor dengan nilai realisasi tertinggi sepanjang periode tahun 2020-2024, dan sektor sekunder menjadi sektor dengan nilai realisasi kedua tertinggi pada periode tahun 20-2024. Berikut ini merupakan perkembangan realisasi investasi 2020-2024 berdasarkan sektor primer, sekunder, dan tersier:

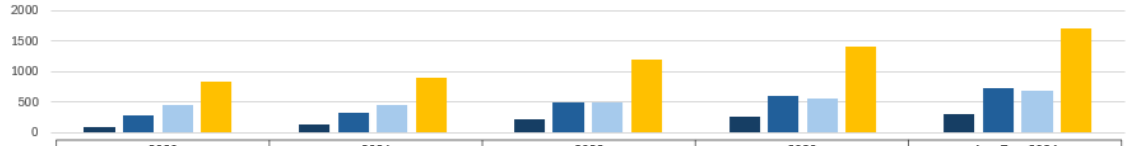

	2020		2021		2022		2023		Jan-Des 2024	
	I	%	I	%	I	%	I	%	I	%
Primer	94,8	11,5	133,2	14,8	212,6	17,6	255,5	18,0	297,4	17,3
Sekunder	272,9	33,0	325,4	36,1	497,7	41,2	596,3	42,0	721,3	42,1
Tersier	458,6	55,5	442,4	49,1	496,9	41,2	567,1	40,0	695,5	40,6
Total	826,3	100,0	901	100,0	1207,2	100,0	1418,9	100,0	1714,2	100,0

PMDN	2020		2021		2022		2023		Jan-Des 2024	
	I	%	I	%	I	%	I	%	I	%
Primer	47,6	11,5	62,8	14	111,2	20,1	155,1	23,0	187,6	23,0
Sekunder	82,8	20	94,7	21,2	143,6	26	171,7	25,4	194,3	23,9
Tersier	283,1	68,5	289,6	64,8	298	53,9	348,1	51,6	432,1	53,1
Total	413,5	100	447,1	100	552,8	100	674,9	100,0	814	100,0

PMA	2020		2021		2022		2023		Jan-Des 2024	
	I	%	I	%	I	%	I	%	I	%
Primer	47,2	11,4	70,5	15,5	101,4	15,5	100,4	13,5	109,8	12,2
Sekunder	190,1	46,1	230,7	50,8	354,1	54,1	424,6	57,1	527,0	58,5
Tersier	175,5	42,5	152,8	33,7	198,9	30,4	219,0	29,4	263,5	29,3
Total	412,8	100	454	100	654,4	100	744,0	100,0	900,2	100,0

Gambar 3.27.
Perkembangan Realisasi Investasi
Berdasarkan Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier Tahun 2020-2024

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga aktif melakukan promosi investasi melalui berbagai forum internasional, pemasaran terfokus dan pertemuan tertutup (*one-on-one meeting*) untuk menarik investor asing ke sektor sekunder Indonesia. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan aliran investasi asing langsung (FDI) ke sektor manufaktur dan industri pengolahan.

Gambar 3.28.
Pembangunan Industri Petrokimia di Cilegon

PT LCI merupakan salah satu proyek investasi yang berhasil difasilitasi pemerintah pasca pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM berupaya untuk membangun industri petrokimia di Cilegon dengan nilai investasi 59 Triliun. Hal ini memberikan dukungan terhadap realisasi penanaman modal sektor sekunder industri kimia.

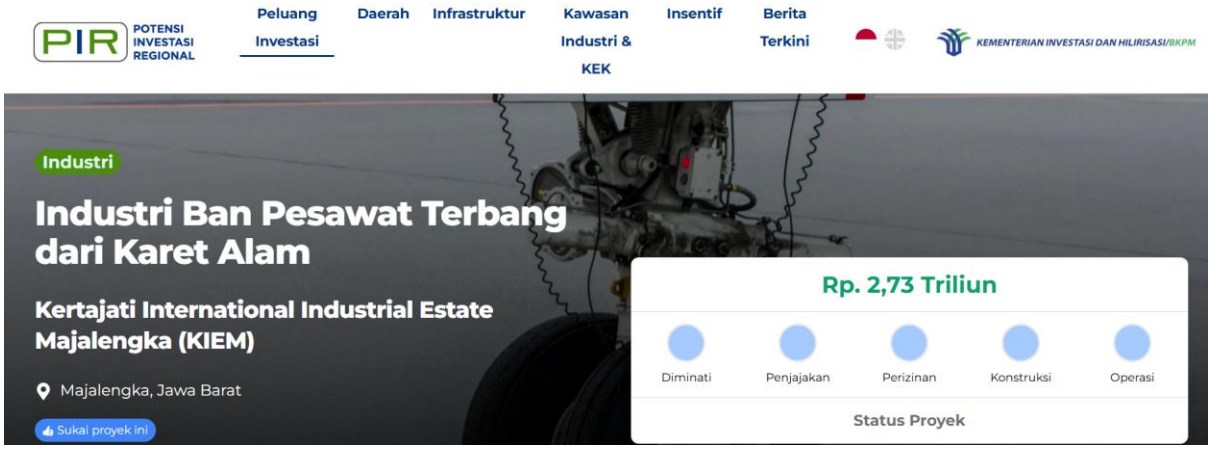

Gambar 3.29.
Penawaran Potensi Terkait Industri Ban Pesawat Terbang dari Karet Alam di Laman Resmi PIR Kementerian Investasi Dan Hilirisasi/BKPM

Industri ban pesawat terbang dari karet alam akan berlokasi di Kertajati International Industrial Estate Majalengka (KIEM). KIEM berada di wilayah Segitiga Rebana yang diarahkan menjadi lokasi spesialisasi industri penerbangan. Kawasan ini didukung oleh fasilitas berupa air baku, listrik, gas alam, pengolahan limbah serta konektivitas Jalan Tol Trans-Jawa, Bandara Internasional Kertajati dan Pelabuhan Patimban. Untuk mendukung industri ini, PT Perkebunan Nusantara siap memasok karet alam berjenis *Ribbed Smoked Sheet* (RSS) yang merupakan bahan baku utama. Potensi bahan baku, kawasan, dan kebijakan pemerintah akan mendukung berdirinya industri pionir ban pesawat terbang di Indonesia.

Ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam mencapai target kinerja Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder pada tahun 2024, yaitu:

1. Infrastruktur yang masih kurang, terutama di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang, menjadi salah satu hambatan utama. Meskipun pemerintah telah berusaha membangun kawasan industri dan memperbaiki fasilitas pendukung, beberapa wilayah masih membutuhkan perbaikan lebih lanjut agar dapat menarik lebih banyak investor. Infrastruktur yang lebih baik akan meningkatkan daya tarik investasi di sektor sekunder.
2. Meskipun ada upaya untuk menyederhanakan prosedur perizinan, hambatan birokrasi yang masih ada tetap menjadi masalah. Sistem perizinan berbasis risiko dan digitalisasi sudah diterapkan, namun proses yang masih kompleks dan kurang efisiennya koordinasi antar lembaga dapat memperlambat realisasi investasi, yang pada gilirannya mempengaruhi target kinerja sektor sekunder.
3. Ketidakpastian ekonomi, baik di tingkat global maupun domestik, juga mempengaruhi minat investor. Fluktuasi harga komoditas, ketegangan geopolitik, serta kebijakan perdagangan internasional dapat mengurangi rasa aman bagi investor asing. Ketidakpastian ini mempengaruhi keputusan investasi yang seharusnya dapat meningkatkan sektor sekunder di Indonesia.
4. Sektor hilirisasi memiliki potensi besar, namun masih ada tantangan dalam memastikan kesiapan teknologi, sumber daya manusia, dan kapasitas produksi untuk mendukung pengolahan bahan mentah di dalam negeri. Keterbatasan teknologi dan kesenjangan keterampilan tenaga kerja menjadi kendala dalam mengoptimalkan sektor sekunder yang dapat meningkatkan nilai tambah perekonomian.
5. Ketergantungan Indonesia pada impor teknologi atau bahan baku tertentu juga menghambat pengembangan sektor sekunder. Ketergantungan ini membuat sektor hilirisasi lebih rentan terhadap perubahan harga global dan meningkatkan biaya produksi. Pengembangan kapasitas dalam negeri sangat dibutuhkan untuk mengurangi ketergantungan ini dan mendukung pengolahan bahan mentah yang lebih efektif di Indonesia.

Pada tahun 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang menghambat pencapaian target kinerja Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan memastikan sektor sekunder Indonesia dapat berkembang dengan baik.

1. Percepatan pembangunan kawasan industri serta memperbaiki konektivitas transportasi, khususnya di wilayah yang masih tertinggal. Dengan meningkatkan infrastruktur, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang, diharapkan dapat menarik lebih banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di sektor sekunder.
2. Melalui program pengembangan KEK, pemerintah menawarkan fasilitas dan insentif yang lebih menarik bagi investor. Program ini dirancang untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di kawasan tertentu yang dianggap strategis, yang bertujuan untuk mendongkrak sektor industri dan manufaktur dalam negeri.
3. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menyederhanakan proses perizinan dengan menerapkan sistem perizinan berbasis risiko yang lebih efisien. Selain itu,

platform perizinan digital juga diimplementasikan untuk mempersingkat waktu pengurusan izin dan mengurangi hambatan administratif yang sering kali memperlambat realisasi investasi.

4. Dalam rangka mendukung penyederhanaan birokrasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga melakukan pelatihan kepada petugas-petugas di daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada investor. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses perizinan dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem yang ada.
5. Untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan domestik, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM aktif melakukan diplomasi ekonomi dan promosi investasi di forum-forum internasional. Kerja sama dengan lembaga keuangan dan sektor swasta juga dilakukan untuk memberikan berbagai insentif dan kemudahan bagi investor, guna menjaga iklim investasi yang kondusif meskipun ada tantangan dari luar negeri.
6. Pemerintah mendukung peningkatan teknologi melalui kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga riset untuk mendorong hilirisasi yang lebih baik. Program-program pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja juga difokuskan pada sektor manufaktur dan industri pengolahan, untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi luar negeri dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri.

Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk mencapai target kinerja Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder di masa mendatang akan berfokus pada beberapa aspek utama yang telah menjadi perhatian. Rencana tindak lanjut ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem investasi yang lebih mendukung sektor sekunder, agar potensi pertumbuhannya dapat direalisasikan. Hal ini diharapkan dapat mendorong perekonomian Indonesia yang berkelanjutan melalui peningkatan nilai investasi dan produksi domestik, serta memastikan sektor sekunder terus berkembang untuk memberikan kontribusi lebih besar pada perekonomian nasional.

1. Pemerintah akan terus memperkuat pembangunan infrastruktur, khususnya dalam memperluas jaringan transportasi dan logistik untuk mendukung sektor manufaktur dan hilirisasi. Pengembangan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menjadi prioritas untuk mempercepat realisasi investasi, terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi besar namun terbatas dalam infrastruktur dan akses pasar.
2. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berencana untuk mempercepat transformasi digital dalam hal perizinan dan pelayanan kepada investor. Sistem perizinan berbasis risiko yang sudah diterapkan akan terus diperbaiki, dengan penambahan fitur digital yang mempermudah investor dalam mengakses berbagai layanan. Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat daerah juga akan dilakukan untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan dengan cara yang lebih transparan.
3. Untuk mengatasi ketidakpastian ekonomi global dan domestik, pemerintah akan meningkatkan kerjasama internasional dengan memfokuskan pada promosi investasi yang lebih intensif di pasar global. Selain itu, hubungan perdagangan dan investasi bilateral dengan negara mitra utama juga akan diperkuat. Pemerintah juga akan memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas dan insentif fiskal untuk menarik lebih banyak investasi asing langsung (FDI) ke Indonesia, khususnya di sektor manufaktur.
4. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja di sektor hilirisasi dan manufaktur akan terus dilakukan. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bersama kementerian dan lembaga terkait akan memperluas program pelatihan dan sertifikasi keterampilan di sektor-sektor kunci, seperti industri otomotif, elektronik, dan pengolahan bahan baku yang mendukung kegiatan hilirisasi. Penyuluhan tentang teknologi terbaru dan praktik terbaik dalam industri manufaktur juga akan menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia.

5. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan mengoptimalkan pemberian insentif investasi dengan penyederhanaan dan penguatan skema insentif fiskal serta perpajakan, agar lebih banyak investor tertarik untuk menanamkan modal di sektor-sektor strategis. Pemerintah juga akan memastikan bahwa regulasi yang ada tetap mendukung keberlanjutan investasi jangka panjang tanpa mengorbankan keberlanjutan sosial dan lingkungan.

IKU-3: Sebaran Penanaman Modal Berkualitas (Di Luar Jawa)

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penanaman modal yang merata dan berkualitas, termasuk di luar pulau Jawa. Sebaran penanaman modal berkualitas di luar Jawa menjadi salah satu indikator penting dalam pencapaian pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara wilayah, serta memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terpusat di daerah Jawa, melainkan juga menjangkau daerah-daerah lain yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Melalui penanaman modal yang tepat sasaran, diharapkan sektor-sektor yang potensial dapat berkembang secara optimal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator kinerja ini mencerminkan upaya Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk memastikan bahwa investasi yang masuk dapat memberikan dampak positif yang merata di seluruh wilayah Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kualitas, daya saing, dan keberlanjutan ekonomi lokal.

Tabel 3.8.
Capaian Indikator Kinerja Utama 3 (IKU-3) Sebaran Penanaman Modal Berkualitas (di luar Jawa)

Sasaran Strategis 1 (SS-1) Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal														
Indikator Kinerja Utama 3 (IKU-3) Sebaran Penanaman Modal Berkualitas (di luar Jawa) (%)														
2020		2021		2022		2023		2024		Capaian Kinerja 2024 (%)	Pertumbuhan Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Rata-rata Realisasi Kinerja Tahun 2020 - 2024 (%)	Rata-rata Pertumbuhan Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2024 (%)	Kategori Capaian Kinerja Tahun 2024
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R					
48,3	50,5	49,0	52,0	49,7	52,7	50,6	51,5	51,7	52,2	100,97	1,36	51,79	0,85	▲Sangat Baik

Sejak tahun 2020, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah fokus pada pemerataan penanaman modal di luar Pulau Jawa sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Pada tahun 2020, target sebaran penanaman modal di luar Jawa ditetapkan sebesar 48,3 persen, dan realisasi yang tercapai adalah 50,5 persen, melebihi target dengan persentase pencapaian sebesar 104,6 persen. Pencapaian ini menunjukkan komitmen Kementerian untuk memperluas penyebaran investasi ke wilayah-wilayah di luar Jawa. Pada tahun berikutnya, target ditingkatkan menjadi 49,0 persen, dan realisasi yang tercapai mencapai 52,0 persen, dengan pencapaian sebesar 106,1 persen. Tahun 2022 menunjukkan hasil yang serupa, dengan realisasi mencapai 52,7 persen dari target 49,7 persen, mencatatkan pencapaian 105,9 persen, yang menunjukkan keberhasilan dalam memperluas investasi di luar Jawa. Pada tahun 2023, meskipun target sedikit meningkat menjadi 50,6 persen, realisasi yang tercapai adalah 51,5 persen, dengan pencapaian 101,8 persen.

Pada tahun 2024, target untuk sebaran penanaman modal di luar Jawa kembali mengalami peningkatan menjadi 51,7 persen, dan realisasi yang tercapai adalah 52,2 persen, yang menunjukkan pencapaian sebesar 100,97 persen. Pencapaian ini mencerminkan upaya yang terus konsisten untuk meningkatkan proporsi investasi yang masuk ke luar Jawa, dengan pertumbuhan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 1,36 persen. Rata-rata capaian kinerja selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan nilai 51,79 persen, dengan rata-rata pertumbuhan capaian kinerja tahunannya sebesar 0,85 persen. Kategori pencapaian kinerja pada indikator ini termasuk dalam kategori **Sangat Baik**, yang menandakan keberhasilan yang signifikan dalam mendorong sebaran investasi yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, menekankan pentingnya pemerataan pembangunan dan distribusi investasi ke seluruh wilayah Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan demikian, capaian sebaran investasi di luar Pulau Jawa pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah berhasil mendorong distribusi investasi yang lebih merata ke wilayah tersebut, sejalan dengan tujuan pemerataan pembangunan nasional. Pada periode Januari-Desember Tahun 2024, realisasi investasi di Pulau Jawa mencapai Rp818,8 triliun (47,77%), sementara realisasi investasi di luar Pulau Jawa tercatat sebesar Rp895,4 triliun (52,23%). Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun 2023, realisasi investasi di luar Pulau Jawa yang sebesar Rp730,8 triliun menunjukkan peningkatan sebesar 23%. Grafik persebaran realisasi investasi di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa pada Tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

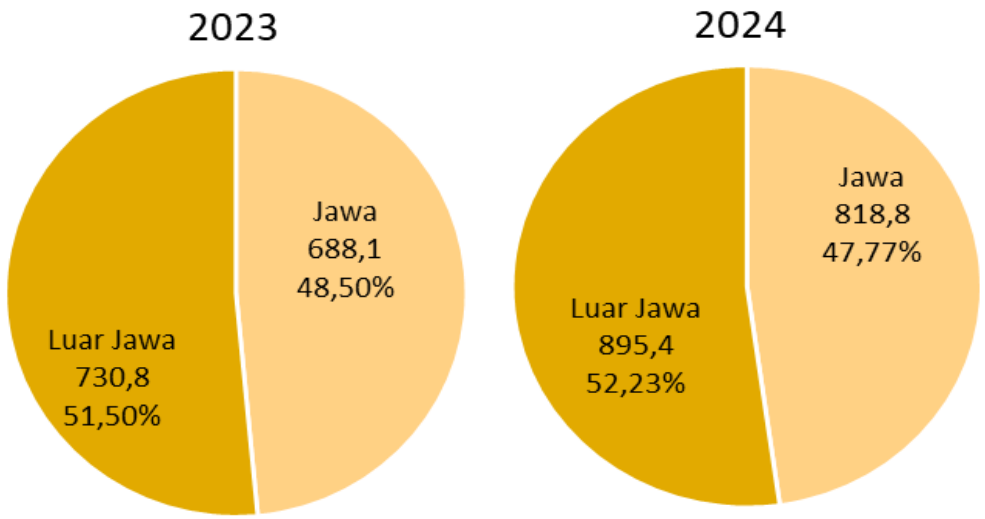

Gambar 3.30.
Persebaran Nilai Realisasi Investasi Luar Jawa dan Jawa

Pada tahun 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berfokus pada upaya yang lebih intensif untuk mencapai target kinerja Sebaran Penanaman Modal Berkualitas di luar Pulau Jawa. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah dengan mendorong pemerataan investasi ke berbagai wilayah di luar Jawa melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI). Pemerintah telah merencanakan pembangunan dan penguatan infrastruktur di luar Jawa, seperti peningkatan fasilitas transportasi, konektivitas, dan penyediaan energi yang lebih memadai untuk mendukung kegiatan industri. Ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik daerah-daerah tersebut bagi investor dan mengurangi ketimpangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa. Selain itu, untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh daerah-daerah di luar Jawa, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan perizinan dan insentif yang menarik bagi investor yang ingin menanamkan modal di luar Jawa. Penyederhanaan proses perizinan melalui sistem *online* dan berbasis risiko sejak tahun 2021 berikut dengan perkembangannya dari tahun ke tahun, juga diterapkan untuk mempercepat realisasi investasi. Salah satu inovasi dalam upaya ini adalah dengan memperkenalkan *platform* digital yang memungkinkan investor untuk mengakses informasi dan proses perizinan dengan lebih mudah, tanpa terkendala oleh jarak atau keterbatasan akses di daerah.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga terus memperkuat promosi investasi di luar Jawa dengan melibatkan pihak swasta dan komunitas internasional. Melalui kerja sama dengan investor asing dan dalam negeri, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dapat membantu menciptakan ekosistem yang lebih baik di luar Jawa, yang pada gilirannya akan

menarik lebih banyak investasi dan menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Pemerintah juga memberikan insentif fiskal untuk sektor-sektor strategis di luar Jawa, seperti energi terbarukan, agribisnis, dan industri pengolahan sumber daya alam yang ada di daerah-daerah tersebut. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berkomitmen untuk menanamkan nilai investasi berkualitas di luar Pulau Jawa. Wujud komitmen tersebut terdapat dalam laman resmi Potensi Investasi Regional (PIR) sebagai berikut:

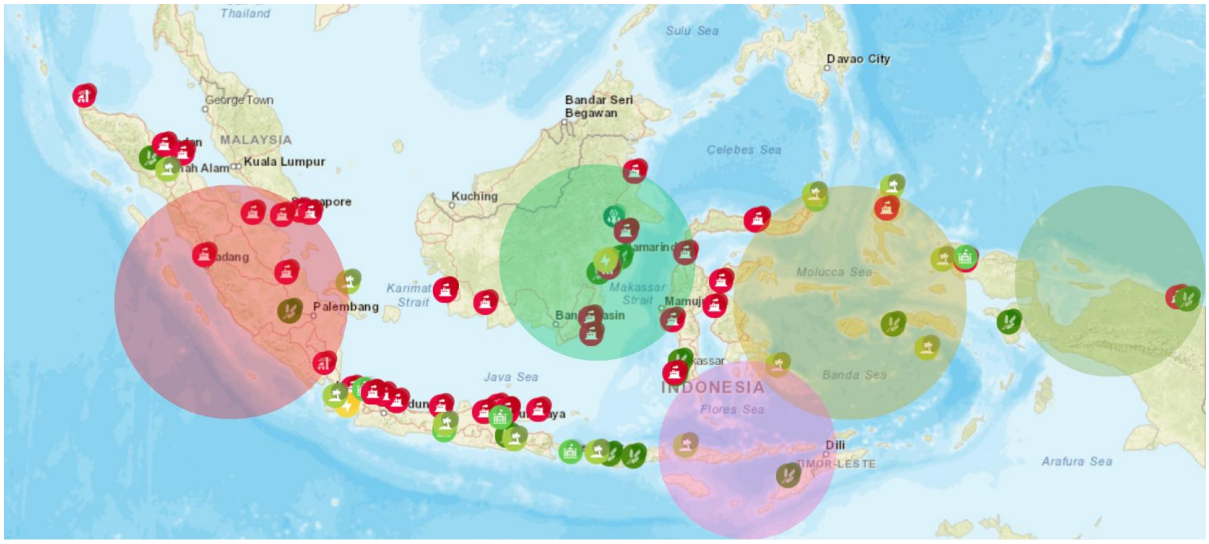

Gambar 3.31.
Sebaran Peluang Investasi di luar Pulau Jawa dalam laman resmi PIR
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

MICE 2024 merupakan ajang tahunan pameran kopi terbesar di wilayah Asia Pasifik yang diikuti oleh pelaku industri kopi dan komunitasnya. Tahun 2024 diikuti oleh lebih dari 15.000 barista atau profesional di industri kopi untuk mengadu kecakapan dalam mengolah kopi. Dalam kesempatan tersebut Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mendorong hilirisasi kopi Papua.

Gambar 3.32.
Hilirisasi Kopi Papua 2024

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menyelenggarakan *Regional Investment Forum* (RIF) kedua di Makassar pada bulan Agustus 2024. Acara ini bertujuan untuk mempromosikan potensi dan peluang penanaman modal di bidang kelautan dan perikanan, serta menyampaikan kebijakan-kebijakan terkini yang mendukung peningkatan iklim dan realisasi investasi.

Gambar 3.33.
Regional Investment Forum (RIF) pada bulan Agustus 2024 di Makassar

Ada beberapa hambatan yang dapat menjadi tantangan dalam pencapaian target sebaran penanaman modal berkualitas di luar Jawa pada tahun 2024 yaitu:

1. Keterbatasan infrastruktur di luar Jawa seperti jalan, pelabuhan, dan bandara. Keterbatasan ini menghambat kelancaran distribusi barang dan tenaga kerja, yang pada gilirannya mengurangi daya tarik bagi investor yang fokus pada efisiensi logistik. Konektivitas yang buruk juga mempengaruhi kemampuan daerah untuk mendukung kegiatan industri secara optimal.
2. Meskipun kebijakan nasional untuk menyederhanakan perizinan sudah diterapkan, hambatan birokrasi lokal sering kali menjadi kendala. Beberapa daerah masih mengalami kesenjangan antara kebijakan yang diterapkan di tingkat nasional dan pelaksanaannya di tingkat daerah. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan administratif bagi para investor, yang dapat memperlambat realisasi investasi dan membuat investor ragu untuk berinvestasi di daerah-daerah tersebut.
3. Tantangan lainnya adalah ketidakmerataan kualitas sumber daya manusia (SDM) di luar Jawa. Banyak daerah yang masih kekurangan tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan industri. Meskipun ada program pelatihan dan peningkatan keterampilan, kekurangan tenaga kerja yang kompeten dapat menjadi hambatan besar, karena investor khawatir akan kesulitan dalam mencari tenaga kerja yang berkualitas. Ketergantungan pada tenaga kerja luar daerah juga berpotensi menambah biaya transportasi dan relokasi, yang bisa mempengaruhi keputusan investasi.
4. Meskipun pemerintah memberikan berbagai insentif fiskal untuk menarik investasi, pengelolaan dan transparansi anggaran di beberapa daerah masih menjadi tantangan. Jika dana yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan program lainnya tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menghambat kemajuan investasi.

Ketidaktransparanan dalam pengelolaan anggaran juga dapat menurunkan efektivitas kebijakan yang ada, serta memengaruhi kepercayaan investor.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mencapai target sebaran penanaman modal berkualitas di luar Jawa pada tahun 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah melaksanakan berbagai langkah strategis, antara lain:

1. Untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM bersama dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya yang berhubungan dengan transportasi dan logistik. Pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan bandara di daerah luar Jawa direncanakan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah. Hal ini diharapkan dapat mempermudah distribusi barang dan mobilitas tenaga kerja, yang akan meningkatkan daya tarik investasi.
2. Dalam rangka mengatasi masalah birokrasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM telah menerapkan sistem perizinan berbasis risiko yang lebih sederhana dan cepat. Platform perizinan digital yang memudahkan investor untuk mengakses informasi serta mengajukan izin telah diperkenalkan. Selain itu, pelatihan dan pemberian panduan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dalam menerapkan kebijakan investasi secara efisien diharapkan dapat mempercepat pelayanan kepada investor dan mengurangi hambatan administratif.
3. Pemerintah juga fokus pada peningkatan kualitas SDM dengan memperluas dan memperdalam program pelatihan keterampilan di sektor-sektor industri yang memiliki potensi besar di luar Jawa, terutama sektor manufaktur dan hilirisasi. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk memastikan tenaga kerja lokal siap menghadapi tuntutan pasar. Program pelatihan ini meliputi peningkatan keterampilan teknis dan *soft skills,* yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja dan menarik lebih banyak investor.
4. Pemerintah terus memberikan insentif fiskal dan kemudahan bagi sektor-sektor yang diprioritaskan, seperti energi terbarukan, agribisnis, dan pengolahan sumber daya alam. Insentif tersebut meliputi pembebasan atau pengurangan pajak untuk investor yang berinvestasi di luar Jawa, serta pemberian fasilitas seperti *tax holiday* dan *tax allowance.* Program ini bertujuan untuk mempercepat pengembalian modal bagi investor, mendorong investasi asing dan domestik, serta menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Rencana tindak lanjut Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk mencapai target sebaran penanaman modal berkualitas di luar Jawa pada tahun-tahun mendatang akan berfokus pada beberapa area kunci untuk mengatasi hambatan yang masih ada dan mempercepat pencapaian tujuan tersebut.

1. Pembangunan infrastruktur terutama dalam hal transportasi dan akses logistik di luar Jawa. Pembangunan jalur transportasi yang menghubungkan pusat-pusat ekonomi daerah dengan pasar global menjadi prioritas utama. Selain itu, penyediaan energi yang memadai juga akan diperhatikan untuk mendukung pertumbuhan industri.
2. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas sistem perizinan digital di seluruh wilayah Indonesia. Dengan perbaikan ini, proses perizinan akan lebih cepat, transparan, dan efisien.
3. Untuk memastikan kebijakan investasi diterapkan secara konsisten, pemerintah akan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Langkah ini akan meningkatkan konsistensi dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan investasi.
4. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan memperluas dan memperdalam program-program pelatihan keterampilan di sektor-sektor yang berkembang pesat di luar Jawa, seperti pengolahan sumber daya alam, energi terbarukan, dan manufaktur.
5. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan berkolaborasi dengan lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi untuk memastikan bahwa kurikulum pendidikan

sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga tenaga kerja lokal siap dengan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar.

6. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mendukung skema insentif fiskal yang lebih menarik, seperti pembebasan atau pengurangan pajak, untuk mempercepat realisasi investasi di luar Jawa.

IKU-4: Kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Termasuk UMKM

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berkomitmen untuk memperkuat perekonomian nasional melalui peningkatan kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang juga mencakup sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). PMDN, sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia, memiliki peran vital dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing produk lokal, serta mempercepat pemerataan ekonomi. Di sisi lain, UMKM merupakan sektor yang sangat penting dalam menjaga ketahanan ekonomi domestik, mengingat kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat. Indikator kinerja ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana penanaman modal dalam negeri, baik dari sektor besar maupun UMKM, dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan penciptaan peluang usaha yang inklusif. Melalui upaya ini, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berupaya memastikan bahwa sektor ekonomi domestik semakin tumbuh dan berkembang dengan mandiri, serta mampu berdaya saing di kancah global.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

1. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
3. Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Tabel 3.9.
Capaian Indikator Kinerja Utama 4 (IKU-4) Kontribusi Investasi PMDN termasuk UMKM

Sasaran Strategis 1 (SS-1) Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal														
Indikator Kinerja Utama 4 (IKU-4) Kontribusi Investasi PMDN termasuk UMKM (%)														
2020		2021		2022		2023		2024		Capaian Kinerja 2024 (%)	Pertumbuhan Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Rata-rata Realisasi Kinerja Tahun 2020 -2024 (%)	Rata-rata Pertumbuhan Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2024 (%)	Kategori Capaian Kinerja Tahun 2024
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R					
48,8	50,1	49,7	49,6	50,3	45,8	51,9	47,6	53,1	47,5	89,45	-0,21	48,12	-1,23	▲Baik

Indikator Kinerja Utama keempat ini berfokus pada kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang mencakup sektor UMKM, dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik melalui partisipasi sektor swasta dalam negeri. Pada tahun 2020, target kontribusi PMDN termasuk UMKM ditetapkan sebesar 48,8 persen, dan realisasi yang tercapai adalah 50,1 persen, melebihi target yang telah ditetapkan, dengan pencapaian sebesar 102,7 persen. Pencapaian ini menunjukkan hasil yang cukup positif dalam memperkuat peran investor dalam negeri serta sektor UMKM. Namun, pada tahun 2021, meskipun target tetap sedikit meningkat menjadi 49,7 persen, realisasi yang tercapai hanya sebesar 49,6 persen, dengan pencapaian 99,8 persen, sedikit di bawah target.

Pada tahun 2022, target untuk kontribusi PMDN termasuk UMKM kembali meningkat menjadi 50,3 persen, tetapi realisasi yang tercapai mengalami penurunan signifikan, hanya mencapai 45,8 persen, dengan pencapaian 91,1 persen. Pencapaian ini menjadi perhatian karena menunjukkan penurunan yang cukup besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, target sebesar 51,9 persen, namun realisasi yang tercapai kembali lebih rendah, hanya 47,6 persen, dengan pencapaian sebesar 91,7 persen. Hal ini menunjukkan tantangan dalam meningkatkan kontribusi PMDN dan UMKM meskipun ada upaya dan kebijakan yang mendukung.

Data realisasi investasi pada Tahun 2024 belum mencakup realisasi investasi Usaha Mikro Kecil (UMK). Adapun rencana investasi UMK pada Tahun 2024 sebesar Rp.261,9 Triliun, dengan rincian Usaha Mikro sebesar Rp.146,8 Triliun dan Usaha Kecil sebesar Rp.115,1 Triliun. Sedangkan total proyek UMK pada Tahun 2024 sebanyak 4.499.349 proyek, dengan rincian Usaha Mikro sebanyak 4.072.861 dan Usaha Kecil sebanyak 426.488 proyek. Pada tahun 2024, target kontribusi PMDN termasuk UMKM ditetapkan sebesar 53,1 persen, namun realisasi yang tercapai hanya 47,5 persen, dengan pencapaian 89,45 persen, namun bukan berarti capaian realisasi PMDN pada Tahun 2024 menurun. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan sebaran investasi perusahaan PMA di luar pulau Jawa yang melonjak cukup tinggi yang tentu saja mempengaruhi hasil dari rasio realisasi PMDN. Adapun pertumbuhan capaian kinerja tahun 2024 sebesar -0,21 persen. Rata-rata capaian kinerja selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan 48,12 persen, sedangkan rata-rata pertumbuhan capaian kinerja tahunannya adalah -1,23 persen. Meskipun pencapaian pada 2024 berada dalam kategori Baik, hal ini menunjukkan adanya tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai target yang lebih tinggi dalam tahun-tahun berikutnya.

Pada tahun 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM telah fokus pada sejumlah upaya strategis untuk mencapai target kinerja kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), termasuk yang melibatkan UMKM. Salah satu langkah utama adalah memperkuat dukungan kepada UMKM dengan memberikan kemudahan akses perizinan, pembiayaan, dan pasar. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk membantu UMKM bertransformasi menjadi lebih kompetitif, termasuk program digitalisasi yang memungkinkan UMKM mengakses pasar yang lebih luas dan meningkatkan produktivitas melalui teknologi. Melalui sistem perizinan yang lebih efisien dan berbasis risiko, serta pemberian insentif yang sesuai, UMKM dapat lebih mudah berinvestasi dan berkembang.

Selain itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM juga aktif dalam meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong peningkatan kontribusi PMDN. Dengan memperkuat hubungan dengan pihak-pihak terkait, pemerintah berusaha menciptakan ekosistem yang lebih mendukung untuk investasi domestik, termasuk pengembangan kawasan industri dan ekonomi khusus yang lebih ramah bagi pelaku usaha lokal. Untuk UMKM, pemerintah terus memperluas akses pembiayaan melalui berbagai skema kredit dan dana hibah yang disalurkan oleh lembaga keuangan seperti perbankan dan lembaga pembiayaan mikro. Program-program ini bertujuan untuk membantu UMKM memperoleh modal yang dibutuhkan untuk ekspansi dan peningkatan kapasitas produksi.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga berkomitmen untuk memberdayakan UMKM melalui penguatan kapasitas dan peran UMKM untuk mendukung sektor hilirisasi dan manufaktur. Dengan mengoptimalkan potensi pasar domestik dan mendorong UMKM bertransformasi menjadi pemasok atau bagian dari rantai pasok industri besar, diharapkan kontribusi mereka terhadap perekonomian akan semakin signifikan. Untuk mewujudkan hal tersebut, kementerian juga menjalin kerja sama dengan berbagai asosiasi dan pelaku industri besar dalam proyek-proyek strategis guna membuka peluang kolaborasi bagi UMKM sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas produk serta memperluas akses pasar.

Sebagai wujud komitmen terhadap pemberdayan UMKM, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berkolaborasi dengan Dewan Kerajinan Nasional (DEKRANAS) dan asosiasi usaha melakanakan kegiatan pemberdayaan UMKM Perempuan Mandiri melalui peningkatan kompetensi di Kota Surakarta. Forum yang dihadiri oleh 300 (tiga ratus) peserta diadakan untuk mendorong pemberdayaan pelaku UMKM perempuan agar dapat meningkatkan

kontribusi UMKM terhadap kegiatan investasi, dan perekonomian nasional diberbagai sektor khususnya sektor Kriya, serta untuk meningkatkan kompetensi dan saya saing pelaku UMKM melalui pemberian materi mengenai legalitas usaha, peluang kemitraan, dan manajemen usaha. Kegiatan ini diharapkan dapat membuka akses pemasaran dan akses permodalan dan jugamerupakan media komunikasi untuk memperluas jejaring antar pelaku usaha dan asosiasi usaha sehingga pelaku UMKM khususnya di Kota Surakarta dapat berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional.

Gambar 3.34.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Dukung Pemberdayaan UMKM Perempuan

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mendukung pelaksanaan Sulteng Expo 2024 dalam meningkatkan investasi di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Kementerian Investasi bertugas untuk menjaga iklim investasi dan rasio investasi di Indonesia dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi, kegiatan tersebut dapat mendukung peningkatan investasi di Sulawesi Tengah dan Indonesia. Dalam jangka panjang, nilai realisasi investasi yang tinggi dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 3.35.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM Dukung EXPO UMKM di Sulawesi Tengah

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bekerja sama dengan Jawa Pos Media dan Pemerintah Kota Depok akan menyelenggarakan Festival Literasi Cakap Ekonomi 2024. Acara tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal agar mereka dapat naik kelas dan menjadi pemain di tingkat nasional dan internasional. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM mengungkapkan dalam sesi *talk show* berjudul Peran Legalitas dan Tren Investasi di Sektor UMKM, bahwa pemerintah telah melakukan berbagai langkah strategis untuk menciptakan iklim investasi yang ramah bagi UMKM.

Gambar 3.36.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Fasilitasi Legalitas Sektor UMKM Melalui Festival Literasi Cakap Ekonomi 2024

Terdapat beberapa hambatan dalam pencapaian target kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk UMKM pada tahun 2024, yaitu:

1. Banyak pelaku UMKM yang kesulitan mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya jaminan yang dimiliki oleh pelaku UMKM atau persyaratan pinjaman yang sulit dipenuhi, seperti kemampuan untuk menyediakan dokumen atau agunan yang diperlukan. Kredit merupakan salah satu faktor penting untuk mengembangkan usaha, namun UMKM seringkali terhambat oleh ketatnya persyaratan tersebut.
2. Banyak UMKM yang masih mengandalkan metode tradisional dalam menjalankan operasional bisnis mereka, seperti menggunakan proses manual untuk pencatatan transaksi, pengelolaan inventaris, dan pemasaran produk. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan untuk bersaing dengan perusahaan yang lebih besar dan lebih modern yang sudah mengadopsi teknologi dan sistem manajemen yang efisien.
3. Pelaku UMKM masih memiliki keterbatasan dalam pemahaman manajemen keuangan, seperti pengelolaan arus kas, perencanaan keuangan jangka panjang, dan cara mengelola utang.
4. Banyak UMKM yang tidak dapat memasuki rantai pasok industri besar karena belum memenuhi standar kualitas atau operasional yang diharapkan oleh perusahaan-perusahaan besar.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mencapai target kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), termasuk UMKM pada tahun 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah melakukan berbagai upaya strategis, beberapa **di antaranya** yaitu:

1. Pemerintah melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memperkenalkan berbagai skema pembiayaan untuk membantu UMKM memperoleh modal kerja yang diperlukan. Program ini mencakup pembiayaan dari lembaga keuangan seperti bank

dan lembaga pembiayaan mikro, yang diharapkan dapat mempermudah akses UMKM terhadap modal untuk ekspansi dan meningkatkan kapasitas produksi mereka.
2. Pemerintah memperkenalkan berbagai program untuk mendukung digitalisasi UMKM, termasuk pelatihan keterampilan digital, penyediaan *platform e-commerce,* dan bantuan teknologi yang dapat meningkatkan daya saing UMKM. Program ini dirancang untuk membantu UMKM memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi operasional mereka di era industri 4.0.
3. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bersama lembaga terkait lainnya menyelenggarakan program pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan literasi keuangan dan manajerial di kalangan pelaku UMKM. Program ini bertujuan untuk mengedukasi pelaku UMKM dalam mengelola keuangan, membuat perencanaan bisnis yang efektif, serta memahami strategi pemasaran dan manajemen risiko.

Rencana tindak lanjut Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk mencapai target kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), termasuk UMKM, di masa depan akan berfokus pada penguatan dan perluasan berbagai program yang telah dilaksanakan, serta penanganan hambatan-hambatan yang masih ada.

1. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengintegrasikan lebih banyak lembaga keuangan mikro dan digital guna memberikan solusi pembiayaan yang lebih luas dan mudah diakses oleh UMKM, terutama di daerah-daerah terpencil. Ini bertujuan untuk mempermudah UMKM dalam mendapatkan modal usaha.
2. Pemerintah dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan terus memfasilitasi UMKM dalam transformasi digital dengan menyediakan pelatihan dan pendampingan intensif.
3. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM berencana untuk terus memperbarui dan meningkatkan kualitas sistem *Online Single Submission* (OSS), agar lebih mudah diakses dan digunakan oleh pelaku usaha di seluruh Indonesia.

Sasaran Strategis (SS-2) "Meningkatnya Kepercayaan Pelaku Usaha/Penanam Modal"

Salah satu sasaran strategis yang menjadi prioritas Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM adalah meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan penanam modal. Kepercayaan tersebut menjadi landasan utama bagi terciptanya iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan. Dalam dunia bisnis, kepercayaan merupakan faktor kunci yang dapat mendorong masuknya investasi baik dari dalam maupun luar negeri, sekaligus menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan sektor swasta. Melalui berbagai kebijakan, perbaikan regulasi, serta peningkatan transparansi dan efisiensi pelayanan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan terpercaya bagi para investor. Sasaran ini tidak hanya berfokus pada aspek pendorong investasi, tetapi juga pada upaya untuk memperkuat hubungan antara pelaku usaha dengan pemerintah, dengan harapan bahwa semakin meningkatnya kepercayaan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Dalam rangka mendukung upaya tersebut, telah ditetapkan satu Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

IKU-5: Peringkat Kemudahan Berusaha *(Ease of Doing Business)*

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dalam meningkatkan kepercayaan pelaku usaha/penanam modal, telah ditetapkan indikator yang mengacu pada peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business)*. Indikator ini didasarkan pada pemeringkatan yang dilakukan oleh Bank Dunia melalui laporan *Ease of Doing Business*. Sejak tahun 2022, pemeringkatan ini beralih mengacu pada *World Competitiveness Yearbook* yang diterbitkan oleh *Institute for Management Development* (IMD). Berikut ini rincian capaian kinerja indikator tersebut:

Tabel 3.10.
Capaian Indikator Kinerja Utama 5 (IKU-5) Peringkat Kemudahan Berusaha *(Ease of Doing Business)*

Sasaran Strategis 2 (SS-2) Meningkatnya Kepercayaan Pelaku Usaha/Penanam Modal														
Indikator Kinerja Utama 5 (IKU-5) Peringkat Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business*) (peringkat EoDB)														
2020		2021		2022		2023		2024		Capaian Kinerja 2024 (%)	Pertumbuhan Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Rata-rata Realisasi Kinerja Tahun 2020 - 2024 (%)	Rata-rata Pertumbuhan Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2024 (%)	Kategori Capaian Kinerja Tahun 2024
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi					
60	N/A*	56	N/A*	51	N/A*	45	34	40	27	120,00	20,59	30,50	-	▲Sangat Baik

Dalam *World Competitiveness Yearbook* 2024 yang diterbitkan oleh *Institute for Management Development* (IMD), Indonesia berhasil mencapai peringkat ke-27 dari 67 negara, naik tujuh peringkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di posisi ke-34. Dalam laporan tahun ini, Indonesia mengalami peningkatan pada tiga dari empat faktor utama yang dinilai. Faktor *Economic Performance* naik ke peringkat 24, meningkat lima posisi; *Government Efficiency* berada di peringkat 23, naik delapan posisi; dan *Business Efficiency* menempati peringkat 14, naik enam posisi. Indonesia hanya tertinggal dari Singapura di kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, faktor Infrastructure mengalami penurunan, dengan peringkat 52, turun satu posisi. Adapun capaian kinerja di tahun 2024 ini tumbuh sebesar 20,59 persen dari tahun sebelumnya dengan kategori Sangat Baik. Kenaikan peringkat ini memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi investasi yang kompetitif di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, peringkat yang lebih baik juga memberikan dampak positif terhadap citra Indonesia sebagai negara yang fokus dalam pembenahan efisiensi bisnis untuk ekosistem investasi para pelaku usaha.

Gambar 3.37.
World Competitiveness Yearbook

Selama periode 2020 hingga 2024, peringkat Indonesia dalam *World Competitiveness Yearbook* yang diterbitkan oleh *Institute for Management Development* (IMD) mengalami fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2020, Indonesia berada di peringkat 40, kemudian pada tahun 2021, Indonesia berhasil meningkat ke peringkat 37, mencerminkan adanya upaya yang lebih baik dalam meningkatkan daya saing global. Namun pada tahun 2022, Indonesia mengalami penurunan peringkat ke posisi 44. Hal ini menandakan adanya tantangan dalam mempertahankan posisi daya saing yang lebih tinggi. Pada tahun 2023, Indonesia kembali mencatatkan perbaikan dengan mencapai peringkat 34, kemudian di tahun 2024, Indonesia mengalami lonjakan signifikan dan mencapai peringkat 27. Pencapaian ini menunjukkan

upaya yang berhasil dalam meningkatkan daya saing negara, meskipun ada dinamika yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Secara keseluruhan, peringkat Indonesia pada *World Competitiveness Yearbook* menunjukkan tren positif dengan pencapaian yang sangat menggembirakan pada tahun 2024.

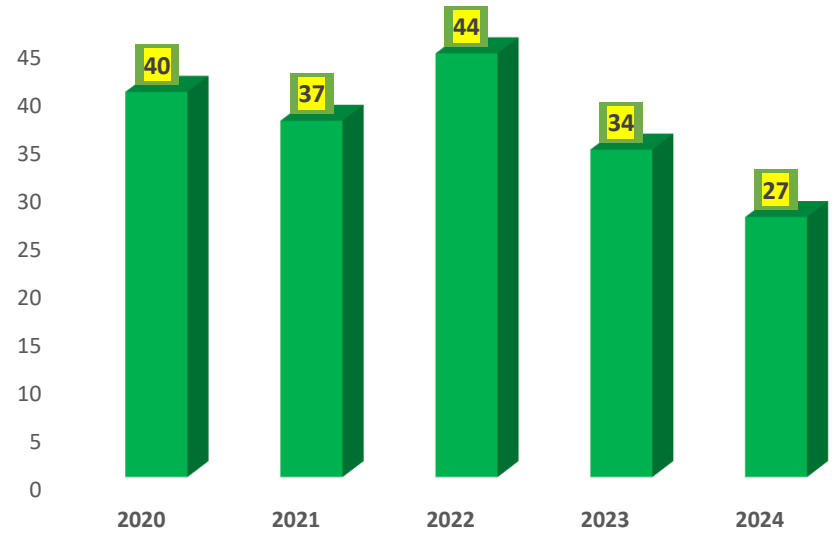

Gambar 3.38.
Peringkat Indonesia dalam *World Competitiveness Yearbook* (WCY) Tahun 2020-2024

Secara institusional, pemerintah telah melakukan berbagai pembenahan. Pada tahun 2020, diundangkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian disempurnakan pada tahun 2023 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dalam kebijakan ini, fokus utama adalah menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dengan memberdayakan UMKM. Sebagai salah satu langkah untuk memperkuat UMKM, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mengeluarkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022, yang mengatur tata cara pelaksanaan kemitraan antara usaha besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah. Upaya tersebut tidak hanya diterapkan di Kementerian Investasi, tetapi juga konsisten diterapkan oleh seluruh kementerian dan lembaga terkait.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah berperan penting dalam penerapan Omnibus Law yang bertujuan untuk menyederhanakan berbagai regulasi yang menghambat kegiatan berusaha. Salah satu fokus utama dari kebijakan ini adalah untuk mempercepat proses perizinan usaha, mengurangi birokrasi yang berbelit, serta memberikan lebih banyak kemudahan bagi investor baik domestik maupun asing. Hal ini berkontribusi pada peningkatan efisiensi bisnis, yang tercermin dalam kenaikan peringkat Indonesia dalam kategori ini dari posisi 20 menjadi posisi 14.

Gambar 3.39.
Rapat Konsolidasi Kebijakan Investasi Pusat dan Daerah

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga telah mengoptimalkan hilirisasi sumber daya alam dengan mendorong investasi di sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi, seperti pengolahan mineral, industri manufaktur, dan teknologi. Hilirisasi tidak hanya berfokus pada penciptaan lapangan kerja baru, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing. Hilirisasi sektor-sektor strategis seperti pertambangan dan energi terbukti menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan performa ekonomi, yang tercatat naik dari posisi 29 ke posisi 24. Melalui sistem perizinan berusaha *Online Single Submission* (OSS), Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus berupaya memperbaiki kemudahan akses perizinan. Sistem ini mempermudah pelaku usaha dalam melakukan pendaftaran dan perizinan, serta memungkinkan proses yang lebih transparan dan cepat. Hal ini menjadi salah satu alasan penting di balik kenaikan efisiensi pemerintah Indonesia, yang berhasil naik ke posisi 23 dari sebelumnya di posisi 31.

Gambar 3.40.
Website *Online Single Submission* (OSS)

Pada tahun 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksaaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman para penyelenggara Pemerintah Daerah terkait kebijakan penanaman modal serta penyelenggaraan PTSP dan perizinan berusaha berbasis risiko. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha di daerah dengan memberikan pengetahuan dan bimbingan teknis serta memotivasi para penyelenggara Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan kualifikasi kinerja mereka. Kegiatan ini diselenggarakan pada 7 (tujuh) lokasi, yaitu:

1. Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
4. Koya Jayapura, Provinsi Papua;
5. Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
6. Kota Denpasar, Provinsi Bali; dan
7. Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Gambar 3.41.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksaaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melakukan *talk show* dalam acara *Sindo Goes To Campus* (SGTC) terkait inovasi kemudahan perizinan untuk pelaku usaha/ *entrepreneur*. Dalam hal ini Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berupaya untuk mendukung sektor UMKM dengan memberi fasilitas kemudahan perizinan berusaha.

Gambar 3.42.
Talk show dalam acara *Sindo Goes To Campus* (SGTC)

Meskipun Indonesia telah mencatatkan kemajuan yang signifikan dalam *World Competitiveness Yearbook* 2024, masih ada sejumlah tantangan dan hambatan yang harus dihadapi oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk terus meningkatkan daya saing dan mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

1. Infrastruktur transportasi yang belum memadai, terutama di beberapa wilayah, masih menjadi masalah utama. Kemacetan dan keterbatasan konektivitas antarwilayah dapat menghambat kelancaran distribusi barang dan mobilitas tenaga kerja, yang berpotensi mengurangi efisiensi ekonomi.
2. Kesenjangan dalam pengembangan infrastruktur dan daya saing antarwilayah masih menjadi tantangan. Wilayah tertentu, terutama di luar Jawa, masih kurang dalam hal aksesibilitas dan fasilitas pendukung yang memadai untuk menarik investasi.
3. Proses perizinan yang belum sepenuhnya praktis menjadi penghalang bagi para investor yang ingin menanamkan modal. Walaupun ada inisiatif untuk penyederhanaan, efektivitas penerapan peraturan masih perlu diperbaiki agar tidak menambah beban bagi dunia usaha.
4. Ketidakpastian dalam kebijakan investasi, seperti perubahan regulasi yang tidak terduga, dapat menurunkan kepercayaan investor dan memperlambat proses investasi di Indonesia. Kementerian perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan jelas, konsisten, dan mendukung iklim investasi yang stabil.

Untuk mengatasi berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam meningkatkan daya saing Indonesia, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ KPM telah mendukung dan turut serta dalam proses perbaikan kebijakan pemerintah khususnya dalam sektor investasi melalui:

1. Dukungan terhadap pembangunan IKN Nusantara untuk mempercepat pengembangan wilayah luar Jawa, yang selama ini mengalami ketimpangan dalam pengembangan sektor infrastruktur dan fasilitas dibandingkan dengan wilayah Jawa. Ini dapat mempercepat pertumbuhan investasi di luar jawa.
2. Diharapkan bahwa dengan adanya pusat pemerintahan dan bisnis di Kalimantan Timur, lebih banyak investor akan tertarik untuk menanamkan modal mereka di daerah-daerah yang selama ini kurang berkembang, yang pada gilirannya akan mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saing Indonesia.

Untuk meningkatkan peringkat Indonesia di *World Competitiveness Yearbook* (WCY) 2024, pemerintah khususnya Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM perlu melanjutkan dan memperkuat berbagai upaya yang sudah dilakukan, sambil fokus pada pengembangan

infrastruktur, penyederhanaan regulasi, pengembangan SDM, dan perbaikan tata kelola. IKN Nusantara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa akan memainkan peran penting dalam pemerataan pembangunan, yang akan membantu Indonesia menarik lebih banyak investasi dan memperbaiki daya saing globalnya. Dengan rencana tindak lanjut yang komprehensif ini, Indonesia diharapkan dapat terus meraih hasil positif dalam peringkat daya saing dunia.

Sasaran Program 1 (SP-1) "Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penanaman Modal"

Salah satu aspek yang menjadi kunci utama dalam meningkatkan daya saing daerah adalah pengembangan investasi atau penanaman modal. Penanaman modal yang efektif dan efisien memiliki peran penting dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kualitas perencanaan penanaman modal menjadi salah satu faktor strategis yang harus diperhatikan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan daerah. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam sasaran ini diharapkan dapat menggambarkan sejauh mana perencanaan penanaman modal yang dilakukan telah memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Hal ini akan berdampak positif pada meningkatnya jumlah investasi yang masuk, menciptakan iklim usaha yang lebih baik, serta memperkuat perekonomian secara keseluruhan.

IK-6: Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal

Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana kualitas pemetaan potensi investasi dan perencanaan pengembangan penanaman modal. Pemetaan yang akurat dan perencanaan yang matang sangat penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik bagi investor. Indeks ini mencakup beberapa dimensi, antara lain, penyusunan kebijakan yang jelas dan terukur, keterbukaan informasi investasi, kecepatan dan kemudahan perizinan, serta kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam perencanaan dan implementasi. Peningkatan kualitas pemetaan dan perencanaan investasi tidak hanya berkontribusi pada peningkatan jumlah investasi yang masuk, tetapi juga pada keberlanjutan dan pemerataan manfaat pembangunan ekonomi.

Tabel 3.11.
Capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Pemetaan
dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal

Sasaran Program 1 (SP-1) Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penanaman Modal														
Indikator Kinerja 6 (IK-6) Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal (indeks Skala 5)														
2020		2021		2022		2023		2024		Capaian Kinerja 2024 (%)	Pertumbuhan Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Rata-rata Realisasi Kinerja Tahun 2020 - 2024 (%)	Rata-rata Pertumbuhan Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2024 (%)	Kategori Capaian Kinerja Tahun 2024
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R					
3,50	4,25	3,65	4,23	3,75	4,44	4,20	4,35	4,30	4,35	110,75	0,00	4,32	0,62	▲Sangat Baik

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2020, capaian rata-rata untuk realisasi kinerja berada di angka 3,50 untuk target dan 4,25 untuk realisasi. Pada tahun 2021, angka ini sedikit meningkat dengan target 3,65 dan realisasi 4,23. Tahun 2022 menunjukkan capaian yang lebih baik dengan target 3,75 dan realisasi mencapai 4,44, dan pada tahun 2023, capaian kinerja meningkat dengan target 4,20 dan realisasi 4,35. Pada tahun 2024, angka capaian target dan realisasi menunjukkan hasil yang stabil, dengan target 4,30 dan realisasi tetap di angka 4,35, yang menghasilkan capaian kinerja sebesar 110,75 persen. Pertumbuhan capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya tidak mengalami perubahan signifikan, namun rata-rata realisasi kinerja antara tahun 2020 hingga 2024 mencapai 4,32, dengan rata-rata pertumbuhan capaian kinerja sebesar 0,62 persen. Berdasarkan hasil tersebut, capaian kinerja tahun 2024 dikategorikan sebagai "Sangat Baik".

Dalam rangka mendukung meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menyediakan platform Potensi Investasi Regional (PIR) berbasis geospasial dengan update data host to host dengan Kementerian/Lembaga dan Asosiasi Usaha. Platform PIR dilengkapi dengan informasi pendukung seperti data infrastruktur, profil provinsi dan kabupaten, peluang dan komoditi, data sosial ekonomi, dan regulasi serta intensif. Melalui PIR BKPM, diharapkan dapat membantu investor, baik domestik maupun asing untuk mengidentifikasi peluang investasi yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka.

Gambar 3.43.
Tampilan pada Platfrom Potensi Investasi Regional BKPM

Pada 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menyusun *Background Study* Rencana Umum Penanaman Modal 2025-2045 sebagai dokumen perencanaan strategis jangka panjang untuk memberikan arah dan pedoman mengenai pengembangan investasi. RUPM berisi kebijakan dan strategi dalam rangka meningkatkan daya tarik investasi serta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi para investor. Dokumen ini juga berupaya menyelaraskan antara kebutuhan pembangunan daerah dengan potensi investasi yang ada. Dokumen RUPM akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD).

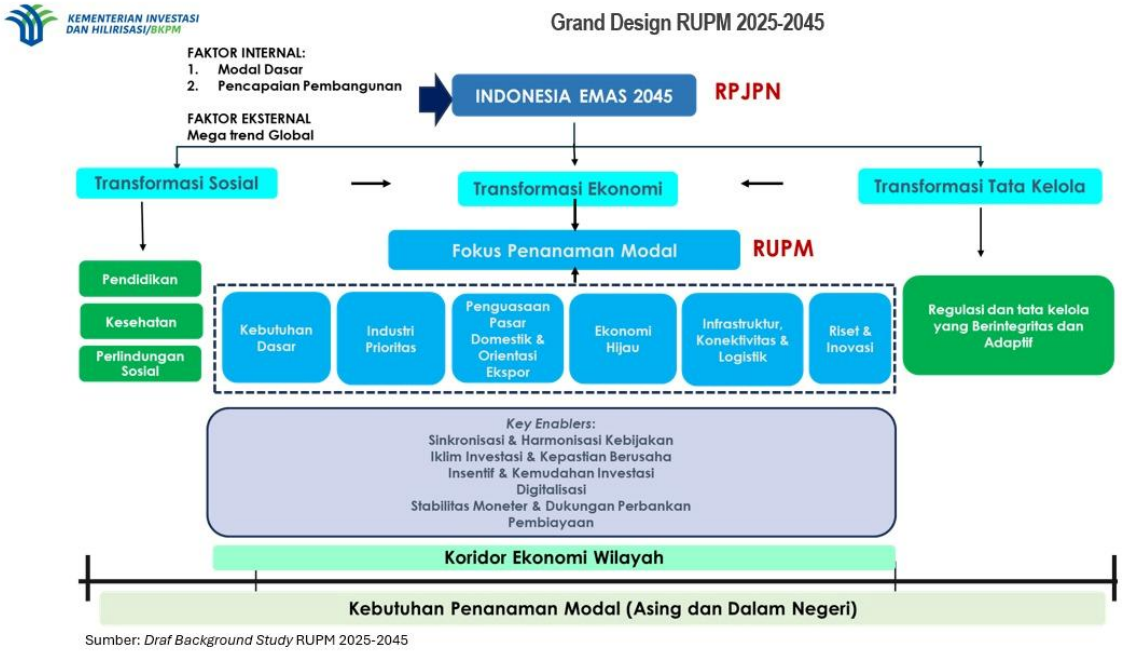

Sumber: *Draf Background Study* RUPM 2025-2045

Gambar 3.44.
Grand Design RUPM 2025-2045

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menetapkan sembilan sektor prioritas investasi yang merupakan fokus utama pemerintah dalam menarik penanaman modal, baik dari dalam negeri (PMDN) maupun luar negeri (PMA). Penetapan sektor tersebut berdasarkan potensi pertumbuhan ekonomi, kontribusi terhadap pembangunan nasional, dan kesesuaian dengan tren global. Sembilan sektor prioritas tersebut yaitu: 1) Energi Baru dan Terbarukan; 2) Industri Hilirisasi; 3) Ketahanan Pangan; 4) Semikonduktor; 5) Ekonomi Digital dan Data Center; 6) Industri Manufaktur Berorientasi Ekspor; 7) Kesehatan; 8) Ibukota Nusantara (IKN); dan 9) Pendidikan Vokasi.

Gambar 3.45.
Sektor Prioritas Investasi

Pengembangan investasi berbasis kawasan menjadi strategi penting dalam mendorong pemerataan investasi di Kawasan Pusat Pertumbuhan (KKP). Upaya ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan pembangunan antar wilayah dengan mengoptimalkan potensi ekonom lokal serta menarik investasi yang berkelanjutan dan berdaya saing. Upaya pengembangan investasi berbasis kawasan ini mencakup Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Ibu Kota Nusantara (IKN), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau *Free Trade Zone* (ZEE), dan 81 proyek investasi berkelanjutan.

Gambar 3.46.
Upaya Pengembangan Investasi Berbasis Kawasan

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus mendorong percepatan investasi melalui 10 Program *Quick Wins,* khususnya dalam mendukung hilirisasi industri. Program ini bertujuan untuk menghasilkan dampak ekonomi yang cepat, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, serta mempercepat realisasi investasi di sektor strategis. Berikut adalah 10 program *Quick Win* Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM:

Gambar 3.47.
10 Program *Quick Wins* Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM

Pada tahun 2024, Kedeputian Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menyusun dokumen *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) antara lain:

1. Pengembangan Investasi Budidaya Ubi Kayu Terintegrasi Industri Pengolahannya
2. Eksipien Amilum dalam Formulasi Sediaan Obat
3. Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Bromo–Tengger–Semeru
4. Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Lombok-Gili Tramen
5. Kertajati Aircraft Maintenance Center (KAMC) Facility

Investment Project Ready to Offer (IPRO) merupakan profil proyek yang siap untuk ditawarkan kepada investor. *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) memuat tentang studi kelayakan suatu proyek yang mencakup pemetaan terhadap potensi pengembangan, peluang pasar, lokasi potensial, prosedur dan regulasi terkait sektor, insentif yang dapat diberikan, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan infrastruktur pendukung, serta kelayakan teknis dan finansial dengan tingkat analisis pra-studi kelayakan. Keluaran/output dari kegiatan IPRO adalah *resume* informasi proyek dari Pra-FS/FS, Memo info dan infografis dengan pembahasan *resume* kajian/masterplan, pendetailan lokasi/kegiatan usaha, *mapping* proyek (peta eksisting & rencana pengembangan ke depan), konsep pengembangan, dukungan infrastruktur MADA (*Market Analysis & Demand Assessment*), dan analisa keuangan/finansial.

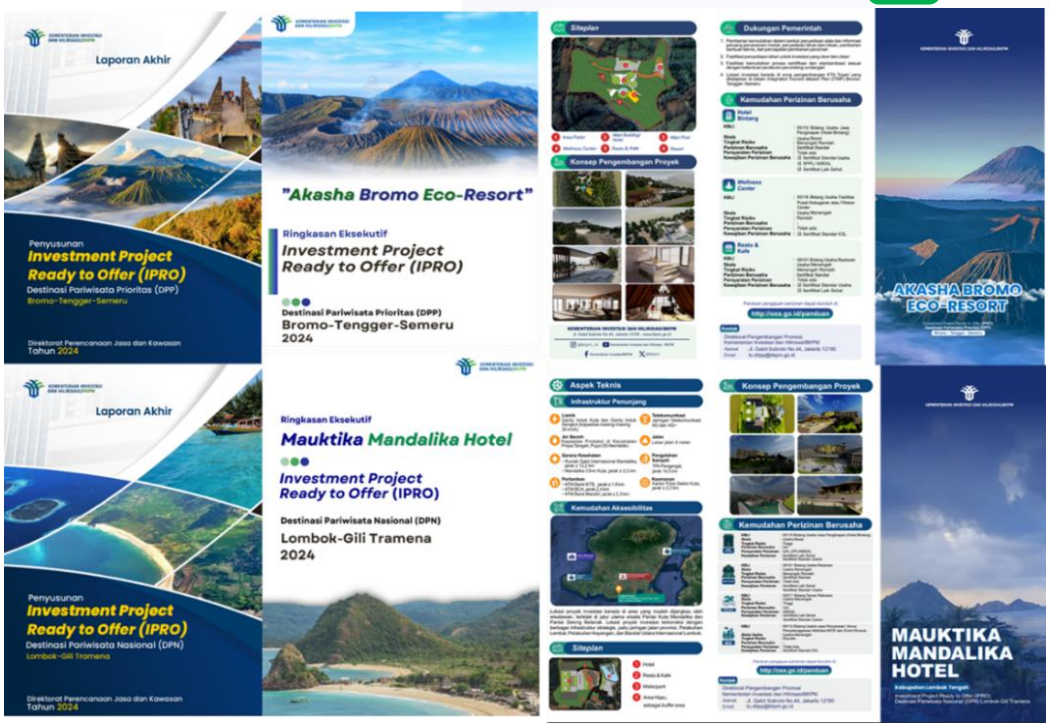

Gambar 3.48.
Output/Keluaran Kegiatan *Investment Project Ready to Offer* (IPRO)

Adapun permasalahan dan hambatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM dalam mencapai sasaran kualitas perencanaan penanaman modal sebagai berikut:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkapasitas;
2. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan dalam menjalankan rencana pelaksanaan kegiatan;
3. Belum adanya *timeline* kegiatan yang terstruktur; dan
4. Belum optimalnya pemanfaatan media digital dalam penyebarluasan informasi;

Adapun rencana tindak lanjut yang dilakukan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk mencapai target indikator dan mengatasi permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

1. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi;
2. Melakukan kolaborasi secara intensif dengan stakeholder terkait rencana pelaksanaan kegiatan;
3. Penyusunan *timeline* rencana pelaksanaan kegiatan sehingga dapat mengatur dan mengukur perkiraan penyelesaian kegiatan.
4. Peningkatan penyebarluasan informasi terkait pelaksanaan kegiatan melalui media yang relevan; dan
5. Melakukan penguatan pemantauan perkembangan pelaksanaan kegiatan

Sasaran Program 2 (SP-2) "Meningkatnya Kualitas Hilirisasi Investasi Strategis"

Hilirisasi investasi strategis merupakan salah satu fokus utama dalam meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global. Indikator Meningkatnya Kualitas Hilirisasi Investasi Strategis berfokus pada upaya untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan sektor industri yang ada, dengan mengarahkan investasi pada kegiatan yang dapat menghasilkan produk dengan nilai lebih tinggi. Hal ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan ekspor, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Peningkatan kualitas hilirisasi ini diharapkan dapat mempercepat transisi ekonomi Indonesia menuju industri yang lebih maju, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi, serta mendukung pencapaian target-target pembangunan yang tercantum dalam RPJMN.

IK-7: Persentase rekomendasi Hilirisasi Investasi Strategis yang akan Diimplementasikan ke dalam Rencana Aksi

Hilirisasi investasi strategis merupakan langkah krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Sebagai bagian dari upaya mempercepat transformasi ekonomi, hilirisasi tidak hanya berfokus pada pengolahan sumber daya alam, tetapi juga pada pengembangan sektor industri dengan nilai tambah tinggi. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan implementasi rencana aksi yang terencana dan berbasis pada rekomendasi hilirisasi yang jelas dan terukur. Berikut tabel capaian kinerja pada indikator tersebut.

Tabel 3.12.
Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hilirisasi Investasi Strategis yang akan Diimplementasikan ke dalam Rencana Aksi

Sasaran Program 2 (SP-2) Meningkatnya Kualitas Hilirisasi Investasi Strategis														
Indikator Kinerja 7 (IK-7) Persentase Rekomendasi Hilirisasi Investasi Strategis yang akan Diimplementasikan ke dalam Rencana Aksi (Jumlah)														
2020		2021		2022		2023		2024		Capaian Kinerja 2024 (%)	Pertumbuhan Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Rata-rata Realisasi Kinerja Tahun 2020 - 2024 (%)	Rata-rata Pertumbuhan Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2024 (%)	Kategori Capaian Kinerja Tahun 2024
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi					
				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	▲Sangat Baik

Sepanjang periode 2022 hingga 2024, target yang ditetapkan untuk setiap tahun adalah 8 rekomendasi, dan realisasi capaian selalu tercatat tepat pada angka tersebut, yaitu 8 rekomendasi setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan konsistensi dan keberhasilan dalam menyusun rekomendasi hilirisasi investasi strategis yang relevan untuk diimplementasikan. Pada tahun, 2022, 2023, hingga 2024, target dan realisasi selalu tercapai dengan angka yang sama, yakni 8, yang menandakan bahwa pencapaian tersebut tidak hanya konsisten, tetapi juga efektif dalam memenuhi ekspektasi yang ditetapkan. Pada tahun 2024, capaian kinerja menunjukkan persentase sebesar 100%, yang berarti seluruh target yang ditetapkan untuk tahun tersebut telah tercapai tanpa kekurangan. Rata-rata realisasi kinerja selama periode 2020 hingga 2024 adalah 8,00, yang mengindikasikan pencapaian yang stabil dan optimal setiap tahunnya.

Sebagai langkah konkrit meningkatkan kualitas hilirisasi Investasi Strategis, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menyusun peta jalan hilirisasi untuk 28 komoditas strategis di delapan sektor utama. Peta jalan ini menawarkan potensi investasi senilai 618,1 miliar dolar AS yang diperkirakan mampu menciptakan lapangan kerja untuk lebih dari 3 juta orang, serta meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 235,9 miliar dolar AS. Menurut Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, terdapat tiga cara fundamental untuk mewujudkan realisasi investasi untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen tercapai, di antaranya yaitu “menggenjot” hilirisasi, digitalisasi, serta pendanaan ekonomi hijau.

Gambar 3.49.
Paparan Peta Jalan Investasi Hilirisasi Strategis

Pada 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melaksanakan *Expose* Kajian Hilirisasi Investasi Strategis tahun 2024 yang digelar di Jakarta dengan mengusung tema “Hilirisasi Investasi Strategis: Ciptakan Nilai Tambah, Indonesia Maju”. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis yang telah disusun pada 2022 dan 2023. Terdapat tiga kajian utama yang disusun untuk mengoptimalkan hilirisasi. ***Pertama***, Kajian Akselerasi Hilirisasi Investasi Strategis, dengan fokus untuk memotret perkembangan investasi hilirisasi dari berbagai komoditas, termasuk nikel dan kelapa sawit. ***Kedua***, Kajian Optimalisasi Hilirisasi Investasi Strategis yang bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan sekaligus merancang solusi yang tepat. Terdapat tujuh komoditas yang menjadi perhatian utama, seperti bauksit, biofuel, dan kelapa sawit. Sementara pada kajian ***Ketiga***, fokus untuk mengurai dampak hilirisasi dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Komoditas utama yang menjadi fokus adalah nikel dan kelapa sawit.

Gambar 3.50.
Kegiatan Expose Kajian Hilirisasi Investasi Strategis 2024

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melalui Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis melaksanakan kegiatan fasilitasi investasi hilirisasi kepada perusahaan dalam rangka akselerasi penyelesaian proyek-proyek hilirisasi agar tetap berjalan sesuai *timeline* yang telah disusun perusahaan, termasuk meliputi fasilitasi koordinasi penyelesaian kendala/permasalahan yang dihadapi perusahaan dalam merealisasikan investasinya. Beberapa hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM antara lain:

1. Fasilitas *Tax Holiday* PT Hailiang Nova Material Industry yang hanya mendapatkan 10 tahun dari 20 tahun padahal PT Hailiang Nova Material Industry sudah memenuhi persyaratan total investasi diatas 1 (satu) trilliun rupiah, dan proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang masih terkendala karena belum terdapat aturan turunan pelaksanaan dalam penerbitan PBG dan SLF di Gresik, Jawa Timur.
2. Keterlambatan pembangunan fase II sel baterai dengan kapasitas 20 MWH oleh PT HLI Green Power dikarenakan belum adanya kepastian jaminan penyediaan listrik dari PT PLN dan suplai gas yang belum maksimal dari PT PGN.
3. Kesulitan pasokan bahan baku Nikel Ore dari perusahaan-perusahaan supplier untuk PT Wanxiang Nickel Indonesia, dikarenakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan-perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menjadi supplier belum diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sehingga hal ini mengganggu proses produksi pada lini produksi yang ada.
4. Proses impor mesin dan alat-alat *photobioreactor* yang terhambat, belum adanya Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait produk astaxanthin dan perlunya dukungan penyerapan produk astaxanthin terutama di Industri farmasi nasional, adalah beberapa kendala yang dihadapi PT Evergen Resources.
5. Hasil audit atas perhitungan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) tahun 2023 yang mengakibatkan PT Cargill Cacao Chocolate diharuskan membayar pinalti. Padahal, sejak tahun 2017, PT Cargill Cacao Chocolate belum pernah mengalami kendala dalam perolehan fasilitas BMDTP.

Adapun rencana tindak lanjut yang dilakukan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM untuk mencapai target indikator dan mengatasi permasalahan dan hambatan tersebut diatas, antara lain:

1. Konsisten melaksanakan fasilitasi dengan melakukan komunikasi dan pertemuan dengan perusahaan/pelaku usaha untuk menginventarisir permasalahan yang dihadapi.
2. Pengawalan dalam setiap tahapan dan fase-fase yang dilakukan oleh perusahaan agar proyek-proyek hilirisasi agar tetap berjalan sesuai *timeline.*
3. Memperkuat koordinasi dan melaksanakan pertemuan rutin dengan Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk memastikan harmonisasi pelaksanaan kebijakan dan peraturan.

Sasaran Program (SP-3) "Meningkatnya Kualitas Iklim Penanaman Modal"

Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal berfokus pada upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan efisien, yang dapat menarik lebih banyak penanaman modal, baik domestik maupun asing. Kualitas iklim penanaman modal menjadi faktor penting dalam memperkuat daya saing ekonomi nasional, mendorong pertumbuhan sektor industri, dan menciptakan lapangan kerja yang luas. Dengan meningkatnya kualitas iklim penanaman modal, diharapkan tercipta arus investasi yang lebih besar dan merata, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada penguatan ekonomi daerah dan nasional. Peningkatan kualitas iklim investasi ini tidak hanya mendatangkan manfaat ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi yang kuat bagi pembangunan berkelanjutan dalam jangka panjang.

IK-8: Jumlah Hari dalam Memulai Usaha/*Starting a Business*

Indikator Jumlah Hari dalam Memulai Usaha mengukur waktu yang diperlukan untuk memulai sebuah usaha, mulai dari tahap pendaftaran hingga memperoleh izin usaha yang sah. Semakin cepat proses ini, semakin mudah bagi wirausahawan untuk memulai dan mengembangkan bisnis mereka. Pengurangan jumlah hari dalam memulai usaha mencerminkan kemudahan dan efisiensi sistem perizinan yang diterapkan, yang bertujuan untuk menciptakan iklim bisnis yang lebih baik. Berikut tabel capaian kinerja indikator kinerja tersebut.

Tabel 3.13.
Capaian Indikator Kinerja Jumlah Hari Dalam Memulai Usaha/*Starting a Business*

Sasaran Program 3 (SP-3) Meningkatnya Kualitas Iklim Penanaman Modal														
Indikator Kinerja 8 (IK-8) Jumlah Hari dalam memulai Usaha (hari)														
2020		2021		2022		2023		2024		Capaian Kinerja 2024 (%)	Pertumbuhan Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Rata-rata Realisasi Kinerja Tahun 2020 - 2024 (%)	Rata-rata Pertumbuhan Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2024 (%)	Kategori Capaian Kinerja Tahun 2024
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi					
8	10,0	6	7,0	6	2,5	4	2,5	2,5	2,5	100,00	0,00	4,90	23,57	▲Sangat Baik

Pada tahun 2020, target yang ditetapkan adalah 8 hari, namun realisasi yang tercatat adalah 10 hari, menunjukkan bahwa proses memulai usaha pada tahun tersebut lebih lama dari yang diharapkan. Di tahun 2021, target sebesar 6 hari, dan realisasi tercatat 7 hari, yang menunjukkan perbaikan meskipun masih ada keterlambatan dalam pencapaian target. Pada tahun 2022, terjadi penurunan signifikan dengan target tetap 6 hari dengan realisasi 2,5 hari, yang menunjukkan pencapaian yang sangat baik dan jauh lebih efisien daripada yang diharapkan. Angka ini mencerminkan kemajuan pesat dalam mempermudah proses memulai usaha, yang menjadi indikator penting dalam menciptakan iklim penanaman modal yang lebih kondusif.

Tahun 2023 menunjukkan stabilitas dengan target 4 hari dan realisasi tetap di 2,5 hari, yang berarti kualitas iklim penanaman modal tetap baik dan tidak ada peningkatan lebih lanjut

dalam hal waktu yang dibutuhkan untuk memulai usaha. Pada tahun 2024, meskipun targetnya adalah 2,5 hari, realisasi juga tercatat 2,5 hari, yang berarti pencapaian target pada tahun tersebut mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa proses untuk memulai usaha sudah sangat efisien dan mencapai angka optimal sesuai dengan ekspektasi yang ditetapkan.

Rata-rata realisasi kinerja antara tahun 2020 hingga 2024 adalah 4,90 hari, yang menunjukkan bahwa meskipun ada perbaikan signifikan, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memulai usaha selama lima tahun ini masih cukup lama dibandingkan dengan capaian tahun-tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan capaian kinerja selama periode tersebut mencapai 23,57 persen, yang mencerminkan adanya peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 dan stabilitas tinggi di tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan hasil tersebut, capaian kinerja tahun 2024 dikategorikan sebagai **"Sangat Baik"**, yang mencerminkan efisiensi yang luar biasa dalam memulai usaha dan menciptakan iklim penanaman modal yang lebih baik, meskipun tidak ada pertumbuhan yang lebih besar di tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini tidak lepas dari peran penting keberhasilan implementasi *Online Single Submission* (OSS).

Pada tahun 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berfokus pada peningkatan kemudahan berusaha di Indonesia melalui sejumlah kebijakan dan program yang bertujuan untuk mengurangi jumlah hari yang diperlukan untuk memulai usaha. Upaya ini menjadi bagian dari strategi untuk mempercepat proses perizinan dan mendorong iklim investasi yang lebih kondusif. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan memperkuat implementasi sistem *Online Single Submission* (OSS) yang lebih terintegrasi, sehingga memungkinkan pengusaha untuk mengurus izin usaha secara lebih cepat dan efisien. Penguatan sistem digital dan teknologi informasi dalam proses perizinan juga terus didorong, dengan harapan dapat memangkas waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan berbagai izin. Dalam konteks hilirisasi, kementerian juga memfokuskan upaya pada sektor-sektor yang memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan industri dalam negeri, sehingga selain mempercepat izin usaha, juga mendorong terciptanya lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi sistem perizinan dan menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi pelaku usaha, dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di mata investor global.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bersama Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-undang (UU) Cipta Kerja (Satgas UU Cipta Kerja), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH), dan Badan POM mensosialisasi kemudahan perizinan berusaha kepada pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui *workshop* dan *coaching clinic* yang bertemakan “Kemudahan Perizinan Berusaha sebagai Implementasi UU Cipta Kerja”. Kegiatan ini merupakan langkah strategis yang dilakukan untuk mengakselerasi transformasi birokrasi perizinan berusaha yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kontribusi sektor usaha terhadap perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat struktur ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Gambar 3.51.
Workshop dan *Coaching clinic* Kemudahan Perizinan Berusaha

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus berupaya untuk meningkatkan kualitas iklim penanaman modal dan hilirisasi secara inklusif. Melalui Forum Kemitraan Investasi (FKI) 2024 yang merupakan ajang tahunan sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada para pelaku usaha besar dan UMKM yang telah mendukung pelaksanaan program kemitraan yang difasilitasi oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Keterlibatan pelaku UMKM disabilitas merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap pemerataan kesempatan berusaha. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, mengungkapkan bahwa prioritas utama hilirisasi dan investasi kedepan adalah memberikan kesempatan dan prioritas yang sama bagi UMKM untuk berkontribusi dalam perkembangan ekonomi daerah, sebagaimana disampaikan pada Forum Kemitraan Investasi 2024.

Gambar 3.52.
Kemitraan UMKM Memperkuat Hilirisasi dan Investasi

Beberapa hambatan yang dapat menghalangi pencapaian target terkait jumlah hari dalam memulai usaha pada tahun 2024 yaitu:

1. Faktor-faktor birokrasi yang masih cukup kompleks di tingkat daerah, meskipun upaya penyederhanaan telah dilakukan.
2. Meskipun ada kebijakan nasional untuk mempermudah perizinan, implementasinya terhambat oleh ketidaksiapan dan resistensi aparatur daerah serta pemahaman yang tidak merata tentang sistem OSS.
3. Akses internet dan perangkat digital yang terbatas di daerah terpencil mempersulit penggunaan sistem OSS secara optimal.
4. Keterbatasan pelatihan dan dukungan teknis di tingkat lokal menghambat adopsi teknologi yang dibutuhkan untuk mempermudah proses perizinan.
5. Ketidakpastian hukum dan persepsi negatif terhadap sistem yang ada menyebabkan pelaku usaha merasa ragu untuk memulai bisnis.
6. Inkonsistensi dan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menghambat implementasi kebijakan dan memperpanjang waktu untuk memulai usaha.

Untuk mengatasi berbagai hambatan dalam mencapai target pengurangan jumlah hari dalam memulai usaha pada tahun 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah melakukan berbagai upaya yang terarah dan strategis, antara lain:

1. Pemerintah terus memperbaiki sistem OSS, termasuk penyederhanaan prosedur dan pembaruan fitur untuk kemudahan penggunaan.
2. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM meluncurkan pelatihan dan sosialisasi untuk pelaku usaha dan aparat pemerintah daerah guna meningkatkan pemahaman terhadap penggunaan sistem OSS dan peraturan yang berlaku.
3. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memperkuat koordinasi dengan memberikan pedoman jelas dan pertemuan rutin untuk memastikan kebijakan dan peraturan konsisten antara pusat dan daerah.
4. Berkolaborasi dengan sektor swasta untuk meningkatkan akses internet dan teknologi di daerah-daerah tertinggal agar pelaku usaha dapat memanfaatkan sistem digital secara optimal.
5. Upaya transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dilakukan untuk membangun kepercayaan publik, mempermudah pengurusan izin, dan mengurangi hambatan birokrasi.

Rencana tindak lanjut Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk mencapai target pengurangan jumlah hari dalam memulai usaha pada tahun 2024 dan seterusnya, berfokus pada penguatan sistem dan pemerataan kebijakan yang telah diterapkan.

1. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan terus memperbarui dan mengembangkan sistem OSS untuk meningkatkan efisiensi, termasuk integrasi dengan platform digital lain dan pembaruan regulasi yang menyulitkan pelaku usaha.
2. Pelatihan dan sosialisasi akan terus dilaksanakan, dengan prioritas pada daerah yang kesulitan memahami teknologi digital dan pengurusan izin agar penerapan OSS lebih merata.
3. Pembentukan tim koordinasi yang lebih solid antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan serta mengatasi masalah di tingkat daerah.
4. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan meningkatkan transparansi dalam proses perizinan dengan menyediakan data dan informasi yang mudah diakses, serta meminimalisir praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

IK-9: Jumlah Prosedur dalam Memulai Usaha

Indikator kinerja "Jumlah Prosedur dalam Memulai Usaha" merupakan salah satu ukuran utama dalam menilai upaya Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan bisnis di Indonesia. Indikator ini berfokus pada efisiensi proses administratif yang harus dilalui oleh calon pengusaha saat memulai usaha mereka, yang mencakup berbagai prosedur hukum, pendaftaran izin, dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Semakin sedikit jumlah prosedur yang dibutuhkan untuk mendirikan usaha, semakin mudah dan cepat pengusaha dapat memulai kegiatan usaha mereka. Ini tentu saja berpengaruh pada iklim investasi dan daya saing Indonesia di tingkat global. Oleh karena itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus berkomitmen untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan usaha guna mengurangi hambatan birokrasi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kontribusi sektor swasta terhadap perekonomian nasional yang semuanya berimplikasi pada peringkat ICOR Indonesia. Dengan menggunakan indikator ini, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dapat memantau serta mengevaluasi efektivitas kebijakan dan reformasi yang diterapkan dalam mempermudah prosedur pendirian usaha. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi destinasi investasi yang menarik, efisien, dan ramah bagi para pengusaha domestik maupun asing.

Tabel 3.14.
Capaian Indikator Kinerja Jumlah Prosedur Dalam Memulai Usaha

Sasaran Program 3 (SP-3) Meningkatnya Kualitas Iklim Penanaman Modal														
Indikator Kinerja 9 (IK-9) Jumlah Prosedur dalam memulai Usaha (prosedur)														
2020		2021		2022		2023		2024		Capaian Kinerja 2024 (%)	Pertumbuhan Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Rata-rata Realisasi Kinerja Tahun 2020 - 2024 (%)	Rata-rata Pertumbuhan Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2024 (%)	Kategori Capaian Kinerja Tahun 2024
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi					
10	11	8	8	7	2	5	2	2	2	100,00	0,00	5,00	25,57	▲Sangat Baik

Pada tahun 2020, target jumlah prosedur yang ditetapkan adalah 10, namun realisasi menunjukkan adanya sedikit hambatan, dengan jumlah prosedur yang tercatat sebanyak 11. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menyederhanakan proses memulai usaha, masih ada beberapa prosedur administratif yang cukup kompleks. Di tahun 2021, target jumlah prosedur dikurangi menjadi 8, dan realisasi tercatat sesuai target tersebut, yaitu 8 prosedur, menunjukkan adanya perbaikan dan pengurangan jumlah tahapan yang harus dilalui. Pencapaian yang lebih signifikan terlihat pada tahun 2022, dimana target yang ditetapkan adalah 7 prosedur, namun realisasi tercatat sangat baik dengan hanya 2 prosedur yang diperlukan untuk memulai usaha. Hal ini menunjukkan keberhasilan implementasi kebijakan dan sistem yang mempermudah proses perizinan dan administrasi usaha, dengan jumlah prosedur yang sangat sedikit dan jauh lebih efisien dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Perbaikan ini juga menggambarkan dampak positif dari penggunaan teknologi dan sistem digital, yang menyederhanakan berbagai tahapan administratif. Pada tahun 2023, targetnya adalah 5 prosedur, namun realisasi tetap di angka 2, yang menunjukkan stabilitas dalam pencapaian dan efisiensi proses yang terus dipertahankan. Tahun 2024 menunjukkan pencapaian yang serupa, dengan target yang juga ditetapkan 2 prosedur, dan realisasi tercatat tepat 2 prosedur, dengan tingkat capaian kinerja 100 persen. Rata-rata realisasi kinerja antara tahun 2020 hingga 2024 tercatat 5,00 prosedur, yang menunjukkan adanya penurunan yang signifikan dalam jumlah prosedur dari tahun ke tahun, dengan keberhasilan besar pada tahun 2022 dan tahun-tahun berikutnya. Rata-rata pertumbuhan capaian kinerja selama periode tersebut adalah 25,57 persen, yang mencerminkan perubahan besar dalam jumlah prosedur yang diperlukan untuk memulai usaha, terutama pada tahun 2022. Berdasarkan hasil ini, capaian kinerja tahun 2024 dinilai dengan kategori **"Sangat Baik"**, karena pencapaian tersebut menunjukkan efisiensi yang luar biasa dalam menyederhanakan proses administrasi untuk memulai usaha. Implementasi kebijakan dan sistem yang mendukung kemudahan berbisnis melalui OSS dan teknologi digital terbukti memberikan hasil

yang sangat positif dalam menciptakan iklim penanaman modal yang lebih baik dan lebih efisien.

Pada tahun 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berkomitmen untuk mempercepat dan menyederhanakan proses perizinan usaha di Indonesia, khususnya dalam hal jumlah prosedur yang dibutuhkan untuk memulai usaha. Upaya utama yang dilakukan adalah melalui penyederhanaan regulasi dan kebijakan yang selama ini dianggap membebani pelaku usaha. Pemerintah terus berfokus pada pemangkasan prosedur yang tidak efektif dan menduplikasi perizinan, untuk menciptakan sistem yang lebih efisien. Salah satu langkah konkret adalah penerapan sistem OSS yang memungkinkan pengusaha untuk mengurus berbagai izin melalui satu pintu secara digital, sehingga meminimalisir jumlah prosedur administratif yang harus ditempuh. Selain itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap peraturan dan prosedur di daerah selaras dengan kebijakan nasional, menghindari tumpang tindih antara peraturan pusat dan daerah yang bisa memperpanjang proses pengurusan izin. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga mendorong penguatan sektor hilirisasi industri dengan memberikan perhatian lebih pada sektor-sektor yang dinilai strategis, agar para pelaku usaha dapat lebih fokus pada kegiatan produksi dan pengembangan usaha mereka, tanpa terbebani oleh prosedur perizinan yang berlarut-larut. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan jumlah prosedur dalam memulai usaha dapat terus dikurangi, menciptakan iklim usaha yang lebih ramah bagi investor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melakukan pengawasan dan pengecekan secara rutin untuk memastikan proses perizinan maupun layanan yang diberikan kepada pelaku usaha tetap optimal. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memastikan layanan perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) tetap aman untuk melayani pelaku usaha. Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah melakukan evaluasi berkala atas layanan-layanan publik di bawah naungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM seperti sistem OSS maupun *Contact Center*.

Beberapa hambatan yang mungkin dihadapi dalam mencapai target pengurangan jumlah prosedur dalam memulai usaha pada tahun 2024 berkaitan dengan kompleksitas implementasi kebijakan di tingkat daerah dan sektor-sektor tertentu, antara lain:

1. Meskipun ada kebijakan penyederhanaan perizinan, penerapannya bervariasi di tingkat daerah, dengan beberapa daerah masih menggunakan prosedur yang tumpang tindih atau terlalu banyak.
2. Ketidaksiapan beberapa daerah dan kurangnya koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah menghambat penerapan sistem yang lebih terintegrasi.
3. Sektor-sektor seperti pertambangan, kehutanan, dan perikanan masih memiliki peraturan yang kompleks dengan tahapan izin yang lebih panjang, menghambat pengurangan jumlah prosedur.
4. Banyak daerah yang belum siap dengan sistem perizinan berbasis teknologi seperti OSS, serta kesulitan dalam memanfaatkan sistem tersebut, menghambat upaya penyederhanaan.
5. Beberapa aparat pemerintah yang terbiasa dengan prosedur lama tidak siap beradaptasi dengan sistem baru, menjadi kendala dalam implementasi kebijakan.
6. Perbedaan standar dan prosedur antara lembaga dan instansi yang terkait dengan perizinan memperumit proses perizinan dan memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk memulai usaha.

Untuk mengatasi hambatan dalam mencapai target pengurangan jumlah prosedur dalam memulai usaha pada tahun 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM telah melakukan berbagai upaya yang terstruktur dan berkesinambungan melalui:

1. Terus memperbarui dan menyempurnakan sistem OSS untuk mengelola lebih banyak jenis izin secara terpusat, menyederhanakan proses perizinan dan mempercepat pengurusan izin bagi pengusaha.

2. Memberikan pelatihan kepada pemerintah daerah agar dapat lebih memahami dan memanfaatkan teknologi serta kebijakan yang ada untuk mempercepat proses perizinan dan mengurangi tumpang tindih prosedur.
3. Melakukan evaluasi berkala terhadap peraturan yang ada untuk mengurangi duplikasi dan ketidaksesuaian, serta menyederhanakan prosedur di sektor-sektor yang masih rumit seperti pertambangan dan kehutanan.
4. Mengadakan forum koordinasi dan *workshop* untuk memastikan peraturan di daerah sejalan dengan kebijakan nasional, mengurangi inkonsistensi dalam penerapan peraturan.
5. Memberikan pelatihan kepada aparat pemerintah daerah mengenai penggunaan OSS dan prosedur perizinan yang disederhanakan untuk mengatasi hambatan terkait kesiapan teknis dan pengetahuan.
6. Memperkenalkan mekanisme *feedback* agar pelaku usaha dan masyarakat dapat melaporkan hambatan atau prosedur yang masih menghambat, untuk diperbaiki segera.

Rencana tindak lanjut Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk mencapai target pengurangan jumlah prosedur dalam memulai usaha di masa depan akan terus berfokus pada peningkatan efisiensi dan penyederhanaan proses perizinan. Beberapa langkah yang akan dilakukan antara lain:

1. Melanjutkan pengembangan dan penyempurnaan sistem OSS untuk mencakup lebih banyak jenis izin dan prosedur, serta mengintegrasikan OSS dengan sistem lain (seperti perbankan dan pajak) untuk mempercepat proses perizinan terkait keuangan dan perpajakan.
2. Terus melakukan evaluasi mendalam terhadap peraturan dan prosedur perizinan yang rumit, serta bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun kebijakan perizinan yang seragam dan mudah diakses di seluruh Indonesia.
3. Mengidentifikasi dan menyederhanakan sektor-sektor dengan regulasi yang kompleks, seperti pertambangan dan kehutanan, dengan memperkenalkan sistem perizinan yang lebih transparan, efisien, dan berbasis teknologi.
4. Memberikan pelatihan lanjutan terkait teknologi perizinan dan pelayanan publik untuk aparat pemerintah daerah, termasuk wilayah terpencil, agar kebijakan yang disederhanakan dapat diimplementasikan dengan konsisten dan efektif.
5. Memperluas akses pelatihan daring dan fasilitas pendampingan bagi daerah-daerah yang membutuhkan bantuan teknis, guna memastikan kesiapan dalam penerapan sistem perizinan digital.
6. Melakukan evaluasi rutin terhadap implementasi kebijakan perizinan yang sudah diterapkan dan menyesuaikan kebijakan jika diperlukan, dengan mempertimbangkan umpan balik dari pelaku usaha dan masyarakat.
7. Memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan ekosistem usaha yang lebih efisien dan ramah investasi, serta mengurangi prosedur yang tidak perlu.

IK-10: Persentase Realisasi Kesepakatan Perusahaan PMA/PMDN yang Bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan Peraturan Perundangan

Indikator kinerja ini menjadi salah satu alat ukur penting yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) melaksanakan kewajiban mereka dalam menjalin kemitraan dengan UMKM. Kemitraan ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan peran serta UMKM dalam rantai pasok industri dan mendorong pemerataan ekonomi di Indonesia. Melalui indikator ini, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dapat memantau dan mengukur sejauh mana perusahaan besar memenuhi kesepakatan kemitraan yang telah disepakati, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengembangan ekonomi yang dihasilkan dari investasi asing dan domestik juga dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan UMKM, yang merupakan sektor vital bagi perekonomian nasional. Persentase yang tinggi dalam realisasi kemitraan ini mencerminkan keberhasilan kebijakan pemerintah dalam mendorong perusahaan besar untuk berkontribusi langsung dalam pemberdayaan UMKM, serta mendukung upaya pemerataan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan mengedepankan kemitraan yang sesuai dengan regulasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga berupaya untuk memastikan terciptanya ekosistem bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 3.15.
Capaian Indikator Kinerja Persentase Realisasi Kesepakatan Perusahaan PMA/PMDN yang Bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sesuai dengan Peraturan

Sasaran Program 3 (SP-3) Meningkatnya Kualitas Iklim Penanaman Modal														
Indikator Kinerja 10 (IK-10) Persentase realisasi kesepakatan perusahaan PMA/PMDN yang bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan peraturan perundangan (%)														
2020		2021		2022		2023		2024		Capaian Kinerja 2024 (%)	Pertumbuhan Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Rata-rata Realisasi Kinerja Tahun 2020 -2024 (%)	Rata-rata Pertumbuhan Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2024 (%)	Kategori Capaian Kinerja Tahun 2024
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R					
				30,00	30,69	32,00	32,50	32,50	31,40	96,62	-3,38	31,53	0,63	Baik

Pada tahun 2022, target kinerja yang ditetapkan adalah 30 persen dan realisasi capaian tercatat sedikit lebih tinggi, yakni 30,69 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut, perusahaan PMA dan PMDN berhasil melebihi ekspektasi dalam hal kemitraan dengan UMKM, dan ini dapat dianggap sebagai pencapaian yang baik dalam konteks implementasi regulasi terkait. Pada tahun 2023, target meningkat menjadi 32 persen, dan capainnya berhasil mencapai 32,50 persen, menunjukkan kinerja yang lebih baik lagi, sedikit melebihi target yang ditetapkan. Peningkatan ini menggambarkan adanya kemajuan dalam hal kerja sama antara sektor besar dan UMKM, yang mendukung tumbuhnya ekosistem yang lebih inklusif bagi usaha kecil. Namun demikian pada tahun 2024, dari target yang ditetapkan yaitu 32,50 persen, realisasi tercatat sedikit menurun menjadi 31,40 persen. Meskipun capaian pada tahun 2024 sedikit lebih rendah daripada tahun sebelumnya, dengan capaian 96,62 persen dari target, hal ini menunjukkan adanya sedikit penurunan dalam jumlah perusahaan PMA dan PMDN yang berhasil menjalin kemitraan dengan UMKM sesuai dengan regulasi yang ada. Penurunan ini berkontribusi pada adanya pertumbuhan capaian kinerja yang negatif sebesar -3,38 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang menunjukkan bahwa meskipun capaian masih cukup baik, ada tantangan dalam mencapai target yang lebih tinggi pada tahun 2024.

Rata-rata realisasi kinerja antara tahun 2020 hingga 2024 tercatat sebesar 31,53 persen, yang menunjukkan pencapaian yang stabil dalam hal kemitraan dengan UMKM, meskipun ada penurunan kecil pada tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan capaian kinerja selama periode tersebut tercatat 0,63 persen, yang menggambarkan adanya pertumbuhan positif meskipun relatif kecil. Berdasarkan pencapaian ini, kategori capaian kinerja tahun 2024 diberikan label "Baik", yang mencerminkan keberhasilan yang cukup solid dalam hal pengembangan kemitraan antara perusahaan besar dan UMKM, meskipun ada sedikit penurunan capaian pada tahun terakhir. Pada tahun 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berfokus pada memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam kemitraan dengan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan implementasi kebijakan yang mendorong keterlibatan UMKM dalam rantai pasok industri besar, baik di sektor hilirisasi maupun sektor lainnya. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mendukung perusahaan PMA dan PMDN untuk memenuhi kewajiban kemitraan dengan UMKM melalui berbagai insentif dan program yang memfasilitasi akses UMKM terhadap pasar yang lebih luas dan lebih terorganisir. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga

mendorong agar kemitraan yang dibangun antara perusahaan besar dengan UMKM dapat dilakukan secara adil, transparan, dan saling menguntungkan, yang tidak hanya memenuhi regulasi, tetapi juga berdampak positif terhadap pertumbuhan UMKM.

Salah satu langkah yang diambil adalah memperkuat pengawasan dan pendampingan terhadap kesepakatan kemitraan antara perusahaan besar dan UMKM, untuk memastikan bahwa kesepakatan yang tercapai sesuai dengan ketentuan yang ada, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi kedua belah pihak. Selain itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga terus bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait untuk memberikan pelatihan dan bantuan teknis kepada UMKM, agar mereka dapat memenuhi standar yang dibutuhkan oleh perusahaan besar dan meningkatkan kapasitas produksi mereka. Dalam konteks ini, BKPM juga memperkuat peran teknologi digital untuk menghubungkan UMKM dengan pasar yang lebih luas, termasuk dengan perusahaan PMA dan PMDN, guna memastikan bahwa kemitraan yang dibangun dapat lebih efisien dan terukur. Melalui berbagai upaya ini, diharapkan persentase realisasi kesepakatan kemitraan antara perusahaan besar dan UMKM dapat meningkat, sejalan dengan tujuan untuk mendukung i61nklusif ekonomi dan keberlanjutan sektor UMKM di Indonesia.

Gambar 3.53.
Forum Kemitraan Investasi 2024
dengan Tema Mendorong Kemitraan Strategis untuk Investasi Berkelanjutan

Dalam rangka meningkatkan kualitas iklim penanaman modal, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menyelenggarakan forum kemitraan investasi tahun 2024, forum tersebut merupakan ajang tahunan sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Republik Indonesia kepada para pelaku usaha besar dan UMKM yang telah mendukung pelaksanaan program kemitraan

yang difasilitasi oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Forum tersebut menghasilkan kesepakatan Rp3,9 triliun dari 579 kemitraan antara UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan Usaha Besar, melibatkan 158 usaha besar dan 389 UMKM. Penghargaan juga diberikan kepada 10 perusahaan PMA/PMDN dan UMKM yang berkomitmen menjalankan kemitraan investasi.

Program Kemitraan Investasi merupakan wujud komitmen Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam mewujudkan Asta Cita dan tujuan pembangunan yang berkelanjutan melalui pertumbuhan yang merata dan menyeluruh. Kolaborasi antara pelaku usaha besar dengan pelaku UMKM dalam bentuk kemitraan ini berlandaskan pada prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan. Upaya ini terus didorong oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan menyinergikan kebijakan hilirisasi industri dengan pemberdayaan pelaku UMKM agar masuk ke dalam rantai pasok industri, sehingga pelaku UMKM juga dapat turut andil dalam hilirisasi investasi strategis.

Gambar 3.54.
Penyerahan Penghargaan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM kepada PT. Tjiwi Kimia

Dalam rangka memperluas kerjasama kemitraan investasi, perlu juga didorong melalui penciptaan platform yang dapat mempertemukan para investor dengan potensi usaha yang menjanjikan diberbagai daerah. Hal ini telah dilakukan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM salah satunya melalui kolaborasi dengan Pemerintah Kota Surakarta melalui kegiatan Solo Great Sale (SGS) ke-10 pada 5 Mei 2024. Kegiatan SGS 2024 mengusung tema “Grebeg Investasi” yang diharapkan dapat menarik penanaman modal PMA dan PMDN di Kota Surakarta. Kerjasama Pemerintah pusat dan daerah dalam membangun platform wirausaha ini menjadi upaya meningkatkan dunia usaha yang dapat mewujudkan aglomerasi usaha UMKM di Solo.

Gambar 3.55.
Kegiatan Solo *Great Sale* (SGS) ke-10 Kerjasama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM dengan Pemerintah Kota Surakarta.

Beberapa hambatan dalam pencapaian target kinerja persentase realisasi kesepakatan kemitraan antara perusahaan PMA/PMDN dengan UMKM pada tahun 2024 berkaitan dengan berbagai faktor baik internal maupun eksternal, antara lain:

1. Masih terdapat UMKM yang kesulitan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan perusahaan besar, terutama dalam hal volume produksi, konsistensi produk, dan penerapan teknologi yang efisien.
2. Masih terdapat UMKM yang tidak memahami manfaat, prosedur, atau regulasi terkait kemitraan dengan perusahaan besar, yang menyebabkan ketidaksiapan mereka untuk berpartisipasi.
3. Pelaku UMKM belum sepenuhnya memanfaatkan layanan fasilitas kemitraan yang tersedia, karena sosialisasi yang masih terbatas.
4. Sosialisasi terkait pelaporan realisasi kemitraan kepada pelaku usaha besar juga masih terbatas.
5. UMKM masih menghadapi kesulitan dalam mengakses modal dan pembiayaan, yang menghambat pengembangan iklim usaha mereka.
6. UMKM belum sepenuhnya memanfaatkan layanan digital yang ada untuk meningkatkan efisiensi dan akses pasar.

Untuk mengatasi hambatan dalam mencapai target persentase realisasi kesepakatan kemitraan antara perusahaan PMA/PMDN dengan UMKM pada tahun 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah melakukan berbagai upaya strategis, yaitu:

1. Memperkenalkan dan memperkuat program pendampingan bagi UMKM. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk, manajerial, dan pemahaman regulasi agar UMKM dapat memenuhi standar yang dibutuhkan oleh perusahaan besar.
2. Pemerintah akan memberikan fasilitas dan insentif bagi investor yang melibatkan UMKM dalam rantai pasok. Insentif ini bertujuan untuk mendorong lebih banyak perusahaan besar untuk bekerja sama dengan pelaku UMKM, sehingga mempercepat pencapaian target kemitraan.
3. Meningkatkan fasilitasi bagi UMKM yang menjalin kemitraan dengan perusahaan besar.
4. Peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk memastikan kemitraan berjalan sesuai rencana dan dapat meningkatkan realisasi kemitraan di masa depan.

Rencana tindak lanjut Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk mencapai target kinerja persentase realisasi kesepakatan kemitraan antara perusahaan PMA/PMDN dengan UMKM di masa depan akan melibatkan beberapa langkah strategis yang berfokus pada peningkatan kualitas kemitraan dan perluasan kesempatan bagi UMKM, yaitu:

1. Memperluas jangkauan program pembinaan untuk UMKM, dengan fokus pada sektor-sektor yang memiliki potensi besar tetapi kurang mendapat perhatian, seperti sektor pertanian dan kerajinan lokal. Melalui pelatihan berkelanjutan, UMKM akan diberikan dukungan dalam peningkatan kapasitas produksi, penerapan teknologi tepat guna, dan pemahaman lebih mendalam mengenai cara menjalin kemitraan dengan perusahaan besar.
2. Mendorong lebih banyak kemitraan yang efektif, BKPM akan memperkenalkan program kemitraan yang lebih terstruktur. Dengan melibatkan lebih banyak sektor industri besar, termasuk perusahaan multinasional, UMKM diharapkan dapat lebih terintegrasi dalam rantai pasok global.
3. BKPM akan bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk menyediakan jalur pembiayaan yang lebih fleksibel dan mudah diakses oleh UMKM. Program pembiayaan ini akan lebih diarahkan kepada UMKM yang berkomitmen untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan PMA/PMDN.
4. Peningkatan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi akan menjadi fokus utama dalam rencana tindak lanjut ini. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berencana untuk mengembangkan platform digital yang lebih interaktif dan terintegrasi, yang akan mempertemukan perusahaan besar dengan UMKM, serta memberikan akses mudah bagi UMKM untuk mempelajari regulasi, mendapatkan pelatihan, dan bahkan melakukan pemasaran produk mereka.
5. Memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi yang lebih sistematis. Evaluasi ini akan dilakukan secara berkala untuk memantau kemajuan dan realisasi kesepakatan kemitraan antara perusahaan besar dengan UMKM

Sasaran Program (SP-4) "Meningkatnya Efektivitas Promosi Penanaman Modal"

Sasaran Program 4 (SP-4) yaitu "Meningkatnya Efektivitas Promosi Penanaman Modal", SP-4 memiliki 2 (dua) indikator yaitu nilai komitmen/rencana penanaman modal dan jumlah minat penanaman modal. Dalam rangka mendukung tercapainya target realisasi investasi pada tahun 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melalui Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal melakukan berbagai kegiatan promosi yang terintegrasi. Strategi promosi yang diterapkan oleh Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, antara lain adalah menyebarkan informasi melalui pelaksanaan forum bisnis di dalam dan luar negeri serta, pemasaran terfokus, mengadakan pertemuan tertutup (*one-on-one meeting*) baik secara tatap mukalangsung maupun daring dengan investor yang ditargetkan, ~~,~~memasang iklan di media elektronik dan cetak, serta mendampingi misi investasi. Selain itu, terdapat fasilitasi promosi daerah, penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan untuk kantor perwakilan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di sembilan negara, penyusunan analisis market intelligent negara target dan negara pesaing, serta pelaksanaan pameran dan penyediaan bahan dan sarana promosi penanaman modal. Kegiatan promosi ini diharapkan dapat meningkatkan pehamaman dan minat investasi di Indonesia.

IK-11: Nilai Rencana Penanaman Modal Hasil Berbagai Kegiatan Promosi Penanaman Modal

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam memfasilitasi perbaikan iklim investasi dan mendorong realisasi investasi di Indonesia, terus berupaya mengoptimalkan berbagai kegiatan promosi untuk memperkenalkan potensi investasipasar, kebijakan yang mendukung investasi, serta kemudahan yang ditawarkan untuk para investor. Peningkatan nilai rencana penanaman modal yang diperoleh menunjukkan bahwa kegiatan promosi yang dilaksanakan telah berhasil

menarik minat investor untuk berinvestasi di sektor-sektor strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Indikator ini juga mencerminkan efektivitas dari strategi promosi yang diterapkan, serta peran Kkementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam membangun citra Indonesia sebagai tujuan investasi yang menjanjikan. Melalui peningkatan nilai rencana penanaman modal, diharapkan dapat tercipta lapangan kerja baru, peningkatan daya saing industri dalam negeri, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Tabel 3.16.
Capaian Indikator Kinerja
Nilai Rencana Penanaman Modal Hasil Berbagai Kegiatan Promosi Penanaman Modal

Sasaran Program 4 (SP-4) Meningkatnya Efektivitas Promosi Penanaman Modal														
Indikator Kinerja 11 (IK-11) **Nilai Rencana Penanaman Modal Hasil Berbagai Kegiatan Promosi Penanaman Modal** (Rp Triliun)														
2020		2021		2022		2023		2024		Capaian Kinerja 2024 (%)	Pertumbuhan Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Rata-rata Realisasi Kinerja Tahun 2020 -2024	Rata-rata Pertumbuhan Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2024 (%)	Kategori Capaian Kinerja Tahun 2024
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R					
1.362,00	1.582,07	1.430,80	23.357,70	1.614,00	2.357,10	1.833,00	1.979,00	2.065,50	2.334,45	113,02	17,96	6.322,06	322,10	▲Sangat Baik

Pada tahun 2020, target yang ditetapkan untuk nilai komitmen penanaman modal adalah sebesar Rp1.362 triliun, dan realisasi yang tercatat mencapai Rp1.582,07 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berhasil melebihi target yang ditetapkan pada tahun tersebut, yang merupakan indikasi keberhasilan dalam promosi penanaman modal.

Di tahun 2022, targetnya kembali meningkat menjadi Rp1.614 triliun, dan realisasi yang tercatat adalah Rp2.357,10 triliun, melampaui target yang ditetapkan dan menunjukkan peningkatan signifikan dalam investasi yang masuk. Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan berbagai strategi dan upaya promosi investasi yang lebih agresif serta peningkatan kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Indonesia. Pada tahun 2023, target nilai komitmen penanaman modal meningkat lagi menjadi Rp1.833 triliun, dengan realisasi yang tercatat sebesar Rp1.979 triliun, yang lagi-lagi menunjukkan pencapaian yang melebihi target.

Tahun 2024, dengan target yang ditetapkan sebesar Rp2.065,50 triliun, capaian yang tercatat adalah Rp2.334,45 triliun, melebihi target yang telah ditetapkan dan menunjukkan pencapaian yang sangat baik dengan capaian kinerja sebesar 113,02%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya promosi penanaman modal di Indonesia pada tahun 2024 berhasil mencatatkan angka investasi yang sangat tinggi, melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, pertumbuhan capaian kinerja tahun 2024 tercatat sebesar 17,96 persen, yang menunjukkan adanya lonjakan yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Rata-rata realisasi kinerja antara tahun 2020 hingga 2024 mencapai Rp6.322,06 triliun, yang menunjukkan bahwa rata-rata komitmen penanaman modal yang berhasil diraih jauh melebihi target yang telah ditetapkan. Rata-rata pertumbuhan capaian kinerja selama periode tersebut tercatat sebesar 322,10 persen, yang mencerminkan pertumbuhan yang sangat besar dalam komitmen penanaman modal dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil ini, capaian kinerja tahun 2024 dikategorikan sebagai "Sangat Baik", yang menunjukkan bahwa promosi penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia berhasil menarik perhatian investor, menghasilkan komitmen penanaman modal yang sangat besar, dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian negara.

Nilai rencana penanaman modal terus bertumbuh selama 5 tahun terakhir, dimana di tahun 2024 realisasi penanaman modal mencapai Rp. 2.334,45 Triliun atau meningkat sebesar 117,93% dibandingkan tahun sebelumnya dengan kategori Sangat Baik. Adapun nilai rencana investasi yang cukup strategis yang difasilitasi selama tahun 2024 antara lain:

1. Chevron, perusahaan energi terintegrasi terkemuka di dunia yang berasal dari Amerika, melalui Chevron New Energies Holding Indonesia Ltd. bersama dengan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) membentuk JV PT Cahaya Anagata Energy (PT CAE) untuk melakukan investasi dibidang pengusahaan panas bumi di WKP Way Ratai. PT CAE telah mendapatkan Izin Panas Bumi (IPB) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tanggal 24 September 2024. Selain memperkuat sinergi antara dua perusahaan energi terkemuka, IPB ini menandai langkah penting dalam mengembangkan potensi energi panas bumi. Proyek ini melibatkan investasi awal sebesar USD 28,85 juta untuk tahap eksplorasi. Kegiatan eksplorasi meliputi studi geologi, geofisika, dan geokimia yang komprehensif. Pengembangan panas bumi ini diharapkan dapat menghasilkan 55 MW, cukup untuk mendukung sistem kelistrikan Sumatera Bagian Selatan, dan akan menyediakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan pajak, dan berkontribusi pada pengembangan masyarakat di sekitar lokasi proyek.
2. Build Your Dreams (BYD) senilai USD1,3 miliar atau Rp19,5 triliun yang sedang menyelesaikan tahap konstruksi pabrik di Kawasan Industri Subang Smartpolitan, Jawa Barat. Rencana kapasitas produksi mobil listrik sebanyak 150.000 unit per tahun (terbesar di ASEAN dan siap memulai produksi di akhir 2025).
3. Daewong senilai USD524,7 juta atau Rp7,87 triliun yang berencana untuk memperluas skala usahanya untuk mendirikan fasilitas produksi untuk alat kesehatan dan produk kimia di Cikarang, Jawa Barat
4. Wedison Green Energy Holding Pte Ltd merupakan perusahaan asal Singapura yang berencana membangun pabrik perakitan kendaraan listrik roda dua, serta membangun beberapa lini usaha antara lain charging station di Indonesia. Saat ini perusahaan telah memiliki entity di Indonesia, PT Wedison New Energy Technology. Lokasi potensial yang diminati adalah di Jawa Barat. Perusahaan rencananya akan memasarkan 80% produknya untuk pasar domestik dan 20% untuk ekspor. Perusahaan menargetkan dapat merampungkan perizinan, mengamankan lahan, serta memulai persiapan kegiatan usahanya.

Pada tahun 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM fokus pada upaya untuk meningkatkan nilai rencana penanaman modal hasil berbagai kegiatan promosi penanaman modal dengan memanfaatkan berbagai strategi yang lebih terintegrasi dan berbasis teknologi. Salah satu langkah utama yang diambil adalah memperluas jangkauan promosi investasi melalui penyelenggaraan forum-forum investasi, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang melibatkan para investor, pelaku industri, dan pemerintah daerah. Peningkatan nilai rencana penanaman modal juga bergantung pada strategi promosi yang proaktif, dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah mengimplementasikan berbagai inisiatif untuk menarik lebih banyak investor, baik domestik maupun internasional. Kegiatan seperti forum bisnis internasional dan RIF menjadi *platform* penting untuk memperkenalkan potensi investasi Indonesia kepada investor global. Forum-forum ini tidak hanya mempertemukan pelaku usaha, tetapi juga membuka peluang kolaborasi dan investasi antara perusahaan domestik dan internasional, baik dalam bentuk investasi langsung maupun kemitraan strategis.

Kunjungan kerja ke negara-negara target promosi investasi adalah salah satu strategi efektif dalam menjalin hubungan langsung dengan calon investor dari luar negeri. Dalam kegiatan ini, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melakukan presentasi tentang peluang investasi di Indonesia, memberikan informasi terkait kebijakan yang mendukung investasi, serta menjawab pertanyaan yang dapat meningkatkan kepercayaan investor. Kemudian, webinar dan pameran juga menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan informasi mengenai peluang investasi di Indonesia secara lebih luas dan mendalam, baik kepada investor domestik maupun internasional. Melalui webinar, informasi mengenai kebijakan investasi, fasilitas yang tersedia, dan berbagai sektor potensial dapat disampaikan dengan interaktif, serta membuka peluang bagi investor untuk berinteraksi langsung dengan pemerintah dan pelaku bisnis. Penerimaan misi-misi internasional dan kegiatan promosi

lainnya, seperti yang bekerja sama dengan asosiasi bisnis maupun pelaku usaha, juga mendukung tujuan untuk memperkenalkan Indonesia sebagai tujuan investasi yang menarik. Misi ini dapat berupa delegasi bisnis, pemerintahan, atau kelompok pemangku kepentingan yang tertarik untuk memahami lebih lanjut tentang potensi investasi di Indonesia.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus berupaya meningkatkan efektivitas promosi untuk menarik minat investor menanamkan investasinya di Indonesia. Pada 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mengadakan sosialisasi kebijakan Indonesia kepada agen promosi investasi milik Pemerintah China dan sembilan negara ASEAN dalam China-ASEAN Expo (CAEXPO) 2024. CAEXPO merupakan pameran perdagangan internasional tahunan yang diselenggarakan sejak 2024 dengan tujuan untuk mempromosikan kerja sama ekonomi, perdagangan investasi antara China dan 10 negara ASEAN. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM, mendorong investor China untuk membangun kolaborasi dengan mitra di ASEAN termasuk di Indonesia melalui lima sektor strategis utama, yaitu: 1) industri hilir berupa pengolahan mineral, pertanian, perikanan dan produk kehutanan; 2) ekosistem kendaraan listrik dan baterai; 3) bidang energi terbarukan dengan Indonesia secara aktif berkontribusi pada Jaringan Listrik ASEAN, memfasilitasi perdagangan listrik lintas batas dan mengintegrasikan sumber energi terbarukan ke dalam sistem tenaga regional; 4) layanan kesehatan dan bioteknologi; dan 5) pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

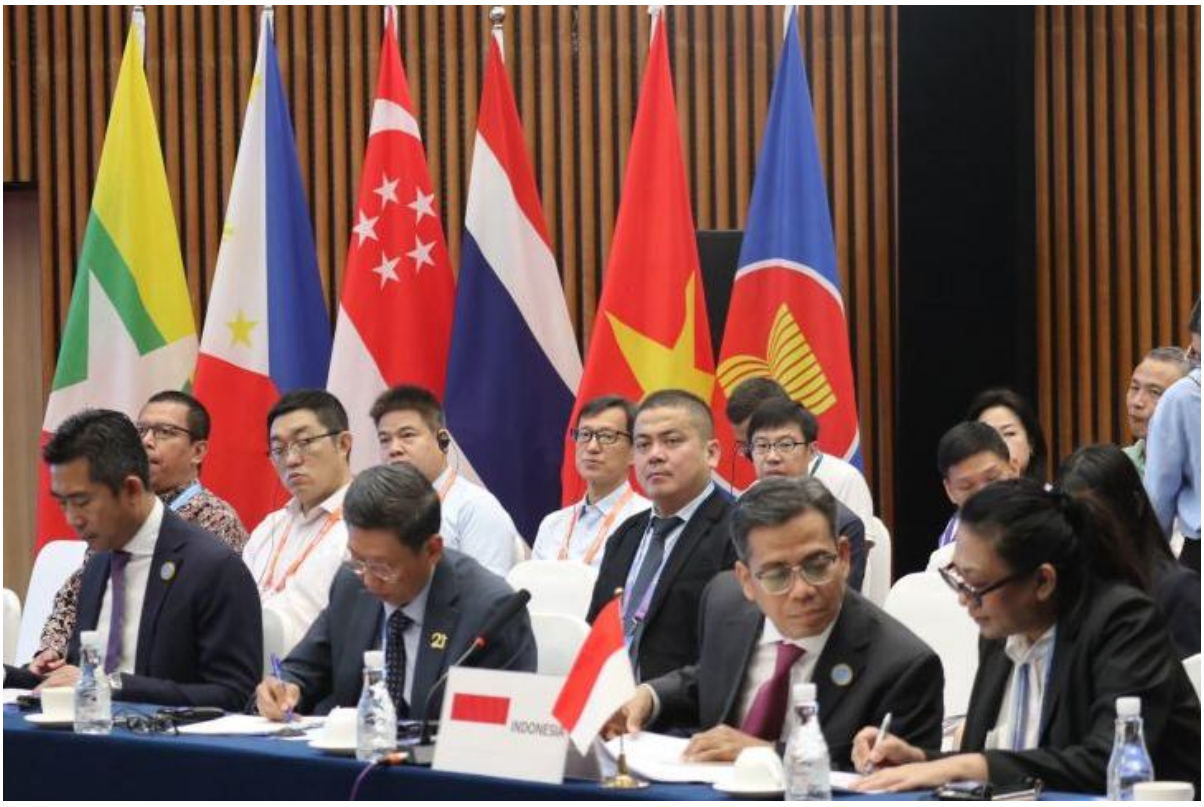

Gambar 3.56.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Sosialiasikan Kebijakan Investasi Indonesia di CAEXPO 2024

Pada 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menyelenggarakan forum bisnis berjudul "*Indonesia Investment Forum* (IIF) 2024" di London, Inggris pada 22 November 2024. IIF 2024 merupakan acara tahunan unggulan yang diselenggarakan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM, bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di London. Kegiatan ini dihadiri oleh sebanyak 150 pelaku usaha terkemuka di Inggris. Pada forum ini, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM menekankan peluang investasi

di Indonesia khususnya pada sektor pendidikan, *renewable energy*, serta hilirisasi. Berdasarkan catatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM, investasi Inggris di Indonesia mencapai USD2,28 miliar pada periode 2019-September 2024. Pada periode tersebut, investasi Inggris di Indonesia didominasi oleh sektor pertambangan (22%); tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan (17%); industri makanan (11%); jasa lainnya (9,2%); serta properti, kawasan industri, dan kegiatan usaha (8,2%).

Gambar 3.57.
Kegiatan *Indonesia Investment Forum*, London 2024

Hambatan yang dihadapi dalam mencapai target nilai rencana penanaman modal hasil promosi penanaman modal pada tahun 2024 berkaitan dengan beberapa faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi minat investor, antara lain:

1. Meskipun promosi dan kunjungan kerja dapat mengedukasi calon investor, ketidakpastian atau kompleksitas dalam kebijakan investasi, perizinan, dan regulasi di Indonesia masih menjadi kendala besar. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan investor yang mencari kepastian dalam berinvestasi.
2. Indonesia harus bersaing dengan banyak negara lain yang juga menawarkan peluang investasi yang menarik. Negara-negara dengan kebijakan yang lebih ramah terhadap investor, insentif pajak yang lebih menarik, atau infrastruktur yang lebih maju dapat lebih menarik minat investor internasional. Oleh karena itu, meskipun promosi melalui forum bisnis atau webinar efektif, namun ada banyak pesaing yang menawarkan hal serupa.
3. Walaupun promosi investasi dapat menarik minat investor, masih ada tantangan besar terkait infrastruktur maupun SDM yang belum sepenuhnya mendukung perkembangan investasi, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang.
4. Situasi ekonomi yang tidak stabil, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dapat menjadi hambatan bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Gejolak ekonomi global atau fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi keputusan investasi. Ditambah lagi, persepsi mengenai ketidakstabilan politik atau sosial di Indonesia dapat menambah keraguan investor.

Untuk mengatasi hambatan dalam mencapai target nilai rencana penanaman modal hasil promosi penanaman modal pada tahun 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM telah melaksanakan berbagai upaya, antara lain:

1. Kegiatan seperti forum bisnis internasional dan RIF menjadi *platform* penting untuk memperkenalkan potensi investasi Indonesia kepada investor global.
2. Kunjungan kerja ke negara-negara target promosi investasi adalah salah satu strategi efektif dalam menjalin hubungan langsung dengan calon investor dari luar negeri.
3. Webinar dan pameran menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan informasi mengenai peluang investasi di Indonesia secara lebih luas dan mendalam, baik kepada investor domestik maupun internasional.
4. Penerimaan misi-misi internasional dan kegiatan promosi lainnya, seperti yang bekerja sama dengan asosiasi bisnis dan pelaku usaha, juga mendukung tujuan untuk memperkenalkan Indonesia sebagai tujuan investasi yang menarik.

Rencana tindak lanjut Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM untuk mencapai target nilai rencana penanaman modal hasil promosi penanaman modal pada tahun 2024 dan seterusnya dapat dilakukan dengan:

1. Promosi digital yang lebih interaktif perlu dikembangkan dengan meningkatkan interaktivitas, seperti melalui platform *virtual reality* atau *augmented reality*, yang memungkinkan investor untuk lebih merasakan langsung potensi investasi yang ada.
2. Promosi melalui influencer dan jaringan global yang dapat menarik investor potensial dari luar negeri.
3. Diplomasi ekonomi yang lebih aktif dengan negara-negara yang memiliki potensi investasi tinggi, serta menjalin kerja sama lebih erat dengan organisasi internasional dan sektor swasta untuk menarik lebih banyak investasi ke Indonesia.
4. Menandatangani perjanjian perdagangan dan investasi bilateral dengan negara-negara maju dan berkembang, yang dapat memberikan jaminan perlindungan dan keuntungan lebih bagi investor asing.
5. Merumuskan rencana jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu, seperti sumber daya alam, dengan mendorong perkembangan sektor-sektor baru seperti ekonomi digital, inovasi teknologi, dan energi terbarukan.

IK-12: Jumlah Minat Penanam Modal Melalui Berbagai Kegiatan Promosi Penanaman Modal

Indikator kinerja "Jumlah Minat Penanam Modal Melalui Berbagai Kegiatan Promosi Penanaman Modal" berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai tingkat respons dan minat calon investor terhadap peluang investasi yang dipromosikan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM. Indikator ini mencatat jumlah investor yang menunjukkan ketertarikan untuk berinvestasi setelah terlibat dalam berbagai kegiatan promosi yang diadakan oleh kementerian, seperti pameran internasional, pertemuan bisnis, seminar, atau platform digital yang memfasilitasi koneksi antara investor dan peluang investasi di Indonesia.

Melalui indikator ini, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dapat mengevaluasi efektivitas upaya promosi dalam menarik perhatian investor, baik domestik maupun asing. Semakin besar jumlah minat penanam modal yang tercatat, semakin menunjukkan keberhasilan strategi promosi yang diterapkan dalam memperkenalkan potensi Indonesia sebagai tujuan investasi yang menarik dan kompetitif.

Tabel 3.17.
Capaian Indikator Kinerja Utama
Jumlah Minat Penanaman Modal Melalui Berbagai Kegiatan Promosi Penanaman Modal

Sasaran Program 4 (SP-4) Meningkatnya Efektivitas Promosi Penanaman Modal														
Indikator Kinerja 12 (IK-12) Jumlah Minat Penanaman Modal melalui berbagai Kegiatan Promosi Penanaman Modal (minat)														
2020		2021		2022		2023		2024		Capaian Kinerja 2024 (%)	Pertumbuhan Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Rata-rata Realisasi Kinerja Tahun 2020 - 2024	Rata-rata Pertumbuhan Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2024 (%)	Kategori Capaian Kinerja Tahun 2024
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R					
1.470	2.985	2.523	3.246	7.900	9.064	8.450	9.200	9.100	12.744	120,00	38,52	7.448	57,00	▲Sangat Baik

Pada tahun 2020, target yang ditetapkan adalah 1.470 minat, sementara realisasi yang tercatat jauh melampaui target dengan angka 2.985 minat. Pencapaian ini menunjukkan bahwa promosi yang dilakukan berhasil menarik minat yang lebih tinggi dari yang diperkirakan, mencerminkan adanya kepercayaan yang semakin besar dari calon investor terhadap iklim investasi di Indonesia. Di tahun 2021, targetnya meningkat menjadi 2.523 minat, dan realisasi yang tercatat juga mengalami peningkatan, yakni 3.246 minat, menunjukkan pertumbuhan yang baik dalam ketertarikan terhadap investasi di Indonesia.

Pada tahun 2022, target yang lebih tinggi ditetapkan, yaitu 7.900 minat, seiring dengan upaya intensifikasi promosi penanaman modal. Realisasi untuk tahun tersebut tercatat sebesar 9.064 minat, yang menunjukkan pencapaian yang sangat baik, melebihi target yang ditetapkan dan mengindikasikan bahwa kegiatan promosi semakin menarik perhatian investor. Di tahun 2023, meskipun target sedikit diturunkan menjadi 8.450 minat, realisasi yang tercatat justru lebih tinggi lagi, yaitu 9.200 minat, menggambarkan bahwa minat terhadap penanaman modal tidak hanya stabil, tetapi juga terus meningkat.

Pada tahun 2024, target ditetapkan sebesar 9.100 minat, dan realisasi yang tercatat mencapai 12.744 minat, yang melampaui target dengan capaian kinerja sebesar 120 persen. Hal ini menunjukkan hasil promosi yang sangat efektif, dengan angka minat yang jauh lebih tinggi daripada yang ditargetkan, menandakan semakin suksesnya upaya-upaya pemerintah dalam menarik perhatian investor. Pertumbuhan capaian kinerja tahun 2024 tercatat sebesar 38,52 persen, yang menunjukkan adanya lonjakan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Rata-rata realisasi kinerja selama periode 2020 hingga 2024 tercatat sebesar 7.448 minat, yang menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten dalam jumlah minat penanaman modal yang terhimpun. Rata-rata pertumbuhan capaian kinerja selama lima tahun mencapai 57 persen, yang mengindikasikan bahwa efektivitas promosi penanaman modal mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan pencapaian ini, capaian kinerja tahun 2024 diberikan kategori **"Sangat Baik"**, yang mencerminkan keberhasilan luar biasa dalam meningkatkan minat penanaman modal melalui berbagai kegiatan promosi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pencapaian ini juga menjadi indikasi positif bahwa iklim investasi di Indonesia semakin menarik bagi para investor domestik maupun internasional.

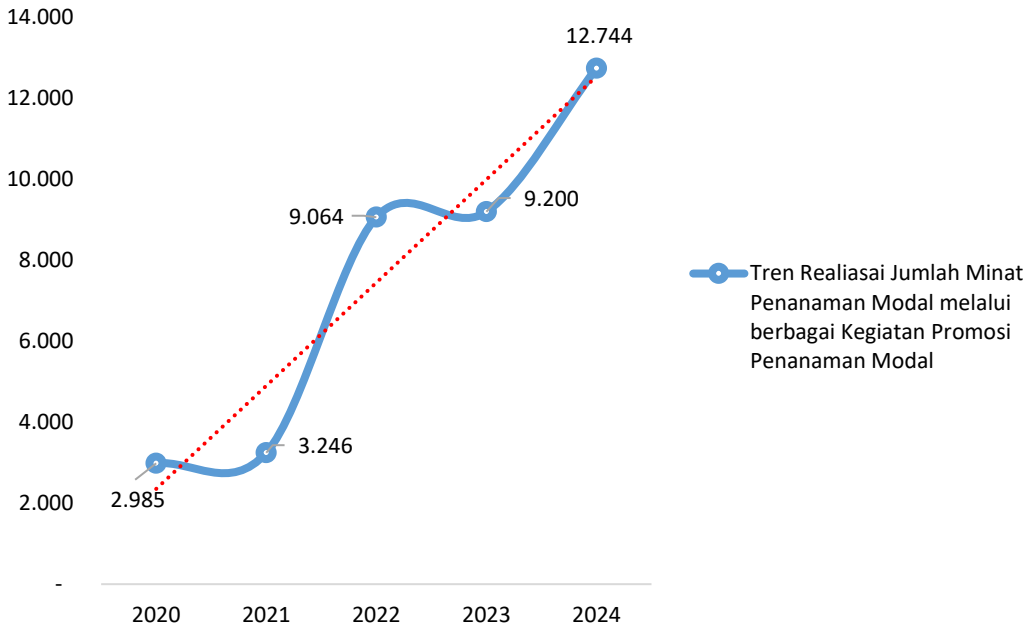

Gambar 3.58.
Tren Realisasi Jumlah Minat Penanaman Modal
melalui berbagai Kegiatan Promosi Penanaman Modal Tahun 2020-2024

Rangkaian kegiatan promosi penanaman modal dilaksanakan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melalui unit Direktorat di Kedeputian Promosi Penanaman Modal dan melibatkan calon investor yang berperan dalam menghasilkan total minat investasi sejumlah 12.744 calon investor dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.18.
Ringkasan Jumlah Minat Penanaman Modal Berdasarkan Unit Kerja

Kegiatan	Jumlah Minat
Direktorat Pengembangan Promosi	4.896
Direktorat Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik	2.952
Direktorat Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika	3.434
Direktorat Promosi Wilayah Amerika dan Eropa	1.462
Total	**12.744**

Pencapaian minat ini merupakan hasil kolaboratif dari seluruh direktorat di lingkungan Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal. Kolaborasi ini melibatkan Direktorat Promosi Wilayah Amerika dan Eropa, Direktorat Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika, Direktorat Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan Pasifik, serta Direktorat Pengembangan Promosi dan IIPC, dengan rincian sebagai berikut:

1. Minat Penanaman Modal dari Direktorat Pengembangan Promosi
   Hasil kegiatan pemasaran investasi Direktorat Pengembangan Promosi melalui 9 (sembilan) *Indonesia Investment Promotion Center* (IIPC) berupa fasilitasi dan kunjungan kerja serta penyelenggaraan forum internasional yang ditujukan kepada investor di Negara Tempat Kedudukan, diperoleh 4.896 Minat Investasi dari target 2.388 dengan pencapaian sebesar 205,02 persen dari target.
2. Minat Penanaman Modal dari Direktorat Promosi Wilayah Amerika dan Eropa
   Selama tahun 2024, dari hasil kegiatan pemasaran investasi melalui fasilitasi dan kunjungan kerja serta penyelenggaraan forum internasional yang ditujukan kepada investor di wilayah Amerika dan Eropa, diperoleh 1.462 Minat Investasi dari target 1.160 dengan pencapaian sebesar 120 persen dari target.

Gambar 3.59.
Kegiatan Pemasaran Investasi melalui kegiatan *Indonesia Investment Forum* 2024.

3. Minat Penanaman Modal dari Direktorat Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika
   Melalui kegiatan pemasaran investasi berdasarkan sektor pendukung prioritas nasional, penyelenggaraan forum internasional, dan penyelenggaraan promosi kegiatan di Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika selama tahun 2024, diperoleh 3.434 minat investasi dari target sebesar 2.692 atau pencapaian 127,6 persen dari target.

Gambar 3.60.
Kunjungan Kerja Menteri Investasi dan Hilirisasi/ BKPM ke Tiongkok, 2024

4. Minat Penanaman Modal dari Direktorat Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik (AASP)
   Jumlah minat penanaman modal di wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan Pasifik pada tahun 2024 sebanyak 2.952 minat investasi atau mencapai 108,1% dari target sebesar 2.730 minat investasi. Dengan kata lain, capaian tersebut sudah memenuhi target yang ditetapkan melalui berbagai kegiatan promosi penanaman modal di wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan Pasifik sepanjang tahun 2024.

Gambar 3.61.
Pelaksanaan *Indonesia-Australia Business Summit* 2024

Secara umum, realisasi jumlah ketertarikan dalam investasi melalui serangkaian kegiatan promosi pada tahun 2024 telah mencapai target yang ditentukan. Selama tahun 2024 terdapat sejumlah hambatan dalam mencapai target ketertarikan investasi, antara lain sebagai berikut:

1. Masalah persepsi negatif terkait korupsi, ketidakpastian hukum, dan kurangnya transparansi di beberapa sektor dapat menghambat minat investor, terutama dari luar negeri yang membutuhkan stabilitas dan kepastian hukum.
2. Dinamika kegiatan promosi investasi sehingga pelaksanaan kegiatan promosi investasi tidak sesuai dengan rencana.
3. Adanya penghematan anggaran yang semula dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan kegiatan promosi.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang disebutkan dan mencapai target ketertarikan investasi melalui kegiatan promosi pada tahun 2024, beberapa solusi yang lebih rinci dapat diterapkan sebagai berikut:

1. Peningkatan mekanisme transparansi melalui *platform* digital yang memungkinkan investor untuk memantau perkembangan peraturan dan kebijakan investasi secara *real-time.*
2. Memastikan kebijakan investasi yang diterapkan di seluruh sektor berjalan dengan jelas dan konsisten dengan regulasi yang berlaku. Hal ini dapat dilakukan melalui sistem *e-Government* yang memberi akses terbuka bagi publik terkait proses izin dan pengawasan investasi.
3. Menggunakan analitik data untuk memahami tren minat pasar dan mengadaptasi rencana promosi dengan lebih responsif terhadap perubahan situasi.
4. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan promosi sebelumnya untuk memperbaiki dan meningkatkan strategi promosi yang lebih relevan dengan kebutuhan investor.
5. Mengembangkan promosi berbasis digital, seperti webinar, media sosial, dan penggunaan *platform* digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan memungkinkan promosi tetap berlangsung meskipun ada perubahan situasi yang tidak terduga.
6. Melakukan promosi melalui kanal digital internasional dengan menghadirkan presentasi investasi Indonesia yang terkurasi dengan baik, menyoroti peluang dan regulasi yang mendukung.
7. Mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk menyelenggarakan acara promosi investasi secara virtual yang dapat menghemat biaya perjalanan dan logistik.

Rencana tindak lanjut ke depan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mencapai target ketertarikan investasi melalui kegiatan promosi penanaman modal pada tahun 2024 akan melibatkan serangkaian langkah strategis yang lebih terfokus pada

penguatan transparansi, efisiensi operasional, serta peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah dan sektor swasta.

1. Meningkatkan komunikasi publik mengenai kebijakan yang lebih pro-investasi, serta menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki kualitas regulasi dan tata kelola, akan mengurangi ketidakpastian hukum yang masih menjadi tantangan bagi investor.
2. Kegiatan promosi berbasis digital, seperti webinar, *roadshow virtual*, dan forum investasi internasional, menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi keterbatasan anggaran serta meningkatkan jangkauan promosi. Dengan memanfaatkan *platform* digital, Indonesia dapat menjangkau lebih banyak investor dengan biaya yang lebih efisien.
3. Pengembangan *platform* investasi *online* yang mudah diakses akan mempermudah investor dalam memperoleh informasi dan mengajukan izin. Ini akan memberikan kenyamanan bagi investor untuk melakukan investasi dengan lebih cepat dan efisien.

Sasaran Program 5: Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Penanaman Modal

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki sasaran program 5 "Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Penanaman Modal". Sasaran program ini memiliki indikator kinerja "Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri yang Telah Diimplementasikan". Berdasarkan indikator kinerja tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM diarahkan pada upaya memperkuat kerjasama baik bilateral, perjanjian kerja sama dengan Kementerian/Lembaga serta dunia usaha terkait, maupun regional dan multilateral. Perjanjian bilateral mencakup perjanjian promosi dan penanaman modal (P4M), *comprehensive economic partnership agreement* (CEPA/EPA), nota kesepaham/ *memorandum of understanding* (MoU). Perjanjian kerja sama dengan Kementerian/Lembaga dan dunia terkait mencakup kesepakatan dengan berbagai instansi maupun perusahaan dalam negeri. Perjanjian regional dan multilateral meliputi ASEAN summit, AEM-AIA council meeting, CCI meeting 76, AANZFTA, RCEP, IMT-GT, BIMP-EAGA, APEC IEG 1, APEC IEG 2, APEC *leaders week*, dan G20. Berbagai kerja sama dan kesepakatan tersebut adalah upaya Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM untuk mencapai nilai realisasi investasi di Indonesia yang semakin tinggi, berkualitas, dan berkelanjutan. Kerja sama penanaman modal menjadi upaya strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk meningkatkan kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap kerja sama penanaman modal. Kepercayaan tersebut merupakan pondasi dasar bagi pelaku usaha/ penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

IK-13: Kesepakatan/ Perjanjian Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri Yang Telah Diimplementasikan

Sasaran program ini memiliki indikator kinerja yang tidak hanya sebatas pada level *output,* tetapi sama level *outcome.* Hal ini karena jumlah kesepakatan perjanjian tidak hanya dihitung dari kesepatan yang terjadi tetapi sampai pada tahap yang telah diimplementasikan. Berdasarkan dokumen perjanjian kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2024, indikator kinerja kesepakatan/perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan memiliki target sebesar 69 kesepatan. Tahun 2024 adalah periode akhir dari Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Oleh karenanya, capaian pada tahun 2024 merupakan capaian akhir dari periode perencanaan strategis periode 2020-2024.

Tabel 3.19.
Capaian Indikator Kinerja Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri yang Telah Diimplementasikan (Kesepakatan)

Sasaran Program 5 (SP-5) Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Penanaman Modal														
Indikator Kinerja 13 (IK-13) Kesepakatan/ Perjanjian Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri Yang Telah Diimplementasikan (Kesepakatan)														
2020		2021		2022		2023		2024		Capaian Kinerja 2024 (%)	Pertumbuhan Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Rata-rata Realisasi Kinerja Tahun 2020 - 2024	Rata-rata Pertumbuhan Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2024 (%)	Kategori Capaian Kinerja Tahun 2024
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R					
50	58	53	73	58	155	64	64	69	69	100	7,81	83,80	21,82	▲ Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas, bahwa indikator kesepakatan/ perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan memiliki capaian sebanyak 69 kesepakatan pada tahun 2024. Capaian tersebut telah mencapai target tahun 2024 sebanyak 69 kesepakatan. Berdasarkan kondisi tersebut, tingkat capaian kinerja tahun 2024 adalah 100 persen atau terkategori **sangat baik**. Jumlah kesepakatan/ perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan juga mengalami peningkatan dibanding realisasi tahun 2023 sebesar 64 kesepakatan. Peningkatan tersebut menjadikan capaian kinerja pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 7,81 persen. Merujuk rata-rata realisasi jumlah kesepakatan/perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan bahwa sepanjang tahun 2020-2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki rata-rata sebesar 83,80 kesepakatan. Rata-rata tersebut lebih tinggi dibanding capaian tahun 2024. Artinya, ini menjadi dasar kondisi existing untuk menetapkan target yang lebih tinggi ke depannya. Capaian kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki tren pertumbuhan yang positif, rata-rata capaian pertumbuhan capaian kinerja tahun 2020-2024 sebesar 21,82 persen. Berikut ini merupakan grafik capaian dan realisasi kesepakatan/perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM selama periode 2020-2024.

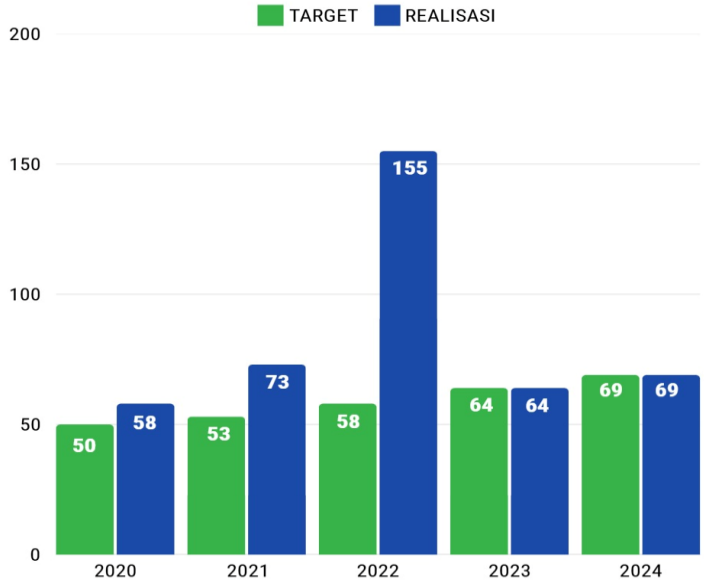

Gambar 3.62.
Target dan Realisasi Kesepakatan/ Perjanjian Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri Yang Telah Diimplementasikan selama Periode 2020-2024
Sumber: Deputi Kerja Sama Penanaman Modal

Capaian kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melalui Deputi Kerja Sama Penanaman Modal terus berupaya melakukan perbaikan kinerja dan peningkatan capaian

kesepakatan/ perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan. Pada tahun 2024, terdapat beberapa kesepakatan untuk yang telah dilakukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menuturkan bahwa pihaknya berencana untuk membuka EU Desk (European Union Desk/Desk Uni Eropa) untuk meningkatkan kerja sama antara Indonesia dan kawasan tersebut. Ia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan hasil dari pertemuan bersama para pelaku bisnis yang tergabung dalam Kamar Dagang Eropa (European Business Chambers of Commerce/EuroCham).

Gambar 3.63.
Rencana Menteri Investasi Membuka EU Desk

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus berupaya memperkuat hubungan bilateral dengan berbagai wilayah. Pada tahun 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menyampaikan adanya hubungan investasi yang baik dan berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia dan Afrika.

Gambar 3.64.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Memberikan Pidato Penguatan Hubungan antara Indonesia dan Afrika

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bekerja sama memperkokoh kemitraan strategis pada tiga bidang. Ketiga bidang tersebut adalah kerja sama di sektor energi hijau, hilirisasi dan *human capital*. Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat untuk mempererat hubungan ini, menciptakan kemitraan yang saling melengkapi dan memperkuat posisi *Global South* di kancah internasional. Kami percaya bahwa kemitraan ini tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pengembangan *human capital*.

Gambar 3.65.
Rencana Menteri Investasi Membuka EU Desk

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menggelar *Memorandum of Understanding* (MoU) *signing* dengan PT Grab Teknologi Indonesia, PT GoTo Gojek Tokopedia, dan PT Tokopedia. Kerja sama ini dalam rangka meningkatkan sinergi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis digital di Indonesia, serta mendorong para UMKM untuk memperluas pasar. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menyampaikan apresiasi kepada para pihak yang terlibat dalam kerja sama ini. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berharap akan lebih banyak lagi kerja sama serupa yang akan memberikan manfaat bagi perkembangan UMKM di Indonesia.

Gambar 3.66.
MoU Kerja Sama antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM dan PT Grab Teknologi Indonesia, PT GoTo Gojek Tokopedia

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatatkan kesepakatan sebesar Rp3,9 triliun dari 579 kemitraan antara Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan pelaku Usaha Besar (UB). Kesepakatan ini melibatkan 158 usaha besar dan 389 UMKM di seluruh Indonesia. Dalam forum ini juga dilakukan pemberian penghargaan kepada 10 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan UMKM yang telah melaksanakan kemitraan di bidang penanaman modal.

Gambar 3.67.
Forum Kemitraan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM dengan Usaha Besar dan UMKM

Dalam upaya memperkuat iklim investasi dan meningkatkan keselarasan antarlembaga dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Perizinan Terkait Sektor Keuangan dengan Bank Indonesia. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi.

Gambar 3.68.
Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM dan Bank Indonesia

IPEF *negotiations* adalah negosiasi yang dilakukan oleh 14 negara anggota Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) untuk membangun kerja sama ekonomi di kawasan Indo-Pasifik. Berdasarkan berita yang diterbitkan oleh *The Jakarta Post*, Negosiasi Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran *(Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity*/IPEF) telah mencapai kesepakatan pada tiga dari empat pilar utama, yaitu rantai pasok, energi bersih, dan tata kelola perusahaan. Namun, pilar perdagangan belum mencapai konsensus, terutama karena perbedaan pandangan mengenai standar ketenagakerjaan dan lingkungan yang mengikat. Beberapa negara, termasuk Vietnam dan Indonesia, enggan berkomitmen pada standar yang ketat dengan ketentuan penegakan yang mengikat. Situasi ini diperburuk oleh dinamika politik dalam negeri Amerika Serikat menjelang pemilihan umum 2024, yang mempengaruhi prospek penyelesaian kesepakatan perdagangan di bawah IPEF. Meskipun demikian, pemerintah AS berkomitmen untuk melanjutkan negosiasi guna menawarkan alternatif terhadap pengaruh perdagangan Tiongkok yang semakin meningkat di kawasan Indo-Pasifik.

Gambar 3.69.
IPEF Negosiasi

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga ikut serta dalam *Trade and Investment Working Group (TIWG*) Presidensi G20 Brasil 2024 adalah forum yang mendorong kerja sama perdagangan dan investasi antarnegara anggota G20. Berdasarkan laman resmi G20 *Sustainable Finance Working Group* (SFWG) dengan judul "*Welcome Brazil 2024 G20 Presidency - SFWG Newsletter* April 2024. Forum ini bertujuan untuk mengatasi tantangan ekonomi global dan mencapai pembangunan berkelanjutan. Kegiatan *Trade and Investment Working Group (TIWG)* dalam Presidensi G20 Brazil 2024 difokuskan pada upaya meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi global yang inklusif dan berkelanjutan. Kelompok kerja ini bertujuan untuk membahas kebijakan dan praktik terbaik yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi hambatan perdagangan, serta mempromosikan investasi yang bertanggung jawab.
Beberapa agenda utama yang disusun oleh TIWG meliputi:

1) Mendorong Perdagangan Bebas dan Adil: Memfasilitasi dialog untuk mengurangi proteksionisme dan meningkatkan akses pasar bagi negara-negara berkembang.
2) Investasi Berkelanjutan: Mempromosikan investasi yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan transisi energi hijau.
3) Digitalisasi Perdagangan: Meningkatkan kolaborasi dalam pemanfaatan teknologi digital untuk mempermudah proses perdagangan dan investasi.
4) Ketahanan Rantai Pasok Global: Membahas langkah-langkah untuk memperkuat ketahanan rantai pasok global, terutama dalam menghadapi krisis seperti pandemi dan konflik geopolitik.

Kegiatan ini diselenggarakan melalui serangkaian pertemuan, diskusi, dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan organisasi internasional. Hasil dari pembahasan TIWG diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret untuk diterapkan oleh negara-negara anggota G20.

Gambar 3.70.
Trade and Investment Working Group (TIWG)

Pertemuan WTO *Joint Initiative on Investment Facilitation for Development* (JI IFD) adalah pertemuan terkait Perjanjian Fasilitasi Investasi untuk Pembangunan (IFD). Situs resmi *World Trade Organization* (WTO) menyediakan informasi mengenai Investment Facilitation for Development (IFD), sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mempermudah proses investasi dan mendukung pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Inisiatif ini berfokus pada peningkatan transparansi, efisiensi, dan koordinasi kebijakan investasi, serta mengurangi hambatan yang dihadapi oleh investor. Melalui IFD, WTO berupaya menciptakan lingkungan investasi yang lebih kondusif dan mendorong aliran investasi yang berkelanjutan ke negara-negara berkembang. Inisiatif ini juga mencakup pembahasan mengenai kerangka kerja internasional untuk memfasilitasi investasi, termasuk pertukaran praktik terbaik dan peningkatan kapasitas institusional.

Gambar 3.71.
Pertemuan WTO *Joint Initiative on Investment Facilitation for Development* (JI IFD)

Kesepakatan/perjanjian yang telah diimplementasikan tersebut meliputi kerja sama bilateral, regional dan multilateral Perjanjian investasi yang telah diimplementasikan terdiri dari 43 (empat puluh tiga) kesepakatan/perjanjian kerja sama bilateral serta 26 (dua puluh enam) kesepakatan/perjanjian kerja sama regional dan multilateral. Pada lingkup bilateral, terdapat kesepakatan/perjanjian yang terdiri dari:

a. Perjanjian investasi sebanyak 22 (dua puluh dua) perjanjian investasi (BIT/P4M) Indonesia dengan negara mitra yang diimplementasikan antara lain yaitu: BIT Indonesia-Korea Selatan, BIT Indonesia-Thailand, BIT Indonesia-Jordania, BIT Indonesia-Bangladesh, BIT Indonesia-Ceko, BIT Indonesia-Suriah, BIT Indonesia-Mongolia, BIT Indonesia-Kuba/Cuba, BIT Indonesia-Turkmenistan, BIT Indonesia-Iran, BIT Indonesia-Denmark, BIT Indonesia-Rusia, BIT Indonesia-Mauritius, BIT Indonesia-Maroko, BIT Indonesia- Sudan, BIT Indonesia-Swedia, BIT Indonesia-Polandia, BIT Indonesia-Finlandia, BIT Indonesia-Qatar, BIT Indonesia-Singapura, BIT Indonesia-Uni Emirat Arab, dan BIT Indonesia-Swiss. Kemudian terdapat 2 (dua) Perjanjian terkait Investasi yaitu *Investment Agreement* (IA) antara Indonesia *Economic Trade Office* (IETO) dengan *Taiwan Economic Trade Office* (TETO), dan satu perjanjian *Investment Support Agreement* (ISA) antara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan *Overseas Private Investment Corporation* (OPIC) dari Amerika Serikat yang sekarang menjadi *Development Finance Corporation* (DFC).
b. Terdapat juga 5 (lima) perjanjian bilateral terkait investasi dalam bentuk perjanjian perdagangan bebas (*Free Trade Agreement*/FTA) atau kemitraan ekonomi komprehensif bilateral (*Comprehensive Economic Partnership Agreement*/CEPA) dengan bab investasi didalamnya dan telah berlaku, yaitu Indonesia-Jepang EPA, Indonesia-EFTA CEPA, Indonesia-Australia CEPA, Indonesia-Korea CEPA, serta Indonesia-UAE CEPA. Sehingga total terdapat 29 (dua puluh sembilan) perjanjian internasional lingkup bilateral terkait investasi dengan mitra negara atau entitas ekonomi asing.
c. Sebanyak 7 (tujuh) forum internasional lingkup bilateral terkait ekonomi dan investasi yang dilakukan pada tahun 2024 sebagai implementasi dari komitmen atau kesepakatan dengan negara mitra antara lain yaitu:
    1) *Working Group of Investment Joint Committee Trade and Investment Indonesia Economic and Trade Office – Taipei Economic and Trade Office* (WGI JCTI IETO-TETO);
    2) *Working Group of Investment* (WGI) dan Senior Official Meeting (SOM) dan 13th Ministerial Meeting (MM) Indonesia – Singapura;
    3) *Working Group on Trade and Investment* (WGTI) of the 2nJoint *Committee on Economic Cooperation* (JCEC) Indonesia-Korea Selatan;
    4) Malaysia Indonesia *Investment Cooperation Working Group* (MIICWG);
    5) Summary of Discussion (SoD) Round ke-10 Perundingan Indonesia - Canada CEPA;
    6) *Summary of Discussion* (SoD) Putaran Pertama BIT Indonesia - Timor Leste;
    7) *Summary of Discussion* (SoD) Intersesi Perundingan Indonesia - GCC FTA untuk *Chapter Economic Cooperation*;
d. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) atau perjanjian kerja sama (PKS) sebanyak 7 (tujuh) kesepakatan dengan berbagai mitra kerja sama dalam dan luar negeri yang dimiliki oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM yang disepakati pada tahun 2024 antara lain:
    1) Nota Kesepahaman (NK) antara Kementerian Investasi dengan PT Grab Teknologi Indonesia;
    2) Nota Kesepahaman (NK) antara Kementerian Investasi dengan PT Tokopedia;
    3) Nota Kesepahaman (NK) antara Kementerian Investasi dengan PT GoTo Tokopedia;
    4) Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara kementerian Investasi/ BKPM dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Terkait Pemanfaatan Data Kependudukan pada Sistem OSS RBA;

5) Nota Kesepahaman (NK) antara Kementerian Investasi/ BKPM dengan Universitas Lambung Magkurat di Kalimantan Timur;
6) Nota Kesepahaman (NK) antara Bank Indonesia dengan Kementerian Investasi/ BKPM;
7) Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM dengan PT PLN (Persero).

Adapun kesepakatan/perjanjian kerja sama regional dan multilateral merupakan bagian dalam kerangka kegiatan *Investment Agreement* (IA) IETO - TETO, *Investment Support Agreement* RI - US, ASEAN - *China Free Trade Agreement* (FTA), ASEAN - Australia New Zealand FTA, *Investment Facilitation for Development of World Trade Organization* (WTO), ASEAN - Hong Kong FTA, ASEAN - Canada FTA, dan *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS) Reform UNCITRAL. Rincian kesepakatan/perjanjian pada lingkup regional dan multilateral dilaksanakan dalam forum sebagai implementasi dari perjanjian yang sudah ada, yang terdiri dari:

a. Pada tingkat Regional dan Subregional terdapat 19 (sembilan belas) forum antara lain:
   1) ASEAN *Coordinating Committee on Investment*;
   2) IMT-GT *Working Group on Trade and Investment Facilitation Meeting*;
   3) ASEAN-China FTA WGI *Meeting*;
   4) ASEAN-Australia New Zealand FTA *Committee on Investment*;
   5) ASEAN *Economic Community* (AEC) *Council Meeting*;
   6) ASEAN *Coordinating Committee on Services* (CCS);
   7) ASEAN *Senior Economic Officials Meeting* (SEOM)/ASEAN *Economic Minister* (AEM) *Meeting*;
   8) ASEAN-Hong Kong Sub-*Committee on Investment*;
   9) *High-Level Task Force on* ASEAN *Economic Integration* (HLTF-EI);
   10) ASEAN-Canada FTA *Working Group on Investment*;
   11) *Committee of the Whole for* ASEAN *Economic Community* (CoW);
   12) ASEAN *Investment Area* (AIA) *Council Meeting*;
   13) ASEAN Summit;
   14) Pertemuan Tingkat Senior Official/Menteri IMT-GT;
   15) BIMP-EAGA *Trade and Investment Facilitation and Promotion Cluster* (TIPC) *Meeting*;
   16) Pertemuan Tingkat Senior Official/Menteri BIMP-EAGA;
   17) ASEAN *Investment Forum*;
   18) RCEP *Committee on Services and Investment* (CSI);
   19) ASEAN *Investment Report* (AIR) *Consultative Forum*.
b. Pada tingkat Multilateral terdapat sebanyak 7 (tujuh) forum antara lain:
   1) APEC Meeting (*Investment Experts Group* (IEG) dan *Senior Official Meeting* (SOM);
   2) IPEF Negotiations;
   3) T*rade and Investment Working Group* G20 Presidensi Brazil;
   4) *Trade and Investment Ministrial Meeting* G20 Presidensi Brazil;
   5) WG III (*Investor-State Dispute Settlement Reform*/ISDS) UNCITRAL;
   6) Pertemuan WTO *Joint Initiative on Investment Facilitation for Development* (JI IFD);
   7) UNESCAP Regional *Investment Promotion Action Plan*;

Beberapa kendala dan hambatan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM untuk mencapai target indikator kinerja ini pada tahun 2024 antara lain:

1) Perubahan jadwal perundingan secara mendadak;
2) Masih terbatasnya efektivitas monitoring terhadap pelaksanaan nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama yang telah disepakati dengan Kementerian/Lembaga serta mitra dunia usaha;

3) Perlunya perubahan terhadap Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 untuk penyesuaian nomenklatur Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM serta penambahan indikator dalam penilaian kinerja;
4) Koordinasi antar lembaga atau pemangku kepentingan pemerintah Indonesia yang terlibat dalam perumusan bahan posisi perundingan masih belum optimal;
5) Belum optimalnya penyebarluasan dan sosialisasi hasil perjanjian atau kesepakatan yang telah dicapai. Hal ini disebabkan oleh belum disetujuinya program sosialisasi atau diseminasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan dari kesepakatan tersebut;
6) Kurangnya pemahaman yang Komprehensif tentang *Outward Investment;*
7) Belum optimalnya pencapaian target akibat kebijakan refocusing anggaran yang dilakukan beberapa kali dalam satu tahun berjalan;
8) Masih terbatasnya sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM memiliki beberapa rencana tindak lanjut ke depan dalam mendorong peningkatan kegiatan penanaman modal antara lain:

1) Menerbitkan sertifikat digital guna meningkatkan kinerja DPMPTSP, kinerja PPB Pemerintah Daerah, serta kinerja PPB Kementerian/Lembaga pada tahun 2024, sejalan dengan perkembangan teknologi;
2) Melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman (NK) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM;
3) Mengimplementasikan digitalisasi pengisian survei minat pelaku usaha untuk *Outward Investment;*
4) Pemanfaatan media sosial untuk menyebarluaskan program dan kegiatan Kedeputian Bidang Kerja Sama Penanaman Modal bagi pemangku kepentingan;
5) Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kedeputian Bidang Kerja Sama Penanaman Modal.

Sasaran Program 6: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki sasaran program “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal”. Sasaran program ini memiliki indikator kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal”. Berdasarkan indikator kinerja tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki uraian IKM sebagai berikut:

Tabel 3.20.
Capaian Indikator Kinerja
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal (Indeks)

Sasaran Program 6 (SP-6) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal														
Indikator Kinerja 14 (IK-14) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal (Indeks)														
2020		2021		2022		2023		2024		Capaian Kinerja 2024 (%)	Pertumbuhan Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Rata-rata Realisasi Kinerja Tahun 2020 -2024	Rata-rata Pertumbuhan Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2024 (%)	Kategori Capaian Kinerja Tahun 2024
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R					
3,3	3,29	3,35	3,26	3,4	3,4	3,45	3,34	3,5	3,5	100	3,29	98,76	0,12	▲Sangat Baik

IK-14: Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pelayanan penanaman modal melalui penilaian atas kegiatan layanan berbantuan, yaitu konsultasi tatap muka, aplikasi *WhatsApp Messenger*, panggilan video, email, dan layanan *call center*. Target yang ditetapkan adalah nilai indeks 3,5 dalam skala 4. Penilaian atas kegiatan layanan berbantuan ini dilakukan melalui survei

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan diharapkan dapat memberikan gambaran atas persepsi dan pengalaman pelaku usaha/penanam modal secara kuantitatif. Nilai yang diperoleh dari survei tersebut akan digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan layanan berbantuan sehingga dapat terus mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki dan bagian mana yang perlu dikembangkan. Dengan evaluasi dan pengembangan pelayanan secara berkelanjutan, diharapkan pelaku usaha/penanam modal dapat merasa nyaman dan percaya akan informasi yang disediakan.

Indikator penilaian yang digunakan dalam survei kinerja ini yaitu indikator kelembagaan dan kegiatan, kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM), serta waktu penyelesaian perizinan berusaha yang ditetapkan. Kuesioner yang disebarkan melalui *Google Form* yang disampaikan kepada pelaku usaha setelah selesai menggunakan layanan konsultasi yang kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan dengan menggunakan *Method of Successive Interval* (MSI) secara triwulan. Pengambilan responden didasarkan pada metode pengambilan data berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan metode MSI terhadap hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.21.
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal Tahun 2024

No	Ruang Lingkup (Unsur) Pelayanan	NRR 2024				
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Rata-rata
1.	Persyaratan	3,33	3,37	3,48	3,48	3,39
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	3,36	3,42	3,55	3,50	3,43
3.	Waktu penyelesaian	3,22	3,30	3,39	3,41	3,30
4.	Biaya/tarif	3,96	3,97	3,95	3,96	3,96
5.	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3,43	3,47	3,57	3,57	3,49
6.	Kompetensi pelaksana	3,47	3,51	3,61	3,61	3,53
7.	Perilaku pelaksana	3,65	3,68	3,76	3,74	3,69
8.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	3,45	3,48	3,61	3,60	3,50
9.	Sarana dan prasarana	3,44	3,50	3,61	3,60	3,50
Nilai Rata-rata (NRR) IKM Tertimbang		**3,44**	**3,49**	**3,58**	**3,57**	**3,50**
IKM Unit Pelayanan Prioritas ({NRR IKM : 4} x 100)		**86,20**	**87,25**	**89,57**	**89,37**	**87,55**

Secara keseluruhan, kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2024 adalah **Baik** dengan indeks sebesar **3,50**. Dari 9 (sembilan) unsur pelayanan, terdapat 3 (tiga) unsur mendapatkan penilaian Sangat Baik, yaitu biaya/tarif, kompetensi pelaksana, dan perilaku pelaksana. Sementara itu, terdapat 6 (enam) unsur mendapatkan penilaian Baik, yaitu persyaratan; sistem, mekanisme, dan prosedur; waktu penyelesaian; produk spesifikasi jenis pelayanan; penanganan pengaduan, saran, dan masukan; serta sarana dan prasarana. Dari 9 (sembilan) ruang lingkup (unsur) pelayanan, Nilai Rata-Rata (NRR) paling tinggi adalah unsur biaya/tarif pelayanan dengan nilai indeks Triwulan I adalah 3,96, Triwulan II adalah 3,97, Triwulan III adalah 3,95, dan Triwulan IV adalah 3,96. Dari 9 (sembilan) ruang lingkup (unsur) pelayanan, Nilai Rata-Rata (NRR) paling rendah adalah waktu penyelesaian dengan nilai indeks Triwulan I adalah 3,22, Triwulan II adalah 3,30, Triwulan III adalah 3,39, dan Triwulan IV adalah 3,41. Unsur waktu penyelesaian memperoleh nilai paling rendah karena banyak kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha tidak dapat langsung terselesaikan sehingga harus dieskalasi kepada tim teknis pengembang Sistem OSS. Lamanya respon dari tim yang

bersangkutan menyebabkan pelaku usaha terhambat dalam memproses perizinannya dan mengakibatkan penilaian pada unsur waktu penyelesaian menurun.

Permasalahan dan Hambatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM dalam pencapaian kinerja sasaran "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal" sebagai berikut:

1. Adanya proses revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang belum selesai sehingga dapat berdampak signifikan dalam memberikan kepastian berusaha yang lebih baik bagi Pelaku Usaha.
2. Sistem OSS masih belum stabil sehingga menyebabkan terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha, seperti *bug*, konektivitas, dan integrasi antar kementerian/lembaga yang belum optimal.
3. Keterbatasan jumlah SDM yang kompeten dalam pelayanan perizinan dan fasilitasi penanaman modal dan kurangnya pelatihan teknis untuk mengoperasikan Sistem OSS.

Rencana Tindak Lanjut Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk menjawab permasalahan dan hambatan adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan koordinasi dengan kementerian teknis untuk mendorong penerbitan perizinan berusaha melalui Sistem OSS Berbasis Risiko bagi perizinan berusaha yang saat ini masih diterbitkan secara manual di luar Sistem OSS.
2. Sistem OSS merupakan prasarana utama dalam mendukung kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Namun masih sering terjadi *error* dalam Sistem OSS dan banyak kendala yang terjadi sehingga sangat diperlukan perbaikan dan peningkatan kembali Sistem OSS.
3. Melakukan kerja sama yang intensif dengan daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan supervisi dalam rangka memberikan pelayanan pendampingan dan meningkatkan pemahaman pelaku usaha di daerah.
4. Mendorong peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pelayanan penanaman modal melalui pelatihan berkala dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan, baik nasional maupun internasional guna mendukung pelayanan

Sasaran Program 7: Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM memiliki sasaran program 7 "Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pelayanan Pelaksanaan Penanaman Modal". Sasaran program ini memiliki indikator kinerja "Persentase Fasilitasi Perusahaan yang Dapat Diselesaikan Permasalahannya". Berdasarkan indikator kinerja tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berupaya untuk memberikan fasilitasi terhadap perusahaan yang bermasalah. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal memberikan fasilitasi terhadap perusahaan yang bermasalah dengan kriteria:

1) Memiliki permasalahan yang terkendala kurang dari 1 tahun;
2) Memiliki nilai rencana investasi yang belum dapat direalisasikan;
3) Tidak bernilai strategis.

IK-15: Persentase Fasilitasi Perusahaan yang Dapat Diselesaikan Permasalahannya

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal membagi upaya fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan ke dalam lima wilayah direktorat. Direktorat wilayah satu memiliki fokus fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Lampung. Direktorat wilayah dua fokus fasilitasi penyelesaian permasalahan

perusahaan di Provinsi Jambi, Daerah Khusus Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Tengah. Direktorat wilayah tiga fokus fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Sulawesi Utara. Direktorat wilayah empat fokus fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan. Direktorat wilayah lima fokus fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan di Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua Barat Daya.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM memiliki target kinerja presentase fasilitasi perusahaan yang dapat diselesaikan permasalahannya sebesar 79 persen. Tahun 2024 adalah periode akhir dari Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Oleh karenanya, capaian pada tahun 2024 merupakan capaian akhir dari periode perencanaan strategis periode 2020-2024.

Tabel 3.22.
Capaian Indikator Kinerja
Persentase Fasilitasi Perusahaan yang Dapat Diselesaikan Permasalahannya (Persentase)

Sasaran Program 7 (SP-7) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal														
Indikator Kinerja 15 (IK-15) Persentase Fasilitasi Perusahaan yang Dapat Diselesaikan Permasalahannya (Persentase)														
2020		2021		2022		2023		2024		Capaian Kinerja 2024 (%)	Pertumbuhan Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Rata-rata Realisasi Kinerja Tahun 2020 - 2024	Rata-rata Pertumbuhan Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2024 (%)	Kategori Capaian Kinerja Tahun 2024
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R					
		67		70	68,9		103,8	79	106,15	134,37	2,26			▲ Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki target persentase fasilitasi perusahaan yang dapat diselesaikan permasalahannya sebesar 79 persen pada tahun 2024. Capaian realisasi persentase fasilitasi perusahaan yang dapat diselesaikan permasalahannya sebesar 106,15 persen pada tahun 2024. Capaian tersebut berhasil melampui target yang telah ditetapkan, sehingga capaian kinerja sasaran program meningkatnya kualitas pengendalian dan pelayanan pelaksanaan penanaman modal sebesar 134,37 persen atau terkategori **sangat baik**. Capaian realisasi tersebut merupakan rata-rata dari realisasi persentase fasilitasi perusahaan yang dapat diselesaikan permasalahannya di masing-masing wilayah direktorat I sampai direktorat V. Berikut ini merupakan target dan realisasi capaian di masing-masing wilayah direktorat pada tahun 2024.

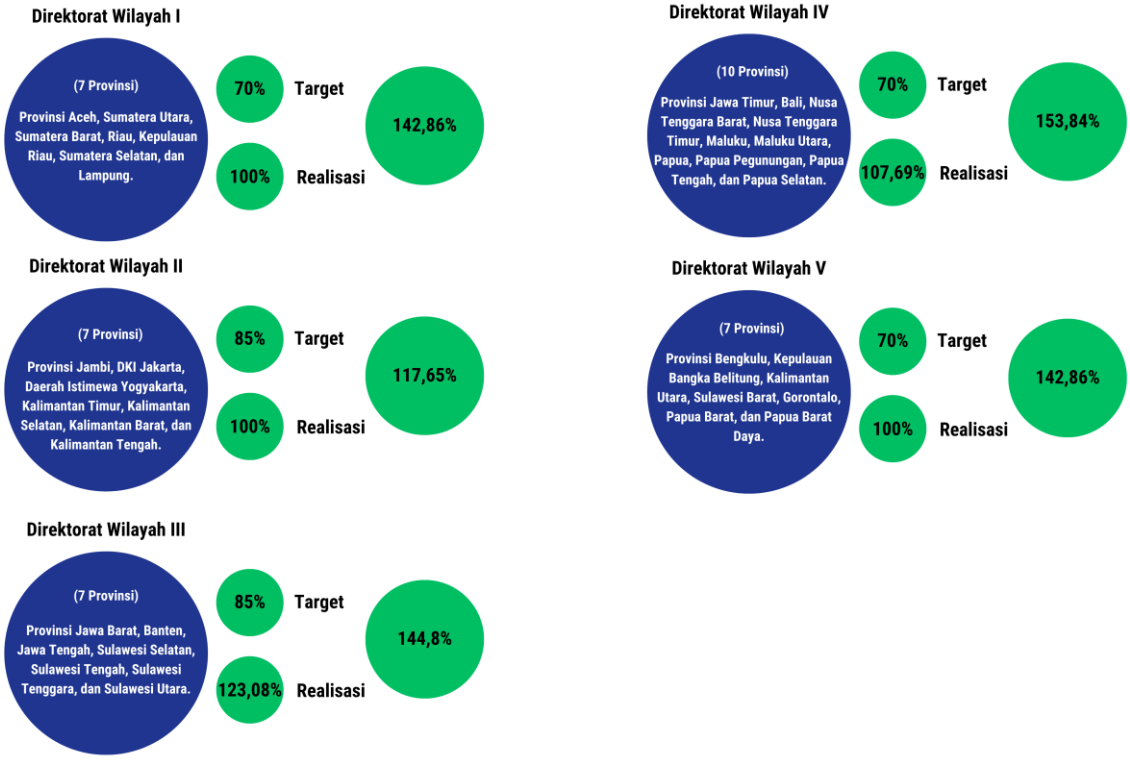

Gambar 3.72.
Wilayah, Target, dan Realisasi Masing-Masing Direktorat Tahun 2024

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melalui Direktorat Wilayah I telah memfasilitasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan di lingkup wilayah kerja direktorat wilayah I **di antaranya**: 1) Permasalahan perizinan; 2) Permasalahan dengan pemegang saham; 3) Hambatan dari masyarakat sekitar; dan 4) Gangguan keamanan. Fasilitasi permasalahan tersebut juga melibatkan beberapa pihak dan instansi di daerah. Pada tahun 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melalui Direktorat Wilayah I telah melakukan kegiatan fasilitasi terhadap 21 perusahaan atau 100 persen dari target sebesar 21 perusahaan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini merupakan pelayanan aftercare dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM kepada pelaku usaha baik PMA/PMDN yang menghadapi permasalahan dalam pelaksanaan proyek setelah terbitnya perizinan berusaha. Kegiatan ini melibatkan para stakeholders terkait seperti kementerian sektor, instansi daerah, pengelola kawasan industri, perusahaan BUMN, maupun masyarakat.

Dalam menjalankan kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah, pertama kali Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menerima laporan/surat pengaduan dari perusahaan, kemudian ditindaklanjuti dengan penelaahan masalah dan rapat fasilitasi yang bisa dilakukan lebih dari satu kali. Secara umum, tingkat keberhasilan dan jangka waktu kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan tergantung dengan tingkat kerumitan dari kasus yang dihadapi serta pihak-pihak yang terlibat. Untuk itu diperlukan koordinasi antar lembaga baik secara formal maupun informal untuk penyelesaian masalah tersebut. Beberapa kasus fasilitasi permasalahan yang membutuhkan jangka waktu panjang **di antaranya** adalah terkait Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan permasalahan lahan.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melalui Direktorat Wilayah II telah melakukan fasilitasi beberapa permasalahan pada tahun 2024 meliputi: permasalahan perizinan, konflik dengan pemegang saham, hambatan dari masyarakat sekitar, dan gangguan keamanan. Kegiatan fasilitasi ini melibatkan instansi dan pihak-pihak terkait. Di Direktorat Wilayah II, jumlah fasilitasi permasalahan yang berhasil terselesaikan mencapai 31 Badan Usaha, sehingga diperoleh persentase sebesar 100% dari target 31 Badan Usaha. Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitasi permasalahan melalui surat resmi

kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM atau DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota, yang kemudian diteruskan kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM, akan direspon sesuai dengan lokasi proyek. Wilayah yang tercakup meliputi Provinsi Jambi, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Pada tahun 2024, Direktorat Wilayah II telah melaksanakan kegiatan fasilitasi terhadap 31 perusahaan, mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 31 perusahaan. Kegiatan ini merupakan bagian dari layanan *aftercare* yang diberikan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM kepada pelaku usaha, baik PMA (Penanaman Modal Asing) maupun PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), yang menghadapi permasalahan dalam pelaksanaan proyek setelah terbitnya perizinan berusaha. Kegiatan ini melibatkan berbagai *stakeholders* terkait, termasuk Kementerian/Lembaga teknis (pengampu sektor), instansi daerah, pengelola kawasan industri, perusahaan BUMN, serta masyarakat.

Dalam menjalankan kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM pertama-tama menerima laporan atau surat pengaduan dari perusahaan. Selanjutnya, dilakukan penelaahan masalah dan diadakan rapat fasilitasi yang dapat dilakukan lebih dari satu kali, tergantung pada kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Secara umum, tingkat keberhasilan dan jangka waktu kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan sangat bergantung pada tingkat kerumitan kasus serta pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi antar lembaga, baik secara formal maupun informal, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Beberapa kasus fasilitasi permasalahan yang memerlukan jangka waktu panjang antara lain terkait rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan permasalahan tumpang tindih lahan.

Sepanjang tahun 2024, Direktorat Wilayah III Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal berhasil melaksanakan kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan pada 32 perusahaan, atau sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan. Kegiatan fasilitasi ini merupakan bagian dari layanan aftercare yang diberikan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, yang bertujuan untuk membantu pelaku usaha yang menghadapi kendala dalam pelaksanaan proyek setelah penerbitan perizinan berusaha.

Proses fasilitasi pada umumnya berasal dari surat yang disampaikan pelaku usaha yang ditujukan kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM atau menerima laporan/pengaduan dari perusahaan yang mengalami masalah, hambatan atau kendala. Setelah itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM akan melakukan penelaahan terhadap permasalahan tersebut dan mengorganisir rapat fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dapat dilaksanakan lebih dari satu kali, tergantung dari kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Melalui kegiatan ini, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian/Lembaga lain, Instansi Daerah, Pengelola Kawasan Industri/KEK/KPBPB, Perusahaan BUMN, maupun unsur masyarakat untuk mencari solusi yang tepat dan efektif. Kinerja fasilitasi yang dilakukan ini mencerminkan pentingnya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, Direktorat Wilayah III Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal/BKPM berkolaborasi erat dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi maupun Kabupaten/Kota di tujuh Provinsi yang berada di Wilayah III untuk memastikan penyelesaian masalah yang dihadapi perusahaan dapat berjalan dengan lancar.

Pada tahun 2024, Direktorat Wilayah IV telah melakukan kegiatan fasilitasi terhadap 28 perusahaan atau 107,69 persen dari target sebesar 26 perusahaan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini merupakan pelayanan aftercare dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM kepada pelaku usaha baik PMA/PMDN yang menghadapi permasalahan dalam pelaksanaan proyek setelah terbitnya perizinan berusaha. Kegiatan ini melibatkan para stakeholders terkait seperti kementerian sektor, instansi daerah, pengelola kawasan industri, perusahaan BUMN, maupun masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah, pertama kali Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menerima laporan/surat pengaduan dari perusahaan, kemudian ditindaklanjuti dengan penelaahan masalah dan rapat fasilitasi yang bisa dilakukan lebih dari satu kali. Secara umum, tingkat keberhasilan dan jangka waktu

kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan tergantung dengan tingkat kerumitan dari kasus yang dihadapi serta pihak-pihak yang terlibat. Untuk itu diperlukan koordinasi antar lembaga baik secara formal maupun informal untuk penyelesaian masalah tersebut. Kasus-kasus yang ditemui dalam proses fasilitasi permasalahan perusahaan sangat beragam, antara lain permasalahan progres perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), permasalahan ekspor, permasalahan penutupan kegiatan usaha.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melalui Direktorat Wilayah V telah melakukan fasilitasi terhadap beberapa permasalahan **di antaranya**: permasalahan perizinan, permasalahan dengan pemegang saham, hambatan dari masyarakat sekitar, gangguan keamanan. Fasilitasi permasalahan melibatkan instansi dan pihak- pihak yang terkait. Pada Direktorat Wilayah II, jumlah fasilitasi permasalahan yang terselesaikan sebanyak 11 Badan Usaha sehingga diperoleh persentase sebesar 100 persen dari target 11 Badan Usaha. Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitasi permasalahannya melalui surat resmi kepada Kementerian Investasi/BKPM atau DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota yang diteruskan kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitasi direspon sesuai dengan lokasi proyek yang wilayahnya berada di Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Beberapa kendala dan hambatan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM untuk mencapai target indikator kinerja ini pada tahun 2024 antara lain:

1) Adanya banyak kepentingan baik dalam konflik perusahaan;
2) Belum adanya data terpadu yang memberikan status lahan *clear* and *clean,* terutama lahan di dalam masyarakat adat;
3) Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar berbagai pihak yang terlibat permasalahan;
4) Adanya perbedaan nilai sosial dan nilai budaya;
5) Kurangnya kepastian hukum terkait status lahan.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki beberapa rencana tindak lanjut ke depan dalam mendorong peningkatan fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan antara lain:

1) Peningkatan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan berbagai stakeholders terkait;
2) Pembuatan sistem yang lebih tertata dan sistematis terkait status lahan yang *clear and clean;*
3) Mengembangkan berbagai mekanisme dengan pendekatan nilai sosial dan nilai budaya;
4) Bimbingan teknis terhadap DPMPTSP di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk dapat berperan aktif dan memberikan mekanisme terkait penyelesaian sengketa perusahaan;
5) Melakukan pemetaan dan sertifikasi lahan.

Sasaran Program 8: Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi Penanaman Modal

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki sasaran program 8 “Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi Penanaman Modal”. Sasaran program ini memiliki indikator kinerja “Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE.

IK-16: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE. Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian interviu, serta penilaian visitasi (pada lokus tertentu).

Tabel 3.23.
Capaian Indikator Kinerja Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)

Sasaran Program 8 (SP-8) Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi Penanaman Modal														
Indikator Kinerja 16 (IK-16) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)														
2020		2021		2022		2023		2024		Capaian Kinerja 2024 (%)	Pertumbuhan Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Rata-rata Realisasi Kinerja Tahun 2020 - 2024	Rata-rata Pertumbuhan Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2024 (%)	Kategori Capaian Kinerja Tahun 2024
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R					
		3,38	2,80	3,00	2,80	3,00	2,83	3,00	3,54	118,00	25,09			▲ Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM memiliki target persentase indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik sebesar 3,00 pada tahun 2024. Capaian nilai indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah 3,54. Capaian tersebut telah melebih target yang telah ditetapkan dengan persentase capaian kinerja sebesar 118,00 persen atau terkategori **sangat baik**. Berdasarkan capaian tahun 2023, capaian kinerja tahun 2024 menunjukkan peningkatan sebesar 25,09 persen. Hasil dari pemantauan dan evaluasi SPBE yang dilakukan pada Tahun 2024 memperoleh nilai 3,54 dengan predikat Sangat Baik. Pencapaian ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,71 poin atau 25 persen dibandingkan perolehan pada tahun sebelumnya yaitu 2,83 pada tahun 2023. Pencapaian ini melampaui target yang telah disepakati sebelumnya, yaitu 3,14 dan menggambarkan adanya peningkatan efisiensi proses bisnis, terutama pada aspek manajemen serta audit teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Nilai Indeks SPBE dengan Tingkat Kematangan Indikator sebagai berikut.

INDEKS SPBE - KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL | **3,54 (Sangat Baik)**

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek

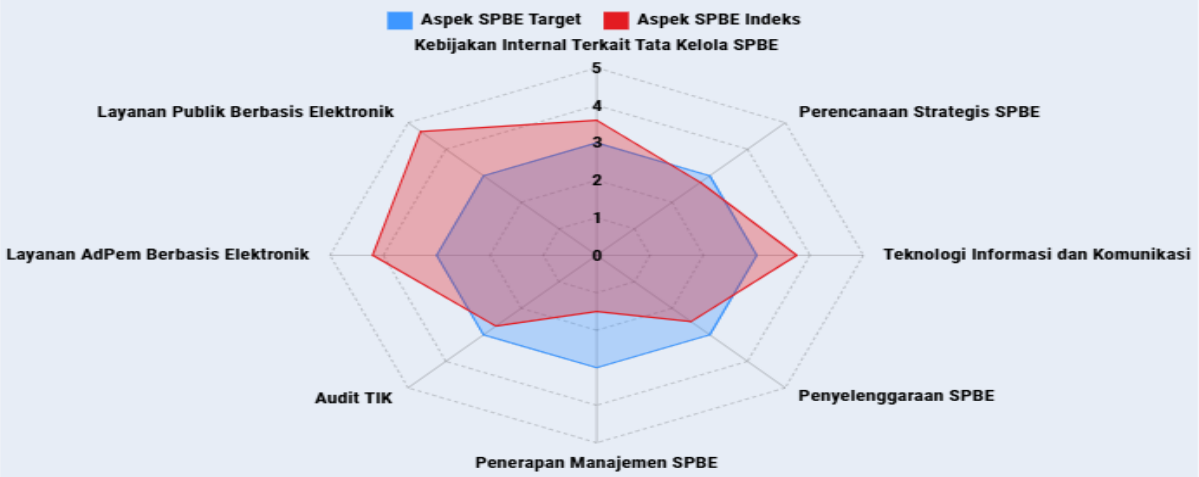

SPBE	Nilai 2024
Domain Kebijakan SPBE	3,54
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,6
Domain Tata Kelola SPBE	3,1
Perencanaan Strategis SPBE	2,75
Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,75
Penyelenggara SPBE	2,5
Domain Manajemen SPBE	1,82
Penerapan Manajemen SPBE	1,5
Audit TIK	2,67
Domain Layanan SPBE	4,38
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,2
Layanan Publik Berbasis Elektronik	4,67

Gambar 3.73.
Indeks SPBE Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Untuk tingkat kematangan sistem pemerintahan berbasis elektronik, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM juga menunjukkan kinerja yang positif dibanding tahun 2023. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada tahun 2024 telah menerbitkan Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 176 Tahun 2024 tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Tujuan penyusunan dokumen ini adalah untuk memberikan informasi hasil dalam penyusunan inisiatif dan program kegiatan Kementerian, selain itu dokumen ini juga dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengambilan keputusan bagi pimpinan. Terdapat lima arahan terkait kebijakan SPBE yang menjadi fondasi dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kementerian, antara lain sebagai berikut:

a) Kepatuhan terhadap hukum dan regulasi eksternal. Digitalisasi proses bisnis di lingkungan Kementerian adalah keluaran dari produk hukum. Oleh karena itu, segala proses digitalisasi yang sedang dan akan berjalan pada Kementerian harus berlandaskan pada hukum dan regulasi yang berlaku;

b) Budaya pelayanan berorientasi pelanggan. Semua inovasi yang dibuat oleh Kementerian bertujuan untuk memudahkan pelaku usaha, sehingga minat perizinan usaha semakin meningkat dan dapat menjadi pendorong pertumbuhan perekonomian nasional;
c) Kontinuitas dan ketersediaan layanan bisnis. Sistem Kementerian berperan sangat krusial dalam ekosistem pemerintahan karena terintegrasi dengan 64 (enam puluh empat) sistem pemerintahan lainnya. Ketersediaan layanan menjadi penting untuk memelihara kepercayaan pelaku usaha;
d) Kualitas manajemen informasi. Informasi terkait perizinan berusaha di Indonesia harus dikelola dengan optimal untuk meningkatkan kepercayaan pelaku usaha;
e) Optimalisasi biaya proses bisnis. Dengan adanya digitalisasi, *proses bisnis end-to-end* dapat berjalan dengan optimal.

Saat ini proses bisnis yang terdapat di Kementerian belum seluruhnya didukung oleh sistem informasi/aplikasi. Dengan kondisi demikian terdapat risiko yang mungkin timbul seperti tidak efisiennya operasional, kesulitan dalam monitoring kinerja, hingga kesulitan dalam berintegrasi dengan sistem lain. Gambar di bawah merupakan arsitektur proses bisnis Kementerian di mana terdapat proses bisnis pada unit kerja, baik yang memerlukan dukungan aplikasi maupun yang perlu dioptimalisasi.

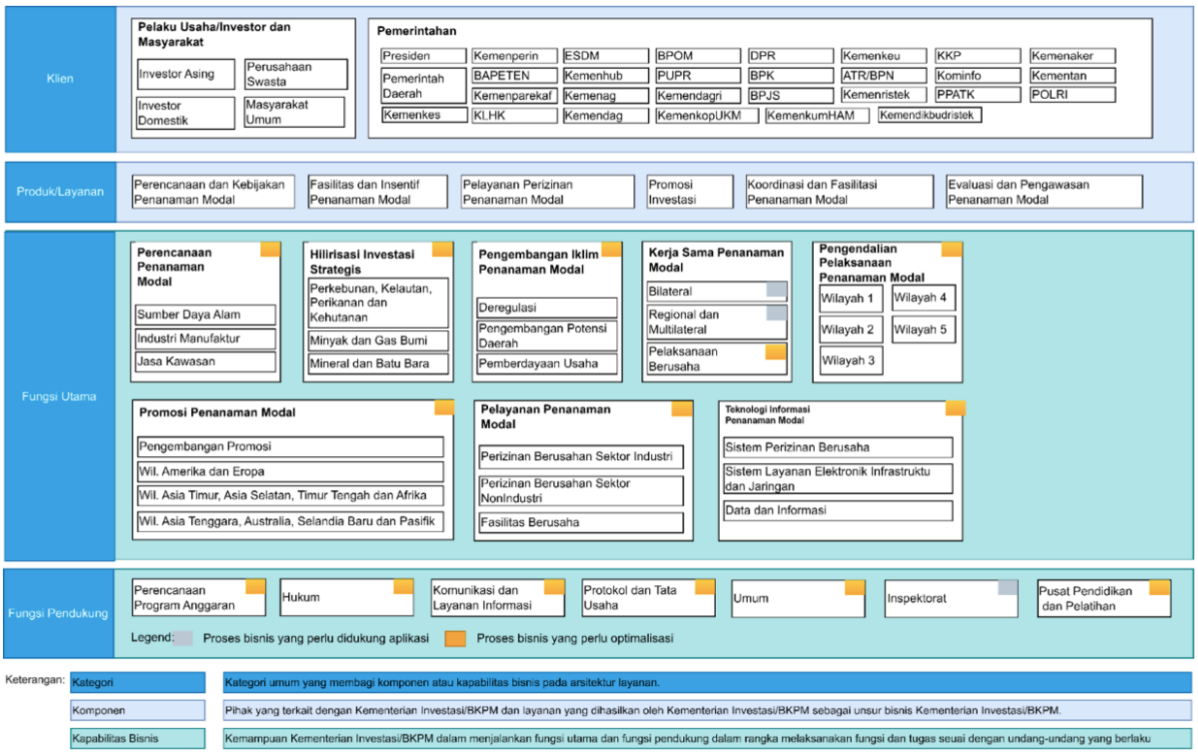

Gambar 3.74.
Arsitektur Proses Bisnis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Arsitektur proses bisnis ideal dalam SPBE adalah rencana strategis penggunaan TI untuk mengintegrasikan dan mengelola proses bisnis di Kementerian secara efisien dan efektif. Hal ini mencakup cara organisasi, otomatisasi, dan manajemen proses yang direncanakan secara strategis menggunakan teknologi. Saat ini, sebagian proses bisnis di Kementerian belum terdigitalisasi, maka target arsitektur organisasi ke depannya adalah digitalisasi proses bisnis. Penyelenggaraan proses bisnis yang terdigitalisasi merupakan proses bisnis yang penyelenggaraannya bertransformasi dari penggunaan teknologi konvensional ke teknologi digital. Transformasi ini melibatkan penggunaan perangkat lunak, aplikasi, dan alat teknologi lainnya untuk mengotomatisasi, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kinerja proses bisnis.

Beberapa langkah penting yang dapat dilakukan dalam mencapai arsitektur proses bisnis kondisi target adalah:

a) Identifikasi, yaitu identifikasi dan dokumentasi proses bisnis Kementerian kemudian dilakukan penyempurnaan proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas;
b) Integrasi proses, yaitu bagaimana proses bisnis yang terkait dari berbagai unit kerja dapat diintegrasikan dan bagaimana aliran data dan informasi dapat diatur antar proses;
c) Otomatisasi. Pada beberapa proses bisnis di Kementerian terdapat proses yang masih dilakukan secara manual. Untuk itu organisasi perlu melakukan otomatisasi proses bisnis melalui pemilihan teknologi dan platform yang tepat;
d) Keamanan dan kepatuhan. Untuk mencapai arsitektur proses bisnis target, organisasi diharapkan tetap memperhatikan aspek keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku;
e) Pengukuran dan pemantauan kinerja. Pengukuran dan pemantauan kinerja proses bisnis dilakukan untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai dengan standar dan target yang telah ditetapkan;
f) Manajemen perubahan, yaitu bagaimana perubahan dalam proses bisnis dikelola dan dikomunikasikan kepada pegawai dan pemangku kepentingan yang terlibat;
g) Integrasi dengan sistem dan teknologi yang ada, salah satunya dapat dilakukan melalui pengembangan antarmuka pemrograman aplikasi (application programming interface/API) dan antarmuka yang memungkinkan integrasi dengan sistem yang ada.

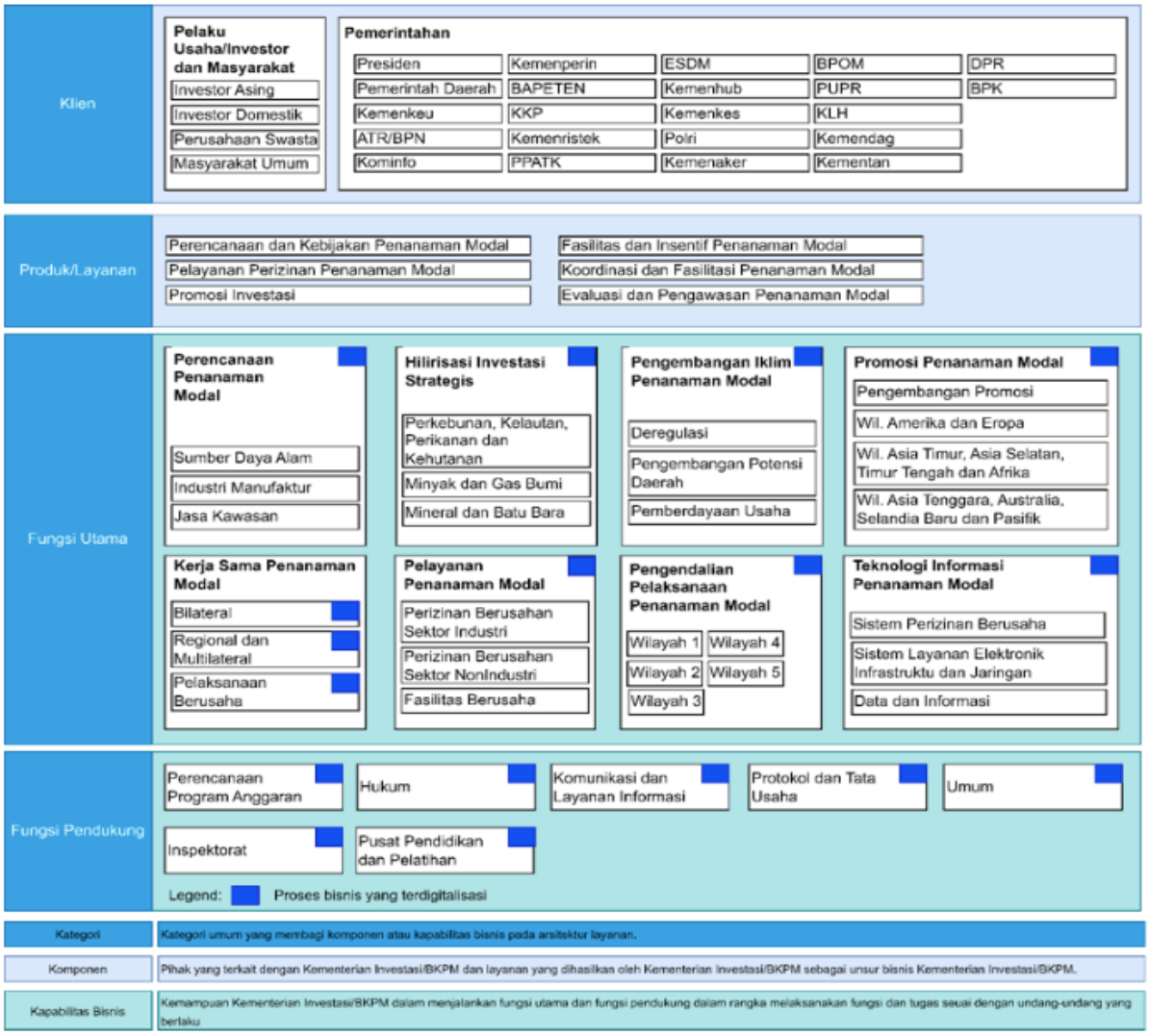

Gambar 3.75.
Arsitektur Proses Bisnis Target Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Arsitektur aplikasi di Kementerian dapat dibagi berdasarkan besaran fungsinya, yaitu fungsi yang mencakup perizinan dan fungsi yang tidak mencakup perizinan. Arsitektur aplikasi dari Kementerian disajikan dalam gambar berikut.

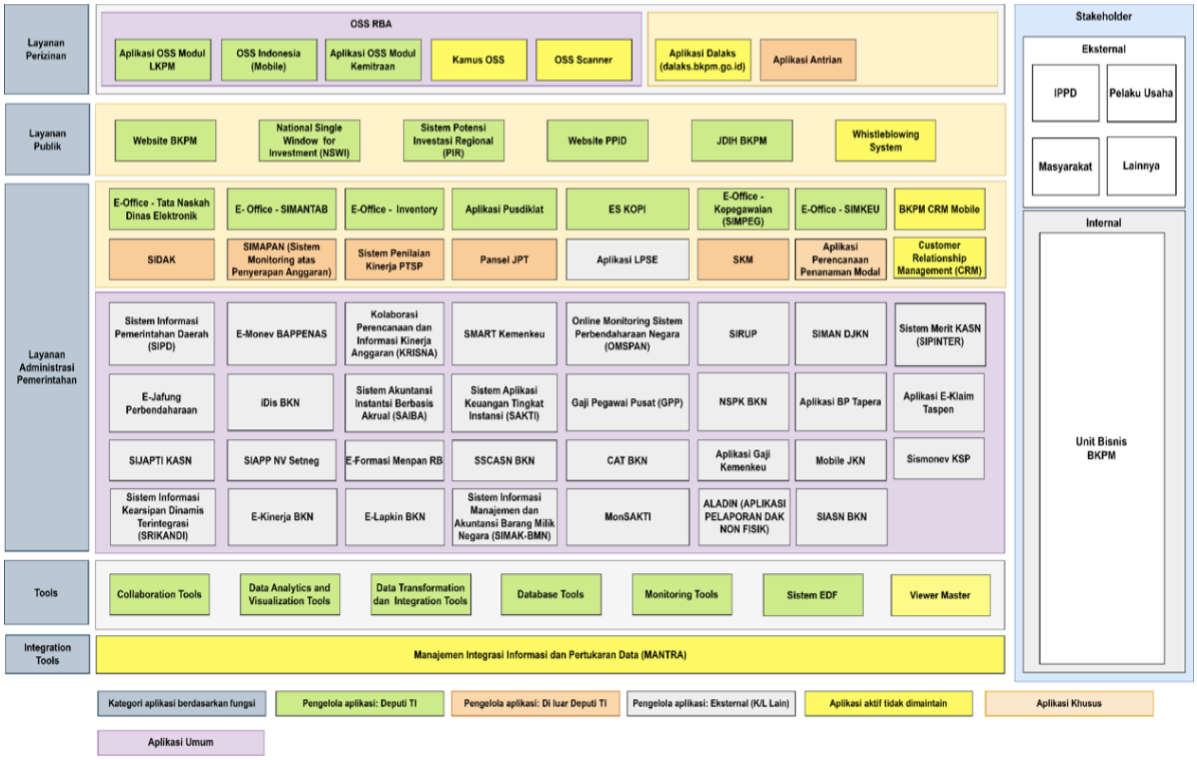

Gambar 3.76.
Arsitektur Aplikasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Kondisi ideal arsitektur aplikasi dalam SPBE adalah rancangan yang mencakup semua komponen, struktur, dan prinsip yang diperlukan untuk mengatur dan merinci bagaimana aplikasi dan sistem TI harus beroperasi dalam lingkungan SPBE (Gambar 3.77). Arsitektur ini bertujuan untuk mendukung tujuan dan visi SPBE yang melibatkan layanan publik berbasis elektronik, efisiensi pemerintahan, transparansi, dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. Arsitektur ini dirancang untuk memastikan bahwa aplikasi dalam SPBE dapat beroperasi secara efisien, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya. Arsitektur ini juga harus mempertimbangkan perkembangan teknologi dan perubahan kebijakan pemerintah yang mungkin memengaruhi desain dan implementasi aplikasi SPBE. Dengan kata lain, arsitektur aplikasi SPBE memberikan panduan dan kerangka kerja yang diperlukan untuk mengembangkan, mengelola, dan menjaga aplikasi SPBE agar sesuai dengan visi dan misi pemerintah dalam melayani masyarakat dan pemangku kepentingan.

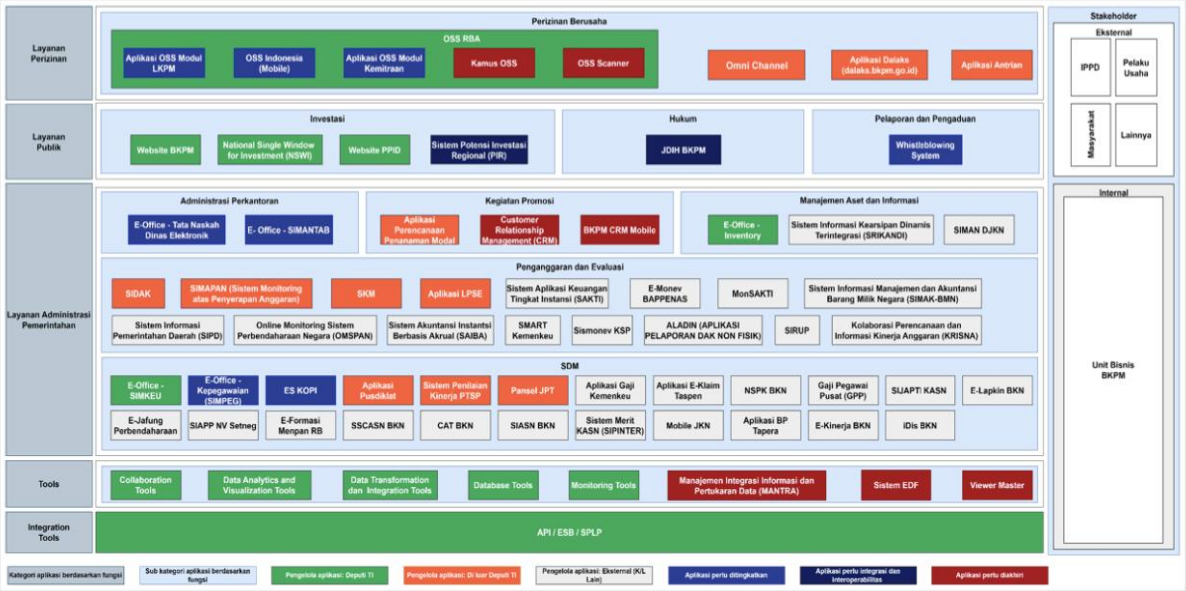

Gambar 3.77.
Arsitektur Aplikasi Target Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Berdasarkan hasil analisis, hasil asesmen, dan arah kebijakan Kementerian, untuk mencapai target SPBE, terdapat sembilan belas inisiatif program TI (IPTI) yang akan dilakukan oleh Kementerian selama tahun 2024 sampai dengan 2028. Inisiatif program kegiatan di Kementerian meliputi program kegiatan peningkatan aplikasi dan layanan, peningkatan infrastruktur, manajemen SPBE, keamanan, data dan informasi, serta implementasi tata kelola dan manajemen SPBE. Berikut ini gambar daftar rekomendasi berdasarkan hasil analisis kesenjangan yang telah dipetakan terhadap IPTI.

Gambar 3.78.
Pemetaan Rekomendasi terhadap Iniasiatif Program Teknologi Informasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Beberapa kendala dan hambatan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk mencapai target indikator kinerja ini pada tahun 2024 antara lain:

1) Kurangnya sinkronisasi antara rencana strategis TI dan rencana strategis utama organisasi;
2) Perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah pusat, khususnya terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

3) Ekspektasi yang terus meningkat dari pengguna layanan seiring dengan perkembangan teknologi;
4) Belum adanya tata kelola teknologi informasi di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM; adanya keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur TI seperti *storage* dan server yang reliabel dikarenakan keterbatasan anggaran dan adanya peraturan yang kurang dinamis;
5) Adanya keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur TI seperti storage dan server yang reliabel dikarenakan keterbatasan anggaran dan adanya peraturan yang kurang dinamis;
6) Perlu adanya pengelolaan sumber daya manusia teknologi informasi.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki beberapa rencana tindak lanjut ke depan dalam mendorong peningkatan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik antara lain:

1) Penerapan Manajemen Layanan Teknologi Informasi ISO 20000-1:2018 yang merupakan standar internasional manajemen layanan teknologi informasi dan mendorong penggunaan pendekatan proses yang terintegrasi dalam pelaksanaan layanan TI yang efektif serta menetapkan pedoman untuk kualitas manajemen layanan TI. ISO 20000-1:2018 secara khusus memberikan persyaratan untuk penyedia layanan untuk merencanakan, membangun, mengoperasikan, memonitor, mereviu, memelihara dan meningkatkan sistem manajemen layanan. Persyaratannya meliputi proses perancangan, transisi, penyelenggaraan, atau peningkatan layanan untuk memenuhi kebutuhan layanan dari organisasi. Penerapan unsur-unsur SPBE yang selaras dengan ISO 20000-1:2018 di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah berjalan efektif, baik bagi pengelola pemerintahan maupun pengguna layanan. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah mengembangkan dan menerapkan berbagai layanan elektronik, khususnya dalam administrasi pemerintahan, dengan tingkat kematangan yang tinggi. Meskipun demikian, beberapa layanan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek manajemen SPBE.
2) Melakukan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengelolaan, pengembangan dan interoperabilitas sistem perizinan berusaha secara elektronik;
3) Melakukan pengakhiran aplikasi-aplikasi *legacy* yang sudah tidak lagi dilakukan pengelolaan terhadap aplikasi tersebut. Tujuan pengakhiran ini adalah sebagai upaya efisiensi dan peningkatan kualitas layanan kepada publik;
4) Melakukan pengembangan rancangan besar *(grand design)* arsitektur aplikasi Kementerian yang saling terintegrasi pada level aplikasi dan data melalui portal solusi terintegrasi. Tujuan dari rancangan ini adalah memastikan sinergi internal untuk memenuhi kebutuhan Kementerian dalam melayani seluruh pemangku kepentingan, seperti kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/D) lainnya (G2G), masyarakat (G2C), pelaku usaha (G2B), dan karyawan (G2E);
5) Arsitektur aplikasi adalah melakukan peningkatan fungsi aplikasi E- Office, yaitu dengan menambahkan fungsionalitas CRM. Fungsi CRM ditujukan untuk seluruh target layanan Kementerian, seperti K/L/D lain (G2G), masyarakat (G2C), pelaku usaha (G2B), dan pegawai (G2E). Fungsionalitas yang perlu disediakan meliputi fitur pelacakan status layanan (*tracking*) dan fitur pengajuan tiket layanan (*ticketing*). Selain itu, salah satu fungsi lain yang direkomendasikan adalah fungsi untuk melakukan penawaran, pelayanan, dan penindaklanjutan peluang investasi.

Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Efektif, dan Melayani

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki sasaran strategis tiga “Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Efektif, dan Melayani”. Indikator kinerja untuk sasaran ketiga ini adalah: 1) Nilai reformasi biorkrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan 2) Opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi

dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen alat (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional. Opini BPK merupakan pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Terdapat empat kategori opini BPK. *Pertama,* WTP menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku (SAP). *Kedua,* WDP menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan. *Ketiga,* TW kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini tidak wajar adalah setelah pemeriksa mendapatkan bukti pemeriksaan yang cukup memadai, dan pemeriksa menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) yang ditemukan, baik secara individual maupun agregat adalah material dan pervasive. *Keempat,* TMP kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini TMP adalah adanya pembatasan lingkup yang luar biasa, sehingga pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti yang cukup memadai sebagai dasar menyatakan pendapat (opini).

IKU-17 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024. Berdasarkan peraturan tersebut beserta peraturan turunannya terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot, dan kriteria penilaian yang signifikan terhadap penilaian Reformasi Birokrasi
pada setiap instansi pemerintah. Menindaklanjuti hal tersebut, pada tahun 2023, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi , Kementerian Investasi/BKPM (setelah penajaman) Tahun 2020-2024.

Reformasi Birokrasi menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang Reformasi Birokrasi berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret. Bahwa, pengelolaan Reformasi Birokrasi di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan RB juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional. Sehingga dengan kondisi tersebut perlu dilakukan penajaman terhadap Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Penajaman Road Map ini juga untuk membantu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 tentang Reformasi Birokrasi.

Tabel 3.24.
Indikator Kinerja Utama
Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Sasaran Strategis 3 (SS-3) Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Efektif, dan Melayani														
Indikator Kinerja Utama 17 (IKU-17) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM (Nilai)														
2020		2021		2022		2023		2024		Capaian Kinerja 2024 (%)	Pertumbuhan Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Rata-rata Realisasi Kinerja Tahun 2020 - 2024	Rata-rata Pertumbuhan Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2024 (%)	Kategori Capaian Kinerja Tahun 2024
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R					
BB (>70%-80%)	77,89	BB (>70%-80%)	78,20	A (>80%-90%)	78,84	A (>80%-90%)	71,91	A (>80%-90%)	71,91*	90,00	0,00	75,51	-1,84	▲ Baik

Berdasarkan tabel di atas, bahwa target nilai reformasi birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM adalah A (>80%-90%) pada tahun 2024. Capaian nilai reformasi birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM adalah 71,91 atau kategori BB. Capaian kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terkait nilai reformasi birokrasi adalah 90,00 persen atau terkategori **baik**. Berdasarkan rata-rata realisasi kinerja tahun 2020-2024, bahwa nilai reformasi birokrasi memiliki capaian sebesar 75,51 persen.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM secara konsisten berupaya untuk meningkatkan nilai reformasi birokrasi dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Optimalisasi layanan publik di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2) Membahas penyesuaian nomenklatur baru kementerian pada produk *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA); dan
3) Melakukan koordinasi antar unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan penilaian indikator reformasi birokrasi yang dilakukan oleh evaluator eksternal.

Gambar 3.79.
Pertemuan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Beberapa kendala dan hambatan yang dialami oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk mencapai target indikator kinerja ini pada tahun 2024 antara lain:

1) Kurangnya awareness dari unit kerja pengampu indikator penilaian reformasi birokrasi;
2) Kurangnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi;
3) Keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki beberapa rencana tindak lanjut ke depan dalam upaya peningkatan nilai reformasi birokrasi antara lain:

1) Melakukan koordinasi secara berkala dengan unit kerja pengampu indikator penilaian reformasi birokrasi;
2) Peningkatan kapabilitas sumber daya aparatur di bidang akuntabilitas kinerja;
3) Melakukan perbaikan dan penyempurnaan strategi pada tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi agar sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4) Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Tematik tahun 2025 untuk menjadi pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
5) Melakukan monitoring secara berkala atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan yang melibatkan unit Biro Perencanaan Program dan Anggaran, Inspektorat, Biro Umum, Pengelola Anggaran Satuan Kerja, dan Unit Layanan Pengadaan.

IKU-18 Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Pemberian opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional dari pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pernyataan ini didasarkan pada empat kriteria, yaitu: (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, BPK RI memberikan empat jenis opini atas hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah. Keempat jenis opini tersebut adalah:

1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2) Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
3) Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
4) Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP): Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Tabel 3.25.
Capaian Indikator Kinerja Utama
Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Sasaran Strategis 3 (SS-3) Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Efektif, dan Melayani														
Indikator Kinerja Utama 18 (IKU-18) Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM (Nilai)														
2020		2021		2022		2023		2024		Capaian Kinerja 2024 (%)	Pertumbuhan Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Rata-rata Realisasi Kinerja Tahun 2020 - 2024	Rata-rata Pertumbuhan Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2024 (%)	Kategori Capaian Kinerja Tahun 2024
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R					
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100,00	0,00	100,00	0,00	▲ Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki target opini atas laporan keuangan dengan nilai 4 (WTP) pada tahun 2024. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki realiasi capaian opini atas laporan keuangan dengan nilai 4 (WTP). Merujuk kondisi tersebut, capaian kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebesar 100 persen atau terkategori **sangat baik**. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM secara konsisten memiliki opini atas laporan keuangan dengan nilai 4 (WTP) selama periode tahun 2020-2024, sehingga rata-rata realisasi kinerjanya sebesar 100 persen.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM melalui Biro Umum beserta seluruh unit kerja terkait terus berkomitmen untuk tetap mengawal proses perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan kegiatan, serta pelaporan keuangan agar mendapatkan predikat WTP untuk penyusunan Laporan Keuangan di tahun-tahun selanjutnya. Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian Investasi/BKPM menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Kementerian Investasi/ BKPM dalam Laporan Keuangan secara material telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi. Pemerintahan, pengungkapan yang cukup, kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM telah berkomitmen untuk mengedepankan tata kelola yang baik atau *good governance*, sehingga seluruh kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM maupun penggunaan anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berdampak positif dan optimal dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM selama 16 tahun memperoleh opini laporan keuangan “Wajar Tanpa Pengecualian”. Pemeriksaan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dilaksanakan oleh BPK merupakan bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. BPK melaksanakan pemeriksaan keuangan sebagai tanggung jawab presiden atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Gambar 3.80.
Penerimaan Penilaian Opini Laporan Keuangan

Beberapa kendala dan hambatan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ KPM untuk mencapai target indikator kinerja ini pada tahun 2024 antara lain:

1) Terbitnya peraturan pelaksanaan anggaran baru yang belum tersosialisakan dengan baik sehingga implementasi pelaksanaan pada Kementerian/ Lembaga menjadi terkendala;
2) Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia khususnya di bidang pengelolaan anggaran, sehingga terdapat rangkap jabatan antara tugas dan fungsi pada unit kerja dengan pengelola anggaran;
3) Terdapat rekomendasi BPK pada tahun-tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki beberapa rencana tindak lanjut ke depan dalam upaya peningkatan opini atas laporan keuangan antara lain:

1) Penguatan Sistem Pengendalian Intern dalam pengelolaan keuangan;
2) Melakukan penilaian risiko atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersifat strategis;
3) Menyusun rencana dan kegiatan pengendalian atas timbulnya risiko pada kegiatan strategis;
4) Melakukan pemantauan dan evaluasi untuk kegiatan pengendalian pada kegiatan strategis;
5) Menindaklanjuti penyelesaian seluruh rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2024 dilengkapi dengan bukti-bukti pendukungnya.

3.4. Keterkaitan Kinerja Unit Kerja Dalam Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berkomitmen untuk mencapai kinerja pada setiap sasaran dengan kerja kolaboratif dan sinergis. Untuk mewujudkan organisasi dan kelembagaan yang berorientasi terhadap hasil, perlu untuk memastikan bahwa struktur organisasi eksisting memiliki kesesuaian dan keterkaitan dengan kinerja yang telah ditetapkan. Organisasi berorientasi pada hasil adalah organisasi yang berfokus pada pencapaian tujuan-sasaran organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber daya manusia maupun anggaran. Dalam rangka memperbaiki proses penyelarasan tujuan organisasi dengan kinerja setiap individu dan dengan desain strategi/program/kegiatan, maka perlu didasarkan pada proses membangun model logis (*logic model*) maupun kerangka pikir logis (*logical framework*) yang tepat.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dengan dukungan struktur organisasi yang baik. Pada tataran implementasi, hal ini sudah dilakukan oleh Kementerian Investasi/BKPM. Namun demikian dikarenakan pada dokumen rencana strategis tahun 2020-2024 menggunakan pendekatan *Balance Score Card (BSC*), maka proses/tahapan logis yang diperlukan dalam mencapai outcome/kinerja tidak terlihat secara jelas. Pada penyusunan Renstra di periode berikutnya Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan menggunakan pendekatan kerangka pikir logis *(logical framework).*

Pada tahun 2024, keterkaitan antar unit kerja dan indikator kinerja telah diidentifikasi untuk kemudian disusun dalam kerangka pikir logis sebagai berikut:

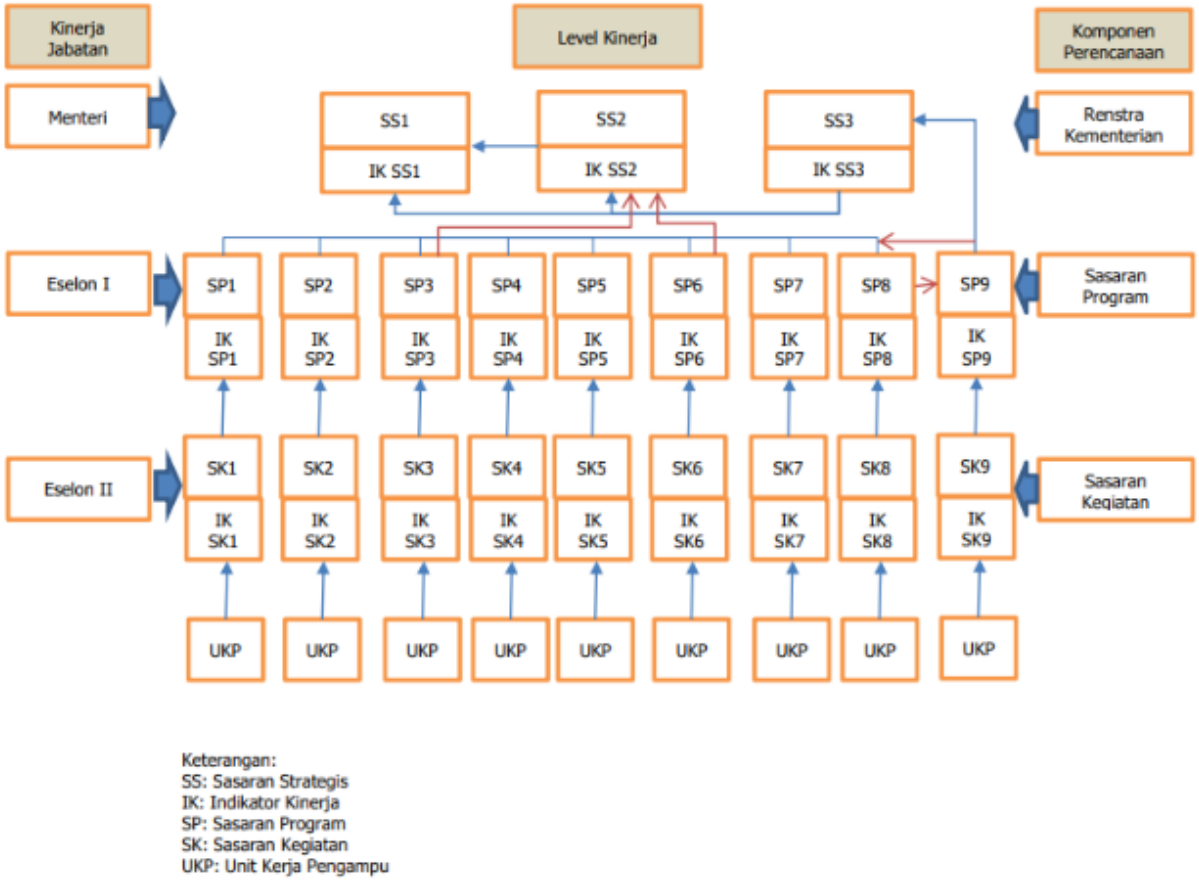

Gambar 3.81.
Keterkaitan Unit Kerja dalam Pencapaian Sasaran Strategis

Dalam mencapai sasaran strategis ke 1 “Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal”, terdapat delapan unit kerja yang berkontribusi secara langsung yaitu: 1) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal; 2) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 3) Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis; 4) Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal; 5) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal; 6) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal; 7) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan 8) Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal. Sasaran strategis ke-2 “Meningkatnya Kepercayaan Pelaku Usaha”, terdapat dua unit kerja yang berkontribusi secara langsung yaitu Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal. Sasaran strategis ke-3 “Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Efektif, dan Melayani”, terdapat satu unit kerja pengampu yaitu Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama. Untuk memastikan keberhasilan hal tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melaksanakan beberapa kegiatan di antaranya, perencanaan, pengendalian, audit, dan dukungan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui berbagai kegiatan pengembangan kompetensi struktural/manajerial, teknis, maupun sosial kultural antara lain Pelatihan Kepemimpinan Nasional, Pelatihan Audit Infrastruktur dan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pelatihan *Speech and Report Writing*, Pelatihan Jurnalistik: Teknik Penulisan dan Fotografi untuk Media Sosial dan *Website*, dan Pelatihan Internalisasi ASN Ber-AKHLAK.

Untuk memperkuat kinerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama, Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal turut berperan terutama dalam hal penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

3.5. Capaian Nilai SAKIP terhadap Pencapaian IKU

Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengarahkan pada peningkatan capaian target kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi. Perbandingan antara nilai SAKIP terhadap pencapaian IKU pada tahun 2024 di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menunjukkan keselarasan yang signifikan. Keselarasan ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mampu mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja dalam satu kesatuan sistem yang efektif dan efisien. Berikut ini merupakan perbandingan nilai SAKIP dan capaian nilai realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023.

Indikator	2023	2024	Pertumbuhan(%)
Nilai SAKIP	**76,17**	**76,78**	**0,80**
IKU			
Nilai realisasi investasi	1418,9	1714,2	20,81
Nilai realisasi investasi sektor sekunder	596,3	721,3	20,96
Nilai realisasi penanaman modal berkualitas (di Luar Jawa)	51,5	52,2	1,35
Nilai realisasi penanaman modal PMDN termasuk UMKM	47,6	47,5	-0,21
Peringkat EoDB	34	27	20,58
Nilai reformasi birokrasi	71,91	71,91	0
Opini BPK	4	4	0

Gambar 3.82.
Perbandingan Nilai SAKIP dan Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2023 dan tahun 2024

Jika diperbandingkan selama periode Renstra 2020-2024, secara keseluruhan menunjukkan adanya dampak positif penerapan SAKIP di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Penerapan SAKIP mampu mengoptimalkan peningkatan sebagian besar capaian target indikator kinerja utama. Hal ini terlihat dari peningkatan yang signifikan pada beberapa indikator kinerja, seperti Nilai realisasi penanaman modal secara rata-rata selama tahun 2020-2024 meningkat sebesar 20,81 persen, nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder 20,96 persen, dan indikator sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa) mampu dicapai secara positif, dengan rata-rata kenaikan selama 2020-2024 yaitu sebesar 1,36 persen. Dampak positif lainnya adalah peningkatan kolaborasi antarunit di dalam Kementerian Investasi dan Hiliriasi/BKPM. Dengan adanya indikator yang jelas, setiap unit kerja dapat saling mendukung untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menciptakan sinergi yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan program. Secara keseluruhan, penerapan SAKIP tidak hanya berkontribusi pada pencapaian target kinerja, tetapi juga memperkuat budaya akuntabilitas dan transparansi di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Dengan demikian, diharapkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dapat terus mempertahankan kinerja yang sudah baik, dengan terus melakukan perbaikan-perbaikan secara akseleratif pada kelemahan yang masih terjadi.

Tabel 3.26.
Perbandingan Nilai SAKIP dan Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Selama Tahun 2020-2024

No	Capaian Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Kenaikan atau Penurunan Kinerja tahun 2024 dengan 2023	Rata-Rata Kenaikan/ Penurunan Kinerja selama tahun 2020-2024	Persentase Kenaikan atau Penurunan Kinerja selama tahun 2020-2024
I	**Akuntabilitas Kinerja**								
	Nilai AKIP Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM	75,27	75,55	75,78	76,17	**76,78**	0,61	0,38	0,80%
II	**Indikator Kinerja Utama**								
1	Nilai realisasi penanaman modal (Rp Triliun)	826,30	901,02	1207,20	1418,90	1714,20	295,30	221,98	20,81%
2	Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder (Rp Triliun)	272,90	325,40	497,70	596,30	721,30	125,00	112,10	20,96%
3	Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa) (%)	50,50	52,00	52,73	51,50	52,20	0,70	0,43	1,36%
4	Kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM (%)	50,10	49,60	45,80	56,20	47,50	-8,70	-0,65	-15,48%
5	Peringkat kemudahan berusaha *(Ease of Doing Business)* (peringkat)	N/A	N/A	N/A	34	27	7,00	7,00	25,93%
6	Nilai reformasi birokrasi Kementerian Investasi/ BKPM (predikat/nilai)	BB (77,66)	BB (77,89)	BB (78,20)	BB (71,91)	BB (71,91)	-0,84	-1,92	-1,43%
7	Opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM (opini BPK/nilai)	WTP (4)	WTP (4)	WTP (4)	WTP (4)	WTP (4)	0,00	0,00	0,00

3.6. Capaian Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Terhadap Indikator RPJMN 2020-2024

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah menetapkan sasaran yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, yaitu (i) meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan (ii) meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki 6 (enam) indikator yang tercantum dalam dokumen RPJMN 2020-2024, berikut rinciannya:

Tabel 3.27.
Target Indikator RPJMN yang diampu oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
Tahun 2020-2024

No	Peran Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM Terhadap RPJMN 2020-2024	Target Tahunan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Peringkat Kemudahan Berusahan di Indonesia (Rangking EoDB)					
	a. Jumlah Prosedur					5 prosedur
	b. Waktu (Hari)					4 Hari
2	Nilai Realisasi Pma dan PMDN (Rp Triliun)	886	991,3	1.128,3	1.294,1	1.500
3	Kontribusi PMDN terhadap total realisasi Pma dan PMDN (Persen)	47,4	47,8	48,3	48,9	49,5
4	Nilai Realisasi Pma dan PMDN Industri Pengolahan (Rp Triliun)	245,3	316,3	422,2	573,2	782
5	Kontribusi Realisasi Investasi Luar Jawa (Persen)	45,6	46,2	47,4	48,5	49,67
6	Penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektornik (K/L/D)	bertahap	bertahap	bertahap	bertahap	selesai

Target indikator pada RPJMN sebagian telah tercapai. Indikator Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia yang diturunkan pada dua sub-indikator yaitu jumlah prosedur dan waktu prosedur memulai usaha. Kedua sub-indikator tersebut memiliki realisasi masing-

masing diatas target yang telah ditetapkan. Indikator jumlah prosedur pada tahun 2024 memiliki target 5 prosedur, realisasinya telah mencapai 2 prosedur. Indikator jumlah hari dalam memulai usaha dengan target 4 hari pada tahun 2024, realisasinya telah mencapai 2,5 hari. Indikator RPJMN selanjutnya adalah nilai realisasi penanaman modal (PMDN dan PMA). Target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar Rp1.500 triliun dengan realisasi sebesar Rp1.714.2 triliun memiliki persentase capaian realisasi sebesar 114,28 persen. Pada sisi lain, indikator kontribusi PMDN terhadap total keseluruhan nilai penanaman modal ditargetkan sebesar 49,5 persen, realisasinya telah mencapai 47,5 persen sehingga capaian realisasinya sebesar 96 persen. Indikator berikutnya adalah Nilai Realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan, yang memiliki target Rp782 triliun pada tahun 2024 dengan realisasi 721,3 triliun atau persentase capaian realisasinya sebesar 92,24 persen. Indikator kontribusi realisasi investasi luar jawa pada tahun 2024 memiliki target 49,67 persen dengan realisasi 52,2 sehingga memiliki persentase capain realisasi sebesar 105 persen. Untuk indikator Penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektornik (K/L/D) pada tahun 2024 memiliki tingkat capaian realisasi sebesar 100 persen.

Tabel 3.28.
Pencapaian Target Indikator RPJMN
yang diampu oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2024

			Target	Realisasi	%
1	Peringkat Kemudahan berusaha di Indonesia Rangking (EoDB)				
	a. Jumlah Prosedure	Jumlah Prosedure	5	2	160
	b. Waktu (Hari)	Jumlah Hari	4	2,5	137,5
2	Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Rp Triliun)	RpTriliun	1.500	1.714,2	114,28
3	Kontribusi PMDN terhadap total realisasi PMA dan PMDN (Persen)	Persentase	49,5	47,5	96
4	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan (Rp Triliun)	Rp/Triliun	782	721,3	92,24
5	Kontribusi Realisasi Investasi Luar Jawa (Persen)	Persentase	49,67	52, 2	105
6	Penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektornik (K/L/D)	Kategori	selesai	selesai	100

3.7. Capaian Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Terhadap Target Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, nilai realisasi PMA dan PMDN memiliki target sebesar 1.450 triliun. Dalam realisasinya, nilai PMA dan PMDN mencapa 1.714,2 triliun atau mencapai 118,22 persen dari target nilai realisasi PMA dan PMDN yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024.

Tabel 3.29.
Sasaran Ekonomi Makro pada RKP Tahun 2024

Indikator	Target RKP 2024	Realisasi 2024	% Capaian
Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp.Triliun)	1.450	1.714,2	118,22

3.8. Peran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam mendukung Pencapaian Program Prioritas Nasional Tahun 2024

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki peran dalam menunjang pencapaian program prioritas nasional pertama dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah 2024. Program prioritas nasional pertama adalah “Memperkuat Kebijakan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan”. Program prioritas ini diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaan program

prioritas pertama ini difokuskan pada sektor energi, pertanian, perikanan dan kelautan, UMKM, industri pengolahan, dan pariwisata. Upaya pencapaian program prioritas pertama ini didukung oleh penguatan reformasi fiskal dan sistem keuangan, peningkatan kualitas investasi, ekspor, partisipasi dalam rantai produksi global, perbaikan sistem logistik, digitalisasi, dan ekonomi hijau.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada tahun 2024 dalam mendukung prioritas nasional pertama tersebut memiliki dua program prioritas dan tiga kegiatan prioritas. Dua program prioritas tersebut adalah: 1) Peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi; serta 2) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Tiga kegiatan prioritas adalah: 1) Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi termasuk reformasi ketenagakerjaan; 2) Peningkatan efektivitas *Prefrential Trade Agreement (PTA)/free trade agreement (FTA)/comprehensive economic partnership agreement (CEPA)* dan diplomasi ekonomi; dan 3) Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menerjamahkan prioritas nasional pertama, program prioritas, dan kegiatan prioritas tersebut ke dalam beberapa program dan kegiatan. Terdapat 24 program dan 63 kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM selama tahun 2024. Dari total 63 kegiatan selama tahun 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki realisasi yang telah mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menjadikan rata-rata persentase capaian kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebesar 100 persen bahkan lebih. Hal ini menunjukkan komitmen dan konsistensi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional "Memperkuat Kebijakan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan". Berikut ini merupakan tabel program/kegiatan/proyek Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, target, realisasi, dan persentase capaian pada tahun 2024.

Tabel 3.30.
Program/Kegiatan/Proyek Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Target, Realisasi, dan Persentase Capaian terhadap Program Prioritas Nasional Tahun 2024

Program/ Kegiatan/ Proyek	Target	Realisasi	% Capaian
Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal			
Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal			
Peningkatan Daya Saing Investasi	2	2	100%
Harmonisasi Regulasi Terkait Perizinan Berusaha di Tingkat Pusat dan Daerah	2	2	100%
Sinkronisasi Kebijakan Investasi	1	1	100%
Transformasi Kebijakan Ekosistem Investasi yang Terintegrasi dan Kebijakan Insentif Untuk Mendorong Investasi yang Berdaya Saing	1	1	100%
Pemberdayaan Usaha Nasional			
Peningkatan Daya Saing Investasi	2	2	100%
Harmonisasi Regulasi Terkait Perizinan Berusaha di Tingkat Pusat dan Daerah	2	2	100%
Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal			
Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di Bidang Penanaman Modal			
Analisis Negara Target dan Negara Pesaing	2	2	100%
IIPC (*Indonesian Investment Promotion Center*)	2.388	4.896	205%
Fasilitasi Relokasi Perusahaan Asing ke Indonesia dan Peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri	11	13	100%
Promosi ke Wilayah Amerika dan Eropa			
Promosi penanaman modal dalam forum internasional di Wilayah Amerika dan Eropa	2	2	100%
Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional di Wilayah Amerika dan Eropa	1	1	100%
Promosi Kegiatan di Kawasan Nasional IKN di Wilayah Amerika dan Eropa	1	1	100%
Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika			

Program/ Kegiatan/ Proyek	Target	Realisasi	% Capaian
Promosi penanaman modal dalam forum internasional di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika	2	2	100%
Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika	1	1	100%
Promosi Kegiatan di Kawasan Nasional Ibu Kota Negara (IKN) di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika	1	1	100%
Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan Pasifik			
Promosi penanaman modal dalam forum internasional di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik	2	2	100%
Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik	1	1	100%
Promosi Kegiatan di Kawasan Nasional Ibu Kota Negara (IKN) di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik	1	1	100%
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal			
Kerjasama Pelaksanaan Berusaha			
Peningkatan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah	1	1	100%
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I			
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah I	21	21	100%
Layanan Pendampingan Keberlanjutan Investasi	40	40	100%
Fasilitasi Eksekusi Realisasi Investasi Penerima Fasilitas Penanaman Modal	30	34	113%
Fasilitasi dan Evaluasi Percepatan Realisasi Investasi Proyek PSN	2	2	100%
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II			
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah II	31	31	100%
Mendorong Investasi Besar Bermitra dengan UMKM	31	31	100%
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III			
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah III	26	32	123%
Eksekusi Proyek Wilayah Barat yang Terkendala Untuk Percepatan Realisasi Investasi	26	26	100%
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV			
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah IV	26	28	108%
Eksekusi Proyek Wilayah Timur yang Terkendala Untuk Percepatan Realisasi Investasi	19	19	100%
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah V			
Satuan Tugas Percepatan Investasi	18	18	100%
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah V	11	11	100%
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal			
Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sumber Daya Alam			
Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya	1	1	100%
Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Bidang Sumber Daya Alam	1	1	100%
Fasilitasi rencana proyek penanaman modal di bidang Sumber Daya Alam	3	3	100%
Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Manufaktur			
Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Industri Manufaktur	1	1	100%
Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Bidang Industri Manufaktur	1	1	100%
Percepatan Rencana Proyek di bidang industri manufaktur	3	5	167%
Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Jasa dan Kawasan			
Investment Project Ready to Offer (IPRO) pada Destinasi Pariwisata Prioritas	2	2	100%
Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Bidang Jasa dan Kawasan	1	1	100%

Program/ Kegiatan/ Proyek	Target	Realisasi	% Capaian
Percepatan Rencana Proyek di Bidang Jasa dan Kawasan	2	2	100%
Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)			
Percepatan Penyelesaian Masalah Strategis di KEK	2	2	100%
Fasilitasi Percepatan Investasi Kerja Sama Pemerintah Swasta			
Percepatan Rencana Penanaman Modal Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	2	2	100%
Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur			
Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Infrastruktur	1	1	100%
Analisis Strategik Penanaman Modal Berbasis Infrastruktur	1	1	100%
Percepatan rencana proyek penanaman modal di bidang infrastruktur	2	2	100%
Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal			
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal			
Penetapan Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian/Lembaga	564	564	100%
Kerja Sama Bilateral di Bidang Penanaman Modal			
Konsultasi publik bahan posisi pertemuan kerja sama bilateral dan dunia usaha	19	19	100%
Penguatan Kesepakatan dan Implementasi Kerja Sama Bilateral di Bidang Penanaman Modal	1	1	100%
Hasil perundingan kerja sama penanaman modal bilateral	19	19	100%
Kerja sama penanaman modal dengan dunia usaha dalam dan luar negeri	4	7	175%
Kerja Sama Regional dan Multilateral di Bidang Penanaman Modal			
Konsultasi publik bahan posisi pertemuan kerja sama regional dan multilateral	20	20	100%
Penguatan Kesepakatan dan Implementasi Kerja Sama Regional dan Multilateral di Bidang Penanaman Modal	1	1	100%
Penyelenggaraan Forum Fasilitasi Outward Investment	6	6	100%
Hasil perundingan kerja sama penanaman modal regional dan multilateral	20	20	100%
Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis			
Peningkatan Investasi Baru di Bidang Hilirisasi			
Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di bidang Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	1	1	100%
Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di bidang Minyak dan Gas Bumi	1	1	100%
Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di bidang Mineral dan Batubara	1	1	100%
Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	5	5	100%
Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Minyak dan Gas Bumi	5	7	140%
Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Mineral dan Batubara	5	9	180%
Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal			
Peningkatan Kualitas Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)	1	1	100%
Pengelolaan Layanan Elektronik Infrastruktur dan Jaringan			
Website Penanaman Modal	1	1	100%
Pemeliharaan Data Center dan DRC yang Mendukung OSS	1	1	100%
		Rata-Rata Capaian	**104,78%**

3.9. Capaian Kinerja Anggaran

Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM selama periode 2022-2024 menunjukkan terjadi peningkatan pada tahun 2020-2022, dan relatif stabil pada tahun 2022-2024. Pada tahun 2024, anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yaitu sebesar

Rp.1.229.295.942.000. Dari alokasi anggaran tahun 2024, Kementerian Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berhasil merealisasikan anggaran secara optimal dan lebih tepat sasaran, dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.148.963.439.591 atau 93,47 persen dari total anggaran. Dari penggunaan anggaran tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mampu mencapai target pada sebagian besar indikator yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan komitmen Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk tetap fokus pada pencapaian kinerja.

Penerapan SAKIP yang semakin baik juga menunjukkan adanya keselarasan dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan sistem yang lebih terstruktur dan terukur, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dapat mengidentifikasi prioritas dan memfokuskan sumber daya pada area yang paling berdampak. Ini tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran.

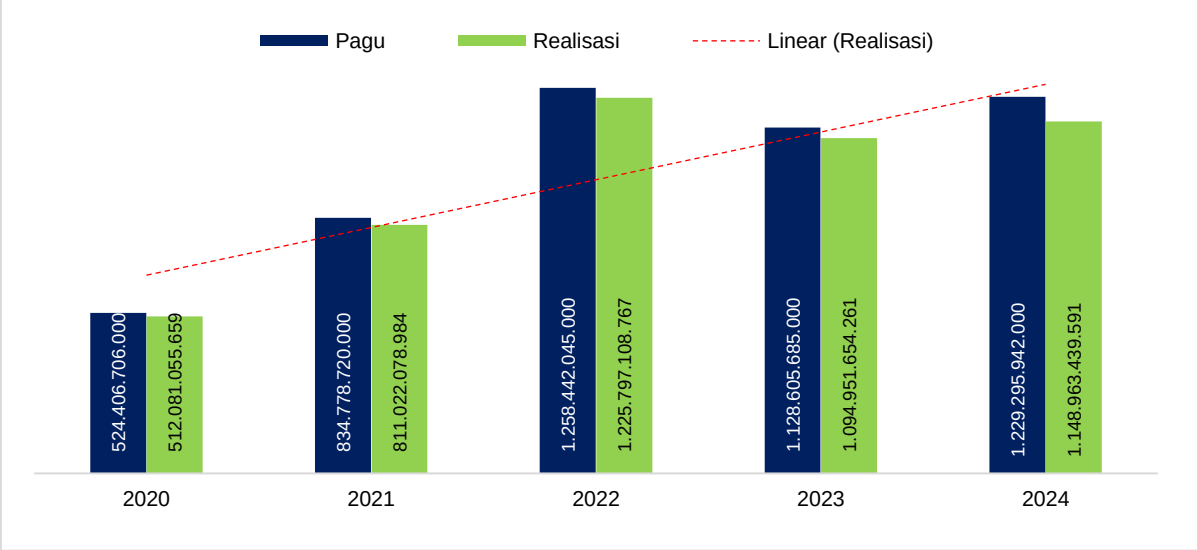

Gambar 3.83.
Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2020-2024

Komposisi anggaran dan realisasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun Anggaran 2024 berdasarkan program dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.31.
Realisasi Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Program

No	Program/Satker	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dukungan Manajemen (Generik)	507.666.216.000	480.267.797.413	94,60
2	Penanaman Modal (Teknis)	721.629.726.000	668.695.642.178	92,66
Jumlah		1.229.295.942.000	1.148.963.439.591	93,47

Sementara itu, realisasi anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun Anggaran 2024 berdasarkan jenis belanja secara lebih rinci dapat dilihat pada tebel berikut:

Tabel 3.32.
Realisasi Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Uraian Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja	
			Realisasi Belanja (Rp)	(%)
1	Belanja Pegawai	251.203.078.000	241.796.276.779	96,26
2	Belanja Barang	867.300.733.000	815.287.116.229	94,00
3	Belanja Modal	110.792.131.000	91.880.046.583	82,93
Jumlah		**1.229.295.942.000**	**1.148.963.439.591**	**93,47**

Tabel 3.33.
Realisasi Belanja Setiap Sasaran
di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun Anggaran 2024

Perspektif	Sasaran	Anggaran (Rp)		%
Stakeholders	Meningkatnya realisasi penanaman modal	17.922.606.000	15.882.785.922	88,62
Costumers	Meningkatkan kepercayaan pelaku usaha/penanam modal	18.340.000.000	17.405.694.913	94,91
Internal Process	Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal	25.805.472.000	24.241.971.460	93,94
	Meningkatnya kualitas hilirisasi investasi strategis	32.500.000.000	31.378.420.938	96,55
	Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal	28.952.967.000	27.842.445.156	96,16
	Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal	39.513.694.000	36.376.731.474	92,06
	Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal	182.909.143.000	171.933.531.559	94,00
	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	26.799.449.000	25.266.416.546	94,28
	Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal	107.371.816.000	103.872.003.052	96,74
	Meningkatnya kualitas teknologi informasi penanaman modal	160.646.005.000	134.283.189.681	83,59
Learning and Growth	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani	588.534.790.000	560.480.248.890	95,23
Jumlah		**1.229.295.942.000**	**1.148.963.439.591**	**93,47**

3.10. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengkuran efisiensi penggunaan anggaran sumber daya dilakukan dalam rangka untuk mengetahui besaran tingkat efisiensi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan pemanfaatan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya antara lain:

1. Data capaian Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)
2. Data pagu anggaran; dan
3. Data realisasi anggaran

Efisiensi anggaran tercapai ketika penggunaan sumber daya menghasilkan kinerja keluaran yang optimal. Jika sumber daya yang dikeluarkan melebihi capaian kinerja tertentu, efisiensi dianggap rendah. Sebaliknya, jika pengeluaran sumber daya lebih sedikit dibandingkan capaian kinerja yang ditetapkan, maka efisiensi anggaran semakin tinggi. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran yang seharusnya dan pengeluaran yang sebenarnya. Pengeluaran yang seharusnya adalah jumlah anggaran yang direncanakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan, sedangkan

pengeluaran yang sebenarnya adalah jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai target tersebut, sesuai dengan hasil yang ditampilkan dalam tabel sebelumnya.

Berdasarkan hasil penghitungan, persentase efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencapai 15,94 yaitu dari alokasi anggaran sebesar 1.229.295.942.000 dengan realisasi sebesar 1.148.963.439.591 dengan Nilai Pencapaian Sasaran sebesar 109,41 persen. Kemudian apabila dilihat dari perhitungan efisiensi anggaran berdasarkan pencapaian sasaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah termasuk kategori efisien dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.34.
Efisiensi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Sasaran	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	NPS (%)	% Efisiensi
Meningkatnya realisasi penanaman modal	17.922.606.000	15.882.785.922	88,62	110,10	21,48
Meningkatkan kepercayaan pelaku usaha/penanam modal	18.340.000.000	17.405.694.913	94,91	120,00	25,09
Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal	25.805.472.000	24.241.971.460	93,94	110,75	16,81
Meningkatnya kualitas hilirisasi investasi strategis	32.500.000.000	31.378.420.938	96,55	100,00	3,45
Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal	28.952.967.000	27.842.445.156	96,16	98,87	2,71
Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal	39.513.694.000	36.376.731.474	92,06	100,00	7,94
Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal	182.909.143.000	171.933.531.559	94,00	116,51	22,51
Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	26.799.449.000	25.266.416.546	94,28	100,00	5,72
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal	107.371.816.000	103.872.003.052	96,74	134,37	37,63
Meningkatnya kualitas teknologi informasi penanaman modal	160.646.005.000	134.283.189.681	83,59	118,00	34,41
Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani	588.534.790.000	560.480.248.890	95,23	94,99	-0,24
TOTAL	**1.229.295.942.000**	**1.148.963.439.591**	**93,47**	**109,41**	**15,94**

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mampu melakukan efisiensi sebesar 15,94 persen pada tahun 2024. Selama periode tahun 2020-2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berhasil mempertahankan tingkat efisiensi di atas 8 persen. Adanya efisiensi yang tinggi secara konsisten, bersamaan dengan perbaikan nilai SAKIP, serta capaian kinerja yang sebagian besar telah tercapai, menunjukkan bahwa penerapan SAKIP di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memberikan dampak positif. Efisiensi yang tinggi ini menggambarkan kemampuan kementerian dalam mengelola sumber daya secara optimal, meskipun dalam kondisi anggaran yang terbatas.

Penerapan SAKIP yang efektif juga berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas, sehingga setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Semoga hal ini menciptakan kepercayaan publik yang lebih besar terhadap kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan program-program yang dilaksanakan.

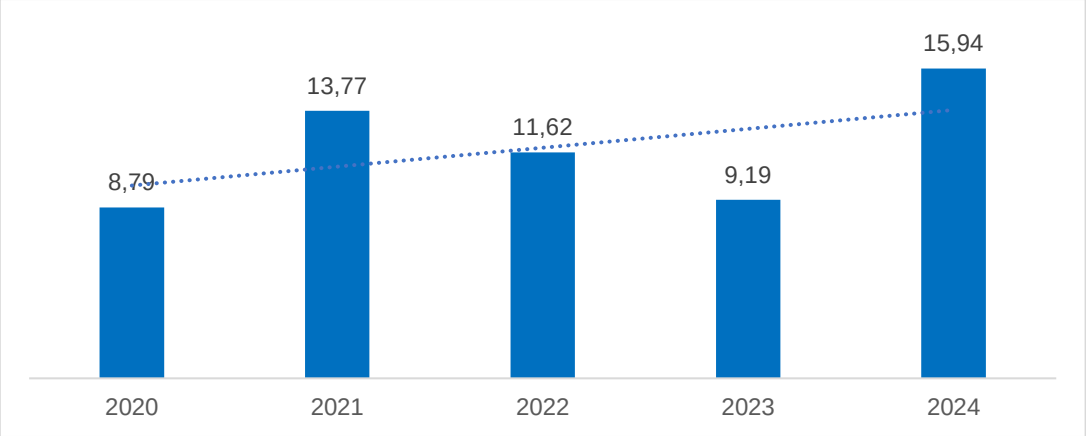

Gambar 3.84.
Perkembangan Efisiensi Sumber Daya Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2020-2024

KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM

BAB 4

INISIATIF PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM selama ini telah melakukan berbagai inisiatif perbaikan akuntabilitas kinerja sebagai upaya untuk terus mengoptimalkan pencapaian kinerja secara optimal dan berkesinambungan. Berbagai upaya yang telah dilakukan menunjukan hasil positif, ditandai dengan tren peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Puncaknya pada penilaian AKIP tahun 2024, yaitu sebesar 76,78 poin dengan tingkat akuntabilitas "BB". Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan terus mengoptimalkan pencapaian nilai AKIP di tahun mendatang dengan target tingkat akuntabilitas kinerja adalah "A"

Tabel 4.1.
Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2018-2024

Komponen Yang Dinilai	Bobot Versi Lama	Nilai				Bobot Versi Baru	Nilai		
		2018	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Perencanaan Kinerja	30	23,66	23,89	23,96	23,96	30	24,94	24,98	25,08
Pengukuran Kinerja	25	16,31	16,47	16,55	16,57	30	21,56	21,64	21,74
Pelaporan Kinerja	15	11,58	11,71	11,81	11,86	15	10,84	10,90	11,10
Evaluasi Kinerja	10	6,64	6,85	6,96	6,96	25	18,44	18,65	18,86
Capaian Kinerja	20	15,85	15,92	15,98	16,20	-	-	-	-
Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**74,05**	**74,83**	**75,27**	**75,55**	**100**	**75,78**	**76,17**	**76,78**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**BB**	**BB**	**BB**	**BB**		**BB**	**BB**	**BB**

Sumber; Hasil Evaluasi AKIP Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berbagai tahun oleh KemenPAN RB

Pada Bab ini akan menguraikan berbagai inisiatif peningkatan akuntabilitas kinerja selama tahun 2024 dan rencana tindaklanjut di tahun berikut. Inisiatif tersebut disusun dengan mengacu pada hasil evaluasi eksternal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, hasil evaluasi internal yaitu Inspektorat Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, arahan pimpinan, serta reviu pengelolaan kinerja

4.1. Tindak Lanjut Atas Evaluasi AKIP Tahun 2023

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah melakukan berbagai inisiatif kegiatan perbaikan selama tahun 2024 dalam upaya untuk meningkatkan kinerja institusi secara optimal dan berkesinambungan selaras dengan program pembangunan nasional. Berdasarkan hasil evaluasi eksternal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/94/AA,05/2023 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 pada tanggal 27 November 2023, terdapat 11 rekomendasi perbaikan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menindaklanjuti melalui berbagai inisiatif kegiatan perbaikan selama tahun 2024, diantaranya sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kualitas Perencanaan Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM**

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus berupaya memperbaiki kualitas Perencanaan Strategis. Pada tahun 2024, telah dilakukan penyusunan Rancangan Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra 2025-2029 tersebut dilakukan menggunakan kerangka kerja logis (*logical framework)*. Pendekatan penyusunan ini berbeda dengan Renstra 2020-2024 yaitu menggunakan pendekatan *Balance Score Card* (BSC). Proses penyusunan Renstra yang disusun dengan pendekatan LFA memiliki keunggulan dikarenakan pencapaian tujuan strategis terhubung secara langsung dengan program setiap satuan kerja, bahkan juga dapat diturunkan ke masing-masing individu. Renstra yang berbasis LFA sudah terdapat hubungan logis yang memiliki hubungan sebab-akibat. Input

dimanfaatkan dengan kegiatan untuk mencapai output pada Eselon 2, yang akan mendukung output/Sasaran Program Eselon 1 (*outcome* Eselon 2) dan mendukung tercapainya *outcome* berupa Sasaran Strategis. Kemudian hal tersebut menjadi syarat bagi pencapaian tujuan strategis yeng merupakan turunan langsung visi dan misi organisasi. Renstra berbasis LFA tidak lagi terpisah oleh perspektif-perspektif yang ada di dalam konsep BSC, tetapi lebih menonjolkan bagaimana kesinambungan dan hubungan yang logis antara pencapaian visi misi dengan strategi dan struktur organisasi yang telah ada sehingga juga terhubung kepada indikator kinerja. Gambar berikut merupakan kerangka logis visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator sasaran, dan Unit Kerja Pengampu berdasarkan Rancangan Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2025-2029 yang disusun pada tahun 2024.

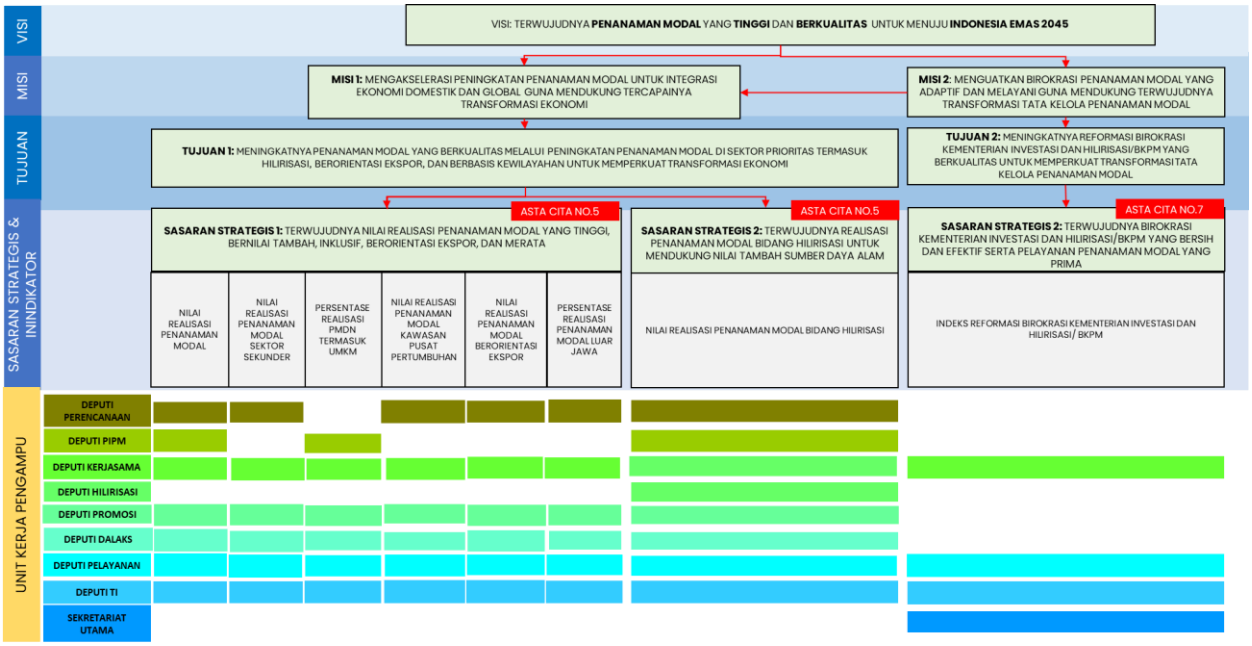

Gambar 4.1.
Kerangka Logis Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran, dan Unit Kerja Pengampu Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029
Sumber: Rancangan Renstra Kementerian Investasi/BKPM tahun 2025-2029

Rencana Strategis 2025-2029 yang disusun merupakan pondasi penting dan momentum dalam mengatasi berbagai kelemahan AKIP Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM selama ini, diantaranya: (i) indikator kinerja memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound* (SMART); (ii) penyempurnaan penjenjangan kinerja; (iii) kualitas Indikator Kinerja Utama (IKU); dan (iv) integrasi hasil pengukuran kinerja individu dengan pengukuran kinerja unit/organisasi sehingga tergambar dengan baik hubungan logis pencapaian kinerja secara berjenjang. Rencana Strategis 2025-2029 direncanakan akan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM pada awal tahun 2025 ini.

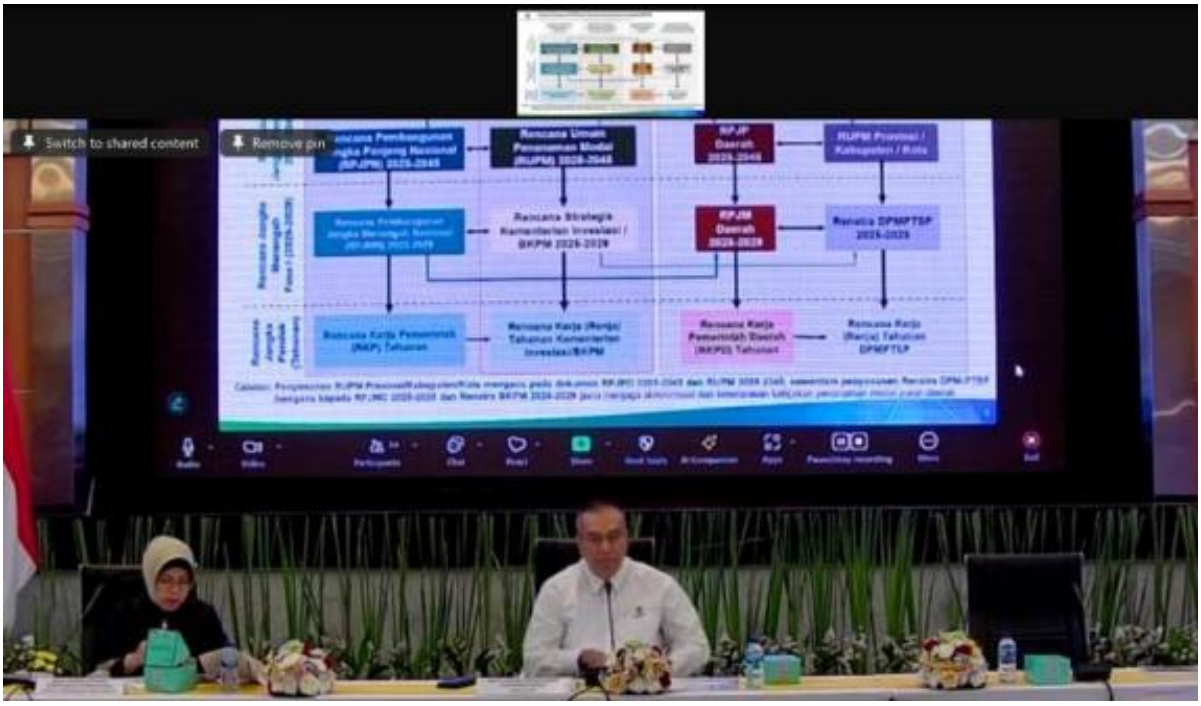

Gambar 4.2.
Rapat Pembahasan Penyusunan Renstra
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029 dengan Kementerian PPN/Bappenas

2. Pengembangan dan Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Aplikasi Manajemen Akuntabilitas Kinerja Lembaga (SIMANTAB)

SIMANTAB adalah sebuah instrumen yang memuat rangkaian sistematik dari berbagai aktifitasal, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus melakukan pengembangan Sistem Aplikasi Manajemen Akuntabilitas Kinerja Lembaga (SIMANTAB) dan mengoptimalkan pemanfaatannya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas dan pencapaian kinerja secara optimal. Berbagai fasilitas menu telah disediakan pada SIMANTAB, mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja baik di level Menteri/Kepala BKPM maupun unit kerja di Lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Pada aplikasi SIMANTAB juga telah disediakan berbagai submenu secara terperinci, diantaranya capaian indikator kinerja dan bahkan *Reward and Punishment* telah dimuat pada aplikasi ini. Untuk mengoptimalkan pemanfaatannya, pada tahun 2024 telah dilakukan bimbingan teknis pengukuran kinerja berkala dan verifikasi kinerja melalui SIMANTAB. Pada tahun 2024 seluruh pelaporan kinerja unit kerja di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sudah memanfaatkan SIMANTAB.

Kementerian Investasi/BKPM telah melakukan pengembangan Sistem Aplikasi Manajemen Akuntabilitas Kinerja Lembaga (SIMANTAB) dalam rangka mengoptimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja level kementerian/lembaga, Eselon I dan Eselon II. Proses pelaporan capaian kinerja dilakukan dengan menugaskan unit kerja untuk menginput capaian kinerja per triwulan/semester/tahunan melalui menu pengukuran kinerja submenu capaian kinerja/capaian indikator kinerja berdasarkan target pada Perjanjian Kinerja yang telah disusun sebelumnya. Berikut adalah tampilan submenu capaian kinerja/capaian indikator kinerja:

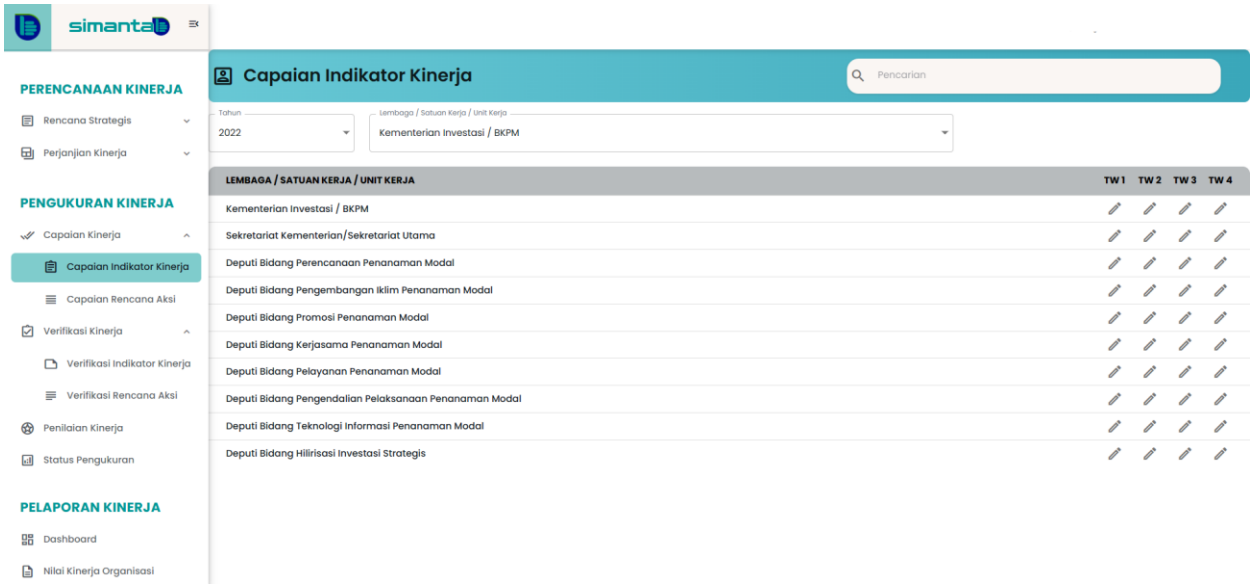

Gambar 4.3.
Tampilan Submenu Capaian Kinerja/Capaian Indikator Kinerja pada SIMANTAB

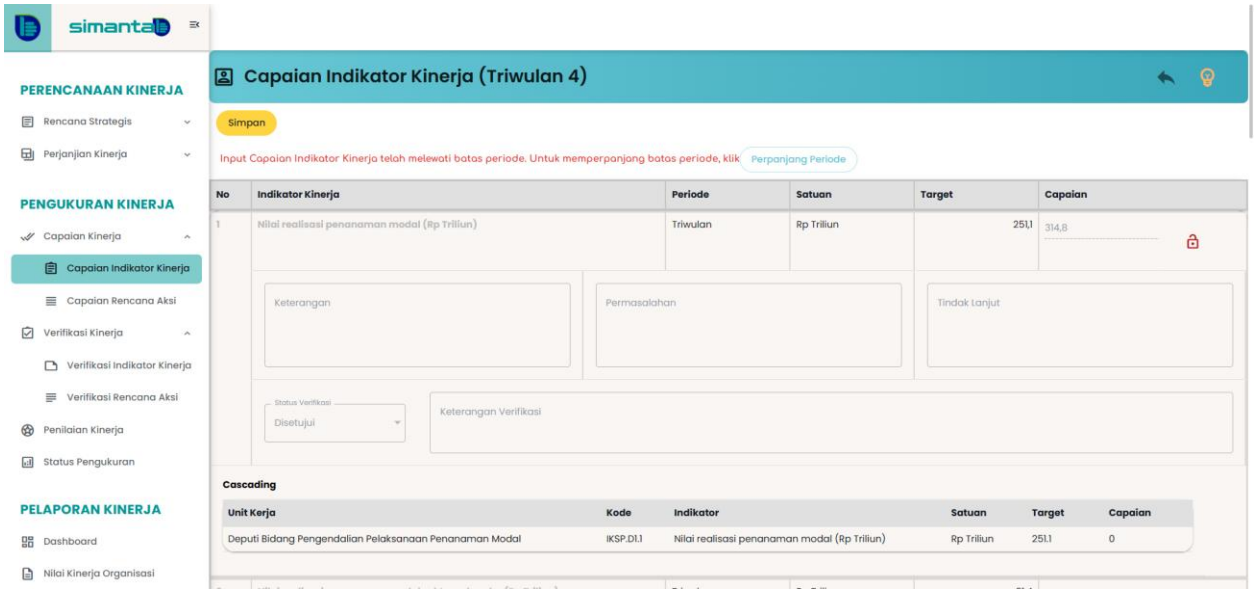

Gambar 4.4.
Tampilan Input Capaian Indikator Kinerja
pada Submenu Capaian Kinerja/Capaian Indikator Kinerja pada SIMANTAB

Untuk menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja tersebut, SIMANTAB juga telah mengakomodir submenu *Reward and Punishment* yang menampilkan hubungan capaian antara Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dengan besaran tunjangan kinerja. Jika NKO mencapai kategori "sangat baik", tidak ada *punishment* berupa pemotongan tunjangan kinerja, sebaliknya, jika NKO mendapat kategori "buruk", "kurang", dan "cukup", maka akan mendapatkan *punishment* berupa pemotongan tunjangan kinerja sesuai dengan besaran yang telah ditentukan. Berikut adalah tampilan submenu *Reward and Punishment* pada sistem SIMANTAB.

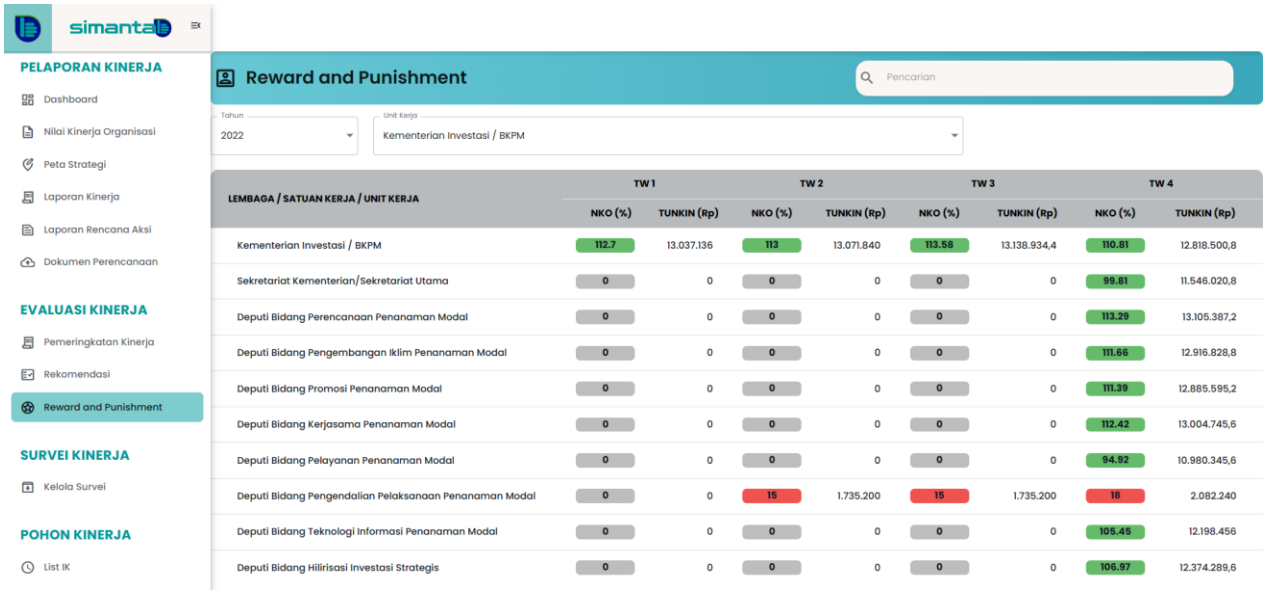

LEMBAGA / SATUAN KERJA / UNIT KERJA	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4	
	NKO (%)	TUNKIN (Rp)	NKO (%)	TUNKIN (Rp)	NKO (%)	TUNKIN (Rp)	NKO (%)	TUNKIN (Rp)
Kementerian Investasi / BKPM	112.7	13.037.136	113	13.071.840	113.58	13.138.934,4	110.81	12.818.500,8
Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	0	0	0	0	0	0	99.81	11.546.020,8
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal	0	0	0	0	0	0	113.29	13.105.387,2
Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal	0	0	0	0	0	0	111.66	12.916.828,8
Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal	0	0	0	0	0	0	111.39	12.885.595,2
Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal	0	0	0	0	0	0	112.42	13.004.745,6
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	0	0	0	0	0	0	94.92	10.980.345,6
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	0	0	15	1.735.200	15	1.735.200	18	2.082.240
Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal	0	0	0	0	0	0	105.45	12.198.456
Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis	0	0	0	0	0	0	106.97	12.374.289,6

Gambar 4.5.
Submenu *Reward and Punishment* pada SIMANTAB

3. Penguatan dan Optimalisasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Dalam mendukung implementasi berbagai bentuk inovasi guna memperbaiki iklim investasi di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, diperlukan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berperan penting dalam mempertahankan efektivitas serta efisiensi proses organisasi secara optimal. Oleh karena itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus melakukan penguatan dan penguatan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Dalam rangka penguatan SPBE, pada tahun 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menetapkan **Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 176 Tahun 2024 tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2024-2028**.

Arsitektur dan Peta Rencana SPBE disusun untuk mempersiapkan dan mengeksekusi inisiatif-inisiatif strategis jangka pendek, menengah, dan panjang, serta pengembangan aplikasi, basis data, infrastruktur, serta sumber daya manusia (SDM), dan manajemen pelayanan yang didasarkan atas analisis terhadap kondisi terkait SPBE di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Arsitektur ini berfungsi sebagai panduan integrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, memungkinkan pemantauan dan evaluasi yang terpadu serta menyeluruh terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di berbagai area dan tingkatan. Arsitektur SPBE dirancang untuk menghasilkan layanan digital pemerintah terintegrasi, mencapai visi dan misi SPBE.

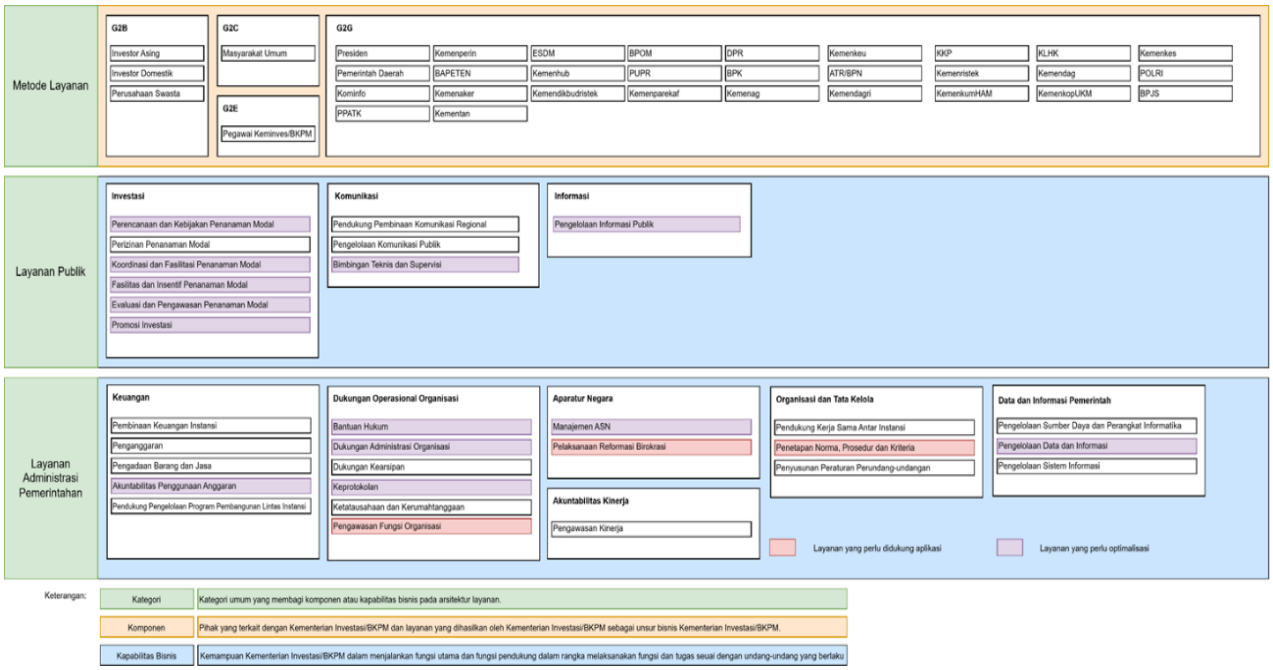

Gambar 4.6.
Arsitektur Layanan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Adanya Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, Kementerian dapat meningkatkan pelayanan publik dengan memberikan akses yang lebih mudah, cepat, dan efisien kepada pemangku kepentingan, termasuk penanam modal/investor dan masyarakat umum. Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE ini merinci strategi peningkatan kualitas layanan elektronik yang diberikan oleh Kementeerian melalui inisiatif-inisiatif yang akan diimplementasikan pada tahun 2024-2028. Tujuan utama penyusunan dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE adalah untuk memberikan informasi hasil analisis dalam penyusunan inisiatif dan program kegiatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Dokumen ini juga dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengambilan keputusan bagi pimpinan.

Beberapa Inisiatif yang dilakukan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada tahun 2024 terhadap pemenuhan aspek pada unsur SPBE dan standar internasional, yaitu:

a. Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 176 Tahun 2024 Tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Investasi/ BKPM Tahun 2024-2028;
b. Katalog Layanan Teknologi Informasi Nomor 1/TI/KAT/2024 tanggal 18 Oktober 2024,
c. Standar Operasional Prosedur Manajemen Katalog Layanan Teknologi Informasi Nomor 23/SOP-TI/2024 tanggal 18 Oktober 2024;
d. Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi di Lingkungan Kementerian Investasi/BKPM,
e. Keputusan Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi di Lingkungan Kementerian Investasi/BKPM;
f. Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 175 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Investasi/BKPM; dan
g. Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Nomor 177 Tahun 2024 Tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Investasi/BKPM.

Penerapan unsur-unsur SPBE yang selaras dengan ISO 20000-1:2018 bagi pengelolaan pemerintahan di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM maupun bagi pengguna layanan sudah dilaksanakan dengan baik. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah memiliki dan menerapkan berbagai layanan elektronik khususnya untuk administrasi pemerintahan dengan tingkat kematangan yang sudah sangat baik walaupun masih terdapat beberapa layanan yang harus ditingkatkan khususnya dalam aspek manajemen SPBE. Selain itu, pada tahun 2024 juga telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE.

4. Transformasi Sistem Perizinan Berusaha

Pada tahun 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah melakukan upaya transformasi sistem perizinan berusaha diantaranya (i) mengadakan sesi *transfer knowledge* secara rutin agar penyebaran informasi antara semua SDM merata; (ii) melakukan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengelolaan, pengembangan dan interoperabilitas sistem perizinan berusaha secara elektronik; dan (iii) Implementasi fiktif positif dalam sistem OSS berbasis risiko untuk semua sektor perizinan berusaha.

Program kegiatan untuk infrastruktur dan jaringan dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjaga keberlangsungan implementasi teknologi informasi pada layanan perizinan berusaha dan meminimalisisasi terhentinya layanan Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (OSS Berbasis Risiko). Pada tahun 2024, kegiatan yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pengelolaan infrastruktur dan jaringan, antara lain:

1. Penyediaan Layanan Komputasi Awan
   Peningkatan penerbitan NIB setiap tahunnya berdampak pada peningkatan beban pemrosesan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di sistem OSS Berbasis Risiko pada periode pelaporan LKPM. Ketersediaan pelayanan perizinan berusaha di Indonesia secara nasional melalui sistem OSS Berbasis Risiko membutuhkan dukungan infrastruktur teknologi informasi yang handal, memiliki skalabilitas dan tingkat keamanan yang tinggi, serta kapasitas infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Untuk menjaga ketersediaan layanan sistem OSS Berbasis Risiko, kapasitas pemrosesan dan penyimpanan data pada infrastruktur OSS yang saat ini bersifat *On-Premise* perlu ditingkatkan dengan penambahan layanan komputasi awan (cloud) sebagai *Infrastructure-as-a-Service*. Penyediaan layanan komputasi awan sebagai infrastruktur pendukung OSS diperlukan untuk menambah kinerja infrastruktur eksisting sehingga dapat mengimbangi beban pemrosesan OSS yang terus meningkat. Pemindahan sebagian *environment* OSS ke komputasi awan diharapkan dapat mengurangi beban pemrosesan pada infrastruktur on-premise secara signifikan, sehingga meningkatkan performa dan kualitas layanan OSS Berbasis Risiko secara keseluruhan, termasuk juga untuk mendukung kegiatan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dari para pelaku usaha.
2. Revitalisasi Perangkat *Data Center* dan *Command Center*
   Untuk mendukung peran sebagai penyelenggara OSS, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mengelola *Command Center* dan *Data Center* yang berlokasi di Gedung Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM agar dapat memberikan manfaat yang optimal untuk kelancaran penyelenggaraan pelayanan berusaha berbasis risiko melalui OSS. *Command Center* merupakan pusat informasi, koordinasi, dan komando untuk monitoring dan pendukung dalam pembuatan keputusan penting/kebijakan terkait investasi. *Data center* merupakan pusat penempatan perangkat jaringan, aplikasi dan

database (penyimpanan data). Dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi dan kondisi perangkat pendukung di data center dan command center yang perlu ditingkatkan, maka perlu dilakukan revitalisasi perangkat data center berupa penggantian perangkat UPS dan perangkat command center berupa perangkat visualisasi dan perangkat pendukung lainnya untuk menampilkan data dan informasi terkait OSS. Kegiatan revitalisasi ini akan mengoptimalkan fungsi Data Center dalam menjaga ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan layanan Command Center sebagai media dalam melakukan pengawasan dan monitoring terhadap data dan aplikasi OSS RBA secara terpusat dan terintegrasi.

3. Pengelolaan *Command Center* Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

   Command center Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM merupakan pusat informasi, koordinasi, dan komando untuk monitoring dan pendukung dalam pembuatan keputusan penting/kebijakan terkait penanaman modal. Kegiatan pengelolaan *command center* bertujuan untuk mendukung implementasi dan pengawasan OSS Berbasis Risiko serta monitoring terhadap layanan data dan aplikasi OSS Berbasis Risiko secara terpusat dan terintegrasi. Hal ini dilakukan dengan menyediakan personil *dedicated* untuk mengoperasikan *command center* dan penyediaan lisensi meeting online untuk kemudahan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait. Personil yang dibutuhkan terdiri dari tenaga operator untuk mengoperasikan perangkat *command center* dengan baik dan benar, tenaga *front office* bertanggung jawab untuk menerima kunjungan ke command center dan mencatat kunjungan ke *command center* serta memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pengunjung *command center* dan tenaga teknisi komputer bertanggung jawab atas operasional semua peralatan yang ada dalam sistem komputerisasi di *command center.* Selain itu, dilakukan juga *reviu* berkala atas sistem *command center* yang dikelola serta pengumpulan daftar permasalahan dan solusi penyelesaian masalah untuk selanjutnya dapat digunakan menjadi bahan pembuatan SOP sebagai mekanisme penyelesaian permasalahan yang ada.

5. Penyediaan *Website* Terintegrasi

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan realisasi investasi di Indonesia dalam pemulihan ekonomi nasional, portal *website* bkpm.go.id memiliki peran yang sangat penting untuk menyediakan akses informasi paling mudah, cepat dan akurat melalui jaringan internet ke belahan dunia. Oleh karenanya Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus mengoptimalkan fungsi *website* sebagai sarana promosi investasi kepada dunia usaha nasional maupun internasional sebagai referensi utama bagi pelaku usaha, publik, dan para *stakeholders*.

Optimalisasi *website* dengan domain bkpm.go.id yang dilakukan di antaranya adalah pembaharuan PHP dan Laravel pada *website* eksisting, analisis penempatan media sosial di halaman utama *website,* perbaikan *broken link website*, perbaikan *link microsite* IIPC yang masih bermasalah dan mengaktifkan kembali fitur disabilitas.

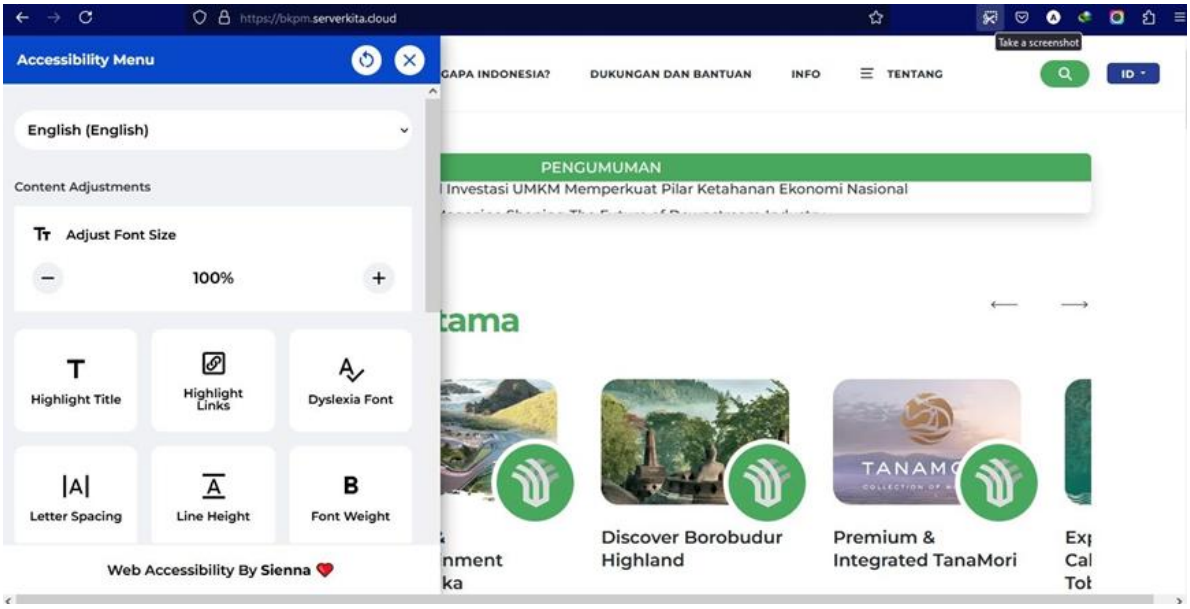

Gambar 4.7.
Tampilan fitur Disabilitas

Kantor perwakilan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di luar negeri, *Indonesia Investment Promotion Center* (IIPC) juga memiliki peranan dalam membuat kebijakan promosi, rekomendasi maupun penyebaran informasi langsung ke investor asing di wilayah IIPC, khususnya IIPC Sydney dan IIPC New York.

Dengan strategi konten dan desain, website IIPC disesuaikan dengan target calon investor masing-masing negara, dimana halaman utama ini diharapkan dapat meningkatkan minat dan partisipasi investor serta mendukung upaya promosi investasi di wilayah tersebut.

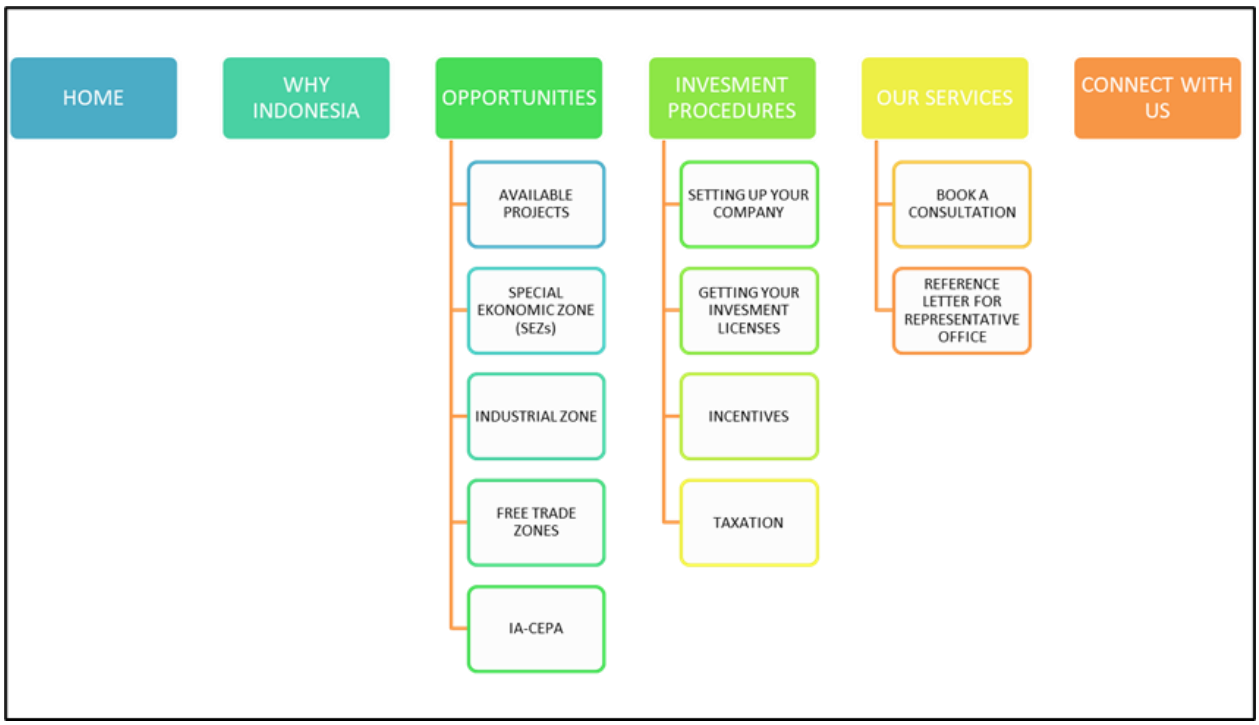

Gambar 4.8.
Struktur menu *website* IIPC Sydney

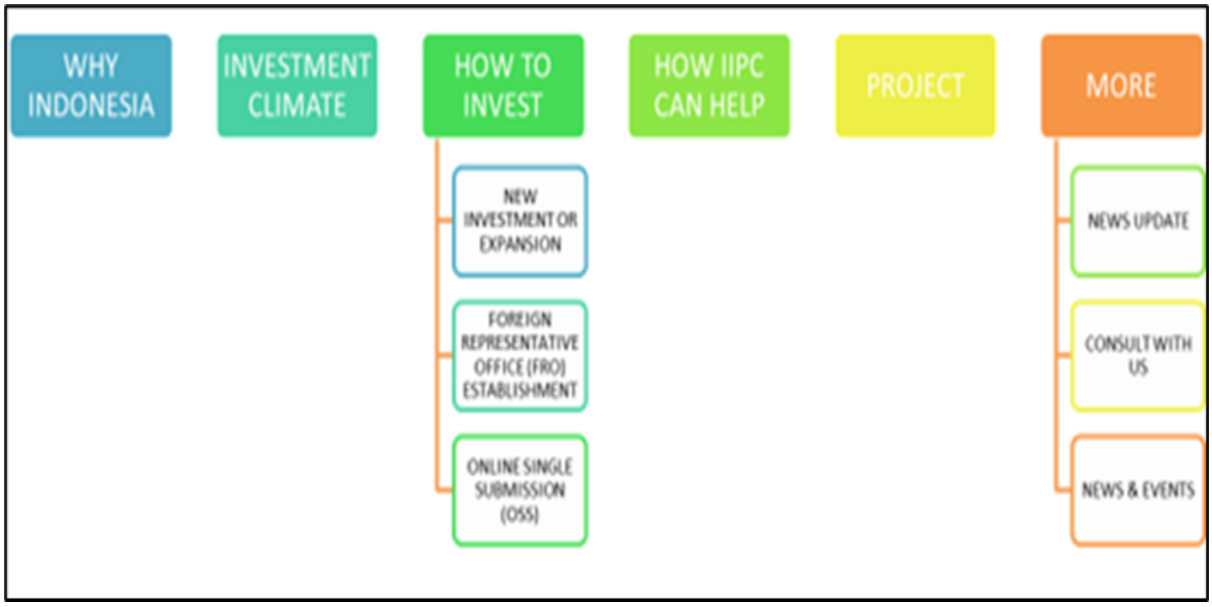

Gambar 4.9.
Struktur menu *website* IIPC New York

Kedua struktur menu, baik IIPC Sydney maupun IIPC New York, dirancang dengan fokus utama untuk menarik investor dan memberikan informasi yang relevan dan *up-to-date*. Keduanya menggunakan desain yang *user-friendly* dan profesional, serta konten yang kaya dan informatif. Namun, perbedaan utama terletak pada fokus geografis dan jenis informasi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan lokal masing–masing negara. Selain itu, fitur interaktif seperti video dan infografis lebih ditekankan pada website IIPC New York, memberikan pengalaman yang lebih dinamis bagi pengunjung. Keduanya juga menekankan pada kemudahan akses ke layanan dukungan dan informasi kontak, memastikan investor dapat dengan mudah mendapatkan bantuan yang dibutuhkan.

Website bkpm.go.id menyediakan pula *Whistleblowing System* (WBS) sebagai mekanisme pegawai untuk melaporkan dugaan pelanggaran atau aktivitas ilegal dalam Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Sistem ini untuk menjaga integritas dan transparansi, serta mendeteksi dan mencegah tindakan korupsi atau pelanggaran lainnya.

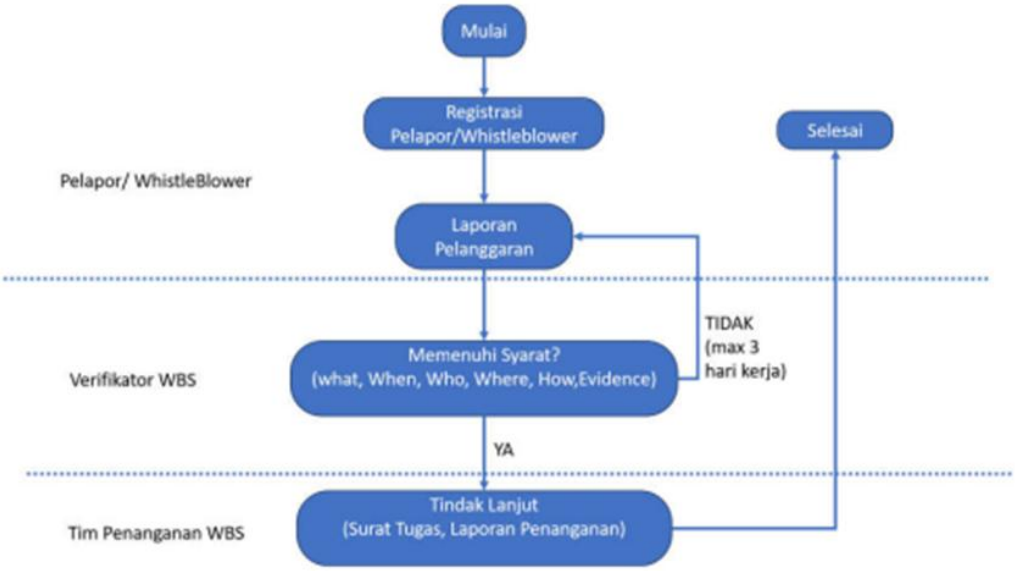

Gambar 4.10.
Proses Bisnis WBS

Setelah pelapor membuat akun pada WBS, pelapor menyampaikan laporan *whistleblowing* secara rinci yang mencakup kejadian yang terindikasi sebagai pelanggaran, waktu terjadinya indikasi pelanggaran, yang terlibat dalam indikasi pelanggaran, lokasi terjadinya indikasi pelanggaran, dan bukti pendukung (dokumen, foto, dan lain-lain) yang kemudian akan diverifikasi oleh verifikator di Inspektorat. Laporan yang telah terverifikasi akan ditindaklanjuti berupa Surat Tugas Inspektur dan Laporan Penanganan.

6. Pengembangan Sistem Layanan Kepegawaian Terintegrasi dengan Layanan Perkantoran (E-Office)

Dalam rangka meningkatkan Reformasi Birokrasi dengan cara keterbukaan informasi yang dapat dirasakan oleh ASN Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, dilakukan pemeliharaan modul eksisting dan pengembangan modul-modul baru pada sistem layanan kepegawaian yang terintegrasi dengan aplikasi perkantoran (E-Office). Layanan–layanan yang dibangun dalam portal E-Office terdiri dari layanan kepegawaian, persuratan, keuangan, inventory, portal, *mobile*, dan *Document Management System* (DMS) berbasis *Microservice.*

Kegiatan pemeliharaan Sistem Kepegawaian yang terintegrasi dengan Aplikasi Perkantoran (E-Office) sampai tanggal 31 Desember 2024 dan persentase sistem internal yang terintegrasi di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah mencapai 100 persen.

Tabel 4.2.
Kegiatan Pemeliharaan Sistem Kepegawaian yang Terintegrasi dengan Aplikasi Perkantoran (E-Office)

Planning	SP0	SP1	SP2	SP3	SP4	SP5	SP6	SP7	SP8	SP9	SP10	SP11	SP12	SP13	SP14
Cummulative	6.5%	14.75%	22.05%	30.03%	35.26%	43.67%	52.16%	62.17%	70.50%	73.52%	75.95%	79.46%	83.00%	99.50%	100%
Progress	SP0	SP1	SP2	SP3	SP4	SP5	SP6	SP7	SP8	SP9	SP10	SP11	SP12	SP13	SP14
Cummulative	6.5%	14.75%	21.83%	30.96%	37.17%	46.95%	53.13%	60.70%	70.94%	72.47%	75.70%	81.09%	90.37%	97.33%	100%

Keterangan:

Planning	:	Perencanaan bobot yang dibuat untuk masing–masing modul utama yang didistribusikan ke setiap Sprint (2 pekanan) progress
Cummulative Planning	:	Hasil penjumlahan *planning bobot current sprint* ditambah plannning bobot pada sprint sebelumnya.
Progress	:	Pencapaian bobot dari masing–masing Sprint progress yang didapatkan dari presentase progress pekerjaan yang sudah dikerjakan.
Cummulative Progress	:	Hasil penjumlahan *actual* bobot pada *current sprint* ditambahn actual bobot pada *sprint* sebelumnya.

7. Pengembangan *User Interface* di *Website* PIR Untuk Peta Peluang Investasi

Potensi Investasi Regional (PIR) dibuat bukan semata-mata untuk mengakomodir Peta Peluang Investasi (PPI). PIR merupakan sistem berbasis geospasial yang memuat data dan informasi provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Republik Indonesia. Data dan informasi tersebut antara lain menyajikan:

1. Profil 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota;
2. Peluang-peluang investasi yang siap ditawarkan kepada investor;
3. Potensi-potensi sektor unggulan di daerah;
4. Sebaran Kawasan Ekonomi;
5. Informasi infrastruktur dasar dan penunjang di daerah.

PIR menjadi salah satu media promosi dan satu-satunya media promosi digital yang dimiliki Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang melibatkan daerah, pengelola Kawasan dan K/L sehinga PIR berperan sangat penting dalam menyampaikan data dan informasi potensi dan peluang investasi kepada calon investor baik di dalam maupun di luar negeri. PIR juga dapat dimanfaatkan oleh kedeputian promosi sebagai salah satu media promosi, khususnya untuk IIPC.

PIR juga dapat dimanfaatkan oleh Kedeputian Perencanaan dan Kedeputian Hilirisasi untuk antara lain menyebar luaskan kajian-kajian, RUPM, *roadmap* dan sasaran strategis lainnya.

Salah satu strategi untuk meningkatkan kemudahan dalam mengakses proyek-proyek Peta Peluang Investasi (PPI) yang disusun adalah melalui *website*: *https://regionalinvestment.bkpm.go.id/pir/.* Pada tahun 2024, telah dilakukan *update* atau pembaharuan pada halaman website PIR. Dalam fitur kontak dan pengunduhan dokumen juga telah dilakukan pendataan sehingga tim dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dapat melakukan tindak lanjut terhadap *potential investor* yang berminat. Aplikasi Potensi Investasi Regional (PIR) merupakan sistem informasi berbasis web yang berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai potensi dan peluang investasi di daerah. Sistem ini digunakan dalam lingkup potensi dan peluang penanaman modal yaitu rangkaian kegiatan menyusun peta potensi dan peluang penanaman modal dam fasilitasi daerah dalam mempromosikan potensi dan peluang investasi yang ditawarkan kepada investor. Melalui integrasi teknologi serta pengorganisasian lembaga yang baik, PIR dirancang sebagai sistem informasi pusat yang dapat memfasilitasi pemerintah daerah dalam melakukan *update* data kependudukan, data ekonomi, sarana prasarana serta potensi dan peluang investasi mulai dari penyusunan profil hingga dihubungkan dengan investor serta melakukan digitasi di Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus untuk menunjang ekosistem investasi di daerah.

Laman ini didesain agar dapat diakses oleh Pemerintah Daerah yang memiliki otorisasi sumber daya dan investor baik dalam negeri maupun luar negeri. Aplikasi PIR yang diakses melalui https://regionalinvestment.bkpm.go.id memiliki pemetaan menu yang dapat memudahkan pengguna dalam mengakses informasi di dalamnya.

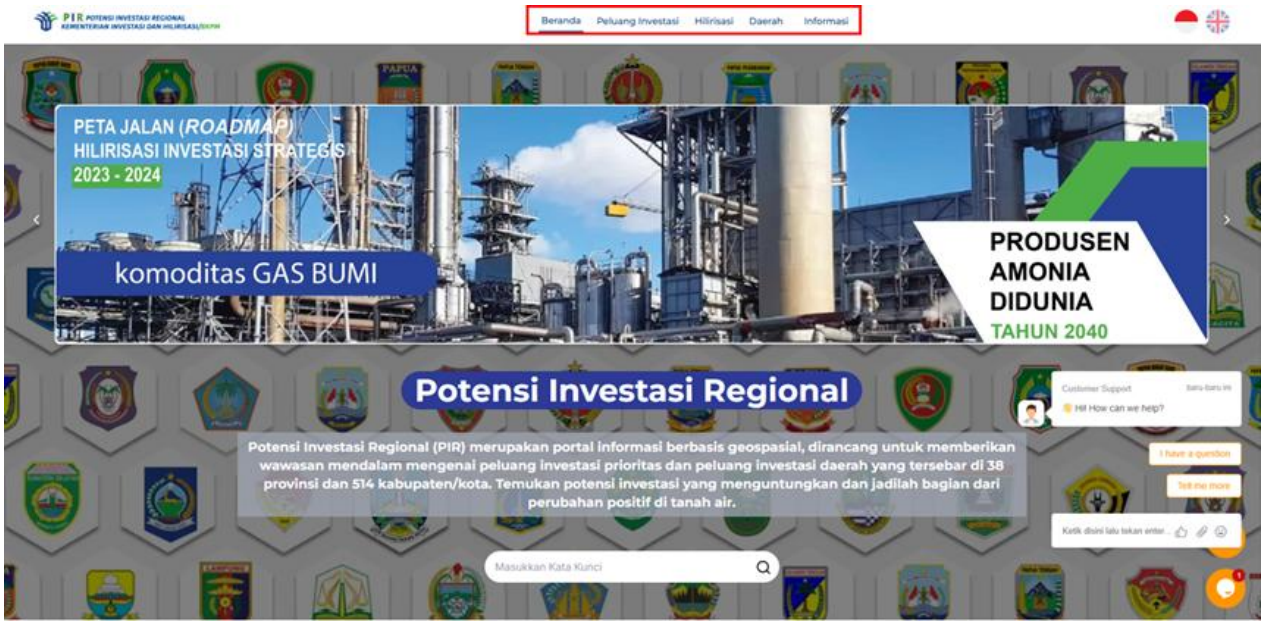

Gambar 4.11.
Potensi Investasi Regional (PIR)

Menu-menu yang terdapat pada aplikasi PIR merupakan pengkategorian informasi berdasarkan preferensi yang diperlukan oleh investor, dimana menu tersebut menjadi jalan pintas untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Adapun menu-menu diantaranya menu Peluang Investasi, menu Hilirisasi, menu Daerah, menu Informasi dan menu Login. Menu Peluang Investasi menampilkan proyek–proyek yang ditawarkan berdasarkan sektor serta informasi singkat yang menjadi preview untuk mendapatkan proyek yang sesuai dengan preferensi. Sedangkan menu Hilirisasi memberikan informasi strategis terkait pengembangan hilirisasi di Indonesia meliputi Roadmap dan kajian. Pada menu Daerah, bermanfaat bagi investor yang berfokus preferensi melalui daerah/provinsi tujuan.

8. Transformasi Layanan Data dan Informasi

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah melakukan optimalisasi peningkatan kualitas data dan informasi tahun 2024, diantaranya:

1. Meningkatkan kualitas SDM dengan terus mengikuti pelatihan dan seminar tentang Data dan Informasi, untuk meningkatkan kualitas pengelolaan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi.
2. Menerapkan tata kelola data untuk dapat meningkatkan transparansi serta mendukung program pemerintah dalam percepatan Investasi.
3. Melakukan evaluasi kebutuhan layanan data dalam rangka peningkatan kepuasan layanan data dan informasi.

Pada Tahun 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memberikan Layanan Data baik secara *Online* dan *Offline*. Untuk Tahun 2024, layanan data secara *offline* yang dilayani sebanyak 496 permintaan data. Permintaan data melalui persuratan meningkat 87.8% dari tahun 2023 yaitu 264 permintaan data. Permintaan data tersebut diterima melalui surat, nota dinas, maupun *e-mail*. Untuk layanan data secara online yaitu dashboard OSS dimana DPMPTSP Provinsi , DPMPTSP Kabupaten/Kota, KEK/KPBPB diseluruh Indonesia serta K/L yang telah terintegrasi dapat mengakses data Rencana OSS pada Dashboard yang sudah disediakan melalui hak akses yang sudah didapatkan oleh masing-masing K/L/D tersebut. Permintaan data secara offline juga dilayani oleh Direktorat Data dan Informasi dari berbagai Pihak baik Internal BKPM maupun Eksternal BKPM seperti Kementerian/lembaga, investor, peneliti/mahasiswa, kedutaan besar, dan sebagainya. Selain itu juga dilakukan analisis-analisis terkait permintaan secara langsung (*ad hoc*) terkait kebutuhan pimpinan dalam rangka monitoring proses perizinan berusaha melalui aplikasi OSS yang rutin dilakukan setiap minggu terkait data-data anomali yang dimungkinkan dapat muncul pada pelaksanaan proses perizinan berusaha melalui OSS, analisis data perizinan meliputi penerbitan NIB, banyaknya proyek yang telah terdaftar serta analisis proses verifikasi perizinan oleh Kementerian/Lembaga dan Daerah yang disajikan dalam bentuk paparan ringkasan eksekutif.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga membuat Buku Statistik Realisasi Investasi Tahun 2023 yang dibagi menjadi dua buka diantaranya buku statistik realisasi investasi berdasarkan lokasi, serta buku statistik realisasi investasi berdasarkan sektor yang selanjutnya diberikan kepada daerah serta Kementerian/Lembaga sebagai sarana informasi terkait data penanaman modal.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta Daerah terkait pemanfaatan data penanaman modal. Hal-hal yang dilakukan dalam rangka koordinasi pemanfaatan data diantaranya: diskusi bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait layanan data dan informasi penanaman modal, serta melaksanakan bimbingan teknis pemanfaatan data di daerah dan konsolidasi mengenai pemanfaatan data penanaman modal baik data realisasi maupun data perizinan. Selain itu, dalam rangka meningkatkan efektifitas penyajian data serta informasi perkembangan kegiatan perizinan berusaha dan pengawasan berbasis risiko (OSS RBA) dilaksanakan pengembangan *Business Intelligence* serta kegiatan penyajian data dalam bentuk dashbord dan report yang dapat di manfaatkan oleh pengguna data. Data yang disajikan dalam dashboard dan report meliputi data OSS dan data Realisasi. Penyajian data dalam bentuk dashboard telah dimanfaatkan oleh pengguna data diantaranya pelaksanaan *press release* yang disampaikan langsung oleh Menteri Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM setiap triwulan sekali.

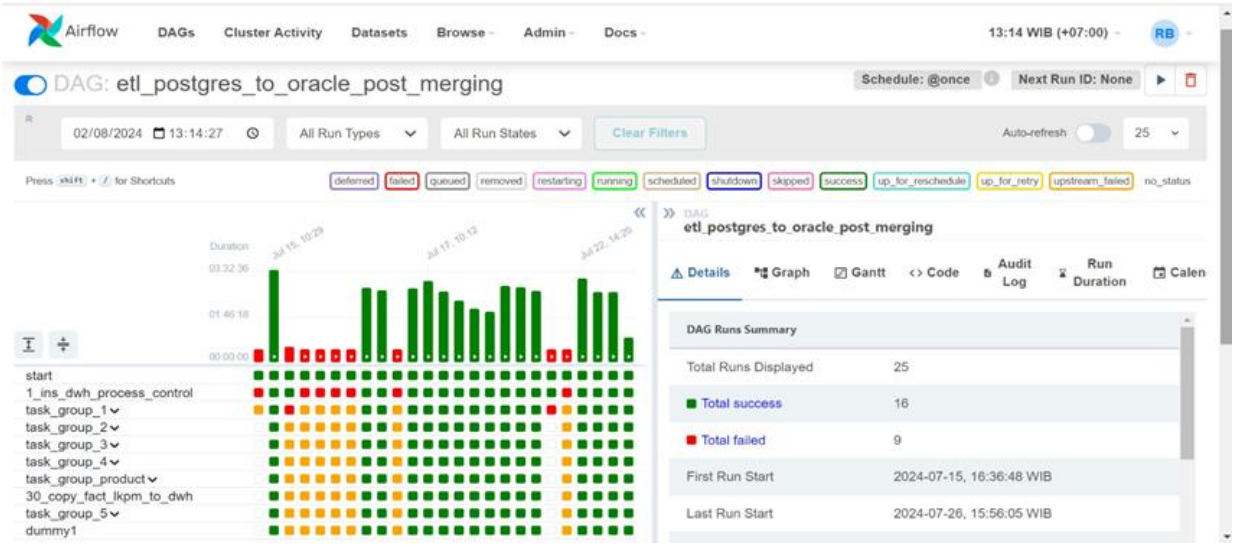

Gambar 4.12.
Pengembangan *Business Intelligence*

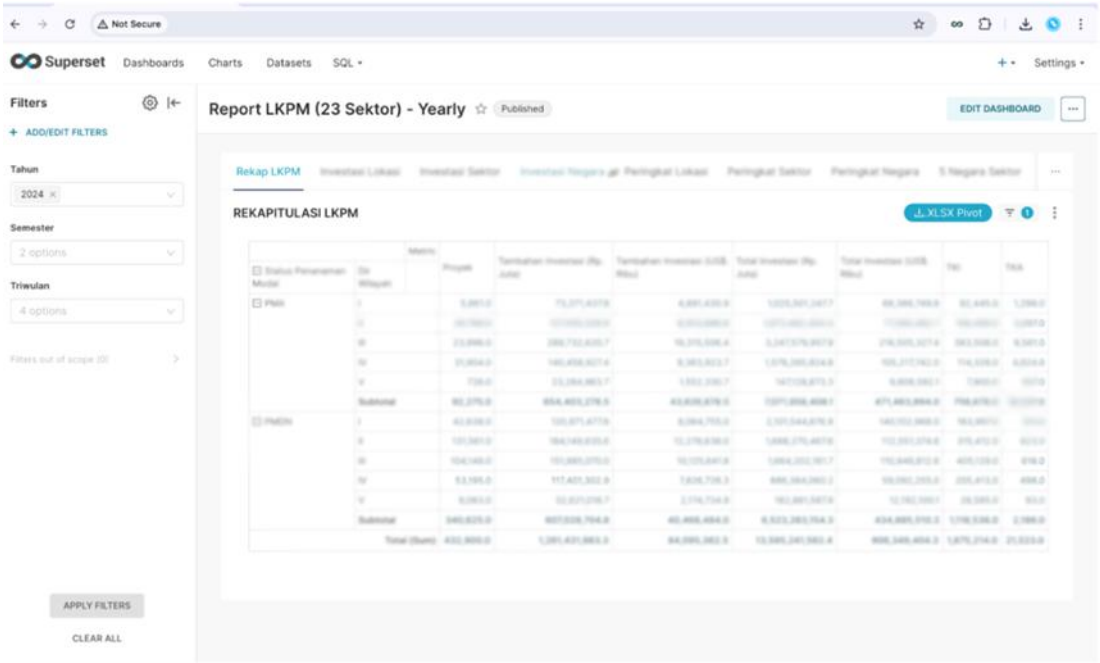

Gambar 4.13.
Report Apache Superset

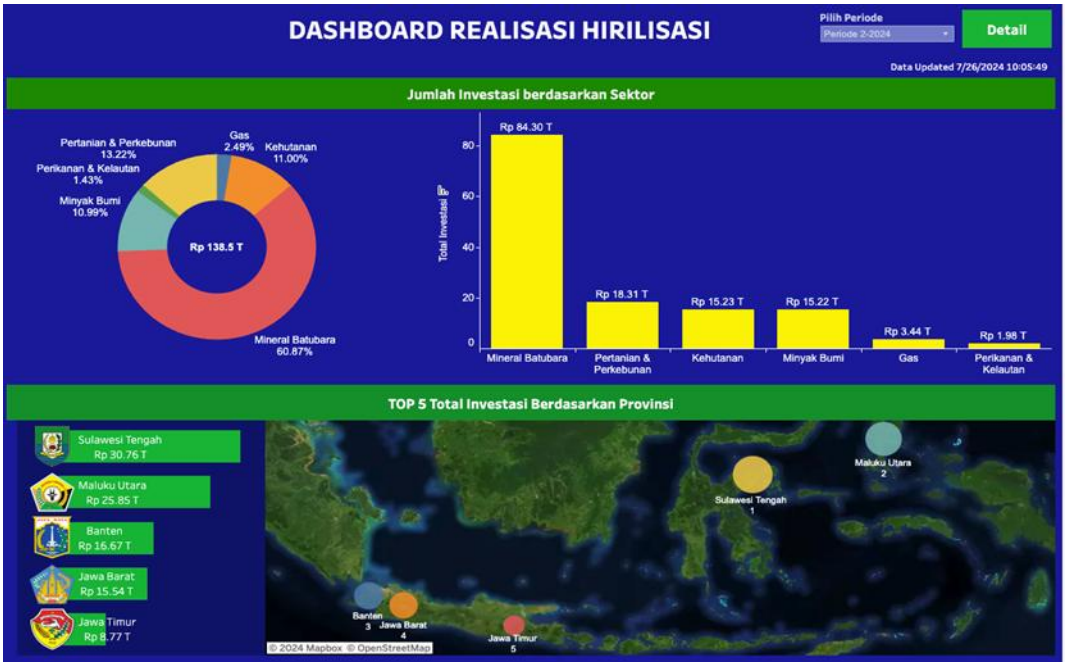

Gambar 4.14.
Dashboard Realisasi Hilirisasi

Gambar 4.15.
Pemanfaatan *Dashboard* dalam kegiatan *Press Release*

Dashboard yang disediakan oleh adalah Dashboard Statistik Penerbitan NIB. Pada *dashboard* pengguna data dapat mengetahui secara cepat jumlah NIB yang telah diterbitkan selama penerapan OSS RBA, terdapat dashboard yang menyajikan jumah proyek yang didaftarkan oleh pelaku usaha serta jumlah izin yang telah diverifikasi oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Gambar 4.16.
Dashboard Statistik Perizinan Berusaha OSS RBA

Dashboard yang disediakan oleh Direktorat Data dan Informasi yang berikutnya adalah *Dashboard* Statistik Penerbitan NIB berdasarkan masing-masing daerah meliputi Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Pada *dashboard* tersebut pengguna data di DPMPTSP daerah dapat mengetahui secara cepat jumlah NIB yang telah diterbitkan selama penerapan OSS RBA pada daerah kewenangannya, terdapat *dashboard* yang menyajikan jumah proyek yang didaftarkan oleh pelaku usaha serta jumlah izin yang telah diverifikasi yang menjadi kewenangan masing-masing daerah.

Gambar 4.17.
Dashboard Statistik Perizinan Berusaha OSS RBA Prov/Kab/Kota & KEK/KPBPB

Dashboard yang disediakan yang berikutnya adalah Dashboard Statistik Penerbitan NIB berdasarkan masing-masing Kementerian dan Lembaga terkait verifikasi masing-masing perizinan berdasarkan kewenangannya. Pada dashboard tersebut pengguna data di Kementerian dan Lembaga dapat mengetahui secara cepat jumlah NIB yang telah diterbitkan selama penerapan OSS RBA berdasarkan kewenangan perizinannya, terdapat dashboard yang menyajikan jumah proyek yang didaftarkan oleh pelaku usaha serta jumlah izin yang telah diverifikasi yang menjadi kewenangan masing-masing Kementerian/Lembaga.

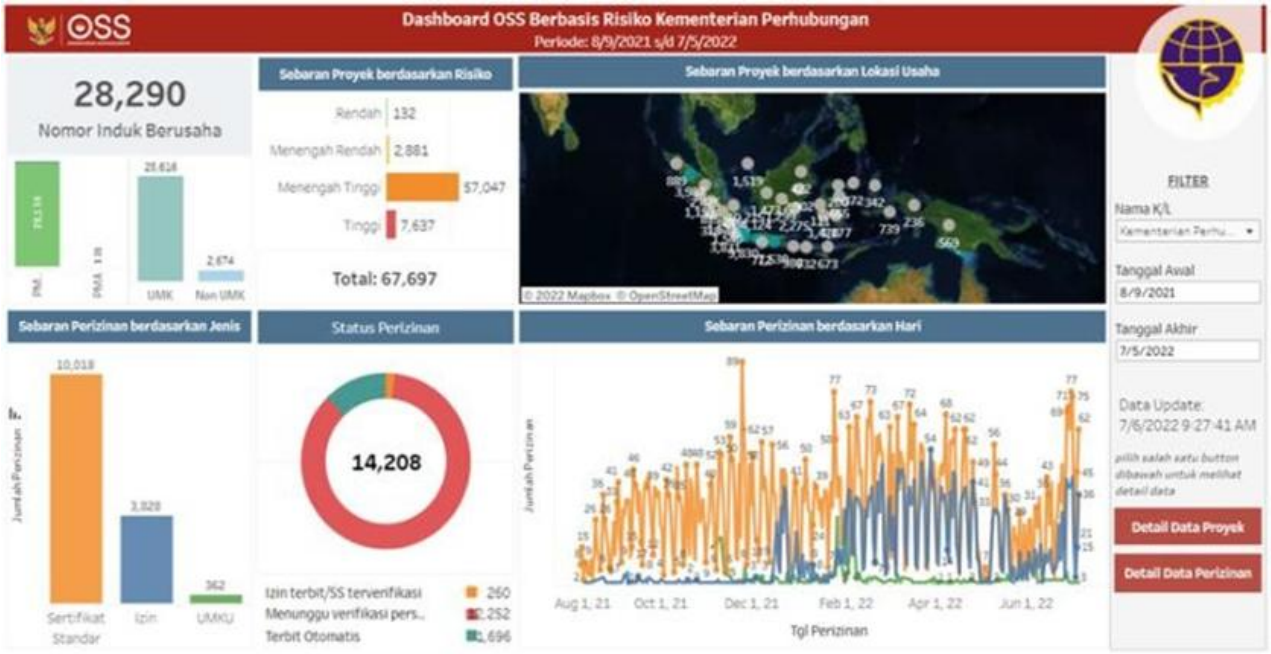

Gambar 4.18.
Dashboard Statistik Perizinan Berusaha OSS RBA Kementerian/Lembaga

Dalam hal kebutuhan data yang akurat, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menyiapkan suatu sistem layanan dalam rangka menciptakan data berkualitas, mudah diakses dan dapat dibagipakaikan antar instansi pusat serta daerah. Portal Satu Data mampu untuk mengelola data dan informasi milik Kementerian Investasi dan Hilirasi/BKPM dengan mengintegrasikan serta menyajikan berbagai data dari berbagai sumber dalam satu lokasi atau portal tunggal. Dengan adanya Portal Satu Data, organisasi atau pemerintah dapat meningkatkan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data, meningkatkan transparansi, serta memperkuat pengambilan keputusan berbasis data.

Gambar 4.19.
Portal Satu Data

Gambar 4.20.
Konten Portal Satu Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Dalam rangka mencapai target pengguna data dan informasi penanaman modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2024 melaksanakan kegiatan *Data Collaboration Project: Advanced Analytic.* Kementerian Investasi/BKPM menyadari pentingnya Analisis Tingkat Lanjut (*Advanced Analytics*) dan pembuatan *Advanced Monitoring Tools* dengan memanfaatkan penerapan teknologi informasi seperti *Artificial Intelligence (AI)*. Untuk itu, Kementerian Investasi/BKPM melakukan analisis lanjutan yang komprehensif dan membangun sebuah dashboard analisis yang *real-time,* informatif dan interaktif, yang dapat menampilkan profil pelaku usaha beserta hasil analisis dan rekomendasi. Langkah ini diharapkan meningkatkan fungsi pengawasan, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan penanaman modal, serta mendukung peningkatan kualitas kebijakan investasi untuk memajukan perekonomian nasional.

9. Inovasi Penguatan Kerja Sama Penanaman Modal

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada tahun 2024 telah melakukan berbagai inovasi terkait penguatan kerjasama penanaman modal, diantaranya yaitu:

a. **Penerbitan Sertifikat Digital.** Sejalan dengan perkembangan teknologi, Kedeputian Bidang Kerja Sama Penanaman Modal melakukan inovasi dengan menerbitkan sertifikat digital untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP dan kinerja PPB Pemerintah Daerah serta kinerja PPB Kementerian/Lembaga pada tahun 2024.

b. Monitoring evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman (NK) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Pada Tahun Anggaran 2024, kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan NK dan PKS yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menggunakan file bersama aplikasi OneDrive. Mekanisme ini mempercepat *updating* kegiatan yang telah dilakukan oleh unit pelaksana di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam rangka NK dan PKS sekaligus mengetahui NK dan PKS dengan mitra kerja sama yang akan selesai masa berlaku.

c. Digitalisasi pengisian survey minat pelaku usaha untuk *Outward Investment.* Pada Tahun Anggaran 2024, telah dilaksanakan Forum Fasilitasi *Outward Investment*

yang bertujuan untuk menjaring minat dan memfasilitasi pelaku usaha nasional untuk mengembangkan usahanya di luar negeri (*outward investment*). Adapun pengumpulan data minat tersebut dilakukan melalui pengisian survei. Untuk memudahkan pelaku usaha yang berpartisipasi dalam forum dalam mengisi survei, formulir disajikan dalam bentuk *hard copy* maupun *digital* dengan memindai kode *QR*.

10. Optimalisasi Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Dana Fasilitasi Penanaman Modal

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2024 melakukan analisis dan gambaran informasi yang komprehensif terkait indikator perhitungan dalam penetapan Provinsi, Kabupaten/Kota penerima DAK Nonfisik FPM, dan besaran target dan formulasi alokasi daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang ditetapkan untuk menerima DAK Nonfisik FPM. Hasil analisis ini diharapkan DAK Nonfisik Dana Fasilitasi Penanaman Modal yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah dilakukan secara tepat sasaran dan memiliki dampak besar dalam peningkatan realisasi investasi.

4.2. Rencana Tindak Lanjut Atas Evaluasi AKIP Tahun 2024

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berkomitmen untuk terus melakukan berbagai upaya inisiatif untuk perbaikan akuntabilitas dan pencapaian kinerja secara optimal dan berkesinambungan. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mengapresiasi terutama kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang telah secara berkala melakukan evaluasi dan memberikan masukan terhadap AKIP Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/646/AA.05/2024 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2024, terdapat 13 rekomendasi untuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai upaya perbaikan dan peningkatan dalam penerapan akuntabilitas kinerja. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan berupaya optimal untuk menindaklajuti rekomendasi yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Beberapa Rencana tindak lanjut atas evaluasi AKIP tahun 2024 yang dilakukan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di tahun mendatang adalah:

1. Menyusun Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM tentang Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2025-2029. Renstra Periode 2025-2029 yang disusun merupakan pondasi penting dan momentum yang tepat dalam mengatasi berbagai kelemahan AKIP Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM selama ini, diantaranya: (i) indikator kinerja yang memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound* (SMART); (ii) penyempurnaan penjenjangan kinerja; (iii) kualitas Indikator Kinerja Utama (IKU); dan (iv) integrasi hasil pengukuran kinerja individu dengan pengukuran kinerja unit/organisasi sehingga tergambar dengan baik hubungan logis pencapaian kinerja secara berjenjang.
2. Masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menyusun Renstra tahun 2025-2029 dengan mengacu pada Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2025-2029. Adanya Renstra masing-masing unit diharapkan dapat memperbaiki kualitas sasaran strategis unit kerja agar lebih spesifik menggambarkan kinerja/kondisi yang ingin di capai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan peran yang dimiliki. Selain itu, indikator kinerja masing-masing unit telah relevan, spesifik dan cukup untuk mengatur ketercapaian setian sasaran/kinerja yang diampu.
3. Menyusun pohon kinerja sesuai kaidah Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah dengan merujuk pada Renstra periode 2025-2029.
4. Menyusun IKU secara berkualitas baik pada level Kementerian maupun IKU level unit kerja dengan merujuk pada Renstra periode 2025-2029

5. Menyusun target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) baik level Kementerian hingga unit kerja terkecil secara baik. Ini untuk memastikan penetapan target setiap indikator lebih baik/lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.
6. Mendorong setiap unit kerja untuk melakukan *breakdown* target per triwulan khususnya terhadap indikator kinerja kegiatan dan level perencanaan kinerja dibawahnya.
7. Mengoptimalkan monitoring penyampaian data capaian kinerja berkala pada aplikasi SIMANTAB untuk memastikan setiap unit kerja lebih bertanggung jawab dan disiplin menyampaikan data sesuai dengan waktu dan ketentuan yang ditelah ditetapkan
8. Meningkatkan kualitas laporan kinerja unit kerja termasuk menyajikan identifikasi atau penjelasan faktor-faktor pendorong/penghambat tercapainya target setiap indikator kinerja. Faktor-faktor pendorong/penghambat yang telah teridentifikasi dapat menjadi dasar perbaikan perencanaan serta strategi dalam mencapai target kinerja kedepannya, serta menyajikan informasi langkah/strategi yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja secara optimal namun dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
9. Penguatan evaluasi AKIP internal, dengan (i) melakukan proses evaluasi AKIP internal secara lebih mendalam untuk memotret kualitas implementasi SAKIP unit kerja secara lebiih rill, khususnya pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja; (ii) Memperbaiki kualitas rekomendasi pada LHE AKIP internal agar memberikan solusi yang lebih relevan atas setiap catatan yang disampaikan dan juga memastikan tim evaluator internal agar lebih tepat/relevan menempatkan catatan hasil evaluasi pada komponen SAKIP yang sesuai; (iii) Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi secara lebih konsisten untuk memastikan unit kerja menindaklanjuti setiap catatan dan rekomendasi yang disampaikan pada LHE AKIP internal, sehingga kualitas implementasi SAKIP setiap unit kerja dapat meningkat secara optimal; dan (iv) Penerapan mekanisme pemberian *reward and punishment* atas hasil evaluasi AKIP internal yang diperoleh untuk meningkatkan motivasi unit kerja terus meningkatkan kualitas implementasi SAKIP

KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2024 disusun mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada tahun 2024 merupakan capaian akhir dari periode Rencana strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2020-2024. Hal ini menjadikan capaian kinerja tahun 2024 merupakan *milestone* dan transisi menuju periode Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029.

Seluruh unit kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah berkolaborasi, bersinergi, dan berkomitmen untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja di tengah berbagai tantangan yang terjadi di tahun 2024, seperti (i) kondisi ekonomi global yang tidak stabil diakibatkan oleh perang dagang, konflik Rusia dan Ukraina, pemanasan global, serta fluktuasi harga komoditas dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS menyebabkan kekhawatiran bagi investor dan berdampak pada minat investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia; (ii) ketersediaan dan kualitas infrastruktur di daerah yang belum merata; dan (iii) permasalahan pengadaan tanah di daerah. Selain itu, pada tahun 2024, Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah periode 2025-2029. Konstelasi politik tersebut menjadi tantangan dalam rangka peningkatan nilai realisasi investasi di Indonesia. Investor cenderung *wait and see* dan menunda investasinya karena menunggu hasil pemilu pada kuartal pertama tahun 2024. Di tengah berbagai tantangan yang terjadi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mampu mencatatkan pencapaian kinerja yang sangat mengesankan. Realisasi investasi mampu dicapai sebesar Rp1.714,2 trilliun. Angka ini telah melampui target Presiden dan target akhir Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2020-2024.

Berbagai upaya dan alokasi dana yang telah direalisasikan selama tahun 2024 menunjukkan pencapaian kinerja **sangat baik**. Hal ini ditandai dengan pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebesar 109,98 persen. Capaian NKO selama periode 2020-2024 menunjukkan nilai diatas 100 persen atau terkategori **sangat baik**. Hal ini menunjukkan kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang secara konsisten dan optimal. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebesar 109,41 atau terkategori **sangat baik** pada tahun 2024. Capaian NPS tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 sebesar 106,21. Berdasarkan capaian rata-rata selama periode 2020-2024, nilai NPS selama periode tahun 2020-2024 secara konsisten berada di atas 100 persen atau terkategori **sangat baik**. Hal ini menunjukkan kinerja positif serta komitmen Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam melaksanakan berbagai kinerja untuk mencapai target setiap sasaran yang telah ditetapkan.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berhasil mencapai sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kemajuan signifikan dalam bidang penanaman modal, kepercayaan pelaku usaha, dan reformasi birokrasi.

1. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal *(Stakeholder Perspective)*
   1) Nilai Realisasi Penanaman Modal
      Target penanaman modal sebesar Rp1.239,3 triliun berhasil terlampaui dengan capaian Rp1.714,2 triliun, mencapai 138,32 persen dari target yang

ditetapkan. Pencapaian ini menunjukkan hasil yang **sangat baik**, mencerminkan keberhasilan dalam menarik investasi secara signifikan.

2) Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder
Target penanaman modal sektor sekunder sebesar Rp646,1 triliun, realisasi yang tercatat mencapai Rp721,3 triliun, dengan pencapaian 111,64 persen. Ini menunjukkan hasil yang **sangat baik**, dengan sektor sekunder menunjukkan kemajuan yang menggembirakan.

3) Sebaran Penanaman Modal Berkualitas di Luar Jawa
Target untuk sebaran penanaman modal berkualitas di luar Jawa adalah 51,7 persen, dan realisasinya tercatat sebesar 52,2 persen. Ini mencapai 100,97 persen dari target, yang menunjukkan distribusi investasi yang merata dan semakin berkembang di luar pulau Jawa, yang dapat digolongkan sebagai **sangat baik**.

4) Kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk UMKM
Target kontribusi PMDN termasuk UMKM sebesar 53,1 persen tidak sepenuhnya tercapai, dengan capaian 47,5 persen. Meskipun tidak mencapai target, pencapaian ini memperoleh 89,45 persen dan dinilai **baik**, menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan di masa mendatang.

2. Meningkatnya Kepercayaan Pelaku Usaha/Penanam Modal *(Customer Perspective)*

1) Peringkat Kemudahan Berusaha *(Ease of Doing Business)*
Target peringkat *Ease of Doing Business* adalah 40, sementara Indonesia berhasil mencatatkan peringkat 27. Ini melampaui target dengan pencapaian 120 persen, yang menunjukkan perbaikan signifikan dalam iklim usaha, yang dapat dikategorikan sebagai **sangat baik**.

3. Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Efektif, dan Melayani *(Learning & Growth Perspective)*

1) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
Pada penilaian reformasi birokrasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berhasil memperoleh predikat BB (71,91), meskipun target yang ditetapkan adalah A (80%-90%). Meskipun tidak tercapai secara penuh, pencapaian ini mencapai 90 persen dan digolongkan sebagai **baik**.

2) Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
Laporan keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK, yang merupakan pencapaian 100 persen dan dikategorikan sebagai **sangat baik** karena menunjukkan transparansi dan akuntabilitas keuangan yang tinggi.

Realisasi kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2020-2024 menunjukkan keberhasilan mencapai sejumlah sasaran strategis dengan kategori kinerja **sangat baik.** Meskipun terdapat beberapa indikator yang belum sepenuhnya mencapai target, namun tetap berada dalam kategori yang baik. Indikator tersebut adalah (1) Kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk UMKM. Target akhir Renstra sebesar 53,1 persen dengan realisasi sebesar 47,5 persen; dan (2) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yaitu BB (71,91), sedangkan target yang ditetapkan adalah A (80%-90%). Meskipun tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus mengupayakan berbagai upaya akseleratif dan inovatif dalam mencapai target yang diharapkan. Oleh karenanya, pencapaian kinerja pada dua indikator kinerja utama di atas masih berada di rentang 76-99 persen atau terkategori **"baik".**

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki capaian kinerja yang positif terhadap berbagai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan

pembangunan nasional. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 115,02% atau terkategori **sangat baik** terhadap pencapaian target indikator RPJMN 2020-2024 yang diampu. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga memiliki capaian kinerja sebesar 118,22 persen atau terkategori **sangat baik** terhadap pencapaian target RKP tahun 2024. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga menunjukkan kinerja yang positif terhadap pencapaian program prioritas nasional tahun 2024. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 104,78% atau terkategori **sangat baik** dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang menunjang program prioritas nasional "Memperkuat Kebijakan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan".

Berbagai keberhasilan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam mencapai target tahun 2024 dan memiliki rata-rata capaian kinerja **sangat baik** merupakan wujud komitmen dalam upaya peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas lembaga. Keberhasilan tersebut menunjukkan adanya berbagai upaya dan inovasi dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan serta proses penganggaran yang dilakukan dengan baik serta tepat sasaran. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM perlu terus mengoptimalkan berbagai upaya, inisiasi, dan inovasi ke depan karena tantangan serta hambatan yang semamin kompleks. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM harus melakukan berbagai sinergi, kolaborasi, serta upaya akseleratif dan transformatif dalam upaya mendukung terwujudnya Visi RPJMN 2025-2029, yaitu "**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**".

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pencapaian kinerja secara optimal. Berdasarkan analisis capaian kinerja terdapat beberapa rencana tindak lanjut untuk mengatasi berbagai permasalahan serta kendala yang ada. Berikut ini beberapa rencana tindak lanjut Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam mengoptimalkan akuntabilitas kinerja dan pencapaian kinerja di tahun mendatang.

1. **Akselerasi peningkatan penanaman modal yang berfokus pada sektor prioritas penanaman modal guna mewujudkan pencapaian nilai realisasi penanaman modal yang lebih tinggi, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata.**
   1) Menguatkan kebijakan perencanaan penanaman modal dengan sinergi kebijakan perencanaan lintas sektor, melalui:
      a. Perencanaan kebijakan di sektor prioritas penanaman modal terutama pada sektor energi baru terbarukan, ketahanan pangan, ekonomi digital & data center, industri manufaktur berorientasi ekspor, kesehatan, Ibu Kota Nusantara (IKN), serta pendidikan dan vokasi. Perencanaan kebijakan di antaranya dilakukan dengan pelaksanaan kajian, analisis kekuatan dan kelemahan dari sektor-sektor prioritas, serta penguatan strategi dan inovasi perencanaan penanaman modal.
      b. Penguatan perencanaan kebijakan makro penanaman modal, di antaranya (i) penguatan kebijakan umum penanaman modal di daerah dengan melakukan pendampingan penyusunan RUPM Provinsi/Kabupaten/Kota; (ii) pengawalan pencapaian kebijakan jangka menengah melalui evaluasi dokumen Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029; (iii) analisis strategis rencana pengembangan penanaman modal, dengan melakukan kajian perekonomian global dan Indonesia serta

dampaknya terhadap investasi di Indonesia beserta segala aspeknya; (iv) pengkajian berbagai aspek investasi dan implikasinya terhadap perekonomian Indonesia untuk mendorong akselerasi implementasi investasi prioritas; dan (v) perencanaan pendanaan investasi prioritas mencakup potensi pendanaan internasional untuk investasi yang berkelanjutan (World Bank, IMF, JICA, dll) dalam rangka mendorong percepatan pendanaan investasi prioritas/berkelanjutan.

c. Penguatan kolaborasi dan fasilitasi kebijakan penanaman modal proyek KPBU dan Kawasan Pusat Pertumbuhan dalam rangka mendukung percepatan penyelesaian masalah strategis di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan percepatan pelaksanaan proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

2) Meningkatkan kualitas kerja sama penanaman modal untuk meningkatkan peran dalam *Global Production Network* (GPN) dan *Global Value Chain* (GVC) serta meningkatkan akses pasar ekspor, melalui:
   a. Penyusunan rekomendasi kebijakan dalam rangka penguatan kesepakatan dan implementasi kerja sama bilateral, multilateral, dan regional di bidang penanaman modal.
   b. Menghadiri dan menyelenggarakan forum dan perundingan kerja sama bilateral, multilateral, dan regional di bidang penanaman modal.
   c. Kemitraan dengan negara-negara di Afrika, Timor Leste, dan Timur Tengah untuk menarik potensi investasi dari *Sovereign Wealth Fund* (SWF).
   d. Pemanfaatan perjanjian dengan pelaku usaha untuk menarik investasi di sektor prioritas penanaman modal, seperti IA-CEPA untuk menarik klaster pendidikan dari Australia.
   e. Peningkatan fasilitasi *outward investment* dan penguatan kerjasama penanaman modal untuk pengembangan rantai nilai global.
3) Meningkatkan potensi dan peluang penanaman modal di sektor prioritas, melalui:
   a. Pemetaan jenis investasi indikatif berbasis kebutuhan investor *(investors need)* dan pemetaan calon investor potensial dalam negeri dan luar negeri.
   b. Pemetaan lahan potensial *(potensial land)* investasi secara menyeluruh dengan melibatkan peran aktif Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah.
   c. Perancangan skema insentif dan kerjasama pemanfaatan lahan investasi dalam rangka mengatasi keterbatasan lahan clean and clear dan mendukung kepastian berusaha.
   d. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) bagi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM dan Pemerintah Daerah agar memiliki keseragaman dalam penyusunannya.
   e. Pemetaan potensi dan peluang penanaman modal terutama di kawasan pusat pertumbuhan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), perguruan tinggi, pihak swasta, dan pemerintah daerah.
   f. Penyusunan peta peluang investasi proyek prioritas strategis yang siap ditawarkan
   g. Penyiapan *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) dan pengembangan video promosi yang lebih menarik, diantaranya video *construction time lapse.*
4) Pelaksanaan kegiatan promosi yang fokus dan terarah *(targeted)*, melalui:
   a. Penguatan branding citra positif penanaman modal di Indonesia.

b. Pendeteksian investor dan negara potensial di sektor prioritas penanaman modal (market intelligence) yang dilakukan di antaranya untuk menentukan *flagship projects.*
c. Sosialisasi flagship projects di kegiatan/forum internasional
d. Promosi yang sesuai dengan sektor prioritas penanaman modal, termasuk peningkatan promosi penanaman modal untuk mendorong hilirisasi dan industrialisasi di kawasan pusat pertumbuhan.
e. Penyelenggaraan forum penanaman modal tingkat internasional, termasuk peningkatan promosi kegiatan di Kawasan Nasional IKN pada forum bisnis dan investasi internasional.
f. Perluasan promosi penanaman modal dengan mengoptimalkan peran aktif Kedubes/Atase di negara potensial, jaringan diaspora Indonesia, instansi/lembaga terkait, asosiasi pelaku usaha, dan pemerintah daerah untuk melakukan promosi penanaman modal.

5) Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan fasilitasi pemanfaatan fasilitas penanaman modal untuk meningkatkan realisasi penanaman modal, melalui:
a. Fasilitasi permasalahan investasi termasuk pelaku usaha (*debottlenecking). Debottlenecking* permasalahan investasi di antaranya terkait pemasalahan: (i) persetujuan pelepasan kawasan hutan; (ii) permasalahan tumpang tindih lahan; (iii) *abnormality* penyaluran gas; (iv) permasalahan proses AMDAL; dan (v) fasilitasi atas masyarakat sekitar yang terdampak dari pengembangan proyek prioritas.
b. Percepatan realisasi penanaman modal proyek strategis nasional (PSN).
c. Pengawasan penanaman modal berbasis risiko.
d. Mengoptimalkan pendataan, pengawasan, dan pembinaan kepada pelaku usaha yang tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan/atau melaporkan LKPM.
e. Mengawal eksekusi dan fasilitasi proyek untuk mendukung percepatan realisasi investasi.

2. Meningkatkan kualitas Iklim penanaman modal melalui sikronisasi dan harmonisasi kebijakan, insentif penanaman modal, penguatan UMKM, dan optimalisasi potensi penanaman modal di daerah untuk mendukung kepastian dan kemudahan berusaha, serta daya tarik penanaman modal.

1) Meningkatkan kualitas iklim melalui penyederhanaan perizinan berusaha, harmonisasi kebijakan lintas sektor, dan kebijakan insentif penanaman modal yang tepat sasaran, melalui:
a. Evaluasi kebijakan insentif yang telah ada dan identifikasi peluang insentif baru sesuai perkembangan ekonomi global.
b. Perubahan regulasi yang mendorong percepatan dan kemudahan proses perizinan berusaha, termasuk di kawasan pusat pertumbuhan.
c. Penguatan ekosistem penanaman modal yang terintegrasi melalui penciptaan kepastian hukum melalui revisi UU Penanaman Modal, peraturan terkait Bidang Usaha Penanaman Modal (BUPM), dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri (KBLI), serta Percepatan Penerbitan Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.
d. Optimalisasi Insentif Fiskal, utamanya *Tax Holiday* dengan melakukan penyelesaian revisi Peraturan Menteri Keuangan tentang “Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan” dan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM tentang “Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir serta Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan”

e. Pengusulan rekomendasi teknis kebijakan sektor usaha dan sinkronisasi kebijakan lintas kementerian/lembaga.
f. Mengusulkan dan memberikan insentif khusus untuk sektor prioritas dan hilirisasi.

2) Mendorong UMKM naik kelas untuk meningkatkan kemandirian penanaman modal dalam negeri, melalui:
a. Peningkatan daya saing UMKM melalui kebijakan yang mendorong partisipasi UMKM bermitra dengan Usaha Besar
b. Dukungan peningkatan kapasitas UMKM terutama dalam keterlibatan rantai pasok industri.
c. Fasilitasi kemitraan antara penanaman modal besar dengan UMKM.

3) Mendukung pemetaan potensi penanaman modal di daerah untuk meningkatkan pemerataan penanaman modal, melalui:
a. Penyusunan kebijakan potensi dan peluang investasi bidang hilirisasi di daerah.
b. Diseminasi kebijakan bidang hilirisasi di daerah.
c. Koordinasi dengan stakeholders terkait penambahan menu hilirisasi pada website Potensi Investasi Regional (PIR).
d. Koordinasi dan dukungan ke pemerintah daerah dalam melaksanakan pemetaan potensi daerah melalui IPRO di daerah.
e. Fasilitasi integrasi potensi daerah dengan sistem informasi Potensi Investasi Regional (PIR).
f. Pengembangan potensi hilirisasi di daerah diantaranya (i) pembuatan memo info potensi dan peluang investasi daerah bidang hilirisasi; dan (ii) optimalisasi penyusunan profil proyek investasi dan IPRO di daerah melalui keberlanjutan dukungan Dana DAK NF Penanaman Modal untuk mengatasi permasalahan keterbatasan anggaran di Pemerintah Daerah.
g. Memonitoring dan mengevaluasi peluang-peluang investasi yang ada di PIR secara berkala.
h. Menyusun rekomendasi terkait permasalahan daerah-daerah dengan kontribusi realisasi investasi rendah.
i. Memetakan wilayah-wilayah menjadi ekosistem dalam yang mendukung pengembangan bidang hilirisasi dari rantai pasok.

3. Akselerasi peningkatan penanaman modal bidang hilirisasi guna mewujudkan pencapaian nilai realisasi penanaman modal bidang hilirisasi untuk mendukung nilai tambah sumber daya alam.

1) Menguatkan dukungan kebijakan perencanaan di sektor hilirisasi investasi strategis untuk meningkatkan minat investor, melalui:
a. Penguatan perencanaan kebijakan bidang hilirisasi, diantaranya melalui (i) pengkajian dan penyusunan rencana aksi hilirisasi investasi strategis di sektor perikanan dan kelautan, minyak bumi, gas bumi dan batubara, mineral, serta perkebunan dan kehutanan; (ii) Penyusunan rekomendasi kebijakan percepatan investasi berkelanjutan untuk mendukung hilirisasi; dan (iii) penyusunan rekomendasi dan sosialisasi kebijakan pengembangan strategi dan tata kelola di bidang hilirisasi investasi strategis.
b. Harmonisasi dan peningkatan kualitas kebijakan di sektor perikanan dan kelautan, minyak bumi, gas bumi dan batubara, mineral, serta perkebunan dan kehutanan untuk mendukung akselerasi penanaman modal di bidang hilirisasi diantaranya melalui penyusunan Peraturan Presiden untuk menetapkan peta jalan Hilirisasi Investasi Strategis (HIS) sebagai dasar hukum bagi Kementerian/Lembaga dan menetapkan Kementerian

Investasi dan Hilirisasi/ BKPM sebagai leading sector untuk implementasi dari hilirisasi.

2) Meningkatkan potensi dan peluang penanaman modal di sektor hilirisasi, melalui:
   a. Pemetaan potensi dan peluang penanaman modal disektor hilirisasi melalui komunikasi secara intensif dengan pemerintah daerah/pelaku usaha/perusahaan/ asosiasi di setiap industri yang ada baik nasional maupun internasional.
   b. Penyiapan *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) sektor hilirisasi di sektor perikanan dan kelautan, minyak bumi, gas bumi dan batubara, mineral, serta perkebunan dan kehutanan.
3) Mengoptimalkan kegiatan promosi yang fokus dan terarah (*targeted*) untuk meningkatkan nilai rencana penanaman modal di bidang hilirisasi, melalui:
   a. Orientasi promosi dalam rangka akselerasi investasi hilirisasi strategis.
   b. Analisis market intelligence terhadap negara dan sektor prioritas promosi investasi di bidang hilirisasi.
   c. *Announce flagship projects* di kegiatan/forum internasional
   d. Promosi investasi di bidang hilirisasi pada event Internasional yang diselenggarakan di dalam negeri.
   e. Event promosi investasi sektor hilirisasi yang diselenggarakan oleh IIPC.
   f. Penayangan promosi investasi di media internasional.
   g. Penyelenggaraan kegiatan promosi terkait hilirisasi di daerah.
4) Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan fasilitasi pemanfaatan fasilitas penanaman modal untuk meningkatkan realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi, melalui:
   a. Fasilitasi penyelesaian masalah di bidang hilirisasi berupa pengawasan pengendalian perizinan bidang hilirisasi.
   b. Fasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal di bidang hilirisasi
5) Meningkatkan kualitas kerja sama penanaman modal bidang hilirisasi, melalui:
   a. Meningkatkan kualitas kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) di bidang hilirisasi, melalui penyusunan rekomendasi kebijakan dalam rangka kerja sama percepatan pelaksanaan berusaha di bidang hilirisasi.
   b. Penguatan kerjasama pengembangan hilirisasi antara pemerintah, perusahaan swasta, dan lembaga penelitian, termasuk kerjasama standarisasi perizinan berusaha

4. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan pelayanan fasilitas berusaha dengan dukungan teknologi informasi yang handal untuk mewujudkan pelayanan penanaman modal yang prima.

1) Meningkatkan kualitas sosialisasi, pelayanan, dan penyelesaian masalah perizinan berbasis risiko, melalui:
   a. Penguatan OSS sebagai *platform* tunggal perizinan.
   b. Penguatan Layanan PTSP dan Pelayanan Perizinan Berusaha di daerah.
   c. Membuka layanan khusus untuk investasi yang bergerak di sektor hilirisasi dan industrialisasi serta di kawasan pusat pertumbuhan.
   d. Fasilitasi pemanfaatan fasilitas dan insentif penanaman modal.
   e. Peningkatan kualitas layanan perizinan termasuk kebijakan fiktif positif dan transparansi layanan. Implementasi fiktif positif terutama dalam hal Pertimbangan Teknis Pertanahan tidak terbit sesuai waktu yang ditetapkan dalam *Service Level Agreement* (SLA), PKKPR penilaian terbit secara otomatis oleh sistem (Fiktif Positif).

f. Percepatan perizinan berusaha di KEK/KI tertentu agar pembangunan konstruksi dapat dilakukan bersamaan dengan pengurusan persetujuan PBG.
g. Implementasi dan promosi percepatan perizinan berusaha, termasuk percepatan layanan pendampingan perizinan berusaha untuk investasi luar negeri (FDI/PMA) strategis, peningkatan layanan dan fasilitasi investasi yang berorientasi riset dan inovasi, dan peningkatan pelayanan dan pelaksanaan perizinan berusaha di kawasan pusat pertumbuhan.

2) Meningkatkan kualitas berbantuan perizinan penanaman modal di bidang hilirisasi, melalui:
a. Layanan berbantuan perizinan investasi hilirisasi strategis, berupa fasilitasi perizinan berusaha.
b. Layanan berbantuan perizinan berusaha.
c. Layanan berbantuan Fasilitas berusaha.

3) Meningkatkan kualitas sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi termasuk layanan data dan informasi penanaman modal dan hilirisasi, melalui:
a. Peningkatan/Upgrade OSS-RBA 1.0 menjadi OSS-RBA 2.0.
b. Peningkatan Integrasi Sistem di Kementerian/Lembaga diantaranya 5 K/L untuk Perizinan Dasar ke dalam Sistem OSS, yaitu: (i) Kementerian ATR/BPN (RDTR); (ii) Kementerian Kehutanan (penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hutan); (iii) Kementerian Lingkungan Hidup (AMDALNET); (iv) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKPR-Laut); dan (v) Kementerian Pekerjaan Umum (SIMBG).
c. Peningkatan Integrasi Sistem RDTR Digital (Daerah) ke dalam Sistem OSS. Terbagi dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu: (1) Jangka pendek, tambahan 42 RDTR terintegrasi dengan OSS sehingga total 320 RDTR terintegrasi OSS; (2) Jangka menengah, yaitu tambahan 200 RDTR terintegrasi dengan OSS sehingga total 520 RDTR terintegrasi OSS; (3) Jangka panjang, yaitu tambahan 300 RDTR terintegrasi dengan OSS sehingga total 830 RDTR terintegrasi OSS.
d. Akomodasi sektor-sektor prioritas dan kawasan pusat pertumbuhan ke dalam sistem pelaporan realisasi penanaman modal untuk mendukung kemudahan dalam pemantauan perkembangan realisasi pada masing-masing sektor prioritas dan kawasan.
e. Pengembangan fitur LKPM pada subsistem pengawasan OSS RBA yang dapat memberikan informasi nilai realisasi investasi yang akurat dan mampu mengirimkan notifikasi kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi pelaporan LKPM
f. Pengembangan dashboard terkait live tracking proses perizinan dan pelaporan realisasi investasi secara real time dalam mendorong transparansi dalam proses perizinan penanaman modal dan pelaporan realisasi investasi.
g. Pengembangan website Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM dalam mendukung penyampaian informasi terkait Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
h. Pemeliharaan insfrastruktur teknologi, seperti keamanan sistem, Data Center dan DRC yang Mendukung OSS.
i. Penguatan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
j. Pengelolaan data dan informasi penanaman modal.

k. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola, pengembangan, interoperabilitas, keamanan, dan operasional sistem informasi penanaman modal dan hilirisasi.
l. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pengolahan, analisa, dan penyajian data penanaman modal dan hilirisasi.

4) Meningkatkan penanaman modal dalam negeri melalui penguatan kinerja PTSP dan percepatan Pelayanan Perizinan Berusaha di daerah, melalui Penetapan Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian/Lembaga.

5. **Meningkatkan efektifitas tata kelola penanaman modal untuk memperkuat reformasi birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM**, melalui:
   1) Penguatan layanan audit internal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM;
   2) Penguatan layanan perencanaan, anggaran dan keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM;
   3) Penguatan layanan pengadaan yang efisien, efektif, dan akuntabel
   4) Penguatan kelembagaan dan tata laksana Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM;
   5) Peningkatan kapasitas SDM aparatur Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM;
   6) Peningkatan budaya kerja dan profesionalisme SDM aparatur Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM;
   7) Penguatan penata kelola penanaman modal, baik di pusat dan daerah;
   8) Peningkatan layanan manajemen SDM Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Untuk melaksanakan berbagai rencana tindak lanjut tersebut, diperlukan penguatan kolaborasi dan sinergitas koordinasi berbagai unsur, baik unit kerja yang ada di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM maupun juga dengan pihak-pihak dari luar Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Laporan kinerja ini dapat dijadikan titik pijak perbaikan kinerja di masa mendatang, sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan inovatif, yang pada akhirnya dapat terwujud Visi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada Renstra periode berikutnya yaitu 2025-2029, dan secara optimal dapat mendukung pencapaian Visi RPJMN 2025-2029, yaitu “**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**”.

KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM

LAMPIRAN

PERNYATAAN TELAH DI REVIU

KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
TAHUN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Inspektur

Kukuh Agung Pribadi

KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2024

KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KEMENTERIAN INVESTASI / BKPM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	**Bahlil Lahadalia**
Jabatan	:	Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 29 Desember 2023

Menteri Investasi / Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal

Bahlil Lahadalia

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEMENTERIAN INVESTASI / BKPM

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
STAKEHOLDER PERSPECTIVE				
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal	1	Nilai realisasi penanaman modal (Rp Triliun)	1.239,3
		2	Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder (Rp Triliun)	646,1
		3	Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa) (%)	51,7
		4	Kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM (%)	53,1
CUSTOMER PERSPECTIVE				
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal	5	Peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) (peringkat)	40
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE				
3	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani	6	Nilai reformasi birokrasi Kementerian Investasi/BKPM (predikat/nilai)	80
		7	Opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi/BKPM (opini BPK)	4

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Penanaman Modal	810.232.102.000
2	Dukungan Manajemen	419.063.840.000
Total Anggaran Tahun 2024		**1.229.295.942.000**

Jakarta, 29 Desember 2023

Menteri Investasi / Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal

Bahlil Lahadalia

KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BKPM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	**Rosan Perkasa Roeslani**
Jabatan	:	Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 19 Agustus 2024

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM

Rosan Perkasa Roeslani

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BKPM

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
STAKEHOLDER PERSPECTIVE				
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal	1	Nilai realisasi penanaman modal (Rp Triliun)	1.239,3
		2	Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder (Rp Triliun)	646,1
		3	Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa) (%)	51,7
		4	Kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM (%)	53,1
CUSTOMER PERSPECTIVE				
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal	5	Peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) (peringkat)	40
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE				
3	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani	6	Nilai reformasi birokrasi Kementerian Investasi/BKPM (predikat/nilai)	80
		7	Opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi/BKPM (opini BPK)	4

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Penanaman Modal	721.629.726.686
2	Dukungan Manajemen	507.666.215.314
Total Anggaran Tahun 2024		**1.229.295.942.000**

Jakarta, 19 Agustus 2024

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM

Rosan Perkasa Roeslani

KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM

LAMPIRAN

MATRIKS CAPAIAN OUTPUT PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024

MATRIKS CAPAIAN OUTPUT PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ PROYEK K/L	OUTPUT PN		%	PAGU		%	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PRIORITAS NASIONAL
		TARGET OUTPUT	REALISASI OUTPUT		ALOKASI	REALISASI				
04	Fungsi Ekonomi									
065.01.ED	Program Penanaman Modal									
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL										
3213	**Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal**									
PBB.021	Peningkatan Daya Saing Investasi	2	2	100%	3.040.000.000	2.592.883.914	85,29%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
PBB.022	Harmonisasi Regulasi Terkait Perizinan Berusaha di Tingkat Pusat dan Daerah	2	2	100%	3.000.000.000	2.999.999.979	100,00%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
PBB.023	Sinkronisasi Kebijakan Investasi	1	1	100%	8.500.000.000	8.499.553.676	99,99%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
PBB.024	Transformasi Kebijakan Ekosistem Investasi yang Terintegrasi dan Kebijakan Insentif Untuk Mendorong Investasi yang Berdaya Saing	1	1	100%	3.800.000.000	3.313.257.344	87,19%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
3215	**Pemberdayaan Usaha Nasional**									
QDG.021	Kemitraan Usaha Nasional	1000	1490	149%	19.000.000.000	18.122.354.666	95,38%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
QDG.022	Penguatan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha UMKM dalam Rantai Pasok	500	594	119%	3.000.000.000	2.994.199.708	99,81%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ PROYEK K/L	OUTPUT PN		%	PAGU		%	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PRIORITAS NASIONAL
		TARGET OUTPUT	REALISASI OUTPUT		ALOKASI	REALISASI				
DEPUTI BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL										
3216	**Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di Bidang Penanaman Modal**									
PBB.021	Analisis Negara Target dan Negara Pesaing	2	2	100%	4.021.558.000	2.957.471.218	73,54%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
PEH.031	IIPC *(Indonesian Investment Promotion Center)*	2388	4896	205%	77.636.636.000	75.438.171.010	97,17%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
QDH.021	Fasilitasi Relokasi Perusahaan Asing ke Indonesia dan Peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri	11	13	100%	22.734.956.000	18.621.121.510	81,91%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
6778	**Promosi Wilayah Amerika dan Eropa**									
PEG.021	Promosi penanaman modal dalam forum internasional di Wilayah Amerika dan Eropa	2	2	100%	17.920.721.000	17.430.022.865	97,26%	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Peningkatan Efektivitas Prefrential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
PEH.021	Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional di Wilayah Amerika dan Eropa	1	1	100%	13.474.583.000	12.878.511.787	95,58%	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk dan Usaha Kreatif dan Digital	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
PEH.023	Promosi Kegiatan di Kawasan Nasional IKN di Wilayah Amerika dan Eropa	1	1	100%	1.000.000.000	993.460.099	99,35%	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
6779	**Promosi Wilayah Asia Timur Asia Selatan Timur Tengah dan Afrika**									
PEG.021	Promosi penanaman modal dalam forum internasional di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika	2	2	100%	2.582.010.000	2.484.052.615	96,21%	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Peningkatan Efektivitas Prefrential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
PEH.021	Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika	1	1	100%	6.098.260.000	5.821.474.187	95,46%	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk dan Usaha Kreatif dan Digital	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
PEH.023	Promosi Kegiatan di Kawasan Nasional Ibu Kota Negara (IKN) di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika	1	1	100%	700.000.000	634.780.501	90,68%	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ PROYEK K/L	OUTPUT PN		%	PAGU		%	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PRIORITAS NASIONAL
		TARGET OUTPUT	REALISASI OUTPUT		ALOKASI	REALISASI				
6780	**Promosi Wilayah Asia Tenggara Australia Selandia Baru dan Pasifik**									
PEG.021	Promosi penanaman modal dalam forum internasional di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik	2	2	100%	1.402.494.000	1.188.664.194	84,75%	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Peningkatan Efektivitas Prefrential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
PEH.021	Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik	1	1	100%	4.709.703.000	3.766.918.088	79,98%	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk dan Usaha Kreatif dan Digital	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
PEH.023	Promosi Kegiatan di Kawasan Nasional Ibu Kota Negara (IKN) di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik	1	1	100%	550.000.000	536.783.980	97,60%	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL										
6481	**Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha**									
QKC.024	Peningkatan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah	1	1	100%	9.000.000.000	8.590.044.059	95,44%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL										
3226	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I**									
QDH.021	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah I	21	21	100%	1.081.593.000	762.723.197	70,52%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
QDH.022	Layanan Pendampingan Keberlanjutan Investasi	40	40	100%	2.687.302.000	2.588.976.459	96,34%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
QDH.023	Fasilitasi Eksekusi Realisasi Investasi Penerima Fasilitas Penanaman Modal	30	34	113%	18.520.000.000	18.319.088.231	98,92%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
QDH.024	Fasilitasi dan Evaluasi Percepatan Realisasi Investasi Proyek PSN	2	2	100%	1.841.140.000	1.639.819.130	89,07%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ PROYEK K/L	OUTPUT PN		%	PAGU		%	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PRIORITAS NASIONAL
		TARGET OUTPUT	REALISASI OUTPUT		ALOKASI	REALISASI				
3227	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II**									
QDH.021	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah II	31	31	100%	1.242.038.000	896.930.518	72,21%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
QDH.022	Mendorong Investasi Besar Bermitra dengan UMKM	31	31	100%	12.000.000.000	11.907.817.346	99,23%	Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi	Peningkatan Kemitraan Usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
3228	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III**									
QDH.021	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah III	26	32	123%	908.190.000	685.387.552	75,47%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
QDH.022	Eksekusi Proyek Wilayah Barat yang Terkendala Untuk Percepatan Realisasi Investasi	26	26	100%	13.000.000.000	12.661.899.911	97,40%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
3229	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV**									
QDH.021	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah IV	26	28	108%	1.538.792.000	1.301.625.883	84,59%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
QDH.022	Eksekusi Proyek Wilayah Timur yang Terkendala Untuk Percepatan Realisasi Investasi	19	19	100%	14.000.000.000	13.892.362.093	99,23%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
6781	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah V**									
QAH.021	Satuan Tugas Percepatan Investasi	18	18	100%	15.000.000.000	14.952.991.655	99,69%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
QDH.021	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah V	11	11	100%	139.401.000	102.721.867	73,69%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ PROYEK K/L	OUTPUT PN		%	PAGU		%	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PRIORITAS NASIONAL
		TARGET OUTPUT	REALISASI OUTPUT		ALOKASI	REALISASI				
DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL										
3231	**Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sumber Daya Alam**									
PBB.022	*Investment Project Ready to Offer* (IPRO) di bidang Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya	1	1	100%	1.000.000.000	786.025.257	78,60%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
PBB.023	Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Bidang Sumber Daya Alam	1	1	100%	3.162.522.000	2.957.356.512	93,51%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
QDH.021	Fasilitasi rencana proyek penanaman modal di bidang Sumber Daya Alam	3	3	100%	450.000.000	432.597.278	96,13%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
3232	**Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Manufaktur**									
PBB.022	*Investment Project Ready to Offer* (IPRO) di bidang Industri Manufaktur	1	1	100%	1.000.000.000	927.804.319	92,78%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
PBB.023	Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Bidang Industri Manufaktur	1	1	100%	3.156.848.000	3.040.913.988	96,33%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
QDH.021	Percepatan Rencana Proyek di bidang industri manufaktur	3	5	167%	450.000.000	391.785.391	87,06%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
3233	**Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Jasa dan Kawasan**									
PBB.021	*Investment Project Ready to Offer* (IPRO) pada Destinasi Pariwisata Prioritas	2	2	100%	1.200.000.000	1.178.330.724	98,19%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
PBB.024	Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Bidang Jasa dan Kawasan	1	1	100%	3.156.848.000	2.976.995.160	94,30%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
QDH.021	Percepatan Rencana Proyek di Bidang Jasa dan Kawasan	2	2	100%	300.000.000	256.730.681	85,58%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
3234	**Pengembangan Penanaman Modal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)**									
QDH.021	Percepatan Penyelesaian Masalah Strategis di KEK	2	2	100%	300.000.000	299.554.433	99,85%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ PROYEK K/L	OUTPUT PN		%	PAGU		%	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PRIORITAS NASIONAL
		TARGET OUTPUT	REALISASI OUTPUT		ALOKASI	REALISASI				
5089	**Fasilitasi Percepatan Investasi Kerja Sama Pemerintah Swasta**									
QDH.021	Percepatan Rencana Penanaman Modal Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	2	2	100%	800.000.000	752.062.073	94,01%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
5265	**Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur**									
PBB.021	*Investment Project Ready to Offer* (IPRO) di bidang Infrastruktur	1	1	100%	650.004.000	629.730.696	96,88%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
PBB.022	Analisis Strategik Penanaman Modal Berbasis Infrastruktur	1	1	100%	281.250.000	279.951.679	99,54%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
QDH.021	Percepatan rencana proyek penanaman modal di bidang infrastruktur	2	2	100%	400.000.000	369.788.747	92,45%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
DEPUTI BIDANG KERJASAMA PENANAMAN MODAL										
3230	**Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal**									
QDB.021	Penetapan Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Percepatan Pelaksanaan Berusaha	564	564	100%	22.864.654.000	21.548.384.011	94,24%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
6482	**Kerja Sama Bilateral di Bidang Penanaman Modal**									
PBB.021	Konsultasi publik bahan posisi pertemuan kerja sama bilateral dan dunia usaha	19	19	100%	750.000.000	690.066.912	92,01%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
PBB.022	Penguatan Kesepakatan dan Implementasi Kerja Sama Bilateral di Bidang Penanaman Modal	1	1	100%	900.000.000	703.657.816	78,18%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
PEC.021	Hasil perundingan kerja sama penanaman modal bilateral	19	19	100%	4.253.661.000	3.587.499.283	84,34%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
PEC.022	Kerja sama penanaman modal dengan dunia usaha dalam dan luar negeri	4	7	175%	365.946.000	365.938.671	100,00%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ PROYEK K/L	OUTPUT PN		%	PAGU		%	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PRIORITAS NASIONAL
		TARGET OUTPUT	REALISASI OUTPUT		ALOKASI	REALISASI				
6483	**Kerja Sama Regional dan Multilateral di Bidang Penanaman Modal**									
PBB.021	Konsultasi publik bahan posisi pertemuan kerja sama regional dan multilateral	20	20	100%	900.000.000	892.641.200	99,18%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
PBB.022	Penguatan Kesepakatan dan Implementasi Kerja Sama Regional dan Multilateral di Bidang Penanaman Modal	1	1	100%	1.100.000.000	915.285.054	83,21%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
PEB.021	Penyelenggaraan Forum Fasilitasi *Outward Investment*	6	6	100%	1.200.000.000	967.286.504	80,61%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
PEC.021	Hasil perundingan kerja sama penanaman modal regional dan multilateral	20	20	100%	7.179.433.000	6.705.972.023	93,41%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
DEPUTI BIDANG HILIRISASI INVESTASI STRATEGIS										
6784	**Peningkatan Investasi Baru di Bidang Hilirisasi**									
PBB.024	Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di bidang Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	1	1	100%	1.500.000.000	1.389.450.394	92,63%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
PBB.025	Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di bidang Minyak dan Gas Bumi	1	1	100%	1.500.000.000	1.473.707.154	98,25%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
PBB.026	Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di bidang Mineral dan Batubara	1	1	100%	1.500.000.000	1.361.850.274	90,79%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
QDH.021	Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	5	5	100%	1.000.000.000	972.474.068	97,25%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
QDH.022	Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Minyak dan Gas Bumi	5	7	140%	1.000.000.000	922.589.537	92,26%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
QDH.023	Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Mineral dan Batubara	5	9	180%	1.000.000.000	872.417.574	87,24%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ PROYEK K/L	OUTPUT PN		%	PAGU		%	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PRIORITAS NASIONAL
		TARGET OUTPUT	REALISASI OUTPUT		ALOKASI	REALISASI				
DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI PENANAMAN MODAL										
6785	**Peningkatan Kualitas Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**									
UAB.022	Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)	1	1	100%	107.572.710.000	82.322.082.933	76,53%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
6786	**Pengelolaan Layanan Elektronik Infrastruktur dan Jaringan**									
QMA.022	Website Penanaman Modal	1	1	100%	1.254.700.000	1.014.706.330	80,87%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
UAB.022	Pemeliharaan Data Center dan DRC yang Mendukung OSS	1	1	100%	29.709.400.000	29.538.399.788	99,42%	Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM

LAMPIRAN

PENGHARGAAN TAHUN 2024

BEBERAPA PENGHARGAAN YANG DITERIMA KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM SELAMA TAHUN 2024

1. Peringkat ke-11 Penilaian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kategori Eka Acalapati dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melalui Biro Hukum memperoleh peringkat 11 atau kategori Eka Acalapati terkait pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Kategori Eka Acalapati merupakan penghargaan tertinggi dalam penilaian kinerja JDIHN. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-3.HN.03.05 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2023. Bahwa, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memperoleh nilai 97 dari total nilai 100. Nilai tersebut mengalami peningkatan dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 92 poin dan berada pada peringkat 14.

2. Nilai Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2024 Memperoleh Kategori AA (ISTIMEWA)

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memperoleh nilai Indeks Reformasi Hukum sebesar **98,96** atau memiliki kategori **AA (ISTIMEWA).** Indeks reformasi hukum merupakan salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di suatu lembaga. Indeks reformasi hukum terdiri dari empat variabel yaitu:1) Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian/Lembaga untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan; 2) Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan *(legal drafter)* yang berkualitas; 3) Kualitas regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu; dan 4) Penataan database peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Surat Keputusan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM Nomor PPH-OT.03.03-76 perihal Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024 tertanggal 11 November 2024. Bahwa, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki nilai 98,96 atau masuk kategori istimewa. Nilai tersebut mengalami peningkatan dari capaian tahun 2023 sebesar 76,64. Peningkatan nilai indeks reformasi hukum tersebut menunjukkan adanya perbaikan berbagai variabel penilaian yang dilaksanakan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM selama tahun 2024.

3. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Menerima Penghargaan sebagai Lembaga Peduli Penyiaran dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memperoleh pengharagaan sebagai lembaga peduli penyiaran dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada lembaga/organisiasi dengan kontribusi signifikan dalam mendukung perkembangan industri penyiaran yang sehat, berkualitas, dan bertanggung jawab. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menjadi salah satu lembaga yang menerima penghargaan ini pada tahun 2024. Penghargaan tersebut diberikan pada saat Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 sekaligus bersamaan dengan agenda Rapat Koordinasi Nasional Tahun 2024.

Gambar 1. Penghargaan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebagai Lembaga Peduli Penyiaran dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

4. Kementerian Investasi/BKPM Raih Penghargaan Detikcom Awards 2024 untuk Kategori Lembaga Pendorong Hilirisasi dan Ekonomi Berkelanjutan

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM kembali meraih penghargaan bergengsi dengan dianugerahi Detikcom Awards 2024 dalam kategori Lembaga Pendorong Hilirisasi dan Ekonomi Berkelanjutan. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam mendorong hilirisasi industri serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen kuat Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam mendukung kebijakan industrialisasi yang bernilai tambah serta pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan ramah lingkungan.

Gambar 2. Penghargaan Detikcom Awards 2024
untuk Kategori Lembaga Pendorong Hilirisasi dan Ekonomi Berkelanjutan

5. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM meraih penghargaan "Program Inovatif Untuk Negeri" dalam ajang Merdeka Awards 2024

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM meraih penghargaan "Program Inovatif Untuk Negeri" dalam ajang Merdeka Awards 2024 yang digelar di Auditorium SCTV Tower. Merdeka Awards adalah ajang penghargaan tahunan untuk memberikan apresiasi kepada tokoh inspiratif, pemimpin lokal, figur dari organisasi non-pemerintah, serta entitas pemerintahan yang berperan dalam percepatan pembangunan fisik dan kemanusiaan di Indonesia. Penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan terhadap inovasi *Contact Center* OSS, sebuah layanan digital yang dirancang untuk memberikan informasi dan bantuan terkait perizinan investasi secara cepat dan terpadu.

Gambar 3. Penghargaan "Program Inovatif Untuk Negeri" dalam ajang Merdeka Awards 2024

6. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM meraih empat penghargaan di ajang *The Best Contact Center Indonesia* (TBCCI) 2024

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik dengan meraih empat penghargaan di ajang *The Best Contact Center Indonesia* (TBCCI) 2024. Acara ini diselenggarakan di Bidakara Tower dan diikuti oleh berbagai institusi serta perusahaan terkemuka di Indonesia. Melalui inovasi layanan digitalnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berhasil memperoleh tiga penghargaan korporat dan satu penghargaan individu, yaitu: **1) *Platinum-The Best Digital Media;* 2) *Gold-The Best Contact Center Operations;* 3) *Silver-The Best Customer Experience; dan* 4) *Bronze-The Best Agent Customer Service (kategori individu)***. TBCCI merupakan ajang tahunan bergengsi yang diselenggarakan oleh Indonesia *Contact Center Association* (ICCA) sebagai bentuk apresiasi terhadap *contact center* terbaik di Indonesia.

Gambar 4. Penghargaan di ajang *The Best Contact Center Indonesia* (TBCCI) 2024

7. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Meraih Predikat Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih predikat Informatif dengan nilai 95,80 untuk kategori Kementerian pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat. Penghargaan ini diterima oleh Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mewakili Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM. Dengan pencapaian predikat informatif yang merupakan kualifikasi tertinggi dalam Anugerah KIP ini, PPID Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebagai bukti layanan keterbukaan informasi yang semakin prima bagi semua kalangan masyarakat.

Gambar 5. Raihan Predikat Informatif
pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024

8. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memperoleh Juara I, Kelompok 2, kategori Utilisasi Barang Milik Negara (BMN) dalam ajang Anugerah Reksa Bandha Tahun 2024

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM kembali meraih prestasi membanggakan dengan memperoleh Juara I, Kelompok 2, kategori Utilisasi Barang Milik Negara (BMN) dalam ajang Anugerah Reksa Bandha Tahun 2024. Penghargaan bergengsi ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas optimalisasi pemanfaatan aset negara secara transparan dan efisien.

Plt. Kepala Biro Umum, menerima penghargaan ini secara langsung dari Wakil Menteri Keuangan. Penghargaan Anugerah Reksa Bandha merupakan bentuk apresiasi dari Kementerian Keuangan kepada instansi pemerintah yang berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam pengelolaan BMN mulai dari pemanfaatan, pengamanan, hingga pendayagunaan aset negara. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk terus meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemanfaatan aset negara demi kemajuan ekonomi nasional.

Gambar 6. Raihan Juara I, Kelompok 2, kategori Utilisasi Barang Milik Negara (BMN)
dalam ajang Anugerah Reksa Bandha Tahun 2024

9. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Raih Penghargaan CNBC Indonesia Awards 2024

CNBC Indonesia Awards 2024 merupakan ajang penghargaan tahunan yang bertujuan mengapresiasi keunggulan di dunia bisnis dan korporasi Indonesia yang terdiri dari rangkaian GCG (*Good Corporate Governance*) *Awards*, CEO (*Chief Executive Officer*) *Awards*, dan *Awarding Night*, yang dirancang untuk menginspirasi praktik bisnis terbaik dan memajukan budaya keunggulan di sektor korporasi Indonesia.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani menerima penghargaan *Outstanding Achievements in Supporting Investment in the Private Sector* dalam ajang CNBC Indonesia Awards 2024 yang digelar di Jakarta pada Rabu, 11 Desember 2024. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya dalam mendorong dan menciptakan ekosistem investasi yang kondusif di Indonesia.

Gambar 7. Penghargaan *Outstanding Achievements in Supporting Investment in the Private Sector* dalam ajang CNBC Indonesia Awards 2024

KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM